Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Marilah kita memanjatkan segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena tas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dengan tepat waktu. Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2019 ini dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2019 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019. Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 merupakan bagian dari periode tahun keempat atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021. Keberhasilan pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ditentukan berdasarkan capaian sasaran pembangunan dan pelaksanaan program / kegiatan yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021. Pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pelaksanan program / kegiatan pada tahun anggaran 2019 menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Cakupan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2019 terdiri atas : arah kebijakan umum Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, hasil capaian program dan kegiatan

tiap urusan pemerintahan, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Mendalami atas hasil penyelenggaraan urusan pembangunan yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo, sudah banyak yang telah dicapai, meskipun harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan hasil pembahasan dengan DPRD diharapkan menjadi rekomendasi yang penting untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun – tahun selanjutnya. Selain itu, materi dalam LKPJ ini, juga memberikan deskripsi mengenai tingkat efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019, termasuk menjadi pijakan penting untuk melakukan perencanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Demikian LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ini disusun untuk bisa menjadi pijakan arah pembangunan daerah ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan lindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju Sidoarjo yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Dasar Hukum 1

B. Gambaran Umum Daerah 2

1. Kondisi Geografis Daerah 2

2. Gambaran Umum Demografis 9

3. Kondisi Ekonomi 16

a. Potensi Unggulan Daerah 19

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB 29

BAB II KEBIJAKAN PEEMRINTAH DAERAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021 32

1. Visi dan Misi 34

2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 42

3. Prioritas Pembangunan Daerah 60

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 65

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 66

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 66

2. Target dan Realisasi Pendapatan 71

B. Pengelolaan Belanja Daerah 77
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah 77
2. Target dan Realisasi Belanja 80
3. Target dan Realisasi Belanja Menurut Organisasi Perangkat Daerah 81
4. Permasalahan dan Solusi 85
C. Pembiayaan Daerah 86

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 88
A. Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan 88
1. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 88
1. Urusan Pendidikan 89
2. Urusan Kesehatan 105
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 149
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 162
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 179
6. Urusan Sosial 206
7. Urusan Tenaga Kerja 212
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 223
9. Urusan Pangan 232
10. Urusan Pertanahan 238
11. Urusan Lingkungan Hidup 239
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 222
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 234

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 247
15. Urusan Perhubungan 256
16. Urusan Komunikasi dan Informatika 268
17. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 278
18. Urusan Penanaman Modal 295
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 302
20. Urusan Statistik 306
21. Urusan Persandian 313
22. Urusan Kebudayaan 315
23. Urusan Perpustakaan 318
24. Urusan Kearsipan 326
2. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 332
1. Urusan Kelautan dan Perikanan 332
2. Urusan Pertanian 346
3. Urusan Pariwisata 354
4. Urusan Perindustrian 357
5. Urusan Perdagangan 364
6. Urusan Transmigrasi 374
3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 375
1. Unsur Penunjang Sekretariat Daerah 375
2. Unsur Penunjang Sekretariat DPRD 397
3. Unsur Penunjang Inspektorat 406
4. Unsur Penunjang Perencanaan 413
5. Unsur Penunjang Keuangan 426
6. Unsur Penunjang Kepegawaian 447
B. Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Daerah 458

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 476

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 486

A. Kerjasama Antar Daerah 486
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 487
C. Pembinaan Batas Wilayah 490
D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah 491
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 493
F. Pengelolaan Kawasan Khusus 495
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 495

BAB VII PRESTASI DAN PENGHARGAAN 496

BAB VIII PENUTUP 499

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang - undangan yang melatar belakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112°5’ – 112°9’ Bujur Timur dan 7°3’ – 7°5’ Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area)* dan desa perkotaan (*urban area*).

Tabel I.1

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	19	-
8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	**322**	**31**

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Grafik I.1

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,30 Hektar dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin / payau berada di belahan timur meliputi 29,99% dari luas wilayah;
- 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar meliputi 40,81% dari luas wilayah; dan
- 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat meliputi 29,20% dari luas wilayah.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang

menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.

Tabel I.2

Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Tinggi Rata – Rata (m dpl)	luas Wilayah (Km2)
1	Sidoarjo	4	62.560
2	Buduran	4	41.030
3	Candi	4	40.670
4	Porong	4	29.820
5	Krembung	5	29.550
6	Tulangan	7	31.210
7	Tanggulangin	4	32.290
8	Jabon	2	81.000
9	Krian	12	32.500
10	Balongbendo	20	31.400
11	Wonoayu	4	33.920
12	Tarik	16	36.060
13	Prambon	10	34.230
14	Taman	9	31.540
15	Waru	5	30.320
16	Gedangan	4	24.060
17	Sedati	4	79.430
18	Sukodono	7	32.680
Jumlah			**714.240**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Wilayah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kandungan gas bumi yang dibentuk oleh batuan *alluvium* seluas 686,89 Ha tersebar disemua kecamatan, batuan *plistosen fasien sedimen* terdapat di 6 kecamatan, tanah *alluvial* kelabu merata di 18 kecamatan, *assosiasi alluvial* kelabu dan cokelat kekuningan terdapat di 4 kecamatan, yaitu : Krembung, Balongbendo, Tarik, dan Prambon.

Tabel I.3

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Plistosen Fasien Sedimen (Ha)	Alluvium (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	42,00	6.214,00	6.256,00
2	Buduran	1.469,00	2.633,50	4.102,50
3	Candi	-	40,67	4.066,75
4	Porong	-	29,82	2.982,25
5	Krembung	-	29,55	2.955,00
6	Tulangan	-	31,21	3.120,50
7	Tanggulangin	-	32,29	3.229,00
8	Jabon	-	81,00	8.099,75
9	Krian	-	32,50	3.250,00
10	Balongbendo	-	31,40	3.140,00
11	Wonoayu	-	33,92	3.392,00
12	Tarik	-	36,06	3.606,00
13	Prambon	-	34,23	3.422,50
14	Taman	448,00	2.705,50	3.153,50
15	Waru	384,00	2.648,00	3.032,00
16	Gedangan	38,00	2.367,75	2.405,75
17	Sedati	355,00	7.588,00	7.943,00
18	Sukodono	-	32,68	3.267,75
Jumlah		**2.736,00**	**24.602,07**	**71.424,25**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Tabel I.4

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	2.966,11	-	3.289,89	-	6.256,00
2	Buduran	1.480,02	-	1.853,22	769,26	4.102,50
3	Candi	1.552,88	-	2.513,87	-	4.066,75
4	Porong	2.083,07	-	899,18	-	2982,25
5	Krembung	2.500,95	454,05	-	-	2.955,00
6	Tulangan	3.120,50	-	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	1.564,77	-	1.664,23	-	3.229,00

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
8	Jabon	2.580,20	-	5.519,55	-	8.099,75
9	Krian	3.250,20	-	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	3.250,00	2.795,55	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	3.392,00	-	-	-	3.392,00
12	Tarik	2.618,93	987,07	-	-	3.606,00
13	Prambon	2.688,94	733,56	-	-	3.422,50
14	Taman	3.153,50	-	-	-	3.153,50
15	Waru	2.020,67	-	1.011,33	-	3.032,00
16	Gedangan	2.304,31	-	-	101,44	2.405,75
17	Sedati	3.333,04	-	4.609,96	-	7.943,00
18	Sukodono	3.267,75	-	-	-	3.267,75
Jumlah		**47.017,64**	**4.970,23**	**21.361,23**	**870,70**	**71.424,25**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Kondisi air tanah di Kabupaten Sidoarjo antara 0 – 5 meter di bawah permukaan tanah. Daerah banjir terbagi menjadi tiga, banjir karena hujan tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, banjir periodik di sebagian 5 (lima) kecamatan, dan banjir karena air pasang berada di sebagian 4 (empat) kecamatan.

Tabel I.5

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2019

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4.063,62	308,14	-	-	6.256,00
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Krembung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50
14	Taman	-	-	108,00	-	3.153,50
15	Waru	740,50	-	-	740,50	3.032,00
16	Gedangan	195,75	-	-	-	2.405,75
17	Sedati	4.101,57	-	387,90	120,30	7.943,00
18	Sukodono	-	-	-	-	3.267,75
Total		**16.312,67**	**1.573,75**	**610,40**	**2.018,55**	**71.424,25**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan terendah di bulan Agustus.

Tabel I.6

Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

No	Lokasi Penakar Hujan	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Kemlaten	226.0	442.0	152.0	229.0	-	16.0	-	-	-	-	91.8	374.0
2	Ponokawan	196.0	909.0	313.0	189.0	-	23.0	-	-	-	-	231.0	222.0
3	Bakalan	261.0	470.0	268.0	109.0	-	18.0	-	-	-	-	182.0	197.0
4	Krian	173.0	377.0	325.0	175.0	-	20.0	-	-	-	-	216.0	198.0
5	Ketawang	280.0	450.0	318.0	135.0	-	27.0	-	-	-	-	242.5	223.5
6	Ketintang	250.0	483.0	252.0	234.0	-	24.0	-	-	-	-	130.2	234.0
7	Watutulis	238.0	398.0	228.0	178.0	-	20.0	-	-	-	-	290.0	243.0
8	Pertapan Maduretno	242.0	436.0	361.0	111.8	-	27.0	-	-	-	-	236.0	279.0
9	Cepiples	159.0	361.0	191.0	136.0	-	18.0	-	-	-	-	25.0	220.0
10	Luwung	176.0	438.0	228.0	183.0	-	20.0	-	-	-	-	42.0	241.0
11	Gedangrowo	111.1	322.0	144.0	166.0	-	15.0	-	-	-	-	98.0	121.0
12	Prambon	136.0	438.0	169.0	138.0	-	19.0	-	-	-	-	143.0	181.0
13	Botokan	292.0	529.0	410.0	174.0	-	32.0	-	-	-	-	191.0	214.0
14	Durungbedug	253.0	583.0	196.0	217.0	-	31.0	-	-	-	-	174.0	157.0
15	Bono	301.0	432.0	497.0	124.0	-	53.0	-	-	-	-	126.0	187.0
16	Sruni	359.0	578.0	523.0	147.0	-	35.0	-	-	-	-	240.0	278.0
17	Sedati	346.0	336.0	457.0	257.0	-	49.0	-	-	-	-	76.0	207.0
18	Bankar Kemantren	227.0	548.0	453.0	191.0	-	27.0	-	-	-	-	203.0	337.0
19	Ketegan	406.0	473.0	539.0	292.0	-	60.0	-	-	-	-	74.0	379.0
20	Sumput	66.0	295.0	91.0	47.0	-	4.0	-	-	-	-	62.0	135.0
21	Klagen	256.0	269.0	76.0	88.0	-	5.0	-	-	-	-	287.0	229.0
22	Karangnongko	267.0	543.0	248.0	111.0	-	22.0	-	-	-	-	145.0	163.0

No	Lokasi Penakar Hujan	B U L A N											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
23	Sidoarjo	-	490.0	247.0	235.0	-	36.0	-	-	-	-	119.0	209.0
24	Kludan	201.0	441.0	344.0	167.0	-	15.0	-	-	-	-	67.0	254.0
25	Putat	284.0	518.0	334.0	138.0	-	-	-	-	-	-	44.0	211.0
26	Kedung Cangkring	152.0	371.0	248.0	37.0	-	-	-	-	-	-	48.0	80.0
27	Porong	189.0	423.0	259.0	65.0	-	14.0	-	-	-	-	68.0	125.0
28	Krembung / Biting	129.0	391.0	80.0	122.0	-	4.0	-	-	-	-	49.0	98.0
29	Bedugbulus	140.0	399.0	113.0	168.0	-	5.0	-	-	-	-	136.0	154.0
30	Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata		**217.8**	**453.2**	**278.1**	**155.6**	**0.0**	**22.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**141.4**	**210.6**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

2. Gambaran Umum Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2019, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.266.533 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik I.2

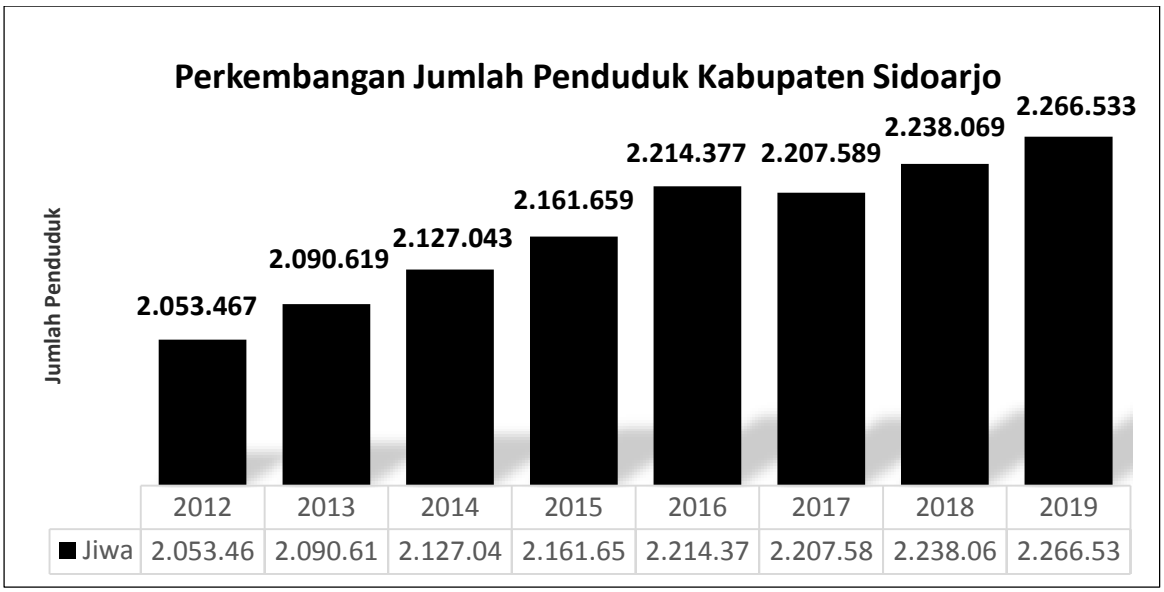

Sumber data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 240.674 jiwa, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 61.092 jiwa. Jumlah penduduk per Kecamatan dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.7

Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Per Kecamatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	TARIK	72,206	23,374
2	PRAMBON	85,157	27,730
3	KREMBUNG	75,731	24,517
4	PORONG	85,700	27,603
5	JABON	61,092	19,496
6	TANGGULANGIN	106,685	32,679
7	CANDI	168,779	52,102
8	SIDOARJO	228,713	71,307
9	TULANGAN	107,683	35,121
10	WONOAYU	90,794	28,772
11	KRIAN	140,183	44,139
12	BALONGBENDO	80,222	25,818
13	TAMAN	235,238	74,811
14	SUKODONO	132,644	41,010
15	BUDURAN	108,457	33,667
16	GEDANGAN	134,787	41,553
17	SEDATI	111,788	35,765
18	WARU	240,674	79,518
	T O T A L	**2,266,533**	**718,982**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I.8

Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	36,356	35,850	72,206
2	PRAMBON	43,075	42,082	85,157
3	KREMBUNG	37,986	37,745	75,731
4	PORONG	43,160	42,540	85,700
5	JABON	30,677	30,415	61,092
6	TANGGULANGIN	53,840	52,845	106,685
7	CANDI	84,923	83,856	168,779
8	SIDOARJO	114,090	114,623	228,713
9	TULANGAN	54,137	53,546	107,683
10	WONOAYU	45,728	45,066	90,794
11	KRIAN	71,152	69,031	140,183
12	BALONGBENDO	40,613	39,609	80,222
13	TAMAN	119,287	115,951	235,238
14	SUKODONO	67,520	65,124	132,644
15	BUDURAN	54,810	53,647	108,457
16	GEDANGAN	68,239	66,548	134,787
17	SEDATI	56,723	55,065	111,788
18	WARU	120,339	120,335	240,674
	T O T A L	**1,142,655**	**1,123,878**	**2,266,533**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo membentuk Piramida jenis piramida muda (expansive), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi daerah karena tingkat produktifitas suatu wilayah akan jauh lebih tinggi karena banyaknya usia muda dan sedikitnya usia tua.

Penduduk di Kabupaten Sidoarjo terbanyak berada di golongan usia produktif, yaitu antara 35 tahun sampai dengan 39 tahun.

Grafik I.3

Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2019

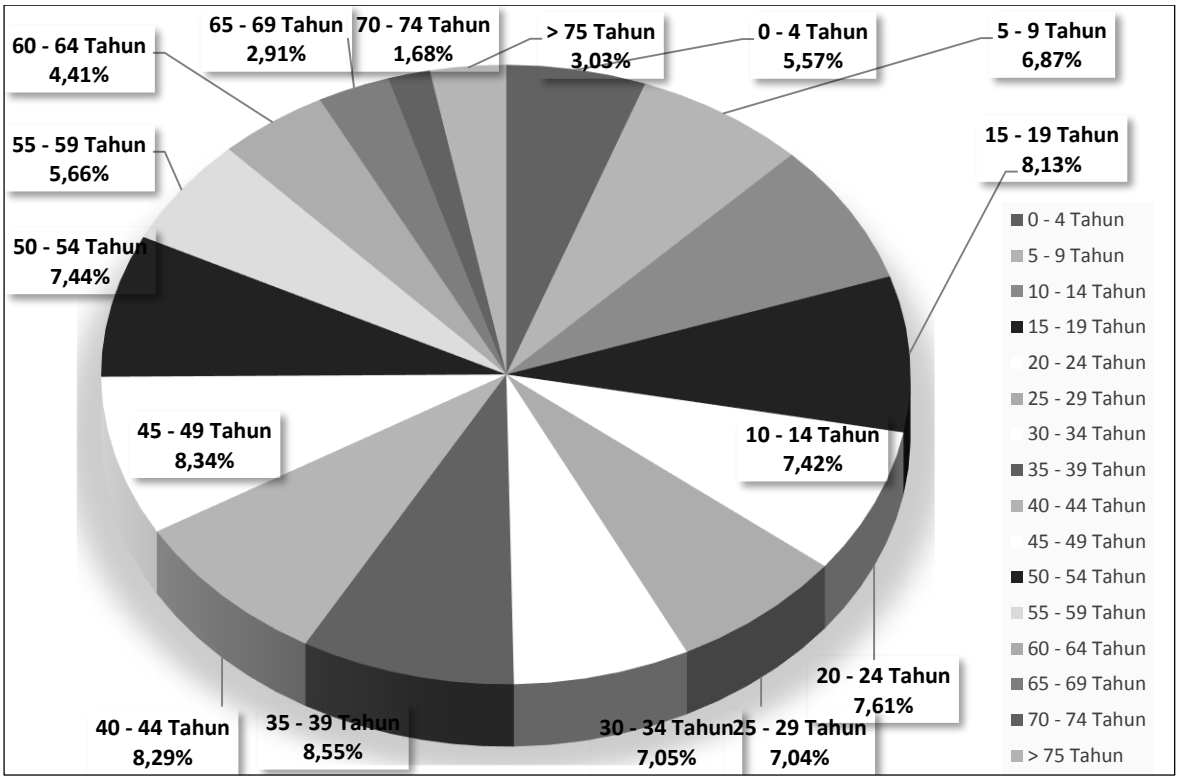

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel I.9

Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	0 - 4	65,444	60,816	126,260
2.	5 - 9	80,481	75,333	155,814
3.	10 - 14	87,141	81,109	168,250
4.	15 - 19	94,996	89,251	184,247
5.	20 - 24	88,610	83,920	172,530
6.	25 - 29	81,199	78,370	159,569
7.	30 - 34	81,087	78,724	159,811
8.	35 - 39	96,279	97,585	193,864
9.	40 - 44	92,671	95,259	187,930

10.	45 - 49	93,579	95,375	188,954
11.	50 - 54	84,257	84,327	168,584
12.	55 - 59	63,544	64,670	128,214
13.	60 - 64	51,724	48,136	99,860
14.	65 - 69	34,799	31,174	65,973
15.	70 - 74	17,171	20,892	38,063
16.	>75	29,673	38,937	68,610
TOTAL		**1,142,655**	**1,123,878**	**2,266,533**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.142.655 jiwa atau 50,41%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.123.878 jiwa atau 49,59%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut :

Grafik I.4

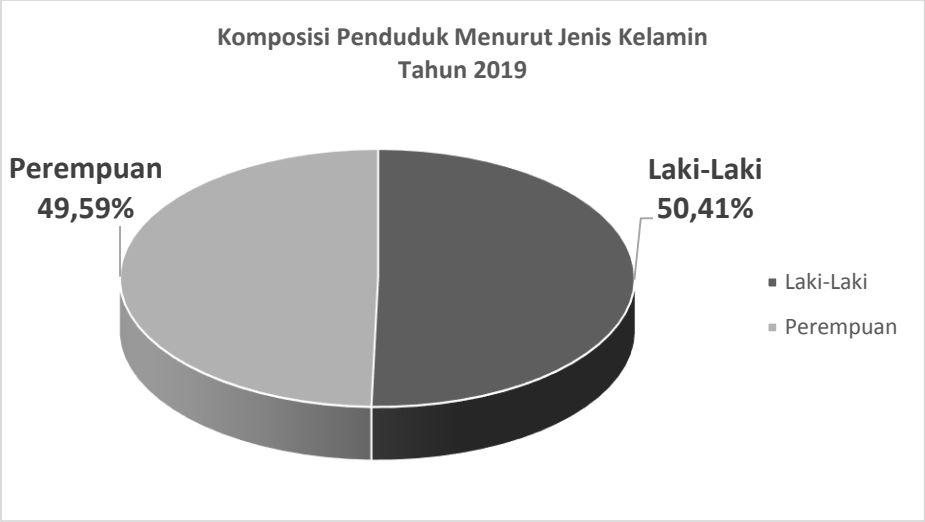

Sumber : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo memiliki kualifikasi pendidikan Lulusan SMA Sederajat, yaitu 42,04% dari jumlah penduduk. Meski demikian, masih ada 25,20% penduduk Kabupaten Sidoarjo yang masih berpendidikan rendah atau Lulusan SD Sederajat.

Komposisi penduduk menurut pendidikan tersajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.10

Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	LULUSAN SD	LULUSAN SMP	LULUSAN SMA	LULUSAN S1	LULUSAN S2	TOTAL
1	TARIK	17,797	14,141	18,244	2,127	74	**52,383**
2	PRAMBON	20,314	15,119	23,916	3,136	95	**62,580**
3	KREMBUNG	15,765	13,937	21,610	2,708	88	**54,108**
4	PORONG	19,415	14,845	22,181	3,432	138	**60,011**
5	JABON	16,120	11,020	14,919	1,774	53	**43,886**
6	TANGGULANGIN	21,162	18,226	31,356	6,302	232	**77,278**
7	CANDI	29,185	23,152	49,458	13,882	679	**116,356**
8	SIDOARJO	32,681	27,668	68,485	29,476	1,690	**160,000**
9	TULANGAN	20,397	18,261	32,865	4,930	157	**76,610**
10	WONOAYU	22,696	14,347	22,917	3,659	141	**63,760**
11	KRIAN	28,331	22,584	39,142	7,309	239	**97,605**
12	BALONGBENDO	17,743	14,805	20,871	2,869	95	**56,383**
13	TAMAN	36,516	32,826	77,677	19,996	1,149	**168,164**
14	SUKODONO	21,940	18,850	41,821	10,761	483	**93,855**
15	BUDURAN	15,011	15,643	34,770	10,397	608	**76,429**
16	GEDANGAN	19,737	18,533	42,078	11,909	601	**92,858**
17	SEDATI	18,711	14,973	35,599	9,396	988	**79,667**
18	WARU	30,556	30,894	76,211	31,723	2,153	**171,537**
	T O T A L	404,077	339,824	674,120	175,786	9,663	**1,603,470**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan untuk komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.11

Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	694,673	45.	USTADZ/MUBALIGH	126
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	120,377	46.	JURU MASAK	35
3	PELAJAR/MAHASISWA	365,540	47.	PROMOTOR ACARA	0
4	PENSIUNAN	18,854	48.	ANGGOTA DPR RI	5
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	32,526	49.	ANGGOTA DPD RI	2
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	18,389	50.	ANGGOTA BPK	2
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	5,918	51.	PRESIDEN	0
8	PERDAGANGAN	25,238	52.	WAKIL PRESIDEN	0
9	PETANI/PEKEBUN	48,801	53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	2
10	PETERNAK	50	54.	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	907	55.	DUTA BESAR	1
12	INDUSTRI	178	56.	GUBERNUR	0
13	KONSTRUKSI	198	57.	WAKIL GUBERNUR	0
14	TRANSPORTASI	208	58.	BUPATI	1
15	KARYAWAN SWASTA	795,957	59.	WAKIL BUPATI	1
16	KARYAWAN BUMN	6,242	60.	WALIKOTA	0
17	KARYAWAN BUMD	572	61.	WAKIL WALIKOTA	1
18	KARYAWAN HONORER	686	62.	ANGGOTA DPRD PROP.	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	3,054	63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	20
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2,095	64.	DOSEN	3,145
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	234	65.	GURU	22,064
22	BURUH PETERNAKAN	21	66.	PILOT	38
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	518	67.	PENGACARA	131
24	TUKANG CUKUR	23	68.	NOTARIS	93
25	TUKANG LISTRIK	72	69.	ARSITEK	42
26	TUKANG BATU	1,076	70.	AKUNTAN	21
27	TUKANG KAYU	227	71.	KONSULTAN	76
28	TUKANG SOL SEPATU	28	72.	DOKTER	1,647
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	102	73.	BIDAN	1,317
30	TUKANG JAHIT	457	74.	PERAWAT	2,345
31	TUKANG GIGI	5	75.	APOTEKER	183
32	PENATA RIAS	49	76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	16

33	PENATA BUSANA	8	77.	PENYIAR TELEVISI	1
34	PENATA RAMBUT	41	78.	PENYIAR RADIO	7
35	MEKANIK	253	79.	PELAUT	2460
36	SENIMAN	68	80.	PENELITI	9
37	TABIB	19	81.	SOPIR	3,699
38	PARAJI	3	82.	PIALANG	6
39	PERANCANG BUSANA	9	83.	PARANORMAL	12
40	PENTERJEMAH	5	84.	PEDAGANG	14,989
41	IMAM MASJID	6	85.	PERANGKAT DESA	2,459
42	PENDETA	206	86.	KEPALA DESA	252
43	PASTOR	5	87.	BIARAWAN/BIARAWATI	17
44	WARTAWAN	169	88.	WIRASWASTA	69,036
			89.	PEKERJAAN LAINNYA	404
				JUMLAH	**2,266,533**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian terbesar adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta, sebesar 35,12%. Posisi kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebesar 3,05%, sedangkan posisi ketiga petani/pekebun sebesar 2,15%, yang berkutat pada bisnis perdagangan sebesar 1,11%, dan pedagang sebesar 0,66%. Komposisi penduduk menurut mata pencaharisan ini tidak lepas dari struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

3. Kondisi Ekonomi

a) Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan Kabupaten Sidoarjo merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan mempunyai daya saing, baik karena ciri-cirinya yang khas, kualitasnya, maupun harganya yang kompetitif. Disamping itu juga, potensi unggulan tersebut berasal dari pemanfaatan potensi yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang potensial untuk ditumbuh kembangkan.

Potensi unggulan di Kabupaten Sidoarjo terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Namun perlu dikembangkan pula sektor pariwisata (akomodasi dan penyediaan makan minum) yang pada tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Perkembangan Industri di Kabupaten Sidoarjo, dapat terlihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.12
Perkembangan Industri di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	Industri Besar	Industri Sedang	JUMLAH
1	TARIK	1	3	1
2	PRAMBON	1	10	1
3	KREMBUNG	2	18	2
4	PORONG	1	11	1
5	JABON	3	20	3
6	TANGGULANGIN	10	32	10
7	CANDI	19	40	19
8	TULANGAN	1	26	1
9	WONOAYU	13	26	13
10	SUKODONO	6	16	6
11	SIDOARJO	13	50	13
12	BUDURAN	27	47	27
13	SEDATI	16	4	16
14	WARU	60	138	60
15	GEDANGAN	39	73	39
16	TAMAN	45	93	45
17	KRIAN	20	41	20
18	BALONGBENDO	20	16	20
		297	**664**	**297**

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Potensi Industri Pengolahan terdiri dari berbagai macam produk / komoditas yang tersebar di 18 Kecamatan. Dimana industri – industri tersebut terkelompok menjadi sentra industri, diantaranya :

Tabel I.13

Sentra Industri di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Sentra
1.	Kecamatan Tulangan	Sentra Batik Kenongo
		Sentra Kerupuk Kepadangan
		Sentra Logam Grabagan
		Sentra Kerupuk Tlasih
2.	Kecamatan Porong	Sentra Sayangan Kesambi
		Sentra Sayangan Kebakalan
3.	Kecamatan Wonoayu	Sentra Garam Wonokasian
		Sentra Garam Sawocangkring
4.	Kecamatan Sidoarjo	Sentra Bati Jetis
		Sentra Knalpot
		Sentra Petis Sekardangan
5.	Kecamatan Jabon	Sentra Bordir Jabon
		Sentra Kerupuk Jabon
		Sentra Konveksi Jabon
		Sentra Nugget / Sosis Jabon
6.	Kecamatan Krembung	Sentra Kerupuk Krembung
7.	Kecamatan Gedangan	Sentra Sepatu Gedangan
		Sentra Topi Punggul
		Sentra Topi Desa Gemurung
		Sentra Topi Kragan
8.	Kecamatan Tanggulangin	Sentra Bordir
		Sentra Tas dan Koper
9.	Kecamatan Candi	Sentra Sayangan Kebonsari
		Sentra Sayangan Candi
		Sentra Sayangan Klurak

		Sentra Petis Balongdowo
		Sentra Tempe Sumokali
		Sentra Tempe Sidodadi
		Sentra Telur Asin Kebonsari
10.	Kecamatan Balongbendo	Sentra Pot Kemangsen
11.	Kecamatan Krian	Sentra Sandal Kemasan
		Sentra Tahu Tropodo
		Sentra Tempe Krian
12.	Kecamatan Waru	Sentra Sepatu Waru
		Sentra Pande Besi Ngingas
13.	Kecamatan Sedati	Sentra Pengasinan Ikan Kalanganyar
14.	Kecamatan Prambon	Sentra Kerupuk Jatikalang
15.	Kecamatan Buduran	Sentra Sepatu Banjarsari
16.	Kecamatan Tarik	Sentra Pande Besi Kalimati
17.	Kecamatan Taman	Sentra Tempe
		Sentra Sanitair
18.	Kecamatan Sukodono	-

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dari keseluruhan sentra yang ada di Kabupaten Sidoarjo, menghasilkan komoditas – komoditas unggulan yang menunjang sektor perdagangan. Komoditas unggulan tersebut, antara lain :

Tabel I.14

Komoditas Unggulan di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	KOMODITI/SENTRA	LOKASI SENTRA
1	SIDOARJO	Petis Udang	Kelurahan Sekardangan
		Kerupuk	Desa Banjarbendo
		Batik	Kelurahan Lemahputro, Dusun Jetis
		Knalpot	Desa Cemengkalan
		Pengasapan Ikan	Kelurahan Celep

2	CANDI	Sayangan Tempe Petis Kupang Telur Asin	Desa Candi Desa Kebonsari Desa Klurak Desa Sepande Desa Sumokali Desa Jambangan Desa Kedungkendo Desa Balongdowo Desa Kebonsari
3	BUDURAN	Sepatu	Desa banjarsari
4	PORONG	Sayangan	Desa Kesambi Desa Kebakalan
5	KREMBUNG	Kerupuk Makanan Basah	Desa Kandangan Desa Krembung Desa Kedungsumur
6	TULANGAN	Logam / Pande Besi Kerupuk Batik Anyaman Bambu Kasur Roti Goreng Tape	Desa Grabagan Desa Telasih Desa Janti Desa Kenongo Desa Kepatihan Desa Pangkemiri Desa Kedondong Desa Sudimoro Desa Kemantren Desa Medalem

7	TANGGULANGIN	Bordir	Desa Randegan
			Desa Kedensari
			Desa Ketegan
		Tas / Koper	Desa Kedensari
			Desa Kludan
			Desa Kalisampurna
		Sepatu	Desa Kedensari
		Pengasapan Ikan	Desa Penatarsewu
8	JABON	Bordir	Desa Semambung
			Desa Trompoasri
			Desa Kedungpandan
		Konveksi	Desa Dukuhsari
			Desa Kebogayung
		Tempe	Desa Jumirahan
		Kerupuk	Desa Kedungrejo
9	KRIAN	Tempe	Desa Sedengan Mijen
		Tahu	Desa Tropodo
		Sandal	Desa Kemasan
		Sepatu	Desa Kemasan
		Makanan Kering	Desa Tarik
10	BALONGBENDO	Pot Bunga	Desa Kemangsen
11	TARIK	Logam / Pande besi	Desa Kalimati
12	PRAMBON	Tempe	Desa Prambon
		Kerupuk	Desa Jatikalang
		Bando	Desa Kedungsugo

13	WONOAYU	Garam Beryodium	Desa Wonokasian
			Desa Sawocangkring
		Gitar	Desa Becirongengor
14	TAMAN	Tempe	Desa Taman
			Desa Ketegan
		Sanitair	Desa Ketegan
15	SUKODONO	-	-
16	GEDANGAN	Bordir	Desa Gading
		Pita Aksesoris	Desa Kebonsikep
		Sepatu	Desa Tebel
			Desa Sruni
		Topi	Desa Punggul
17	WARU	Logam / Pande Besi	Desa Ngingas
			Desa Kedungrejo
			Desa Kureksari
		Tempe	Kelurahan Medaeng
		Sandal	Desa Berbek
			Desa Kepuhkiriman
			Desa Wadungasri
		Kerupuk	Desa Tambakrejo
			Desa Tambaksawah
		Terasi	Desa Tambaksawah
18	SEDATI	Garam Rakyat	Desa Tambak Cemandi
		Pengasinan Ikan	Desa Gisik Cemandi
		Terasi	Desa Tambak Cemandi
		Pengasapan Ikan	Desa Kalanganyar

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selain itu, Kabupaten Sidoarjo mempunyai potensi yang cukup besar dalam mengembangkan sektor pariwisata, terlihat dari peningkatan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang semakin meningkat tiap tahunnya, dengan potensi obyek wisata, sebagai berikut :

Tabel I.15

Obyek Wisata di Kabupaten Sidoarjo

Wisata Alam : 4 Obyek
1. Pantai Kepetingan 2. Pantai Pucukan 3. Pantai Gesik Cemandi 4. Wisata Bahari Telocor / Pulau LUSI
Wisata Minat Khusus dan Belanja : 11 Obyek
1. Industri Tas dan Koper (INTAKO) 2. Sepatu Sandal Wedoro 3. Gedung Olah Raga (GOR) 4. Bursa Kupang dan Tanaman Hias Gedangan 5. Bandara Ir. Juanda 6. Glass Painting Lukisan Kaca 7. Kerajinan Emas dan Perak 8. Kerajinan Wayang Kulit 9. Kerajinan Batik Kenongo 10. Kerajinan Batik Jetis 11. Alun-Alun Sidoarjo
Wisata Sejarah : 17 Obyek
1. Museum Mpu Tantular 2. Monumen R.M. Mangundiprojo 3. Mounumen Perjuangan Rakyat Sidoarjo 4. Monumen Pesawat TNI-AL 5. Monumen Ponti XV-2000 6. Gedung Joang 45 Sidoarjo 7. Rumah Induk Bupati Sidoarjo 8. Stasiun Kereta Api Sidoarjo 9. Stasiun Kereta Api Gedangan 10. Stasiun Kereta Api Porong 11. Masjid Al.Abror 12. Masjid Agung Sidoarjo 13. Klenteng Krian 14. Bekas PG Tanggulangin 15. PG.Tulangan

16. PG.Gula Krembung 17. PG.Gula Watoetoelis
Wisata Cagar Budaya : 20 Obyek
1. Bakalan Prasasti 2. Candi Pari 3. Candi Dermo 4. Candi Sumur 5. Candi Pamotan 6. Candi Medalem 7. Candi Wangkal 8. Candi Tawangalun 9. Candi Lemah Duwur 10. Candi Klagen 11. Situs Watu Tulis 12. Situs Patar Kidul 13. Situs Medowo 14. Situs Kedung Klinter 15. Situs Terung Wetan 16. Situs Plawagan 17. Prasasti Lingga 18. Prasasti Kemlagian 19. Prasastin Peripih 20. Fragmen Arca
Wisata Religi : 4 Obyek
1. Makam Dewi Ayu Sekardadu 2. Makam Mbah Ali Mas'ud 3. Makam Adipati Terung 4. Upacara Nyadran
Wisata Geologi : 1 Obyek
1. Lumpur Sidoarjo
Wisata Edukasi : 1 Obyek
1. Alas Prambon
Wisata Buatan : 30 Obyek
1. Antares Green Park 2. Kolam renang ketegan waterpark 3. Kolam renang candi pari 4. Kolam renang waterpark suncity 5. Kolam renang permata 6. Kolam pancing delta fishing 7. Kolam renang puri surya jaya 8. Kolam renang suko asri 9. Kolam renang golden aquatic 10. Kolam renang sendang delta GOR 11. Kolam renang citra garden

12. Kolam renang citra harmoni park 13. Keraton waterpark krian 14. Kolam renang taman hiburan krian indah 15. Kolam renang tivoli sport club BCF 16. Kolam renang dan tempat bermain jala sari (ponari) 17. Kolam renang embun jati mas 18. Kolam renang kedung galih tirta 19. Kolam renang rahayu park 20. Kolam renang jedong cangkring 21. Kolam renang rahayu park 22. Kolam renang surya bagus 23. Kolam renang sport club pondok tjandra 24. Kolam renang PT. Unimas wahana indonesia 25. Kolam renang graha tirta 26. Kolam renang delta sport club 27. Kolam renang tirta krida juanda (TNI AL) 28. Kolam renang legok asri 29. Kolam renang tirta rani 30. Kolam renang tirtra agung
Wisata Pemancingan : 39 Obyek
1. Kolam Pancing dan Outbond Kusuma Tirta Minapolitan 2. Kolam Pancing dan Lesehan Podorejo 3. Kolam Pancing Nelayan Bluru 4. Kolam Pancing dan Lesehan " Bu Retno " 5. Kolam Pancing Delta Fishing 6. Kolam Pancing Barongan 7. Kolam Pancing Banyu Mili Sidoarjo 8. Kolam Pancing Pak Basuki 9. Kolam Pancing Candi 10. Kolam Pancing Diqqi 11. Kolam Pancing Monstero Fishing 12. Kolam Pancing .Tiga Putra 13. Kolam Pancing dan Lesehan Apung"Saung Bungahe Ati 14. Kolam Pancing Teguh Jaya 15. Kolam Lomba Makarya Binangun 16. Kolam Pancing Soponyono 17. Kolam Pancing Rahayu Jaya Abadi 18. Kolam Pancing Kotero 19. Kolam Pancing Tambak Jaya 20. Kolam Pancing Bandeng Besar-Tambak Jaya 21. Kolam Pancing Tombro Kharisma Juanda 22. Kolam Pancing APS 23. Kolam Pancing Siap Saji 24. Kolam Pancing Arjuna 25. Kolam Pancing Tamasya 26. Kolam Pancing Candi Bang 27. Kolam Pancing Juanda Fishing 28. Kolam Pancing Pak Ri 29. Kolam Pancing Tombro "Elok"

30. Kolam Pancing Gt Patin Ss (Lomba) 31. Kedai Makan Putri dan Kolam Pancing Lesehan Bu Retno 32. Kusuma Tirta Minapolitan 33. Mega Prima Fishing 34. Gafina Jaya Makmur (Harian & Kiloan) Pengelola Pak Koyo 35. Sumber Bening – Eks Anggun Sejahtera 36. Tambak Laguna 37. Tambak Gumilang 1 & 2 38. Tambak Sumber Rejeki 39. Warung Lesehan dan Kolam Pancing CSDW
Hiburan Lain : 17 Obyek
1. Yayang Cafe I 2. Yayang Cafe II 3. King Karaoke 4. NAV Karaoke Keluarga 5. VIP Karaokedan KTV Pool (Karaoke Keluarga, Resto & Billard) 6. X2 Karaoke,Home Theater & Resto (Sherin Yuliasin) 7. Rumah Makan & Karoke Top (Budi Sugiarto) 8. Matahari Rumah Makan and Live Music 9. MX, Karaoke dan Resto 10. Inul Viesta 11. K-BRO Karaoke 12. Mom Viesta Karaoke 13. C.B.Karaoke 14. Scorpion 2 Karaoke Live Musik 15. D' yyas Cafe 16. Mitra Karaoke (PT.Sukses Bina Mitra) R.M dan Live 17. Musik (Sout Sitompul) 18. Karaoke Keluarga Wonderland
Wisata Industri dan Belanja : 42 Obyek
1. Indah Bordir 2. Industri Sayangan 3. Industri Topi 4. Industri Logam (Komponen Listrik,Telepon, Alat Pertanian, Sepeda dll) 5. Industri Sandal 6. Industri Ikan Asin 7. Produk Sayur Mayur 8. Industri Tahu 9. Industri Tempe 10. Industri Kerupuk Ikan 11. Industri Kerupuk Kupang 12. Industri Anyaman Bambu (Rakitan Dapur) 13. Industri Kerajinan Perak 14. Industri Bando 15. Industri Jamu Tradisional 16. Industri Bandeng 17. Industri Pengrajin Tempe

18. Industri Kerupuk 19. Industri Anyaman Bambu (Jrebeng) 20. Industri Anatomi Tubuh 21. Industri Batik Tulis 22. Industri Kaca Cermin 23. Industri Wayang Kulit 24. Industri Sayuran 25. Industri Kupang 26. Industri Udang Windu 27. Industri Mainan Anak 28. Industri Kerupuk 29. Industri Buah Belimbing 30. Industri Sepatu 31. Industri Tahu dan Susu 32. Industri Kendaraan Mobil 33. Industri Sandal Spoon 34. Industri Tempe 35. Industri Udang Windu 36. Industri Jamur Merang 37. Industri Bandeng 38. Industri Udang Windu 39. Kampung Telor Asin 40. Bursa Kupang 41. Kampung Jajanan 42. 42. Pasar Kuliner "PAZKUL"
Wisata Ruang Terbuka Hijau (RTH) : 5 Obyek
1. Taman Tanjung Puri 2. Taman Abhirama 3. Taman Apkasi 4. Taman Dwarakerta 5. 5. Taman Abhirupa
Wisata Olahraga : 3 Obyek
1. Stadion Jenggolo 2. Kompleks GOR Sidoarjo 3. 3. Gedung Bulutangkis Sidoarjo

Sumber data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Peningkatan sektor unggulan ini memicu minat investor untuk berinvestasi ke Kabupaten Sidoarjo, sehingga nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo sangat tinggi. Berikut jumlah dan nilai investasi, serta tenaga kerja yang terserap untuk setiap sektor usaha :

Tabel I.16

Investasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

NO	SEKTOR USAHA	UNIT USAHA	MODAL USAHA (Rp.)	TENAGA KERJA (Org)
1	Sektor Ketenagalistrikan	18	54.898.567.829	3643
2	Sektor Pertanian	39	225.892.475.700	119
3	Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan	11	2.118.411.600	54
4	Sektor Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	610	3.359.217.955.386	3404
5	Sektor Kelautan & Perikanan	61	27.023.366.050	256
6	Sektor Kesehatan	91	428.588.362.490	3205
7	Sektor Obat dan Makanan	746	460.163.912.408	5676
8	Sektor Perindustrian	842	5.502.253.174.050	21477
9	Sektor Perdagangan	3216	12.712.490.893.574	21329
10	Sektor Perhubungan	329	303.557.671.838	1357
11	Sektor Komunikasi dan Informatika	23	20.458.519.280	476
12	Sektor Keuangan	40	291.384.488.053	739
13	Sektor Pariwisata	166	328.995.321.060	1034
14	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	99	66.133.174.512	1145
15	Sektor Pendidikan Tinggi	0	0	0
16	Sektor Agama dan Keagamaan	0	0	0
17	Sektor Ketenagakerjaan	68	45.725.337.598	18116
18	Sektor Kepolisian	1	145.000.000	4
19	Sektor Perkoperasian dan UMKM	7	3.630.145.760	66
20	Sektor Ketenaganukliran	0	0	0
JUMLAH		6367	23.832.676.777.188,00	82100

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu

b) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Angka PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu tiga tahun terakhir adalah masing – masing 174.180.087,6 milyar rupiah, 189.093.191,5 milyar rupiah, dan 204.021.513,1 milyar rupiah.

Sementara angka PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu tiga tahun terakhir masing – masing 125.039.056,4 milyar rupiah, 132.571.190,9 milyar rupiah, dan 140.511.231,4 milyar rupiah.

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2019, terbesar pada kategori industri pengolahan 47,80%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 16,31%. Sedangkan distribusi yang terendah pada kategori pengadaan air dan pengolahan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,06%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo terutama didukung oleh pertumbuhan pada kategori transportasi dan pergudangan sebesar 11,25%, konstruksi 8,69%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,49%, informasi dan komunikasi 3,46%.

Rincian PDRB per sektor tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel I.16

PDRB KABUPATEN SIDOARJO Tahun 2019

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.220.003,70	2.558.272,30
2	Pertambangan dan Penggalian	189.219,90	156.799,80
3	Industri Pengolahan	97.527.910,50	71.841.259,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.743.109,10	1.066.001,40

5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	121.875,70	105.338,80
6	Konstruksi	17.732.848,40	12.962.683,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	33.281.208,70	22.721.470,40
8	Transportasi dan Pergudangan	22.949.045,00	9.721.504,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.119.756,70	5.009.066,90
10	Informasi dan Komunikasi	7.064.805,90	6.265.616,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.453.806,70	1.614.033,00
12	Real Estate	1.873.329,60	1.348.250,90
13	Jasa Perusahaan	333.414,80	224.064,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	3.721.585,00	2.289.684,80
15	Jasa Pendidikan	2.361.345,30	1.637.648,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	616.034,70	458.986,40
17	Jasa Lainnya	712.213,60	530.549,30
	TOTAL	**204.021.513,10**	**140.511.231,40**

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berikut *share* PDRB Kabupaten Sidoarjo per sektor, sebagaimana grafik :

Grafik I.5

***Share* PDRB**

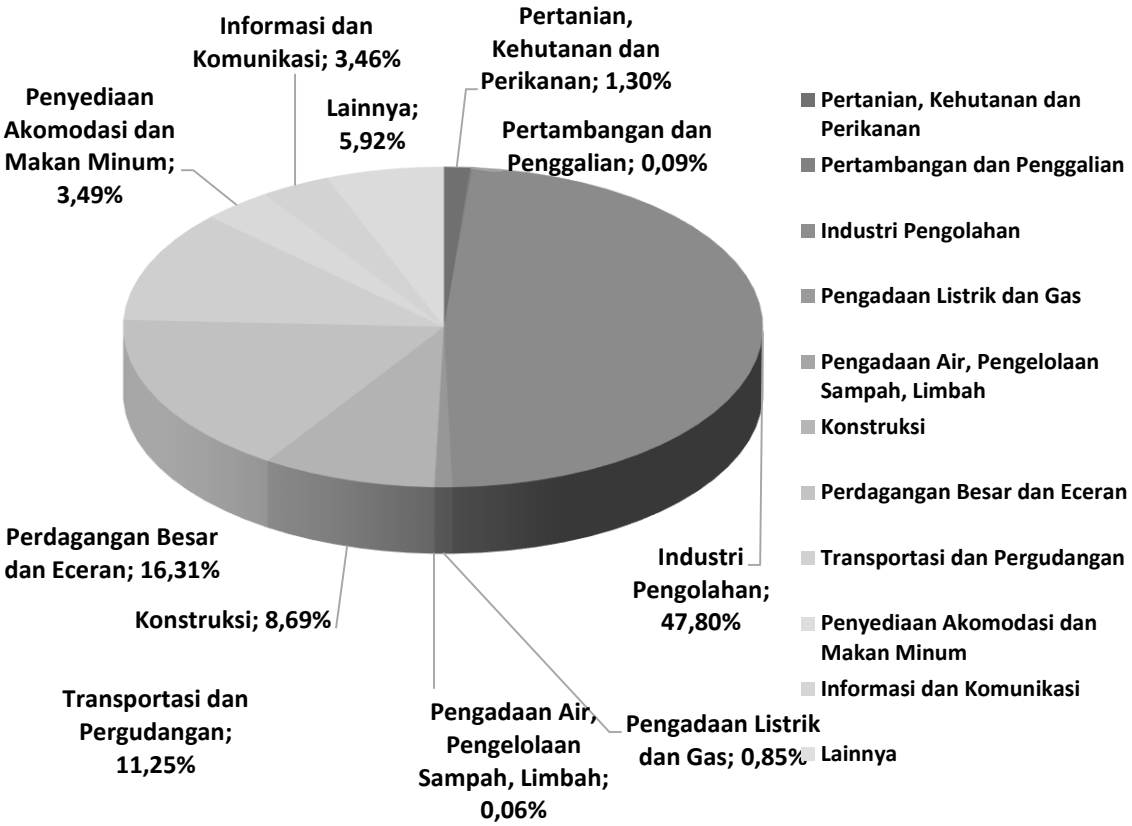

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2019

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien dapat diwujudkan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing - masing misi dilaksanakan berpedoman pada strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021.

Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupaten Sidoarjo berawal dari isu strategis sebagai berikut :

1. Lemahnya kapasitas kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan;
2. Lemahnya inovasi untuk menunjang pelayanan publik pada penyelenggaraan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa;
3. Kualitas dan pemerataan pendidikan rendah;
4. Belum optimalnya layanan dan Akses Kesehatan;
5. Rendahnya aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin;
6. Perselisihan perusahaan dan tenaga kerja meningkat;
7. Komitmen Terhadap Reformasi Birokrasi;

8. Letak Kabupaten yang Strategis dengan ibukota provinsi dan wilayah Gerbangkertasusila;
9. Iklim investasi yang Kondusif;
10. Pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam seiring dengan pesatnya sektor industri dan perdagangan
11. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan
12. Pencegahan konflik berbau SARA, dan Politik
13. Sarana dan prasarana kegiatan Kepemudaan yang masih minim
14. Degradasi Kebudayaan Lokal
15. Jumlah PMKS yang meningkat
16. Belum berkembangnya sektor industri kreatif dalam mendorong sektor pariwisata
17. Potensi Unggulan pada Sektor Industri pengolahan, ekonomi kreatif dan perikanan
18. Peningkatan pada penerimaan Retribusi dan pajak daerah
19. Afirmasi pusat terhadap infrastruktur
20. Arah dan Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Industri Ramah Lingkungan
21. Belum produktifnya usaha ekonomi dan Kemandirian Pemerintahan Desa
22. Penanggulangan Banjir
23. Optimalisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama dengan Swasta
24. Penanggulangan kemiskinan
25. LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
26. Interchanges Tol dengan kawasan wilaah barat sidoarjo
27. Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT)
28. RTRW
29. Program 100-0-100
30. Frontage Road (FR)
31. Pelayanan Persampahan
32. Pengembangan kawasan geowisata

33. Pengembangan kawasan aerocity / aerotropolis
34. Smart City
35. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
36. Limbah domestik
37. Kemacetan
38. Permukiman
39. Pencemaran industri
40. Lemahnya UMKM
41. Pasar tradisional

1. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021.

a. Visi

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan Tahun 2010 - 2015, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2016 – 2021. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2016 – 2021, yaitu :

” KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN”.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok - pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut :

- ***Inovatif*** ; Melakukan proses pembangunan dengan menerapkan berbagai inovasi di bidang pembangunan fisik dan non fisik untuk mendukung akselerasi pembangunan menuju Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
- ***Sejahtera*** ; Makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa Pasangan Kepala Daerah terpilih (KDH) untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo sampai tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadilan sosial budaya, stabilitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
- ***Mandiri*** ; Cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
- ***Berkelanjutan*** ; Proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland Report, PBB 1987). Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan

masa kini saja, tetapi juga internalisasi konsep dan pola pembangunan yang memperdulikan kelestarian lingkungan dan sosial serta dampak yang lain bagi generasi masa depan. Unsur visi ini sangat strategis dan senada dengan komitmen global tentang *climate change*.

b. Misi

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi dijabarkan ke dalam tiap misi, sebagai berikut :

MISI	UNSUR VISI	PENJABARAN
Misi 1	Mandiri	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan
Misi 2	Mandiri	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat
Misi 3	Sejahtera	Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan
Misi 4	Sejahtera	Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

Misi 5	Berkelanjutan	Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait 5 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Misi 1: Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.

Salah satu tolok ukur terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Good Governance dan Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I Kabupaten Sidoarjo difokuskan untuk pencapaian tujuan diatas, dengan menetapkan 2 sasaran yakni Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi; .

Misi 2: Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai Misi II ditetapkan 1 Tujuan dan 2 Sasaran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut dapat dicapai melalui 2 sasaran yaitu Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Misi 3: Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Misi III Kabupaten Sidoarjo terfokus terhadap pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan Misi III. Berdasarkan 3 indeks pembentuk IPM, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan secara representatif menggambarkan pencapaian IPM pada

Misi III. Selain itu sasaran diarahkan terhadap pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Misi 4: Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban.

Perspektif Misi IV lebih diarahkan terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat, yang menggunakan tolok ukur capaian dengan menggunakan Indeks Kebahagiaan, Indeks Rasa Aman, Indeks Resiko Bencana, dan Indeks Pembangunan Gender. Misi IV dapat dicapai dengan meningkatkan harmonisasi dan keamanan sosial.

Misi 5: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Misi terakhir adalah terfokus terhadap peningkatan infrastruktur sebagai penunjang ekonomi, namun tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan

Menindak lanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Sidoarjo yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo 2016-2021, maka berikut ini merupakan kerangka arsitektur Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2016 - 2021 sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar misi dalam pencapaian visi, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.1

Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021

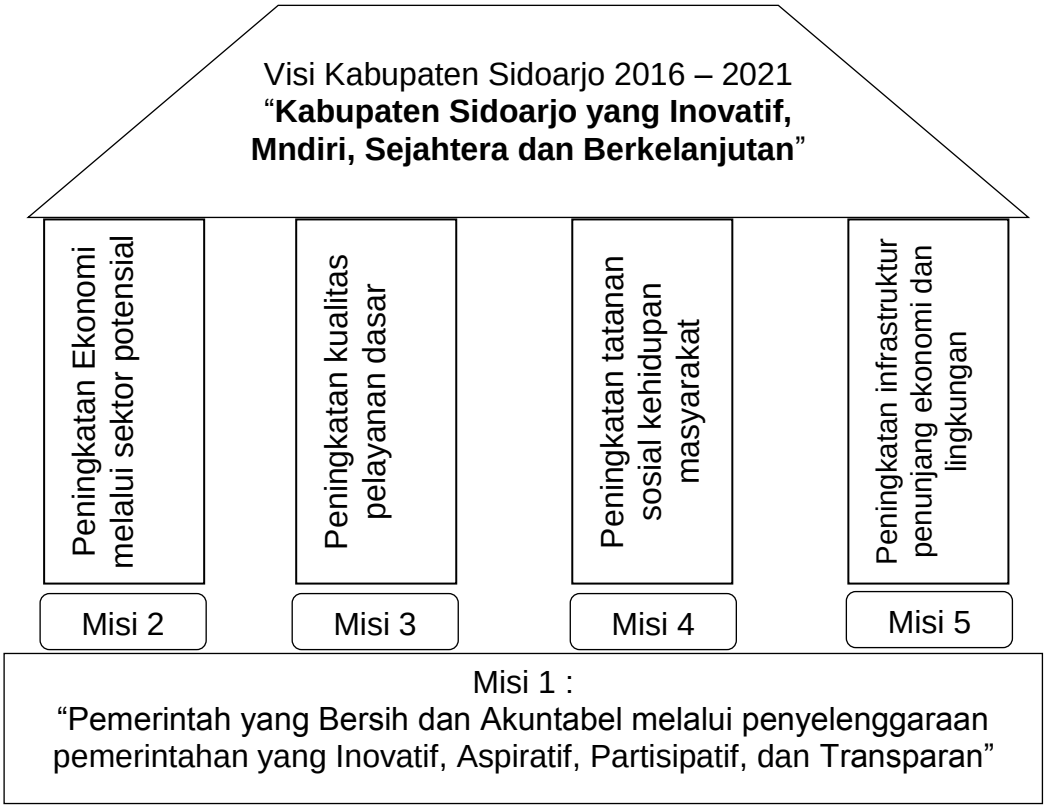

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

c. **Tujuan dan Sasaran**

Untuk mewujudkan 5 misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut :

a) Tujuan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan

5. Meningkatakan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup

b) Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
3. Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
6. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum yang berkeadilan
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
8. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

Berikut keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator keberhasilannya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tabel :

Tabel II.2

Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.	T.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	1. Indeks Good Governance	S1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Opini atas audit BPK
					2. Nilai SAKIP Kabupaten
					3. Nilai Kinerja EKPPD
					4. Tingkat Maturitas SPIP
			2. Indeks Reformasi Birokrasi	S.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
					2. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

2	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat	T.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	1. Pertumbuhan Ekonomi	S.3 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita
			2. Indeks GINI	S.4 Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	1. Tingkat Pengangguran Terbuka
					2. Tingkat Kemiskinan
					3. Persentase Desa Maju
3	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	T.3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	S.5 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
					2. Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS)
				S.6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
4	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban.	T.4 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	Indeks Kebahagiaan	S. 7 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	1. Indeks Rasa Aman
					2. Indeks Resiko Bencana
					3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5	Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	T.5 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian Lingkungan Hidup	1. Indeks Infrastruktur	S.8 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1. Persentase Jalan Kondisi Mantap
					2. Persentase Luas area rawan genangan banjir
			2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	S.9 Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air
					2. Indeks Kualitas Udara
					3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

a. Strategi Pembangunan Daerah

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity*, dan *threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dirumuskan dalam strategi, sebagai berikut :

- Strategi S-O ; yang ditetapkan adalah <u>Penguatan Ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis *eco Industri*.</u>

  Dimaksudkan pada strategi ini yaitu Industri olahan, UMKM, Pertanian dan Perikanan kelautan merupakan sektor sektor potensial Kabupaten Sidoarjo yang perlu didorong oleh pemerintah. Sebab, sektor-sektor potensial tersebut menjadi kekuatan dari pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo. agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor, industri olahan, UMKM, pertanian, Perikanan dan kelautan. Pajak daerah dan restribusi merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah, hal ini tentunya perhatian dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Kabupaten Sidoarjo. investasi baik PMA maupun PMDN telah tumbuh pesat di Kabupaten Sidoarjo, tentunya perlunya menciptkan lingkungan iklim investasi kondusif

- Strategi S-T ; yang ditetapkan adalah <u>Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan.</u>

Pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektifikatas antar wilayah dan infrastruktur strategis penunjang perekonomian, serta pembangunan yang patuh akan rencanana tata ruang. Sesuai dengan Konsep *Sustainable Development*, maka pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu unsur yang perlu perhatian guna untuk generasi mendatang dan menjaga dari dampak perubahan iklim

- Strategi W-O ; yang ditetapkan adalah <u>Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government.</u>

  Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertangungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan. Smart governance prinsip dasar yaitu mengakolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, mengembangkan operasional, meningkatkan managemen organisasi, membuat system database yang dapat diakses secara umum, mengolah informasi yang up to date, menggunakan teknologi yang mutakhir, adanya koordinasi stakeholder

- Strategi W-T (1) ; yang ditetapkan adalah Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

  Membangun generasi yang profesional menjadi prioritas utama dalam Kabupaten Sidoarjo mengingat daya saing dan kompetensi semakin meningkat. Kualitas pendidikan yang baik selaras dengan akses seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau serta pemerataan pendidikan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang bertujuan untuk mencegah, merawat dan mengobati, pemulihan kesehatan terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, upaya tersebut didorong dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keterjangkauan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Masyarakat secara merata.
- Strategi W-T (2) ; yang ditetapkan adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan.

  pada strategi ini mencipatkan adanya social sustainabilty, prinsip utamanya yaitu equity, individu mempunyai akses berpartisipasi secara penuh. kedua, *social inclusion and interaction*, adanya hak untuk kesempatan berpartisipasi baik meliputi partisipasi dalam pembangunan maupun dalam berpolitik. Ketiga, security jaminan untuk lingkungan yang aman dan mendukung. Terakhir yaitu adaptability kelenturan terhadap komunitas. Strategi ini juga menciptakan adanya penguatan pada demokrasi Pancasila.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government.

2. Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis *Eco Industry*.
3. Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan.
5. Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai :

Tabel II.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021

Visi : **Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan**		
Misi I "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
T.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	S1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Strategi: Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government

	S.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	
Misi II "Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat"		
T.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	S.3 Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Strategi: Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis Eco Industri.
	S.4 Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	
Misi III "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"		
T.3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	S.5 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Strategi: Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
	S.6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
Misi IV "Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban"		
T.4 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	S. 7 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan
Misi V "Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"		
T.5 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian Lingkungan Hidup	S.8 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Strategi: Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan
	S.9 Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan serta prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan dituangkan dalam tema pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

Tahun	Tema dan Prioritas Pembangunan
Tahun 2016	Mewujudkan Iklim Demokrasi yang Sehat Dan Kondusif Guna Menunjang Peningkatan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Daerah
Tahun 2017	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Publik Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
Tahun 2018	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja
Tahun 2019	Pemantapan Infrastruktur Penunjang Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2020	Percepatan Pembangunan Ekonomi melalui akselarasi sektor-sektor potensial daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

Tahun 2021	Menciptakan Stabilisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang berdaya saing

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

c. Cascading dan CrossCutting

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Sidoarjo menyusun Cascading Kinerja Daerah. Sedangkan sebagai wujud integritas lintas sektor dari strategi pencapaian kinerja disusun pula CrossCutting Kinerja Daerah. Cascading dan CrossCutting tersebut untuk tiap sasaran digambarkan sebagai berikut :

- Misi 1

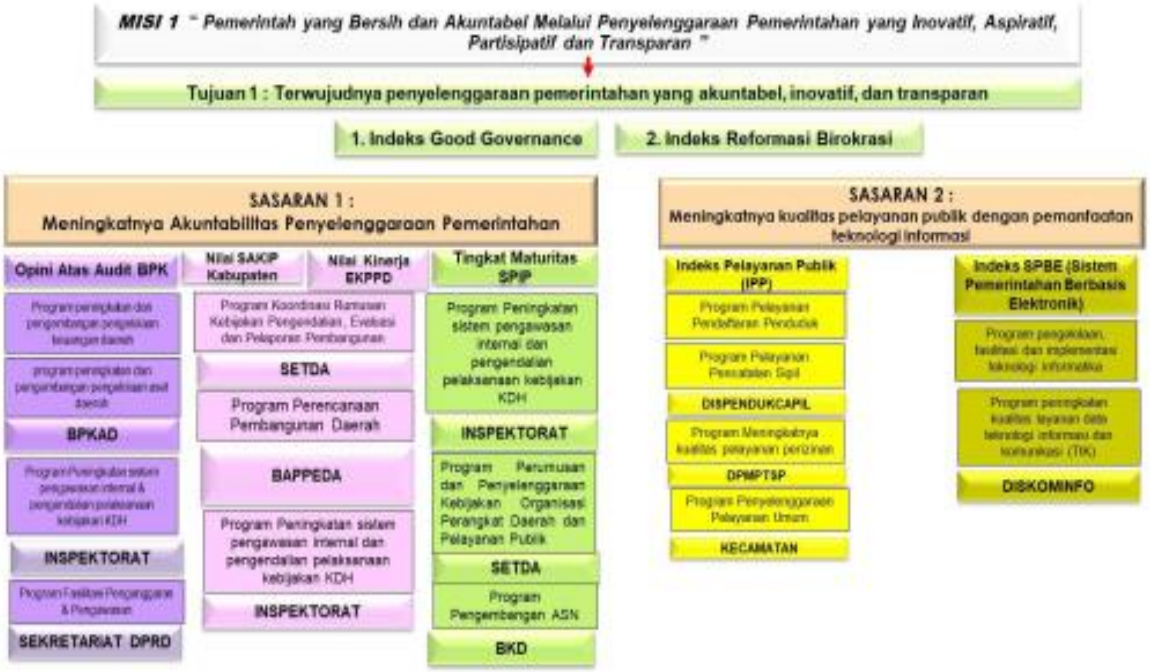

SASARAN 1 :

SASARAN 2 :

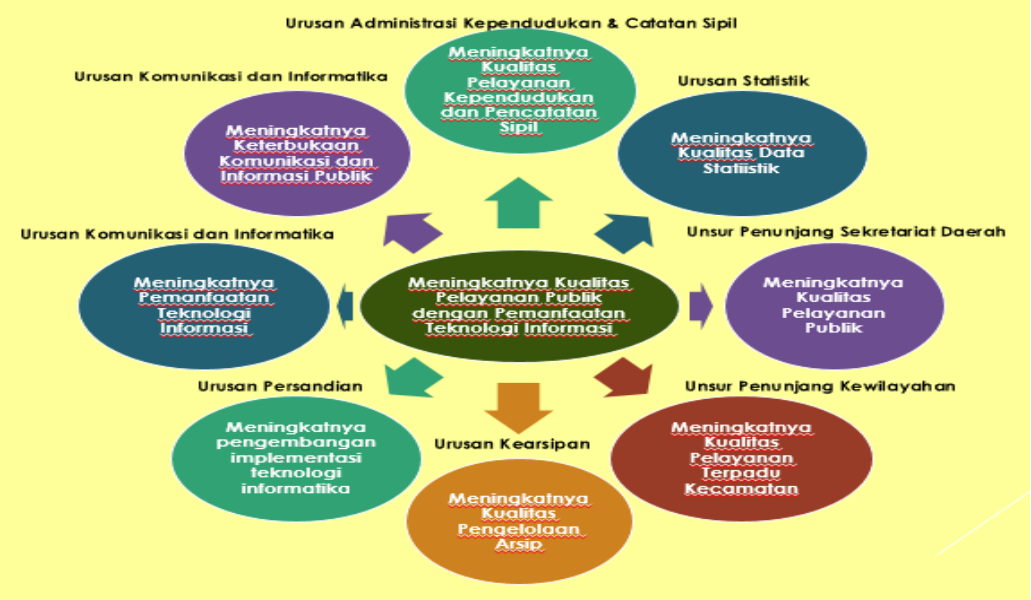

- Misi 2

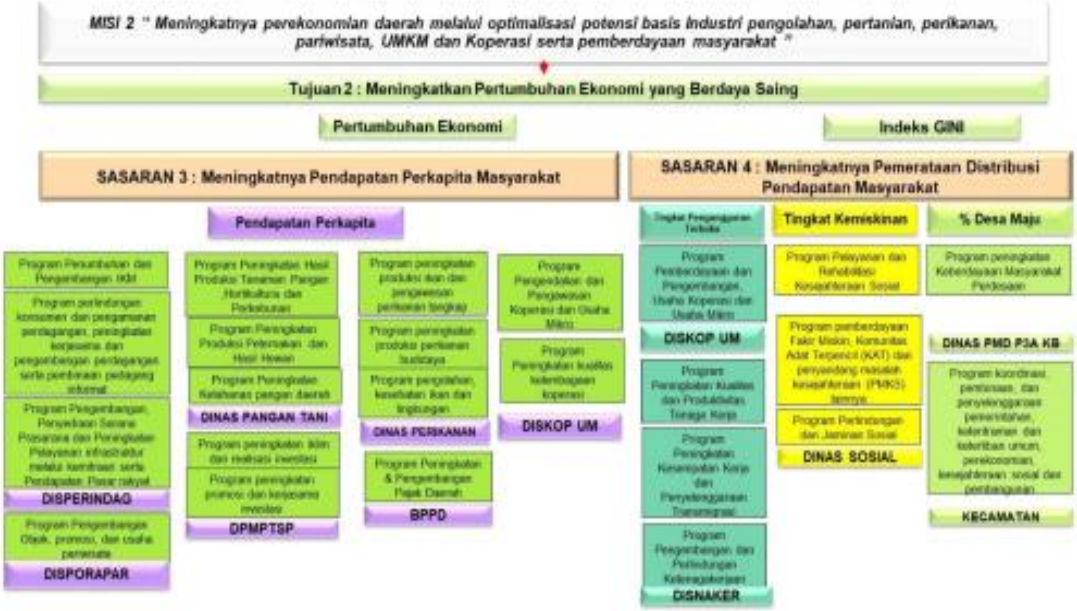

SASARAN 3 :

SASARAN 4 :

- Misi 3

SASARAN 5 :

SASARAN 6 :

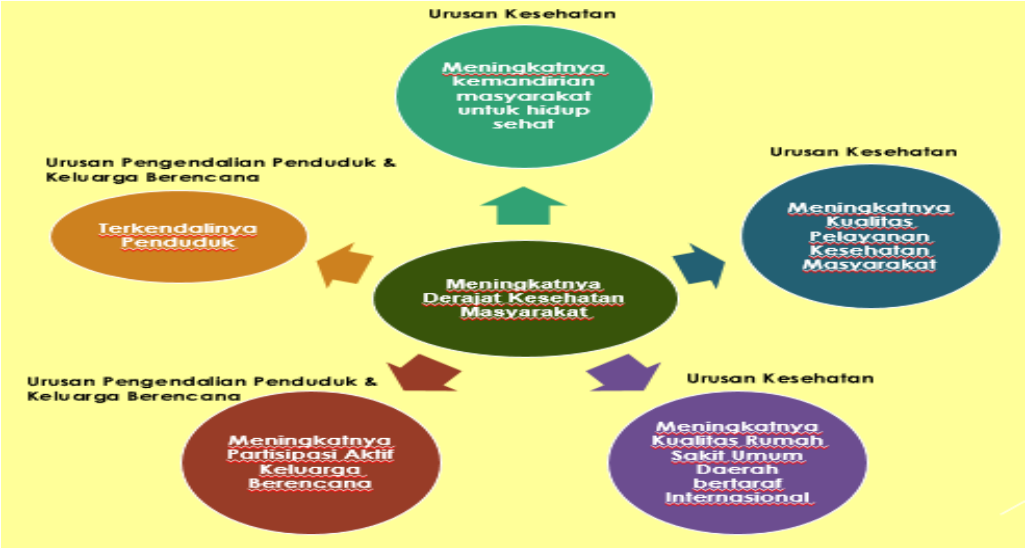

- Misi 4

SASARAN 7 :

- Misi 5

SASARAN 8 :

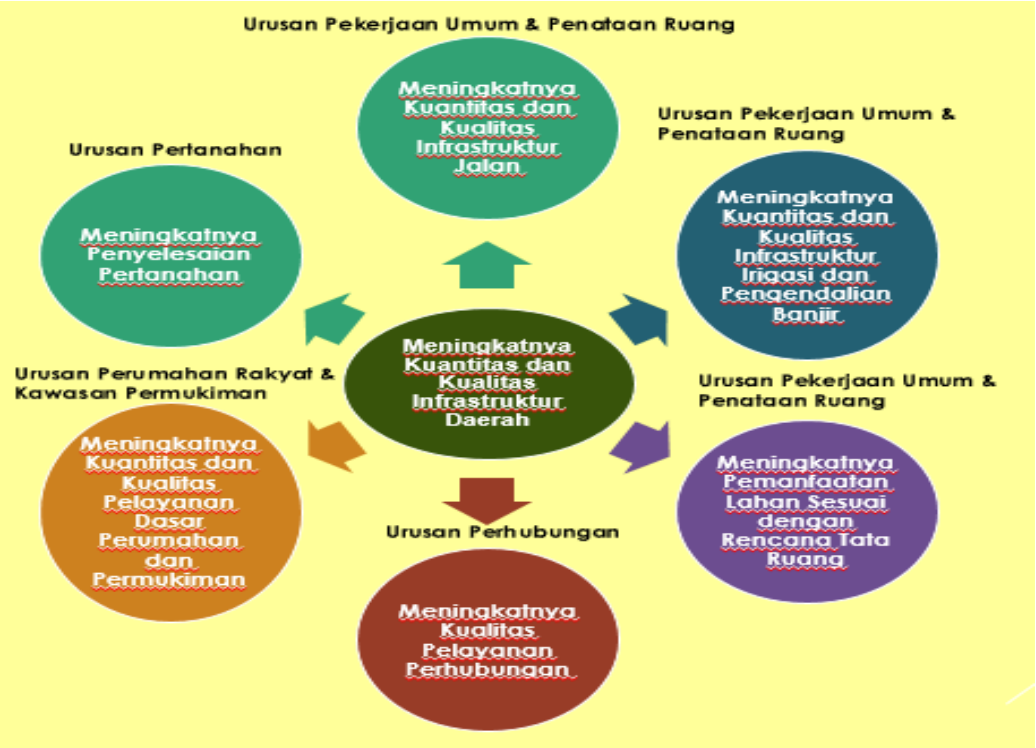

SASARAN 9 :

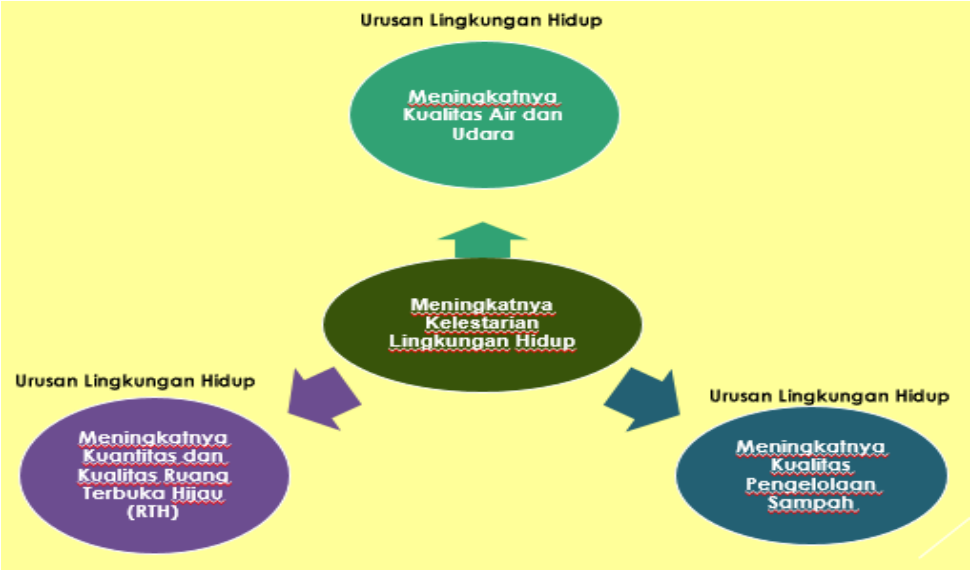

d. Target Kinerja Daerah

Target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan tujuan RPJMD, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur keberhasilan sasaran RPJMD dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2019
1.	Indeks Good Governance	Poin	69,32
2.	Indeks Reformasi Birokasi	Kategori	B
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,67

4.	Indeks GINI	Poin	0,37
5.	Tingkat Kemiskinan	%	6,36
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,56
7.	Indeks Infrastruktur	Poin	1.418
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	79,51
9.	Indeks Kebahagiaan	Poin	79,83
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	52,01

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Daerah (IKD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2016 - 2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan / pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.5

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target Tahun 2019	OPD Penanggung Jawab
1	PDRB Perkapita	82.741	Bidang Ekonomi Bappeda
2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	14,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	10,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,83	Dinas Kesehatan
5	Opini atas Audit BPK	WTP	BPKAD
6	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Baik	Bag.Organisasi-Setda
7	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Bag.Organisasi-Setda
8	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	1,41	Dinas Perikanan
9	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	46.11	Dinas Perindag
10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,25	Dinas Perindag
11	Persentase Pencari kerja yang telah membuka usaha secara mandiri	6	Dinas Tenaga Kerja
12	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	37,93	BPKAD
13	Indeks Profesionalitas ASN	78	BKD
14	Nilai SAKIP Kabupaten	BB	Bag.Pembangunan - Setda
15	Tingkat Maturitas SPIP	Terdefinisi	Inspektorat
16	Nilai PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah)	Baik	Bappeda
17	Status Kinerja LPPD	ST	Bag. Pembangunan
18	Rata-rata Nilai UN SD/MI	8,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	APM SD/MI	96,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	APK SD/MI	108,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Rata-rata Nilai UN SMP/MTs	6,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	APM SMP/MTs	79,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	APK SMP/MTs	99,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

24	Angka Kematian Ibu (AKI)	71,4	Dinas Kesehatan
25	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,6	Dinas Kesehatan
26	Persentase balita stunting	25,2	Dinas Kesehatan
27	Persentase Desa/Kel Universal Child Immunization (UCI)	89	Dinas Kesehatan
28	Persentase orang terinfeksi HIV positif mendapatkan ARV	90	Dinas Kesehatan
29	Status akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	RSUD
30	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat RSUD	A	RSUD
31	Persentase Pasien Keluar Hidup	96	RSUD
32	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	87	Dinas PU BM dan SDA
33	Persentase luas sawah yang terlayani irigasi	85	Dinas PU BM dan SDA
34	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan	60	Dinas PU BM dan SDA
35	Persentase Bangunan ber-IMB	63	Dinas Perkim CKTR
36	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	63	Dinas Perkim CKTR
37	Persentase luasan kawasan kumuh	0,28	Dinas Perkim CKTR
38	Persentase peningkatan rumah layak huni	100	Dinas Perkim CKTR
39	Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	94,21	Dinas Perkim CKTR
40	Persentase masyarakat yang menggunakan air bersih melalui perpipaan	3,5	Dinas Perkim CKTR
41	Indeks Rasa Aman	75,37	Satpol pp
42	Indeks Resiko Bencana	105	BPBD
43	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo) sesuai SPM	50	BPBD
44	Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	1,87	Dinas Sosial
45	Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor	94,44	Dinas Tenaga Kerja
46	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	65	Dinas Tenaga Kerja
47	Indeks Pembangunan Gender	94,55	Dinas P3A KB
48	Indeks Pemberdayaan Gender	64,75	Dinas P3A KB
49	Persentase kasus kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100	Dinas P3A KB
50	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,4	Dinas Pangan dan Pertanian

51	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,45	Dinas Pangan dan Pertanian
52	Persentase pengadaan tanah yang terfasilitasi sesuai prosedur	100	Dinas Perkim CKTR
53	Indeks Kualitas Air	52,29	DLHK
54	Indeks Kualitas Udara	86,79	DLHK
55	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	25,72	DLHK
56	Persentase sampah yang terkelola	64,28	DLHK
57	Persentase penduduk yang ber-KTP Elektronik	95	Dispendukcapil
58	Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK)	100	Dispendukcapil
59	Persentase penduduk usia 0 s.d. 18 tahun yang ber-akta kelahiran	100	Dispendukcapil
60	Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan BUMDES Mandiri	24	Dinas PMD
61	Persentase Desa Maju	27,33	Dinas PMD
62	CBR (Crude Birt Rate): Kelahiran hidup pada pertengahan tahun	16,4	Dinas P3A KB
63	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut KB	81,55	Dinas P3A KB
64	Persentase Keselamatan Angkutan Darat	88	Dinas Perhubungan
65	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,6	Dinas Kominfo
66	Persentase usaha mikro yang mandiri	1,5	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
67	Persentase Koperasi yang berkualitas	19,83	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
68	Persentase Pertumbuhan nilai investasi	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
69	Jumlah investor	3.184	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
70	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan internasional.	15	Disporapar
71	Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional	150	Disporapar
72	Persentase data statistik yang diolah dan dianalisa	60	Dinas Kominfo
73	Persentase jaringan OPD dan Kecamatan yang terintegrasi	70	Dinas Kominfo
74	Jumlah seni dan budaya daerah yang dilestarikan	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
75	Indeks Minat Baca Masyarakat	69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
76	Persentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	22,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

77	Persentase peningkatan produksi budidaya air payau	0,4	Dinas Perikanan
78	Persentase peningkatan produksi budidaya air tawar	4	Dinas Perikanan
79	Rata - rata lama tinggal wisatawan	1	Dinas Porapar
80	Jumlah kunjungan wisatawan	1.867.290	Dinas Porapar
81	Produksi pertanian, perkebunan dan peternakan: a. Padi b. Tebu c. Daging	2.059.312 2.946.094 24.129.466	Dinas Pangan dan Pertanian
82	Nilai ekspor non migas	1.775.000,00	Dinas Perindag
83	Persentase pertumbuhan usaha industri	0,71	Dinas Perindag
84	Persentase transmigran yang berhasil (bekerja sendiri/membuka lapangan usaha atau ke orang lain)	55%	Dinas Tenaga Kerja
85	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan ekternal yang ditindaklanjuti	99,25	Inspektorat
86	Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) ≥ 76%	87	Bappeda
87	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	50	Bappeda
88	Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	100	BPKAD
89	Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	99,738	BPKAD
90	Persentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	7,05	BPPD
91	Persentase Realisasi Piutang	75,01	BPPD
92	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	68	BKD
93	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	15	BKD
94	Persentase dokumen Penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	70	Bappeda
95	Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	100	Sekretariat Daerah
96	Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pembangunan b. Bidang Perekonomian c. Bidang Kesra d. Bidang PBJ e. Bidang Organisasi f. Bidang Pemerintahan	100	Sekretariat Daerah

97	Persentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda	70	Sekretariat DPRD
98	Indeks Toleransi	75,17	Bakesbangpol
99	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN (18 Kecamatan)	82,95	18 Kecamatan

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, juga dipaparkan 10 (sepuluh) Program Prioritas Bupati yang antara lain, sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar 9 Tahun gratis dan berkualitas
2. Percepatan pembangunan infrastruktur, seperti gedung pemerintahan satu atap, frontage road, penanganan banjir, dan lain sebagainya
3. Pembangunan RSUD wilayah barat
4. Pembangunan Eco Industry
5. Penguatan kemandirian desa
6. Sidoarjo “Smart City”
7. Pengelolaan lingkungan yang sehat dan terintegratif
8. Modernisasi pasar tradisional
9. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
10. Beasiswa pelajar berprestasi dan pasca sarjana bagi pendidik

Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan daerah, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan pada tema pembangunan dan prioritas pembangunan di tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.6

Tema dan Program Prioritas Tematik Pembangunan Tahun 2019

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
Tema Pembangunan Tahun 2019 :	
"Pemantapan Infrastruktur Penunjang Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"	
Prioritas Pembangunan Tahun 2019 :	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	1. Program pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 2. Program peningkatan mutu dan relevansi layanan pendidikan 3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 4. Program pendidikan sekolah dasar 5. Program pendidikan sekolah menengah pertama 6. Program perluasan dan aksesibilitas Pendidikan 7. Program Penyediaan Dana BOSREG 8. Program pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca 9. Program pelayanan kesehatan masyarakat 10. Program pengembangan sumber daya kesehatan 11. Program upaya kesehatan masyarakat 12. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM 13. Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat 14. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal 15. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 16. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam

	17. Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan 18. Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 19. Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan 20. Program Peningkatan Ketahanan pangan daerah 21. Program Pengembangan Objek, promosi, dan usaha pariwisata 22. Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 23. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 24. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 25. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 26. Program peningkatan keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 27. Program Penetapan Pajak Daerah 28. Program Pengendalian Pajak Daerah 29. Program pengelolaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 30. Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31. Program peningkatan pelayanan pada badan layanan umum daerah 32. Program Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Teknologi Informatika 33. Program Peningkatan Kualitas Layanan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 34. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan 35. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir 36. Program pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman 37. Program penataan bangunan

	38. Program peningkatan pelayanan angkutan 39. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 40. Program Pemberdayan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya 41. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 42. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 43. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 44. Program peningkatan kesempatan kerja dan penyelenggaraan transmigrasi 45. Program pengembangan dan perlindungan ketenagakerjaan 46. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 47. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 48. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 49. Program Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar Lembaga 50. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 51. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan 52. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 53. Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 54. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 55. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 56. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN 57. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

	58. Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

BAB III
KEBIJAKAN UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan keuangan daerah erat sekali kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan, untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang tinggi daerah terhadap pemerintah pusat, akan menyebabkan kemandirian daerah semakin rendah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, efisiensi alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Arah kebijakan keuangan daerah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi pengembangan PAD secara optimal, sementara di sisi belanja dilakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, baik pada komponen belanja tidak langsung maupun komponen belanja langsung.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang mumpuni akan sangat menentukan kelangsungan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Sedangkan Pengelolaan

Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi program-program yang dicanangkan. Pengelolaan ini menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah (pos pendapatan), pengeluaran belanja (pos belanja) dan sumber-sumber pembiayaan (pos biaya). Jika suatu daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan dan meminimalkan sumber pembiayaan, maka daerah tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber–sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Semua komponen penghasil PAD harus benar-benar diperhatikan dan dijalankan dengan strategi yang matang dan pelaksanaan kebijakan pendapatan dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada khususnya komponen Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD, dikarenakan pertumbuhan komponen Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan untuk dana perimbangan, yang terdiri dari 2 kelompok akun besar yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus juga merupakan 2 faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya walau pertumbuhannya sangat kecil sekali dan di prediksi turun terus.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, maka kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Terkait dengan pos pendapatan daerah, dalam lima tahun ke depan perlu diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah, antara lain menyangkut permasalahan: aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga perbankan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita agar kinerja perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target dan skenario yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sidoarjo, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa :

1) Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
2) Mendorong pembangunan di sembilan program unggulan daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial guna mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak.
3) Memberikan layanan masyarakat secara profesional untuk mencapai pelayanan prima.
4) Menfasilitasi pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6) Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai dasar negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7) Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram, dan tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif.
8) Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun, dan menjunjung tinggi nilainilai dan etika bermasyarakat.
9) Penegakan supremasi hukum di segala bidang.

Peningkatan PAD juga dapat dilaksanakan dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai melalui perbaikan administrasi aset, peningkatan turnover, bekerjasama dengan swasta, dan perlu didukung rencana untuk membentuk badan usaha baru. Optimalisasi aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan melalui sensus aset dan dilakukan up date setiap tahun, sedangkan untuk pengelolaan rutinnya telah dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan perundangan terkait aset. Hasil sensus aset dapat diketahui dari aset yang belum optimal pemanfaatannya sehingga diperlukan kebijakan untuk mendayagunakan aset secara lebih optimal.

Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Penghitungan DAU didasarkan pada celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi (IKK), indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks PDRB. Sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas penerimaan asli daerah (PAD) ditambah dana bagi hasil pajak dan SDA yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah.

Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas

perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreativitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Sebagai upaya untuk melakukan optimalisasi sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan asli daerah, dapat berdampak yang tanpa disadari akan melupakan substansi dari nilai-nilai pelayanan. Hal tersebut terjadi apabila Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, padahal di sisi yang lain efek pelayanan tersebut akan memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga PD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif.

Eskalasi kebutuhan belanja daerah, baik pada sisi Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL) secara umum belum ditopang sepenuhnya dari sisi pendapatan daerah. Hal ini disebabkan karena sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia masih relatif kecil. Hal ini yang sering menjadi constrain dalam pembangunan daerah.

Situasi ini tentu harus disikapi secara bijak melalui penguatan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber - sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Merujuk ke pengalaman pemerintah daerah di negara maju, setidaknya terdapat dua pola pembiayaan pembangunan yang bisa dilakukan pemerintah daerah. Dua hal tersebut adalah :

1) Public Private Partnership (PPP)
2) Municipal Bonds

Orientasi utama kerjasama pembangunan infrastruktur adalah untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan berbagai peluang dan potensi yang dimiliki. Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang dan potensi yang besar untuk mengembangakan pola kerjasama ini, mengingat memiliki wilayah dengan jumlah perusahaan/industri yang cukup besar. Beberapa program kerjasama yang akan diprioritaskan kedepan adalah sebagai berikut :

1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur sepanjang 32 km.
2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pelebaran Jalan Lingkar Timur dengan skema Availability Payment sepanjang 8 km.
3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Rumah Sakit di wilayah Barat dengan skema Availability Payment.
4) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (Long Storage) PDAM Delta Tirta.
5) BOT Revitalisasi Pasar Kepuhkiriman I
6) BOT Revitalisasi Pasar Taman
7) BOT Revitalisasi Pasar Tulangan
8) BOT Revitalisasi Pasar Kepuhkiriman II
9) BOT Revitalisasi Pasar Larangan

Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas dikerjasamakan dengan pihak swasta karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta.
2. Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur

4. Mendorong prinsip pakai-bayar oleh pengguna, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha melalui pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

2. Target Dan Realisasi Pendapatan.

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.708.311.077.856,00	1.689.953.213.262,69	98,93
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.807.667.515.000,00	1.779.140.856.326,00	98,42
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	878.927.886.040,00	975.532.277.036,00	110,99
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.394.906.478.896,00**	**4.444.626.346.624,69**	**101,13**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.444.626.346.624,69 atau 101,13% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.394.906.478.896,00.

Grafik III.1

Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo

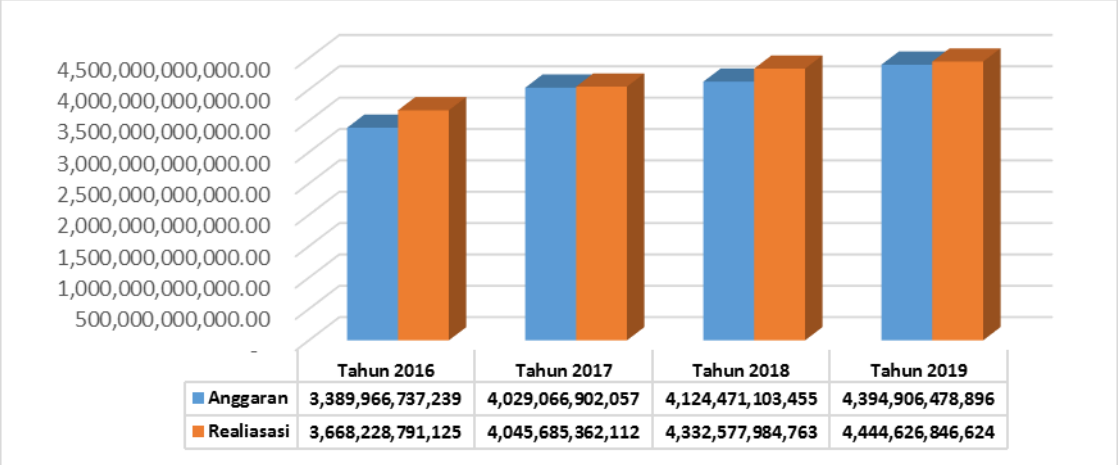

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp.1.689.953.213.262,69 atau tercapai sebesar 98,93% dari seluruh target PAD sebesar Rp.1.708.311.077.856,00.

Rincian realisasi dan target PAD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah	1.009.946.880.000,00	1.032.160.117.012,09	102,20
1.1.2.	Retribusi Daerah	65.940.720.750,00	72.709.215.824,40	110,26
1.1.3.	Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	35.080.939.322,50	37.034.170.234,50	105,57
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	597.342.537.783,50	548.049.710.191,70	91,75
	JUMLAH	**1.708.311.077.856,00**	**1.689.953.213.262,69**	**98,93**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

b. Pajak Daerah

Pajak daerah tahun 2019 realisasinya tercapai sebesar Rp.1.032.160.117.012,09 atau 102,20% dari seluruh target penerimaan pajak daerah.

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pajak Daerah	**1.009.946.880.000,00**	**1.032.160.117.012,09**	102,20
Pajak Hotel	16.500.000.000,00	19.160.663.229,22	116,13
Pajak Restoran	84.500.000.000,00	89.374.707.617,70	105,77
Pajak Hiburan	8.000.000.000,00	8.744.464.694,49	109,31
Pajak Reklame	13.500.000.000,00	13.802.744.150,00	102,24
Pajak Penerangan Jalan	329.000.000.000,00	305.381.298.528,68	92,82

Pajak Parkir	23.500.000.000,00	22.088.671.963,00	93,99
Pajak Air Tanah	1.946.880.000,00	2.142.995.182,00	110,07
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	227.000.000.000,00	237.461.681.071,00	104,61
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	306.000.000.000,00	334.002.890.576,00	109,15

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.72.709.215.824,40 atau tercapai 110,26% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan. Seluruh jenis retribusi realisasinya terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Daerah	**65.940.720.750,00**	**72.709.215.824,40**	**110,26**
Retribusi Jasa Umum	24.075.667.500,00	26.813.435.336,00	111,37
Retribusi Jasa Usaha	7.792.944.500,00	17.496.374.780,00	224,52
Retribusi Perizinan Tertentu	34.072.108.750,00	28.399.405.708,40	83,35

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

d. Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.35.080.939.322,50 dan terealisasi sebesar Rp.37.034.170.234,50 atau tercapai sebesar 105,57%.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD			
Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta"	12.000.000.000,00	13.953.230.912,00	116,28
PD Aneka Usaha "Delta Grafika"	341.332.790,00	341.332.790,00	100,00
BPR "Delta Artha"	5.856.798.214,00	5.856.798.214,00	100,00
Bank Jatim	16.882.808.318,50	16.882.808.318,50	100,00
JUMLAH	**35.080.939.322,50**	**37.034.170.234,50**	**105,57**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

e. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain – lain PAD tahun 2019 sebesar Rp.548.049.710.191,70 atau tercapai 91,75%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.597.342.537.783,50.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan	223.625.000,00	455.583.783,00	203,73
Penerimaan Jasa Giro	6.632.843.598,00	7.121.262.200,77	107,36
Pendapatan Bunga Deposito	57.381.643.868,00	61.348.653.592,86	106,91
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	38.029.600,00	55.323.600,00	145,48
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	323.088.414,76	1.449.534.620,31	448,65
Pendapatan Denda Pajak	2.828.637.629,00	6.709.014.276,00	237,18
Pendapatan Denda Retribusi	168.957.106,00	359.919.461,00	213,02
Pendapatan Dari Pengembalian	5.940.700.296,74	7.088.268.505,74	119,32
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	470.000.000,00	366.372.641,00	77,95
Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)	22.868.034.500,00	23.145.479.829,00	101,21
Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama	728.000.000,00	1.010.419.317,00	138,79
Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	499.392.674.290,00	438.373.961.360,16	87,78
Pendapatan Dari Penjualan Hasil Pasar Murah	203.580.000,00	203.580.000,00	100,00
Pendapatan dari Penerimaan Lain-lain	142.723.481,00	362.337.004,86	254,22
JUMLAH	**597.342.537.783,50**	**548.049.710.191,70**	**91,75**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

f. Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.1.779.140.856.326,00 atau 98,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.807.667.515.000,00. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan adalah sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Dana Perimbangan			
Bagi Hasil Pajak	108.133.662.000,00	106.152.634.261,00	98,17
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber	66.563.666.000,00	78.935.493.725,00	118,59

Daya Alam			
Dana Alokasi Umum	1.265.567.253.000,00	1.265.114.331.000,00	99,96
Dana Alokasi Khusus	39.893.499.000,00	30.495.476.083,00	76,44
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	327.509.435.000,00	298.442.921.257,00	91,12
JUMLAH	**1.807.667.515.000,00**	**1.779.140.856.326,00**	**98,42**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

g. **Lain – Lain Pendapatan Yang Sah**

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**878.927.886.040,00**	**975.532.277.036,00**	110,99
Pendapatan Hibah	**153.009.000.000,00**	**148.319.960.000,00**	96,94
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur	**153.009.000.000,00**	**148.319.960.000,00**	96,94
Pendapatan Hibah BOS Satuan Pendidikan Negeri	153.009.000.000,00	148.319.960.000,00	96,94
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	**353.192.994.540,00**	**489.288.344.479,00**	138,53
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	***353.192.994.540,00***	***487.070.050.849,00***	137,90
Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	110.342.519.737,00	171.903.068.609,00	155,79
Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	83.902.789.474,00	117.807.528.712,00	140,41
Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	107.177.654.166,00	140.631.554.571,00	131,21
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	948.026.316,00	1.237.175.236,00	130,50
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	50.822.004.847,00	55.490.723.721,00	109,19
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota	***0,00***	***2.218.293.630,00***	#DIV/0!
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya	0,00	2.218.293.630,00	#DIV/0!
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	**359.343.126.000,00**	**324.541.207.057,00**	90,32
Dana Penyesuaian	***359.343.126.000,00***	***324.541.207.057,00***	90,32
Dana Insentif Daerah	63.444.058.000,00	31.722.029.000,00	50,00
Dana Desa	295.899.068.000,00	292.819.178.057,00	98,96
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	**13.382.765.500,00**	**13.382.765.500,00**	100,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	***13.382.765.500,00***	***13.382.765.500,00***	100,00
Penunjang Biaya Operasional Program TMMD	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00

Bantuan Keuangan Pendidikan	9.410.000.000,00	9.410.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Kesehatan	3.697.765.500,00	3.697.765.500,00	100,00
Bantuan Keuangan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Jalin Matra	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

3. Pemasalahan dan Solusi

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yaiitu melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, sebagai berikut :

A. Intensifikasi pada tahun 2019

1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak (hotel, hiburan, parkir, restoran) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melaporkan pajak sesuai dengan omset yang sebenarnya
2. Pemutakhiran Pajak Bumi dan Bangunan secara massal dan bertahap, hal ini diharapkan pada akhir masa RPJMD/Renstra sekurang kurangnya sebanyak 7 kecamatan Taman, Waru, Gedangan, Tarik, Sedati dan Balongbendo dari jumlah kecamatan seluruhnya sebanyak 18 kecamatan.
3. Pemasangan alat perekam transaksi (E-Tax) kepada wajib pajak bekerjasama dengan Bank Jatim, sampai dengan tahun 2019 sebanyak 44 obyek pajak sudah terpasang alat perekam
4. Pemeriksaan Wajib Pajak dengan kerjasama dengan pihak/Instansi terkait;
5. Pemutakhiran data (survey harga pasar properti baru) dan melaksanakan Penilaian Individu atas Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan

B. Ekstensifikasi pada tahun 2019

1. Melaksanakan Pendataan Objek Pajak Baru bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam perijinan
2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada calon wajib pajak

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daeraah

Kebijakan belanja daerah pada periode 5 (lima) tahun (2016-2021) akan melanjutkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga trend kedepan komposisinya untuk pelayanan publik semakin bertambah besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifat cost recovery dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah.

Perhitungan secara teoris dengan asumsi dasar yang kuat tentang kedua kebijakan diatas yang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja daerah akan sangat strategis di dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021. Guna mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan, sebagai antisipasi kemungkinan menurunnya bantuan dana yang diterima dari pemerintah pusat, perlu diusahakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan tetap mengusahakan semaksimal mungkin berbagai kebijakan yang akan dilakukan tidak membebani masyarakat.

Belanja tidak langsung adalah komponen belanja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya meliputi gaji pegawai dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

1) Belanja Gaji
   a) Penganggaran Gaji dan tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;

b) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
c) Hibah, Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah;
d) Bantuan Sosial, Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya;
e) Bagi hasil, Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa;
f) Bantuan Keuangan, Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan;
g) Belanja tidak terduga, Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo. Khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun sarana dan

prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Sidoarjo.

Pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomis, rasional, transparansi dan akuntabilitas. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2016-2021 diprioritaskan untuk mendanai program-program berdasarkan prioritasnya. Program prioritas sebagaimana dimaksud adalah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Kebijakan alokasi anggaran Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 secara umum mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

2. Target Dan Realisasi Belanja

Target belanja daerah untuk tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.5.423.124.488.516,28, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.4.344.722.393.986,67 atau tercapai sebesar 80,11%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.391.171.337.231,27	2.105.446.327.097,40	88,05
2.2.	BELANJA LANGSUNG	3.031.953.151.285,01	2.239.276.066.889,27	73,86
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**5.423.124.488.516,28**	**4.344.722.393.986,67**	***80,11***

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

Grafik III.2

Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo

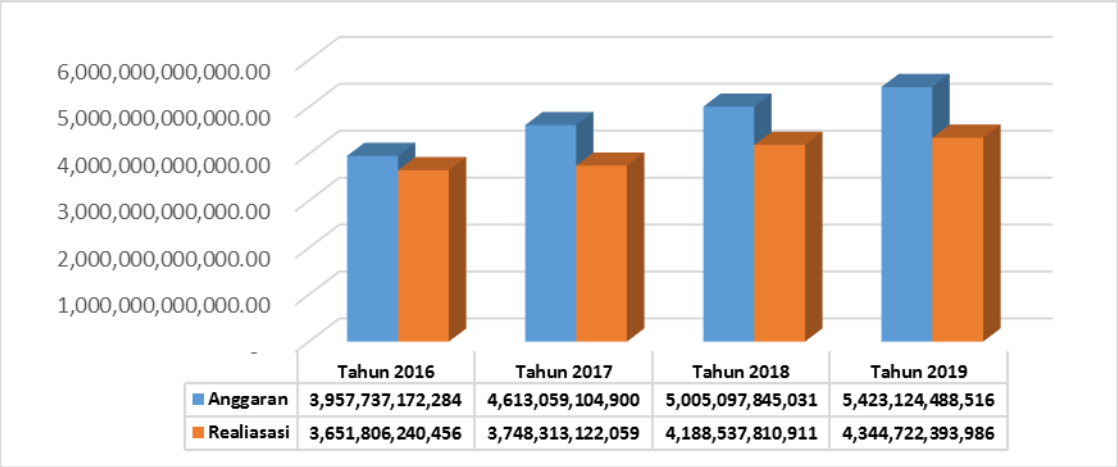

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.2.105.446.327.097,40 atau 88,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.391.171.337.231,27.

Rincian realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**			
2.1.1	Belanja Pegawai	1.490.510.538.315,44	1.309.546.679.104,40	87,86
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah	211.249.617.000,00	175.282.849.800,00	82,97
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	82.385.083.100,35	68.719.995.000,00	83,41
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	115.582.620.588,30	115.268.598.214,00	99,73
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	447.815.126.494,18	436.554.980.979,00	97,49
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	43.628.351.733,00	73.224.000,00	0,17
	JUMLAH	**2.391.171.337.231,27**	**2.105.446.327.097,40**	**88,05**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.2.624.486.819.956,30 atau 73,86% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.031.953.151.285,01.

Rincian realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.2.	BELANJA LANGSUNG			
2.2.1.	Belanja Pegawai	261.870.839.986,80	208.502.539.912,44	*78,18*
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.464.886.041.614,54	1.230.594.387.495,27	*84,01*
2.2.3.	Belanja Modal	1.305.196.269.683,67	803.961.924.262,56	*61,60*
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		**3.031.953.151.285,01**	**2.624.486.819.956,30**	**73,86**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

3. Target Dan Realisasi Belanja Menurut Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan kebijakan umum belanja dan dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan tahun 2019, rincian realisasi Total Belanja Tidak Langsung sebagaimana dalam tabel 3.1, sedangkan realisasi Total

Belanja Langsung sebagaimana dalam tabel 3.2 menurut organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

No.	OPD	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Sekretariat Daerah	24.801.950.364,00	23.230.358.781,00	93,66
2	Sekretariat DRPD	7.141.280.773,00	6.531.574.211,00	91,46
3	Inspektorat	9.858.631.438,00	9.586.834.371,00	97,24
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	848.629.771.865,72	746.586.012.715,00	87,98
5	Dinas Kesehatan	150.116.936.228,40	128.898.766.017,00	85,87
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	16.879.340.991,75	15.118.484.297,40	89,57
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	7.598.874.893,25	6.562.299.760,00	86,36
8	Satuan Polisi Pamong Praja	12.039.566.809,00	11.254.781.801,00	93,48
9	Dinas Sosial	4.735.610.306,00	4.163.618.374,00	87,92
10	Dinas Tenaga Kerja	5.540.760.925,00	5.076.068.716,00	91,61
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.326.216.657,80	4.188.023.414,00	78,63
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.251.034.228,00	5.562.583.217,00	88,99
13	Dinas Pangan dan Pertanian	22.238.722.169,00	17.972.924.062,00	80,82
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	28.226.406.599,00	25.662.328.301,00	90,92
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.746.349.984,00	6.257.179.880,00	92,75
16	Dinas Perhubungan	11.279.172.824,00	10.204.186.091,00	90,47
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.873.788.437,00	6.378.272.064,00	92,79
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.859.541.554,00	4.367.168.753,00	89,87
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.201.499.804,00	7.290.962.133,00	88,90
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.529.541.847,00	6.872.009.213,00	91,27
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.696.735.600,00	4.371.520.227,00	93,08
22	Dinas Perikanan	5.189.263.473,00	4.745.086.206,00	91,44
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.571.040.801,00	18.997.218.178,00	92,35
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.114.249.324,00	6.557.246.541,00	92,17
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.056.314.358,00	8.447.078.947,00	93,27
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	47.182.802.580,00	25.001.572.289,00	52,99
27	Badan Kepegawaian Daerah	25.390.990.742,42	24.962.168.230,00	98,31
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.857.809.796,00	4.514.151.180,00	92,93

29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.678.517.788,00	8.187.060.627,00	94,34
30	Rumah Sakit Umum Daerah	48.680.850.000,00	47.037.502.870,00	96,62
31	Kecamatan Sidoarjo	15.969.134.350,00	14.053.404.112,00	88,00
32	Kecamatan Candi	3.941.539.070,00	3.636.206.127,00	92,25
33	Kecamatan Buduran	3.542.213.288,00	3.215.058.539,00	90,76
34	Kecamatan Gedangan	3.544.725.547,00	3.220.422.996,00	90,85
35	Kecamatan Sedati	3.409.474.386,10	3.029.529.240,00	88,86
36	Kecamatan Waru	3.397.480.818,00	3.043.786.271,00	89,59
37	Kecamatan Taman	8.527.356.582,00	7.792.381.002,00	91,38
38	Kecamatan Krian	5.074.597.332,00	4.447.825.561,00	87,65
39	Kecamatan Wonoayu	3.772.882.806,00	3.468.975.627,00	91,94
40	Kecamatan Sukodono	3.677.233.683,00	3.351.892.948,00	91,15
41	Kecamatan Balongbendo	3.296.552.432,00	3.111.451.829,00	94,39
42	Kecamatan Tarik	3.480.321.793,00	3.225.237.770,00	92,67
43	Kecamatan Tulangan	4.332.823.201,00	3.963.859.793,00	91,48
44	Kecamatan Prambon	3.606.455.379,00	3.321.306.965,00	92,09
45	Kecamatan Krembung	3.678.520.209,00	3.470.951.684,00	94,36
46	Kecamatan Tanggulangin	3.550.970.968,00	3.283.057.040,00	92,46
47	Kecamatan Jabon	2.612.888.506,00	2.434.318.906,00	93,17
48	Kecamatan Porong	5.213.774.972,00	4.567.326.113,00	87,60
49	KDH (KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH)	2.745.219.833,00	2.570.986.800,00	93,65
50	DPRD	26.842.800.000,00	25.753.658.315,00	95,94
51	PPKD (SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	900.660.798.915,83	795.899.647.993,00	88,37
	J u m l a h	**2.391.171.337.231,27**	**2.105.446.327.097,40**	88,05

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

Tabel III.2

Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019

No.	OPD	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Sekretariat Daerah	52.803.743.099,50	44.443.526.333,94	84,17
2	Sekretariat DRPD	73.612.011.013,52	48.971.150.591,40	66,53
3	Inspektorat	4.378.668.512,00	3.480.658.685,52	79,49
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	427.389.535.280,00	367.724.251.604,40	86,04
5	Dinas Kesehatan	260.712.289.705,99	203.944.907.429,00	78,23
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	642.624.248.757,00	356.683.926.697,72	55,50
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	417.607.119.065,07	252.499.248.262,00	60,46
8	Satuan Polisi Pamong Praja	15.380.245.545,00	13.966.769.551,36	90,81

9	Dinas Sosial	10.033.022.583,00	8.602.584.255,00	85,74
10	Dinas Tenaga Kerja	6.623.763.285,50	6.213.361.423,40	93,80
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	14.039.684.129,50	11.381.861.240,00	81,07
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.026.300.610,00	5.698.498.592,00	94,56
13	Dinas Pangan dan Pertanian	26.863.651.623,00	23.834.029.993,00	88,72
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	161.353.639.724,00	121.393.778.765,90	75,23
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.266.021.758,00	9.640.310.111,00	85,57
16	Dinas Perhubungan	62.603.076.576,36	45.543.812.897,87	72,75
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.593.802.619,61	25.719.842.328,00	93,21
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10.190.932.565,00	9.246.238.446,00	90,73
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.488.849.180,00	8.802.481.803,00	83,92
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.717.910.529,50	15.017.787.422,60	89,83
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.400.717.830,00	10.425.854.578,00	91,45
22	Dinas Perikanan	20.942.683.069,00	18.495.944.665,48	88,32
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38.130.790.831,00	34.566.961.398,01	90,65
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.841.446.305,00	14.303.970.379,00	84,93
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.144.691.281,04	10.720.890.634,00	81,56
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	14.260.661.045,00	12.160.698.473,20	85,27
27	Badan Kepegawaian Daerah	17.622.076.220,50	12.985.414.519,00	73,69
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.852.692.150,00	8.147.637.722,00	82,69
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.548.412.875,00	10.156.577.606,80	80,94
30	Rumah Sakit Umum Daerah	541.271.456.631,42	456.243.389.831,51	84,29
31	Kecamatan Sidoarjo	19.238.024.034,00	17.270.436.920,00	89,77
32	Kecamatan Candi	1914306027	1652175181	86,31
33	Kecamatan Buduran	2358371820	2165435046	91,82
34	Kecamatan Gedangan	2.148.962.862,50	2.042.331.164,00	95,04
35	Kecamatan Sedati	2.531.330.272,00	2.199.191.417,00	86,88
36	Kecamatan Waru	2.195.812.826,00	1.980.842.317,00	90,21
37	Kecamatan Taman	12452312266	11587249208	93,05
38	Kecamatan Krian	7.593.427.104,00	6.876.007.025,00	90,55

39	Kecamatan Wonoayu	2.154.751.084,00	1.898.181.509,00	88,09
40	Kecamatan Sukodono	2.872.629.788,00	2.635.951.724,00	91,76
41	Kecamatan Balongbendo	2.254.872.380,00	2.041.338.538,00	90,53
42	Kecamatan Tarik	2.173.621.284,00	1.879.990.955,72	86,49
43	Kecamatan Tulangan	1.797.818.140,00	1.452.105.006,00	80,77
44	Kecamatan Prambon	2.092.684.082,00	1.769.060.409,00	84,54
45	Kecamatan Krembung	1.928.101.860,00	1.555.089.590,00	80,65
46	Kecamatan Tanggulangin	2.399.701.782,00	2.221.349.112,20	92,57
47	Kecamatan Jabon	2.310.602.770,00	1.949.007.115,14	84,35
48	Kecamatan Porong	7.211.676.504,00	5.083.958.412,10	70,50
	J u m l a h	**3.031.953.151.285,01**	**2.239.276.066.889,27**	73,86

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Kurangnya pemahaman OPD terkait tujuan alokasi/pembagian anggaran kas tiap triwulan, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan tidak selaras dengan alokasi anggaran yang direncanakan;
2) Proses pengadaan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; yang mengalami gagal lelang sehingga tertunda penyerapannya;
3) Pembangunan frontage road yang masih terkendala pembebasan lahan.
4) Kegiatan Penyusunan Raperbup Penilaian Kinerja tidak dilaksanakan karena terbit PP Nomor 30 tahun 2019 dan Permenpan (Rancangan) sehingga tidak di perlukan pengaturan Perbup serta Pengembangan aplikasi Kinerja dilaksanakan oleh Diskominfo, mengakibatkan penyerapan Kegiatan Pengembangan Karis dan Kinerja ASN pada BKD kecil

5) Tahun 2019 kegiatan CPNS hanya sampai tahap seleksi administrasi sehingga Kegiatan Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi ASN pada BKD kecil
6) Penyerapan Inspektorat kurang dari 80% dikarenakan Beberapa paket pengadaan belanja modal ada yang dikonsolidasikan dan Pembatalan pindah kantor sehingga ada beberapa rekening belanja yang tidak diserap diantaranya adalah jasa angkut barang, belanja modal meja kerja, dan honorarium pejabat pengadaan
7) Penyerapan Kecamatan Porong kurang dari 80% dikarenakan Kelurahan Siring, Mindi, dan Jatirejo tidak dapat dilakukan penyerapan Dana DAU karena Kelurahan tersebut merupakan Kelurahan yang terdampak lumpur

Solusi :

1) Rekonsiliasi dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran yang dilaksanakan tiap triwulan;
2) Penerbitan surat edaran nomor 900/8627/438.6.2/2019 tanggal 10 September 2019 perihal percepatan penyerapan anggaran dan langkah – langkah penyerapan pada akhir tahun.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Total anggaran pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebesar Rp.1.028.218.009.620,28. Nilai sejumlah itu akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun berjalan sebesar Rp.(1.028.570.919.105,55).

Realisasi pembiayaan netto tahun 2019 sebesar Rp.1.028.571.419.105,55 atau 100,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.028.218.009.620,28 Realisasi pembiayaan netto tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.1.034.646.419.105,55 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.6.075.000.000,-.

Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Surplus/Defisit	**(1.028.218.009.620,28)**	**99.904.452.638,02**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**1.041.118.009.620,28**	**1.034.645.919.105,55**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.028.218.009.620,28	1.028.218.009.620,28
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	12.900.000.000,00	6.427.909.485,27
Pengeluaran Pembiayaan daerah	**12.900.000.000,00**	**6.075.000.000,00**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		
Dana Bergulir	12.900.000.000,00	6.075.000.000,00
Pembiayaan Netto	**1.028.218.009.620,28**	**1.028.570.919.105,55**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	**1.128.475.371.743,57**

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintahan Daerah. Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019, yaitu terdiri dari :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Urusan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Perhubungan

10. Urusan Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Penanaman Modal
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
14. Urusan Statistik
15. Urusan Persandian
16. Urusan Kebudayaan
17. Urusan Perpustakaan
18. Urusan Kearsipan

Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan secara umum sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterkaitan antara sasaran RPJMD
dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayan	Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayan
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Dasar

Untuk mendukung capaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, Program strategis pembangunan untuk urusan pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi:

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar
2. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
6. Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan
7. Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, dengan tujuan **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia"** dan sasaran yaitu "**Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat** ", dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan SKPD – Sasaran RPJMD

Urusan pendidikan yang tertuang dalam Renstra SKPD secara umum sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Tahun 2019 kinerja jangka menengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dicapai berdasarkan tujuan Renstra SKPD yang merupakan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2019	PERSENTASE
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata	Angka Harapan Lama Sekolah	14,55	14,75	101,37
	Rata - Rata Lama Sekolah	10,80	10,24	94,81

1. Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan kombinasi angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk rata-rata lama sekolah sampai dengan di tahun 2021 sebesar 14,55 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 10,24 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 94,81%. Dibandingkan pada tahun 2018 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 10,23 tahun.

Dengan realisasi angka 10,24 tahun tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah sudah mendekati Wajar Pendidikan Menengah 12 Tahun, pemenuhannya sebesar 1,76 tahun akan kita intervensi melalui program bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Grafik IV.A.1

Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk angka harapan lama sekolah sampai dengan di tahun 2021 sebesar 14,55 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 14,75 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 101,37%. Dibandingkan pada tahun 2018 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 14,34 tahun. Hal tersebut bisa dikategorikan ada kenaikan sebesar 0,41 tahun.

Dengan realisasi angka 14,75 tahun tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD sekarang di Kabupaten Sidoarjo punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan Diploma II (DII).

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 sebagai berikut :

Grafik IV.A.2

Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan angka harapan lama sekolah, antara lain:

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
- Memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.

b. Sasaran

Pada Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dicapai berdasarkan sasaran Renstra untuk mendukung Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Dasar

Dalam mendukung capaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah meningkatnya mutu dan akses Pendidikan Dasar, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN) SD/MI dan SMP/MTs

Pengukuran Rata-Rata Nilai Ujian Nasional merupakan hasil akhir penilaian peserta didik yang merupakan salah satu gambaran keberhasilan pendidikan yang dilakukan di setiap tingkatan pendidikan. Namun demikian nilai UN bukan merupakan ukuran yang mutlak keberhasilan pendidikan atau peningkatan kinerja pendidikan, melainkan masih banyak faktor yang mempengaruhi hasil penilaian ini.

Untuk setingkat SD/MI target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata UN tahun 2019 adalah sebesar 8,35 dengan realisasi sebesar 8,57 dengan angka ketercapaian 102,63%. Data tersebut diambil dari Laporan

Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI Berstandar Nasional Tahun Ajaran 2018/2019 Provinsi Jawa Timur.

Dengan realisasi nilai 8,57 tersebut diartikan bahwa layanan mutu pendidikan lebih meningkat sesuai dengan tujuan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Untuk setingkat SMP/MTs target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata UN tahun 2019 adalah sebesar 6,87 dengan realisasi sebesar 5,64 dengan angka ketercapaian 82,10%. Data tersebut diambil dari Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs Tahun Ajaran 2018/2019 Provinsi Jawa Timur.

Nilai capaian untuk Ujian Nasional SMP di Kabupaten Sidoarjo masih diatas rata-rata, baik Propinsi ataupun Nasional, yaitu rata- rata Propinsi 5;62 sedangkan untuk Nasional 5,28.

Nilai realisasi yang dicapai Kab. Sidoarjo untuk tingkat SMP sebesar 6,03, sedangkan lembaga Madrasah Tsanawiyah hanya sebesar 4,95 sehingga berpengaruh terhadap realisasi Nilai capaian Ujian Nasional dengan kategori SMP dan MTs. Salah satu indikator tidak tecapainya realisasi ini terletak pada lembaga Madrasah Tsanawiyah yang mengalami penurunan, sehingga berdampak pada hasil rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs. Yang pada intinya pengelolaan pengukuran mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah terdapat di wilayah Kementerian Agama, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara normatif tidak mempunyai alat ukur untuk meningkatkan mutu.

Perkembangan nilai ujian nasional untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik IV.A.3

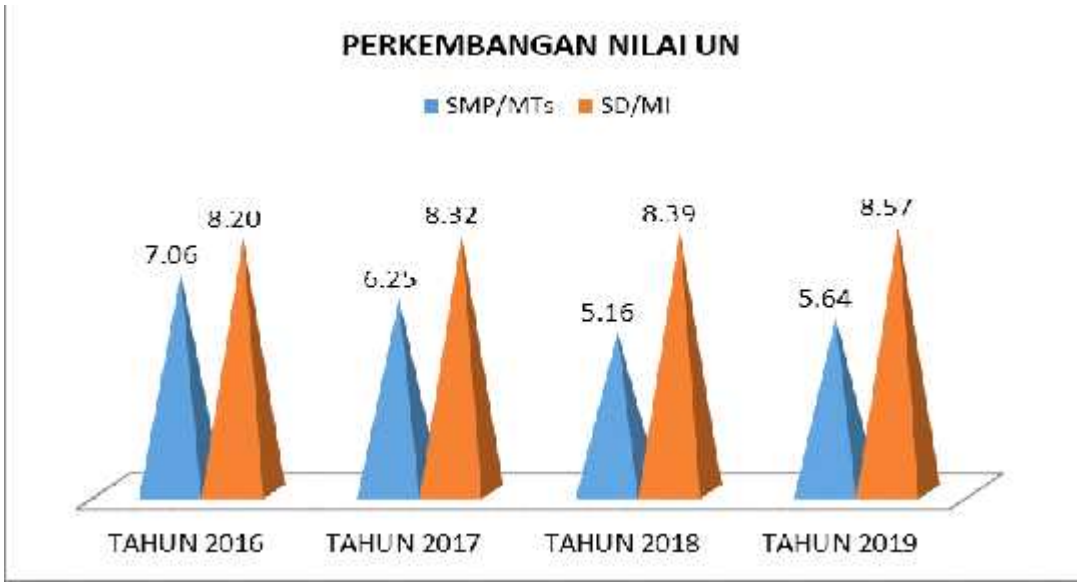

Sumber Data : Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan SMP/MTs Tahun Ajaran 2018/2019 Provinsi Jawa Timur

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan nilai ujian nasional, antara lain:

- Peningkatan sarana prasarana UNBK berupa komputer PC
- Meningkatkan pembinaan berupa simulasi UNBK
- Meningkatkan secara bersama layanan mutu pendidikan dengan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

2. Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi

Di tahun 2019, target yang ditetapkan untuk Persentase SD yang terakreditasi A sebesar 72,11% terrealisasi sebesar 73,56%, dengan angka ketercapaian 102,01%. Untuk SMP target yang ditetapkan sebesar 70,09% terrealisasi sebesar 64,91% dengan angka ketercapaian 92,61%.

Perkembangan satuan pendidikan yang terakreditasi A pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Grafik IV.A.4

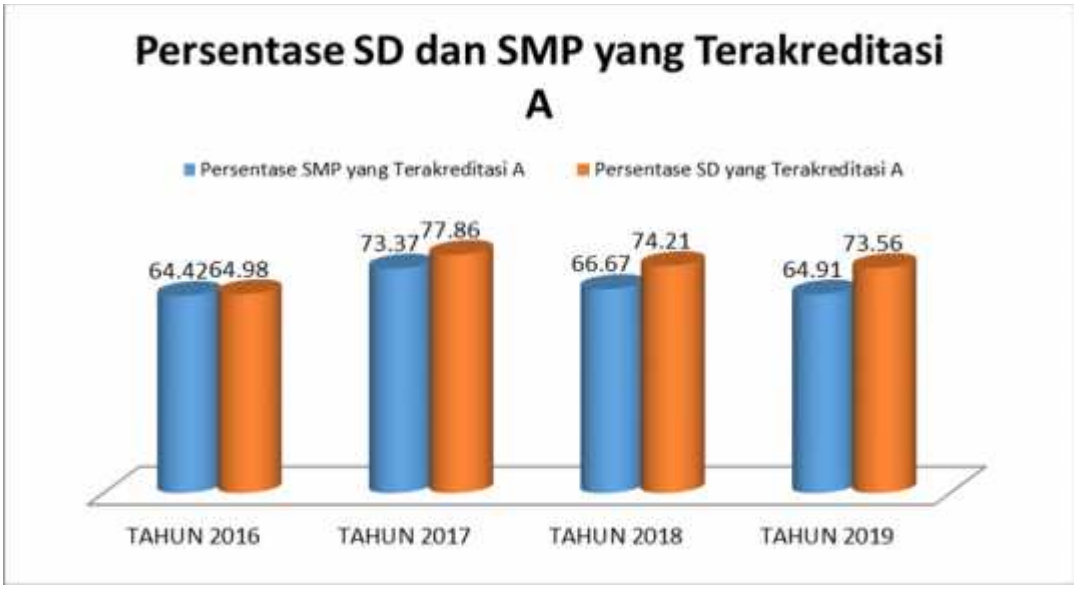

Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan persentase SD dan SMP yang terakreditasi A yaitu: Peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan berupa :

1. Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah/ruang kelas dan ruang penunjang lainnya.
2. Peningkatan standar proses/standar kelulusan berupa kegiatan-kegiatan penunjang evaluasi latihan Ujian Sekolah berupa Try Out.
3. Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan tambahan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dan memberikan bantuan kesejahteraan kepada lembaga swasta untuk guru swasta.

3. **Guru/pendidik yang telah bersertifikasi**

Persentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi adalah merupakan salah satu indikator kinerja sasaran untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Di tahun 2019 ini target yang ditetapkan sebesar 47,85% terrealisasi sebesar 55,85%, dengan angka ketercapaian 116,72%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan guru/tenaga pendidik yang bersertifikasi profesi mengalami peningkatan yang berdampak pada layanan mutu pendidikan yang berkualitas.

Perkembangan Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi pada tahun 2019 sebagai berikut :

Grafik IV.A.5

Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019

4. **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut.

Target yang ditetapkan untuk APK tahun 2019, PAUD sebesar 92,67%, SD/MI sebesar 108,26% dan SMP/MTs sebesar 99,21%.

Sedangkan realisasi APK yang dicapai pada tahun 2019 untuk PAUD sebesar 93,47%, SD/MI sebesar 108,98%, dan SMP/MTs sebesar 99,28%. Jika dibandingkan dengan Realisasi APK tahun 2018, maka terjadi kenaikan pada jenjang PAUD sebesar 0,67%, jenjang SD/MI mengalami kenaikan sebesar 1,01%, dan jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan sebesar 0,27%.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Grafik IV.A.6

Sumber Data: Dapodik dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan APK, antara lain:

1) Pemberlakuan Pendidikan Gratis bagi Sekolah Negeri untuk biaya investasi dan operasional dan untuk Sekolah swasta meringankan beban orang tua
2) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online
3) Pemberian bantuan kepada sekolah swasta berupa hibah partisipatif untuk penambahan ruang kelas baru.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partispasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

Target APM yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk SD/MI sebesar 96,98% dan SMP/MTs sebesar 79,4%. Sedangkan realisasi APM yang dicapai pada tahun 2019 untuk SD/MI sebesar 99,21% dan SMP/MTs sebesar 84,15%.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu :

1) Sistem PPDB pada penerimaan tingkat satuan pendidikan baik madrasah ataupun sekolah pada usia normatif terutama pada siswa kelas 1 (satu) sekolah swasta
2) Keberadaan siswa di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan menentukan angka partisipatif
3) Masih banyak siswa melanjutkan di luar Kabupaten Sidoarjo pada Pondok Pesantren

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Grafik IV.A.7

Sumber Data: Dapodik dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan APM, antara lain:

1) Kebijakan bersama tentang mekanisme penerimaan peserta didik baru antara Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
2) Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sekolah wilayah perbatasan sebagai sekolah rujukan
3) Mendorong sekolah formal untuk melakukan koordinasi dengan Kementrian Agama pada program Diniyah setingkat SD dan SMP dan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

c. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah alat atau sarana untuk mencapai Tujuan Sasaran yaitu sebagai berikut:

1. **Program Pendidikan Sekolah Dasar** dengan anggaran sebesar Rp.14.982.953.652,- dan terealisasi sebesar Rp.13.213.324.727,- atau 88,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INIDKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Rata - Rata Nilai UN SD/MI	8.30	8.39	101.08%	8.35	8.57	102.63
APM SD/MI	96.54%	98.35%	101.87%	96.98%	99.21%	102.30%
APK SD/MI	107.93%	107.97%	100.04%	108.26%	108.98%	100.67%
Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	1:28	1:20	140%	1:28	1:20	140%
Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SD	1:28	1:30	107.14%	1:28	1:29	103.57%
Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik.	94.25%	91.35%	96.92%	94.85%	98,40%	103.74%

2. **Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** dengan anggaran sebesar Rp.15.396.892.545,- dan terealisasi sebesar Rp.13.486.184.200,- atau 87,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Rata - Rata Nilai UN SMP/MTs	6.87	5.16	75.10%	6.87	5.64	82.10
APM SMP/MTs	78.99%	84.03%	106.38%	79.34%	84.15%	106.06%
APK SMP/MTs	98.97%	99.01%	100.04%	99.21%	99.28%	100.07%
Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP	1:32	1:20	62.50%	1:32	1:20	160%
Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP	1:32	1:30	93.75%	1:32	1:30	93.75%
Persentase bangunan ruang kelas SMP kategori baik.	95.39%	98.24%	102.99%	95.39%	99.69%	104.51%

3. **Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** dengan anggaran sebesar Rp.3.022.806.362,- dan terealisasi sebesar Rp.2.572.808.505,- atau 85,11%, Dengan indikator kinerja yaitu :

INIDKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
APK PAUD	92.50%	92.80%	100.32%	92.67%	93.47%	100.86%
Persentase PAUD yang	20%	2.82%	14.10%	30%	37,84%	126,13%

telah terakreditasi						
Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standart	20%	6.87%	34.35%	20%	29.10%	145.50%

4. **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** dengan anggaran sebesar Rp. 130.109.271.790,- dan terealisasi sebesar Rp. 102.954.493.532,- atau 79,13 %. Untuk capaian kegiatan penyelenggaraan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP sebesar 66,45% dikarenakan progress pencairan honor Pegawai Tidak Tetap dan Penjaga Sekolah SMP belum terbayarkan karena menunggu Surat Keputusan Bupati. Dengan indikator kinerja yaitu :

INIDKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4	96.79%	97.57%	100.80%	97.23%	97.61%	100.39%
Persentase guru/tenaga pendidik yang berkualifikasi ahli	47.75%	54.83%	114.83%	47.85%	55.85%	116.72%

5. **Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan** dengan anggaran sebesar Rp.1.944.963.300,- dan terealisasi sebesar Rp.1.505.947.200,- atau 77,43%, dikarenakan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendidikan sebesar 10,20% untuk anggaran tidak terrealisasi, tetapi penyusunan Raperbup sudah dilaksanakan.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INIDKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pengelolaan dan pelayanan pendidikan	92.00%	88.30%	95.98%	95%	84.95%	89.42%

6. **Program Perluasan dan Aksesbilitas Pendidikan** dengan anggaran sebesar Rp.94.041.565.605,- dan terealisasi sebesar Rp.83.053.889.452,- atau 88,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INIDKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96.54%	98.35%	101.87%	96.98%	99.21%	102.30%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78.99%	84.03%	106.38%	79.34%	84.15%	106.06%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	107.93%	107.97%	100.04%	108.26%	108.98%	100.67%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98.97%	99.01%	100.04%	99.21%	99.28%	100.07%

7. **Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)** dengan anggaran sebesar Rp.154.549.039.998,- dan terealisasi sebesar Rp.140.256.901.362,- atau 96,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INIDKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96.54%	98.35%	101.87%	96.98%	99.21%	102.30%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78.99%	84.03%	106.38%	79.34%	84.15%	106.06%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	107.93%	107.97%	100.04%	108.26%	108.98%	100.67%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98.97%	99.01%	100.04%	99.21%	99.28%	100.07%

Urusan Kesehatan

Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi dapat tercapai.

Dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 disebutkan bahwa sasaran RPJMD adalah “Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan” untuk Urusan Kesehatan disebutkan bahwa tujuan dari Rencana Strategi Dinas Kesehatan adalah “Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat” dengan indikator kinerja tercapainya Angka Harapan Hidup (AHH). Sedangkan sasaran renstra adalah “meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterkaitan antara sasaran RPJMD
dengan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra Dinkes	Sasaran Renstra Dinkes
Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan hidup

penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 73,67. Levelnya terus naik menjadi 73,71 di tahun 2017; 73,82 di tahun 2018; dan 73,98 di tahun 2019

Grafik IV.A.8

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur

Tahun 2016 - 2019

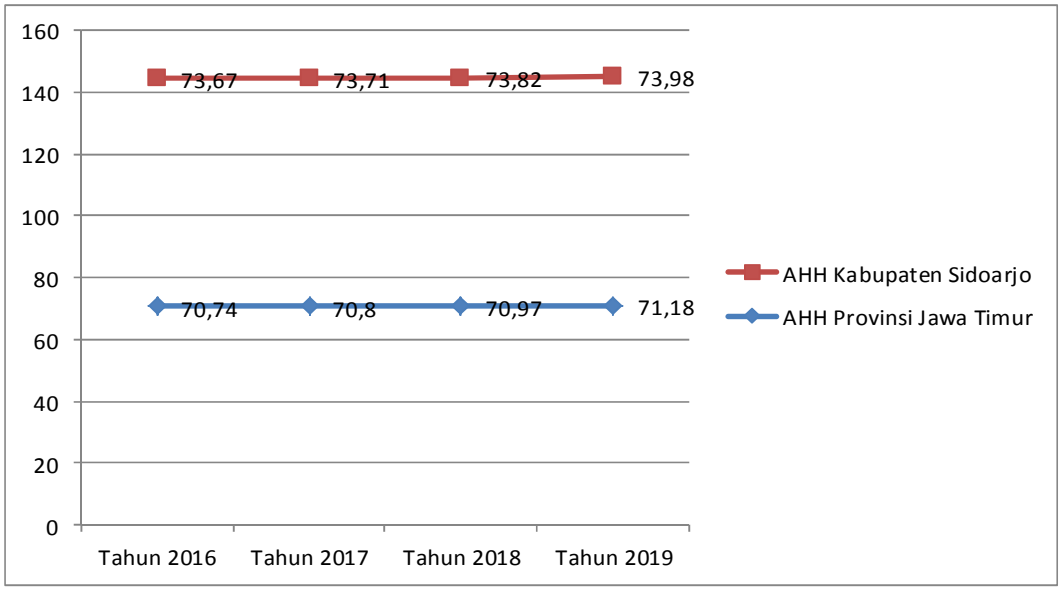

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada grafik diatas digambarkan bahwa dibanding dengan angka Propinsi Jawa Timur, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo lebih baik. Hal ini seiring dengan semakin baiknya kecukupan gizi dan budaya ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakatnya.

Untuk mendukung tercapainya Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indikator kinerja tujuan, ditetapkan 2 indikator kinerja utama, yaitu :

I. Persentase Keluarga Sehat (KS); dan
II. Rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas.

I. KELUARGA SEHAT

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan RI untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta sadar akan pentingnya kesehatan.

Dikatakan keluarga Sehat jika telah memenuhi Indeks Keluarga Sehat (IKS) ≥ 0,80 dari jumlah keluarga yang ada, dengan indikator :

1. Keluarga mengikuti program KB (keluarga berencana)
2. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (*Ante Natal Care/ ANC*) sesuai standar
3. Bayi mendapatkan Imunisasi lengkap
4. Pemberian ASI eksklusif bayi 0 sd 6 bulan
5. Pemantuan pertumbuhan balita
6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar
7. Penderita hipertensi yang berobat teratur
8. Penderita gangguan jiwa berat yang diobati
9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10. Sekeluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Mempunyai sarana air bersih
12. Menggunakan jamban keluarga

Sampai dengan tahun 2019, capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) secara nasional sebesar 0,14. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan (≥ 0,80). Sedangkan capaian IKS Propinsi Jawa Timur sebesar 0,16. Kabupaten Sidoarjo sendiri, meskipun sama-sama belum mencapai target, namun capaian IKS jauh lebih baik dari capaian nasional dan propinsi, yaitu sebesar 0,22.

Selengkapnya untuk melihat capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Persentase Keluarga Sehat Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2017 – 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
	TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL
Persentase Keluarga Sehat	-	0,06	0,16	0,17	0,21	0,22

Sumber : Seksi Yanmer Dinkes Kab. Sidoarjo

Pada dasarnya tidak dijumpai pemasalah yang signifikan atas capaian target yang telah ditetapkan, namun demikian permasalahan yang ada dan tidak cukup signifikan, antara lain:

1. Aplikasi PIS PK, yang merupakan alat bantu dalam salah satu pencapaian keluarga sehat, sering *trouble,* sehingga proses entri data terhambat.
2. Terdapat perbedaan Definisi Operasional (DO) dari indikator PIS PK, menyebabkan terjadinya salah persepsi dalam hal entri data dalam aplikasi PIS PK, yang mempengaruhi hasil capaian indeks.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indeks keluarga sehat adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan seluruh tenaga puskesmas agar melakukan pendataan sekaligus intervensi kepada keluarga yang dikunjunginya.
2. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang menjadi jejaring puskesmas untuk ikut melakukan pendataan dan intervensi kepada masyarakat.
3. Melakukan intervensi kepada keluarga sehingga keluarga pra sehat dapat meningkat menjadi keluarga sehat.

Untuk mencapai indikator kinerja utama (persentase keluarga sehat), perlu dukungan dari indikator program, yaitu :

PROGRAM	INDIKATOR	
1. Upaya Kesehatan Masyarakat	1.1	AKI
	1.2	AKB
	1.3	Persentase Balita Stunting
	1.4	Persentase usia lanjut yang sehat
	1.5	Persentase desa siaga aktif Purnama Mandiri
2. Pencegahan & Pengendalian Penyakit	2.1	Persentase Desa/Kel UCI
	2.2	Persentase penduduk ≥ 15 Th dengan Hipertensi
	2.3	Persentase orang terinfeksi HIV positif mendptkan ARV
	2.4	Angka keberhasilan pengobatan TB

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dapat dicapai dengan 5 indikator pendukung, yaitu :

1.1 Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas, kecuali kasus kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) di kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, tahun 2019 AKI Kabupaten Sidoarjo sebesar 52,11 per 100.000 kelahiran hidup atau 19 jiwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, lebih rendah

dibanding tahun 2018 (64,13 per 100.000 kelahiran hidup), tahun 2017 (82,62 per 100.000 kelahiran hidup), dan tahun 2016 (66,34 per 100.000 kelahiran hidup). Jika dibanding target yang dipasang di tahun 2019 yaitu 71,4 per 100.000 kelahiran hidup, dibanding target Provinsi Jawa Timur (90,92 per 100.000 kelahiran hidup) dan target nasional (305 per 100.000 kelahiran hidup), angka kematian ibu Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 cenderung baik. Ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Sidoarjo cukup berhasil dalam penanganan AKI, melalui program-program yang telah dilaksanakan dalam upaya penurunan AKI berhasil guna.

Perkembangan angka kematian ibu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik IV.A.9

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 – 2019

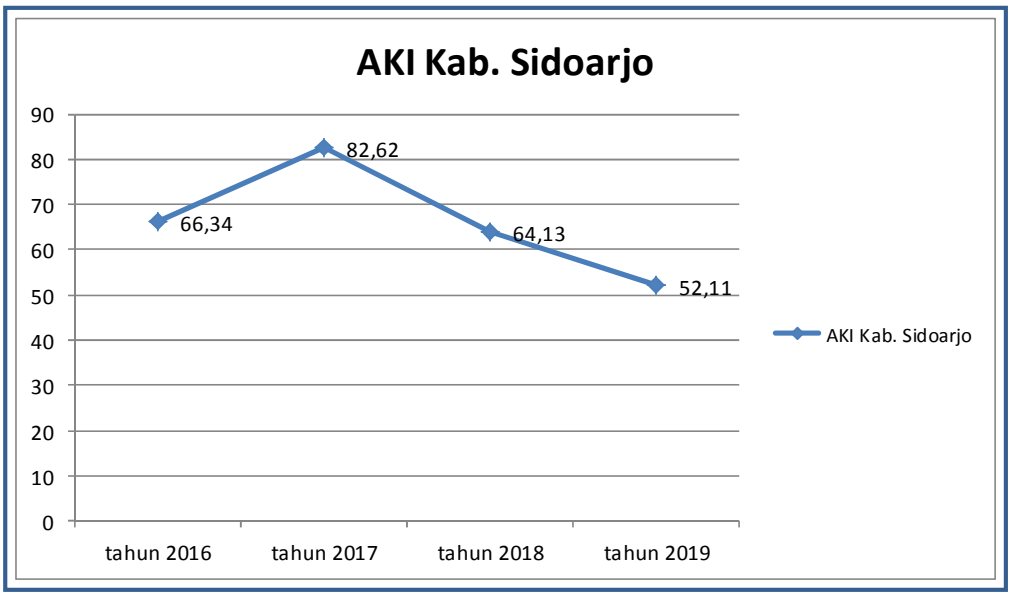

Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Sidoarjo

Adapun penyebab kematian ibu mayoritas disebabkan karena perdarahan 42% dan hipertensi 42%, gangguan sistem peredaran darah 5,5% dan lain-lain sebesar 10,5%

Lebih rinci penyebab kematian ibu digambarkan sbb:

Grafik IV.A.10
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2019

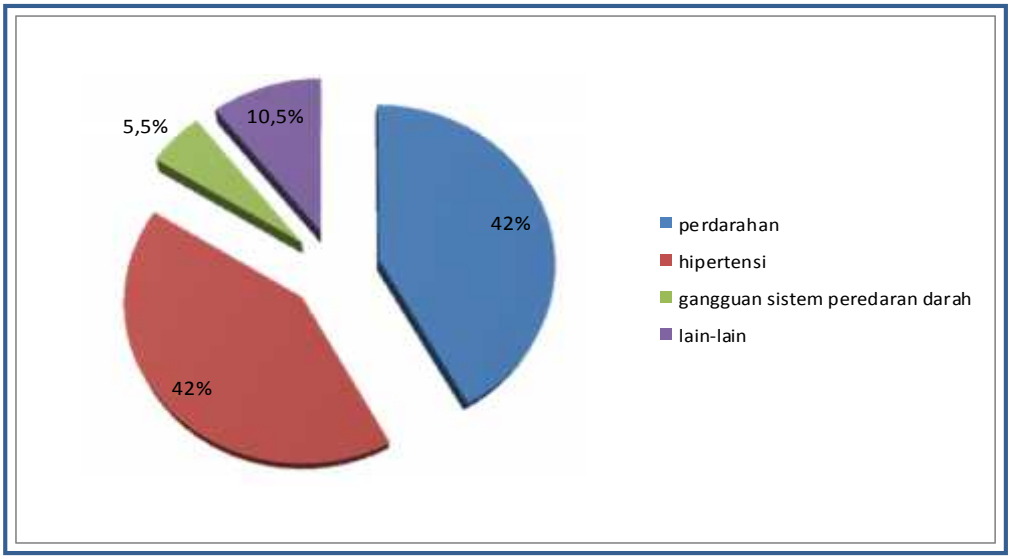

Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Sidoarjo

Masa kematian ibu mayoritas pada usia produktif (20 – 34 tahun) sebesar 63,2%, diatas 35 tahun 36,8%, terutama terjadi pada masa nifas.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care*/ ANC terpadu-10T);
- Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (*Peer Review* Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu, kegawatdaruratan;
- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
- Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat

ini dibentuk dalam Pokja I (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulan Desa);

- Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal melalui *skill assesment* dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan);
- Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus *emergency/* rujukan darurat persalinan;
- Melakukan pengkajian dan pembelajaran *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
- Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;
- Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), program bayi sampai dengan anak.

1.2 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan suatu wilayah. Di Kabupaten Sidoarjo, target Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2019 adalah 6,5 per 1.000 kelahiran hidup, sedang realisasi capaian sebesar 4,14 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2018 (4,38 per 1.000 kelahiran hidup), 2017 (5,45 per 1.000 kelahiran hidup) dan 2016 (4,3 per 1.000 kelahiran hidup) dan dibanding dengan target tahun 2019, maka capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 ini cukup baik. Ini berarti bahwa program dalam upaya penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Sidoarjo dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa upaya dalam penurunan angka kematian bayi, antara lain:

- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Adanya rujukan dini berencana, maksudnya dari persalinan yang bermasalah (mulai ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko dan neonatus beresiko) dilakukan monitoring evaluasi untuk kemudian dirujuk ke RS;

- Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;
- Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;
- Pemberian pelayanan *Ante Natal Care (ANC)* terpadu (10 T);
- Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

Dibanding dengan target di tingkat Provinsi Jawa Timur (22 per 1.000 kelahiran hidup) dan tingkat nasional (24 per 1.000 Kelahiran Hidup), maka Kabupaten Sidoarjo dikatakan berhasil dalam program penurunan Angka Kematian Bayi (AKB).

Perkembangan Angka Kematian Bayi tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik IV.A.11

Angka Kematian Bayi Tahun 2016 – 2019

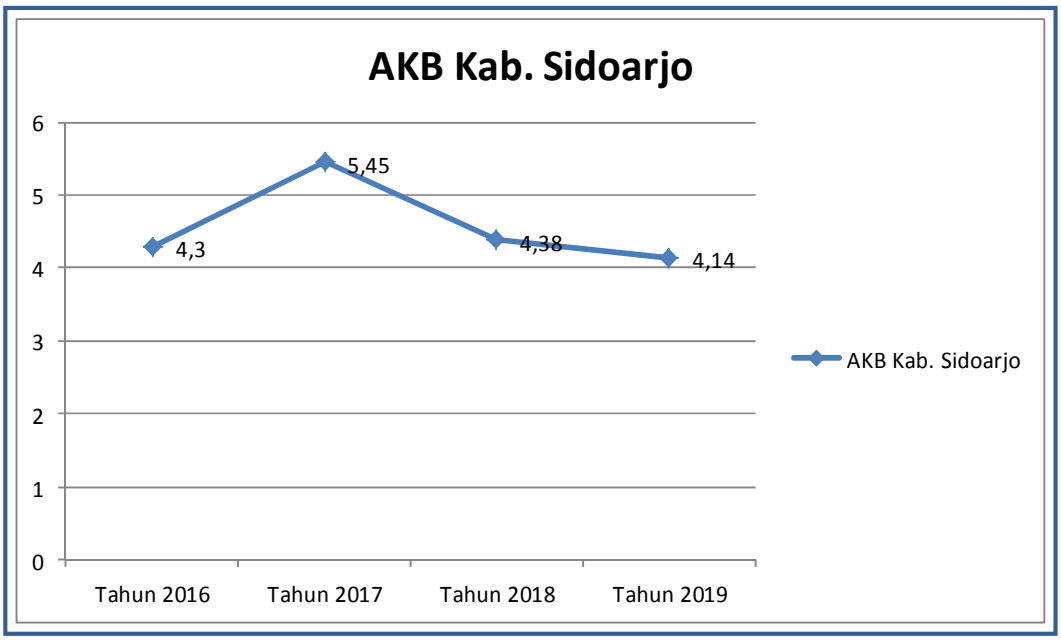

Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Sidoarjo

1.3 Persentase Balita Stunting

Balita stunting adalah balita yang panjang badannya/ tinggi badannya tidak sesuai dengan usia (Panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur < -2 SD

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting bisa terjadi mulai dari dalam kandungan, bayi baru lahir (dengan panjang badan < 48 cm) sampai dengan anak usia 2 tahun.

Stunting merupakan salah satu program nasional. Kondisi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo menurut angka Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013 sebesar 30,2%, sedangkan tahun 2018 sebesar 27,1%. Angka ini dikatakan cukup baik jika dibanding dengan capaian stunting Provinsi Jawa Timur sebesar 35,8% (tahun 2013) dan sebesar 32,81% (tahun 2018).

Grafik IV.A.12

Presentase Stunting Kabupaten Sidoarjo dibanding Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan 2018

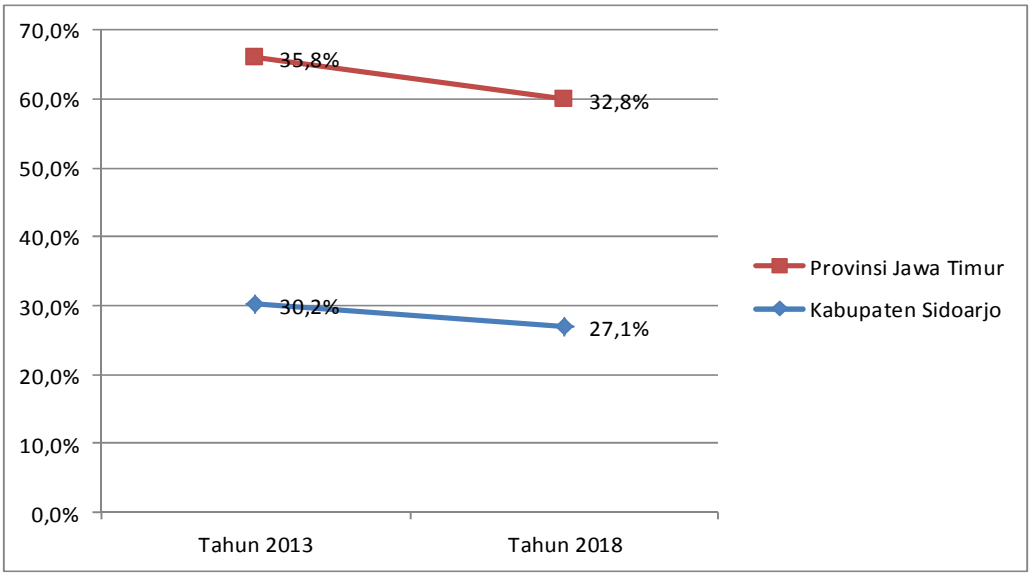

Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Sidoarjo berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

Dari grafik tersebut, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam penanganan masalah gizi. Keberhasilan ini adalah bentuk komitmen kuat Pemerintah Daerah Sidoarjo untuk menanggulangi masalah gizi (stunting dan gizi buruk) yang dituangkan dalam Perda No 1 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

1.4 Persentase Usia Lanjut Yang Sehat

Masalah kesehatan yang sering dialami lanjut usia adalah malnutrisi, gangguan keseimbangan, kebingungan mendadak, dll. Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dsb.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk usia lanjut (>60 tahun) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebesar 94,4% (167.560 dari 177.586 orang dengan usia 60 tahun ke atas), dengan persentase usia lanjut yang sehat sebesar 88,7% (153.271 dari 177.586 orang dengan usia 60 tahun ke atas). Sedangkan tahun 2018, cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Sidoarjo sebesar 84,25%, dengan persentase usia lanjut yang sehat sebesar 74,82%, tahun 2017 sebesar 60,31% dan tahun 2016 sebesar 66,82%. Jika melihat tren dari tahun ke tahun, maka capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Sidoarjo semakin menunjukkan angka yang baik. Ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan terhadap masyarakat usia lanjut cukup menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik IV.A.13

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Tahun 2016 – 2019

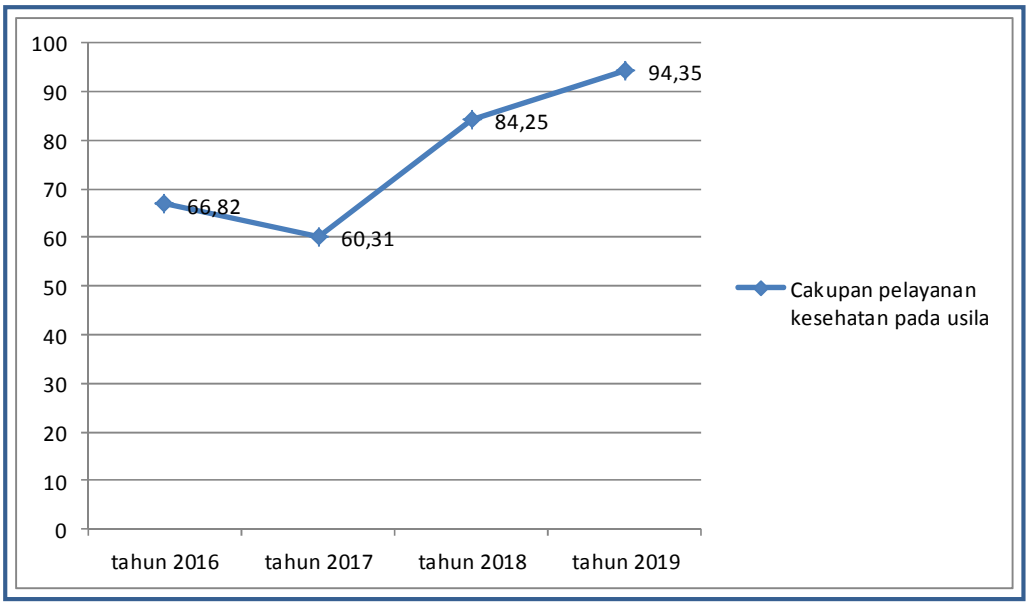

Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Sidoarjo

1.5 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

Desa Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan Desa Siaga yang : 1) Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanaan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. 2) Penduduknya mengembangkan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) dan melaksanakan Surveilans berbasis masyarakat (melalui pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, ada 8 (delapan) indikator desa kelurahan siaga aktif.

Dan dalam pengembangannya, ada 4 (empat) kategori pentahapan desa siaga aktif.

Pentahapan Desa Siaga Aktif, yaitu :

1. Desa Siaga Aktif Pratama
2. Desa Siaga Aktif Madya
3. Desa Siaga Aktif Purnama
4. Desa Siaga Aktif Mandiri

Terdapat 8 (delapan) Indikator Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri adalah sebagai berikut :

No	Desa Siaga Aktif Purnama	No	Desa Siaga Aktif Mandiri
1.	Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan rutin setiap bulan	1.	Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan rutin setiap bulan
2.	Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif antara 6-8 orang	2.	Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif lebih dari 9 orang orang
3.	Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari.	3.	Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari.
4.	Sudah memiliki Posyandu dan 3 (tiga) UKBM lainnya aktif	4.	Sudah memiliki Posyandu dan lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjenjang
5.	Sudah mengakomodasi dana untuk Pengembangan Desa Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan Desa atau kelurahan serta mendapat dukungan Dana dari masyarakat dan Dunia Usaha.	5.	Sudah mengakomodasi dana untuk Pengembangan Desa Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan Desa atau kelurahan serta mendapat dukungan Dana dari masyarakat dan Dunia Usaha.
6.	Sudah ada peran aktif masyarakat dan pe aktif dunia usaha dan ormas dalam kegiat Desa dan Kelurahan Siaga Aktif	6.	Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dunia usaha dan ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
7.	Sudah memiliki peraturan formal(tertulis) di Tingkat Desa atau Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.	7.	Sudah memiliki peraturan formal(tertulis) di Tingkat Desa atau Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
8.	Minimal 40% Rumah Tangga di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	8.	Minimal 70% Rumah Tangga di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif mendapat pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Dari 353 desa/ kelurahan di Kabupaten Sidoarjo, ada 6 (enam) desa/ kelurahan yang terdampak lumpur lapindo, sehingga keberadaan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 tercatat 347 desa/ kelurahan. Untuk tahun 2019, target desa siaga aktif purnama mandiri sebesar 41% (142

desa/ kelurahan). Namun, Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai tahapan desa/ kelurahan pada kategori siaga aktif PURI (Purnama Mandiri) sejumlah 173 desa/kel (121% desa/ kelurahan). Sedangkan desa/ kelurahan berada pada pentahapan Pratama 26 desa/kel (7,49%) serta untuk pentahapan Madya ada 148 desa/ kel (42,65%).

Gambaran ringkas klasifikasi Desa Siaga Aktif sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI DESA/KEL	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Siaga Aktif Purnama Mandiri	142	173	121%
2	Siaga Aktif Pratama	0	26	7,49%
3	Siaga Aktif Madya	0	148	42,65%
4	Desa terdampak lumpur lapindo		6	
	Jumlah Desa		**353**	

2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2.1 Persentase Desa/ Kelurahan UCI

Desa yang mencapai UCI (*Universal Child Immunization*) adalah desa dimana 88% bagi di wilayah desa tersebut telah diimunisasi lengkap. Sedangkan target desa/ kelurahan UCI tahun 2019 sebanyak 89%. Pada tahun 2019, dari 353 desa/ kelurahan yang ada, terdapat 344 (97,45%) desa/ kelurahan yang telah mencapai UCI. Jika dibanding dengan target, maka di tahun 2019, semua desa/ kelurahan di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai UCI.

Meskipun UCI di Kabupaten Sidoarjo sudah melebihi target, namun tetap diwaspadai terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) terutama di puskesmas yang UCI desanya belum mencapai target.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas program imunisasi adalah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan, antara lain DQS (*Distric Quality Self Assesment*), survei *Effectif Vaksin Management* (EVM), dan *Rapid Convenience Assesment* (RCA) sweeping sasaran, Supervisi Supportif,

peningkatan kapasitas (*knowledge skill*) petugas dan pemantauan kualitas penyimpanan vaksin, serta pemenuhan logistik pelayanan imunisasi, baik di layanan pemerintah maupun swasta.

2.2 Persentase Penduduk ≥ 15 Tahun dengan Hipertensi

Pengertian hipertensi atau tekananan darah tinggi merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal, yaitu melebihi 140 / 90 mmHg.

Pengukuran dilakukan pada penduduk yang berusia lebih dari atau sama dengan 15 tahun. Definisi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. Dengan jumlah sasaran dihitung berdasarkan prevalensi 32,1% dari jumlah penduduk berusia lebih dari atau sama dengan 15 tahun. Angka prevalensi ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018.

Pengukuran dapat dilakukan di dalam unit pelayanan kesehatan primer, pemerintahan swasta, di dalam maupun diluar gedung. Di kabupaten Sidoarjo, estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun 2019 sejumlah 552.490 (25% dari jumlah penduduk), dengan proporsi laki-laki sebesar 275.778 penduduk (12,26%) dan perempuan sebesar 276.712 penduduk (12,30%). Dari estimasi yang menderita hipertensi, sebanyak 322.004 orang (58,3%) mendapatkan pelayanan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Estimasi Persentase Penduduk ≥ 15 tahun dengan Hipertensi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Jumlah penduduk	Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun				Mendapatkan pelayanan kesehatan			
	Laki-laki	Perempuan	Total	%	Laki-laki	Perempuan	Total	%
2.249.476	275.778	276.712	552.490	25	126.287	195.717	322.004	58,3

Sumber : Seksi Penyakit Tidak Menular

Kendala dan permasalahan dalam pencapaian yang dihadapi antara lain:

- Pelaksanaan skrining belum melibatkan semua unsur di puskesmas, karena keterbatasan SDM;

- Kegiatan Posbindu (pelaksanaan skrining) belum semuanya *mobile*;
- Angka prevalensi hasil riskesdas terbaru mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi jumlah sasaran dan capaian program;

Namun demikian, tetap dilakukan upaya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, diantaranya:

- Pelaksanaan skrining harus melibatkan semua unsur di puskesmas
- Kegiatan Posbindu harus *mobile* (berpindah) dan jemput bola dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program.
- Pencatatan dan pelaporan hipertensi harus melibatkan semua pengelola program di puskesmas dan institusi kesehatan lain di luar puskesmas.

2.3 Persentase Orang Terinfeksi HIV Positif Mendapatkan ARV

Estimasi penemuan kasus HIV-AIDS sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo adalah 5.226 kasus. Adapun penemuan kasus kumulatif HIV sampai dengan tahun 2019 adalah 3.440 dan untuk AIDS sebanyak 1.222 kasus.

Dari sekian orang terinfeksi HIV positif sampai dengan tahun 2019 yang ditemukan, 75% mendapatkan ARV (*Antiretroviral Virus)*. Angka ini masih belum mencapai target (90%). Hal ini disebabkan karena:

- Terbatasnya layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV yang ada;
- Minimnya pendampingan ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) oleh tenaga kesehatan, baik yang sudah ARV maupun yang belum;
- ODHA yang ditemukan berasal dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- Terbatasnya petugas yang terlatih terhadap konseling kepatuhan minum obat.

Pengendalian HIV/ AIDS merupakan salah satu isu strategis yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 2016 – 2021.

Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui penyuluhan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan kelompok resiko tinggi dan intervensi perubahan perilaku, layanan konseling dan testing HIV, layanan

Harm Reduction, pengobatan dan pemeriksaan berkala penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), pengamanan darah donor dan kegiatan lain yang menunjang pemberantasan HIV/AIDS. Serta penambahan Klinik Inisiasi Anti Retroviral Virus (ARV) yang saat ini menjadi 10 klinik, dinataranya puskesmas Krian, Porong, Waru, Prambon, Krembung, Sukodono, Gedangan, Sedati, Taman dan RSUD Sidoarjo.

2.4 Angka keberhasilan pengobatan TB

Tuberkulosis alias TB atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Bakteri ini sebagian besar (95%) menyerang paru-paru sehingga disebut TB Paru. TB Paru masih menjadi momok penyakit yang menakutkan bagi masyarakat dunia, terutama di Indonesia.

Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (*Treatment Succes Rate =TSR*) adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat. Sembuh yaitu pasien TB Paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan, yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Angka keberhasilan program TB Paru diidentikkan dengan Angka keberhasilan pengobatan TB Paru.

Angka keberhasilan pengobatan TB (*succes rate*) adalah penderita TB yang ditemukan dan diobati pada kurun waktu 10 – 15 bulan yang lalu (menurut Buku Pedoman Nasional Penanggulangan TB), sehingga data yang dievaluasi pada tahun 2019 adalah penderita TB yang ditemukan dan diobati pada tahun 2018, yaitu sebesar 89,2%. Target angka keberhasilan pengobatan TB Paru Tahun 2018 adalah 93%. Angka ini dinilai belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun ketidakberhasilan dalam pengobatan antara lain disebabkan karena dropout (5%), gagal (1%), pindah (1%) dan meninggal (4%).

Grafik IV.A.14

Angka Keberhasilan Pengobatan Tb

Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2018

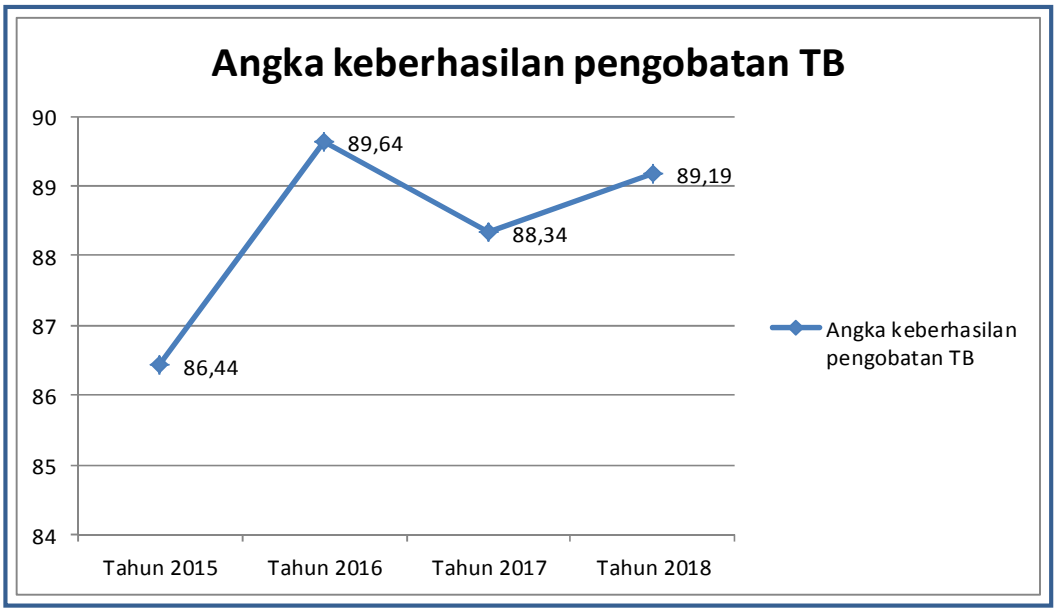

Sumber : Seksi Penyakit Menular

Trend angka keberhasilan pengobatan TB paru dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung fluktuatif. Realisasi angka keberhasilan pengobatan TB paru tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 86,44%, 89,64%, 88,34% dan 89,19%.

II. RATA - RATA NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PUSKESMAS

Rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas merupakan salah satu dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dari Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Untuk mencapai indikator ini, perlu dukungan dari indikator program, yaitu :

PROGRAM	INDIKATOR
Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Puskesmas dengan akreditasi minimal dasar
	2. Persentase FKTL dengan akreditasi
	3. Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan
	4. Presentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (surat terdaftar pengobat tradisonal)
	5. Persentase keluarga yg disurvei KS
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	1. Persentase nakes yg memiliki ijin praktek
	2. Persentase Puskesmas yg memiliki alat kesehatan sesuai standar
	3. Persentase IRTP yg mendapatkan sertifikat (ijin edar)
	4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin
Upaya Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas	26 Puskesmas Terakreditasi

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 adalah 80. Dibanding dengan tahun 2018 (82,45), IKM Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 semakin meningkat. Rata-rata IKM puskesmas di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 adalah 83,68. Namun. Puskesmas terus berbenah dalam peningkatan kualitas pelayanan yang berimbas pada semakin tingginya indeks kepuasan masyarakat dengan cara sebagai berikut :

1) Menstandarkan pelayanan kesehatan dengan terakreditasinya Puskesmas yang merupakan pengakuan dari lembaga independent tentang kualitas pelayanan di Puskesmas;
2) Berinovasi dalam memberikan pelayanan salah satunya dengan Sistem Antrian Pelayanan melalui SIAP TARIK (Puskesmas Tarik), CAK RAHMAN (Puskesmas Krembung), SI ELOK RUPA (Puskesmas Waru), pelayanan rekam medis paperless terintegrasi mulai antrian sampai mendapatkan obat;

3) Rekruitmen tenaga pelayanan Non PNS untuk memenuhi rasio jumlah tenaga pelayanan sesuai standar;
4) Menggalakkan upaya promotif dan preventif serta mensinergikan dengan upaya kuratif rehabilitatif (home visit, puskesmas dan PIS-PK);
5) Relokasi Puskesmas Gedangan ke area yang memenuhi standard;
6) Penambahan Puskesmas Induk baru di wilayah padat penduduk pada tahun 2019, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Candi dan Gedangan.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALIS ASI	%	TARGET	REALIS ASI	%
Rata - Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas	80	80,36		80	81,19		80	82,45		80	83,68	

Untuk mendukung Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan antara lain melalui :

1) Akreditasi Puskesmas

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi. Tujuan akreditasi adalah meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakat.

Terdapat 9 bab sebagai instrument penilaian akreditasi yang terdiri dari administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

(1) Administrasi Manajemen meliputi sistem penyelenggaraan Puskesmas, sarana prasarana, lokasi yang sesuai standar, ketenagaan dan pemeliharaan sarana prasarana

(2) Upaya kesehatan masyarakat meliputi sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, komunikasi koordinasi dengan lintas sektor maupun lintas program, pelaksanaan dan evaluasi program di masyarakat.

(3) Upaya kesehataan perorangan meliputi layanan kinis sesuai standar, obat, laboratorium, peralatan klinis, alat kesehatan sesuai standar, proses peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga klinis

(4) Mutu yang merupakan mutu puskesmas secara keseluruhan yaitu perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan Puskesmas baik di masyarakat maupun klinis perorangan secara brkesinambungan (continues quality improvement) untuk itu seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan

Klasifikasi kelulusan akreditasi :

(1) PARIPURNA → Apabila semua standar dipenuhi lebih dari 80%

(2) UTAMA → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 80% dan mutu dijalankan lebih dari 60%

(3) MADYA → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 40%

(4) DASAR → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 20%

(5) TIDAK TERAKREDITASI → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan kurang dari 75% dan mutu dijalankan kurang dari 20%

Sebanyak 26 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo semuanya telah berstatus akreditasi pada tahun 2018.

Puskesmas yang telah terakreditasi sebanyak 26 tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Terakreditasi Paripurna sebanyak 2 Puskesmas
b. Terakreditasi Utama sebanyak 16 Puskesmas.
c. Terakreditasi Madya sebanyak 6 Puskesmas.
d. Terakreditasi Dasar sebanyak 2 Puskesmas.

Puskesmas yang telah terakreditasi paripurna adalah Puskesmas Taman dan Jabon, sedangkan puskesmas dengan akreditasi dasar adalah Puskesmas Prambon dan Puskesmas Candi.

Dinas Kesehatan berupaya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan yang ada, melalui akreditasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan secara berkala sesuai dengan standar yang ada.
b. pengajuan reakreditasi bagi Puskemas yang telah 3 tahun terakreditasi.
c. memotivasi Puskesmas untuk terakreditasi paripurna.
d. melakukan monitoring evaluasi pasca akreditasi untuk meningkatkan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan.

2) Presentase Penduduk Mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia harus sudah mempunyai Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan tersebut bisa dari pemerintah maupun swasta. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 bahwa Bupati dan walikota agar mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayah masing-masing serta lain hal sebagainya yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pada tahun 2019 sebanyak 71,8% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Jaminan Kesehatan, baik yang berasal dari Pemerintah, swasta maupun mandiri. Jaminan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat miskin berasal dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan diupayakan semuanya terintergrasi dalam BPJS. Hal ini sudah meningkat dibanding tahun 2018 yang masih mencapai 70,25%.

Program dam Kegiatan

Rekapitulasi Pendanaan dan capaian Kinerja Program dalam rangka mendukung capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:

1. **Program Upaya Kesehatan Masyarakat.** dengan anggaran sebesar Rp.28.304.828.061,- dan terealisasi sebesar Rp.22.336.762.029,00 atau 78,92%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
AKI	71,4	52,12/100.000 KH	100%
AKB	5,6	4,14/1.000 KH	100%
Persentase Balita Stunting	24%	14,9%	100%
Persentase usia lanjut yang sehat	58%	88,7%	100%
Persentase desa siaga aktif Purnama Mandiri	41%	121%	121%

   Jika melihat data diatas, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja dibanding dengan capaian anggaran cukup efisien. Dimana pada program ini, semua indikator telah tercapai meskipun dengan anggaran yang pemakaiannya tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena :

- kegiatan-kegiatan dalam upaya perbaikan gizi dan kesehatan keluarga telah banyak dicukupi oleh Anggaran Dana Desa (ADD), sehingga dana yang telah dianggarkan di APBD tidak terserap maksimal. Selain itu, untuk kegiatan pengadaan barang/ jasa, harga yang ada di pasaran lebih rendah dibanding harga yang dipasang di DPA.
- Realisasi kegiatan Jampersal (Jaminan Persalinan) tidak bisa direalisasikan karena honor pengelola keuangan jampersal belum tercantum nominalnya pada Perbup No.31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo dan Perbup No 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinandi Kabupaten Sidoarjo, serta realisasi kegiatan pelayanan kesehatan jampersal baru dialokasikan pada tribulan 2.
- Realisasi penyerapan kegiatan berupa bantuan transpot tidak diberikan karena pelaksanaan kegiatan melewati tribulan IV (Bulan Oktober), dengan pelaksana kegiatan adalah bidan dan tenaga kesehatan (nakes).

Permasalahan:

1. Kekurangan tenaga teknis pengelola program, baik di tingkat kabupaten (dinas kesehatan) maupun di tingkat puskesmas. Banyak tenaga yang *double job* (1 orang memegang beberapa program), sehingga kurang maksimal dalam melakukan penjaringan (*screening*) terpadu.
2. Laporan dari fasyankes swasta kurang maksimal, misal isian alamat dalam format laporan kurang jelas, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam lokus wilayah kerja.
3. Komitmen sektoral belum optimal dalam perwujudan desa siaga.

Solusi:

1. Memaksimalkan tenaga yang ada jika memang tidak diperkenankan untuk merekrut tenaga tambahan
2. Meningkatkan kinerja kader di lapangan untuk penjaringan diluar institusi pendidikan formal/ non formal.
3. Koordinasi dan peningkatan kinerja dengan jejaring.
4. Komitmen bersama tingkat sektoral dengan aturan yang mengikat.

2. **Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.** dengan anggaran sebesar Rp.4.776.022.996,- dan terealisasi sebesar Rp.4.164.310.241,- atau 87,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
1. Persentase Desa/Kel UCI	89%	97,5%	108,9%
2. Persentase penduduk > 15 Th dengan Hipertensi	23,5%	25%	
3. Persentase orang terinfeksi HIV positif mendptkan ARV	90%	75%	77,77%
4. Angka keberhasilan pengobatan TB	93%	89%	99%

Permasalahan:

1. Masih 62% RS yang telah terjalin jejaring layanan TB DOTS, namun untuk RSIA belum ada.

2. Jejaring layanan antara klinik swasta dan dokter praktek mandiri dengan puskesmas di wilayah masing-masing belum berjalan maksimal, misal dalam hal pelaporan.
3. Penjangkauan ke kelompok populasi resiko penularan (Asrama,Pondok Pesantren, Perusahaan, Lapas) masih belum berjalan maksimal.
4. Kerjasama Lintas Program dalam Layanan TB DOTS belum terintegrasi.
5. Pelaksanaan skrining belum melibatkan semua unsur di Puskesmas karena keterbatasan SDM.
6. Kegiatan Posbindu (dimana pelaksanaan skringing penyakit tidak menular dilaksanakan) belum semuanya *mobile.*
7. Angka prevalensi hasil Riskesdas terbaru mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi capaian realisasi.

Solusi:

1. Menjalin Kerjasama jejaring layanan TB DOTS secara bertahap dari 38% rumah sakit yang belum melaksanakan, *memfollow up* Dokter Praktek Mandiri dan Klinik Primer yang telah mengikuti Workshop TB DOTS.
2. Penjangkauan ke kelompok populasi resiko penularan (Asrama,Pondok Pesantren, Perusahaan,Lapas) secara bertahap bekerja sama dengan Lintas Program.
3. Puskesmas selaku pemangku wilayah melaksanakan c*ontact tracing* pada penderita TB.
4. Kerjasama Lintas program TB,Kesga,PIS PK dalam Layanan TB DOTS.
5. Pelaksanaan skrining harus melibatkan semua unsur di puskesmas
6. Kegiatan Posbindu harus *mobile* dan jemput bola yang melibatkan lintas sektor dan lintas program.
7. Pencatatan dan pelaporan hipertensi harus melibatkan semua pengelola program di puskesmas dan Institusi kesehatan lain di luar puskesmas.

3. **Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat.** dengan anggaran sebesar Rp.69.715.669.672,- dan terealisasi sebesar Rp.49.937.036.456,- atau 71,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase FKTL yang memenuhi akreditasi	70%	100%	142%
Persentase keluarga yang disurvey KS	70%	100%	142%
Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	85%	100%	117%
Persentase Penyehat tradisional yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	14%	14,28%	100%
Persentase Puskesmas dengan akreditasi minimal dasar	100%	100%	100%

Permasalahan:

1. Kebijakan dari Kementrian Kesehatan tentang akreditasi FKTP yang dinamis sehingga beberapa anggaran kurang terserap maksimal
2. Adanya perubahan kebijakan prosentase iuran BPJS sehingga berbeda dengan perencanaan
3. Pemberitahuan anggaran pajak Rokok boleh diserap pada pertengahan Desember Tahun 2019 sehingga hanya bisa digunakan untuk pembayaran premi Bulan Desember.
4. Aplikasi PIS PK sering *trouble,* sehingga proses entri data terhambat
5. Terdapat perbedaan Definisi Operasional (DO) dari indikator PIS PK
6. Ada data yang belum lengkap sehingga mempengaruhi hasil Indeks

Solusi:

1. Pengajuan PAK apabila terdapat perubahan kebijakan pada tahun berjalan
2. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait
3. Sosialisasi aplikasi PIS PK di tribulan I tahun 2020
4. Penajaman DO indikator PIS PK
5. Entri dan edit data yang belum lengkap sampai dengan Februari 2020

4. **Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.** dengan anggaran sebesar Rp.3.021.1401.769,68,- dan terealisasi sebesar Rp.27.553.076.976,- atau 91,20%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase IRPT yang mendapatkan sertifikat (ijin edar)	100%	100%	100%
Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100%	100%	100%
Persentase nakes yang memiliki ijin praktek	100%	100%	100%
Persentase puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%

Jika membandingkan antara data capaian kinerja dengan capaian angaran, maka dapat dikatakan bahwa capaian pada program ini adalah seimbang. Meskipun demikian, tetap ada beberapa masalah/ kendala

Permasalahan:

1. Terkait alat kesehatan di puskesmas, kendala yang dihadapi adalah belum 100%peralatan kesehatan tersedia di *e catalog*. Ada beberapa peralatan kesehatan yang turun tayang sehingga pelaksanaan pengadaan melalui lelang cepat.
2. Beberapa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada saat PAK, sehingga waktu terbatas.

Solusi:

1. Perencanaan ulang yang baik dan matang utamanya terkait pengadaan, sehingga tidak perlu PAK, dan sehingga waktu pelaksanaan bisa lebih longgar.

5. **Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas.** dengan anggaran sebesar Rp. 119.121.756.719,31,- dan terealisasi sebesar Rp. 101459534.040,- atau 85,17%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
26 puskesmas terakreditasi	2	2	100

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo

d. Tujuan

Sampai dengan tahun 2019, kinerja jangka menengah RSUD Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit bertaraf Internasional	Status Akreditasi Internasional	Terakreditasi Internasional	Terakreditasi Internasional	Paripurna	Belum tercapai	Terakreditasi Internasional	Paripurna	Belum tercapai

Target status Terakreditasi Internasional pada tahun 2016-2019 belum tercapai karena dalam Renstra RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 target tersebut harus dicapai pada tahun 2020, sedangkan target pada tahun 2016-2019 adalah terakreditasi Paripurna. RSUD Kabupaten Sidoarjo telah memperoleh status akreditasi Paripurna sejak tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2019, RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan persiapan untuk memperoleh status Terakreditasi Internasional di tahun 2020 melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan inovasi dan terobosan di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain aplikasi Si-Maneis (Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency SMS Gateway), SAntri Android RS (Sistem Antrian Android Rumah Sakit), InKamRS, e-Tamat (Elektronik Akta Kematian), Alamak (Anak Lahir Membawa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga), ReMics (Rekam Medis Elektronik); Pengembangan aplikasi pelayanan publik seperti Public Safety Center 119 (PSC 119) yang terintegrasi dengan SiManeis, Health Command Center, e-Medivo Complain, dan Bridging Vendika BPJS;
2. Peningkatan dan penambahan sarana prasarana kesehatan yang berteknologi canggih untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, misalnya USG 4D (Ultrasonografi), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS),

Echokardiografi (ECG), Elektroensefalogram (EEG), pengembangan Vascular Center dan layanan CT-Scan 128 Slices;

3. Penguatan kapasitas kelembagaan;
4. Peningkatan SDM yang kompeten di bidangnya;
5. Optimalisasi Tim dan Komite yang ada di rumah sakit;
6. Monitoring yang berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan standar (Panduan Praktik Klinik, Clinical Pathway, Daftar Obat Medik dan Audit Medik).

e. Sasaran

Sampai dengan tahun 2019, kinerja tahunan RSUD Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran: Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Tercapai	Paripurna	Paripurna	Tercapai
2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	A	B	Belum Tercapai	A	A	Tercapai
3. Persentase Pasien Keluar Hidup	95%	93,91%	98,9%	96%	93,7%	97,6%

RSUD Kabupaten Sidoarjo menerapkan pola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), yaitu sistem yang diterapkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibiltas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Di mana RSUD dengan pola BLUD mengelola hasil pendapatannya sendiri untuk menjalankan operasionalnya, yang bertujuan untuk terwujudnya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya kemandirian RSUD dalam keuangan dan investasi. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator keuangan dan indikator kinerja layanan kesehatannya yang keberhasilan kinerjanya diukur sebagai berikut :

1. Keuangan RSUD

Cost Recovery Rate (CRR)

Cost Recovery Rate (CRR) digunakan untuk mengukur kontribusi pendapatan fungsional terhadap belanja operasional pelayanan. Selain itu, CRR dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan fungsional rumah sakit mampu membiayai kegiatan operasional pelayanan termasuk gaji pegawai Rumah Sakit. Indikator ini mencerminkan efisiensi penggunaan dana operasional Rumah Sakit dalam melayani pasien. Bila nilai CRR di atas 100% maka CRR-nya baik.

Capaian CRR tanpa subsidi gaji:

TAHUN	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	CRR	KETERANGAN
2017	416.523.355.646,81	390.528.622.978,55	106,66%	≥100%
2018	428.423.686.316,37	410.811.551.063,58	104,29%	≥100%
2019	432.881.327.241,02	436.130.154.622,92	99,26%	<100%

Sumber data: Bagian Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa CRR (subsidi gaji tidak diperhitungkan) tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, CRR tanpa subsidi gaji mengalami penurunan sebesar 5,03% menjadi 99,26% dibandingkan tahun 2018 dengan CRR sebesar 104,29%. Penurunan CRR di tahun 2019 dikarenakan adanya kenaikan belanja operasional sebesar 6,16% yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang hanya sebesar 1,04% dibandingkan tahun 2018.

Capaian CRR dengan subsidi gaji:

TAHUN	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	CRR	KETERANGAN
2017	416.523.355.646,81	435.259.261.048,55	95,70%	<100%
2018	428.423.686.316,37	455.395.429.753,58	94,08%	<100%
2019	432.881.327.241,02	483.167.657.492,92	89,59%	<100%

Sumber data: Bagian Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa CRR bila subsidi gaji diperhitungkan pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan dan nilainya <100%. Pada tahun 2019, capaian CRR RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 89,59% atau mengalami penurunan sebesar 4,48% dibandingkan tahun 2018. Penurunan CRR dengan subsidi gaji di tahun 2019 dikarenakan adanya kenaikan belanja operasional sebesar 6,10% dibandingkan tahun 2018 yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang hanya sebesar 1,04%.

Penurunan CRR juga dikarenakan RSUD Kabupaten Sidoarjo melakukan investasi pembangunan secara terus menerus yang menggunakan dana BLUD sehingga terjadi peningkatan aset di tahun 2019. Peningkatan aset ini menyebabkan kenaikan belanja pemeliharaan yang signifikan sebesar 35,25%. Apabila pembangunan seluruh gedung telah selesai sesuai dengan Masterplan, maka diharapkan CRR akan kembali meningkat.

Meskipun RSUD Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan pendapatan di tahun 2019, nilai kenaikannya tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan BPJS Kesehatan terkait sistem rujukan online yang mengharuskan pasien dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dirujuk secara berjenjang ke FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) mulai dari rumah sakit tipe D, kemudian tipe C, tipe B, baru selanjutnya ke tipe A. Hal ini berpengaruh pada menurunnya jumlah kunjungan pasien di RSUD Kabupaten Sidoarjo yang merupakan rumah sakit tipe B, di mana sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS Kesehatan sehingga pasien dari FKTP akan dirujuk ke rumah sakit tipe D dan C terlebih dahulu sebelum dirujuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan terkait BPJS Kesehatan lainnya yang mempengaruhi jumlah kunjungan pasien yaitu Permenkes No. 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa peningkatan kelas perawatan (rawat inap) yang lebih tinggi dari haknya hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta. Sebagai contoh, pasien yang merupakan peserta BPJS

Kesehatan kelas III hanya diperbolehkan naik satu tingkat ke kelas II dengan urun selisih biaya dan tidak diperbolehkan naik ke kelas I. Hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan RSUD Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, adanya klaim pending pasien BPJS Kesehatan di tahun 2019 yang belum diakui sebagai pendapatan tahun 2019 juga menjadi faktor penyebab turunnya CRR di tahun 2019.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi biaya pada setiap unit agar dapat dilakukan pengendalian dan efisiensi biaya, sehingga pendapatan yang diperoleh dapat membiayai semua kegiatan yang ada. Dengan harapan bahwa semua biaya yang dikeluarkan bisa untuk menghasilkan pendapatan dan dapat mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu.

2. Kualitas RSUD

a) Bed Occupancy Ratio (BOR)

Bed Occupancy Ratio (BOR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dalam kurun waktu tertentu. Tingkat pemanfaatan diukur dari penggunaan tempat tidur yang tersedia.

Standar BOR ideal yang ditetapkan oleh Kemenkes RI untuk setiap rumah sakit sebesar 60-85%. Hal ini menggambarkan ketika tingkat pemanfaatan tempat tidur kurang dari 60%, maka rumah sakit tersebut kurang diminati oleh masyarakat. Sedangkan bila lebih dari 85% dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

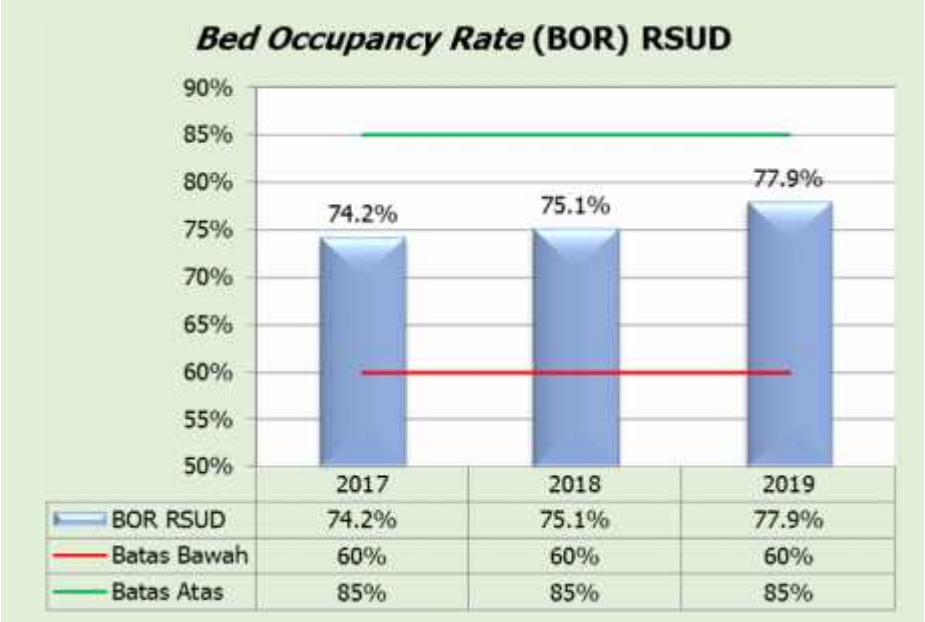

Sumber data: Bidang Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa realisasi BOR RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 berada di angka 77,9%, angka yang ideal untuk pelayanan kepada masyarakat ditunjukkan pula pada tahun 2018 dengan capaian 75,1% dan pada tahun 2017 dengan capaian 74,2%. Selama 3 tahun terakhir, capaian BOR di RSUD Kabupaten Sidoarjo tetap berada di kisaran target yang ditetapkan dan akan selalu diupayakan untuk menjaga BOR berada dalam kisaran target 60-85%.

b) Average Length of Stay (ALOS)

ALOS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata–rata lama waktu pasien mendapat perawatan. Standar ALOS ideal oleh Kemenkes RI untuk seluruh rumah sakit termasuk di RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 6-9 hari. Namun dalam Pedoman Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 oleh Dewan Pengawas, standar ideal ALOS adalah 3-5 hari. Nilai ALOS yang rendah mengindikasikan kualitas layanan kesehatan

baik dan secara ekonomi akan mengurangi cost yang dikeluarkan seorang pasien, sedangkan nilai ALOS yang tinggi mengindikasikan lambatnya penanganan pasien oleh tenaga medis.

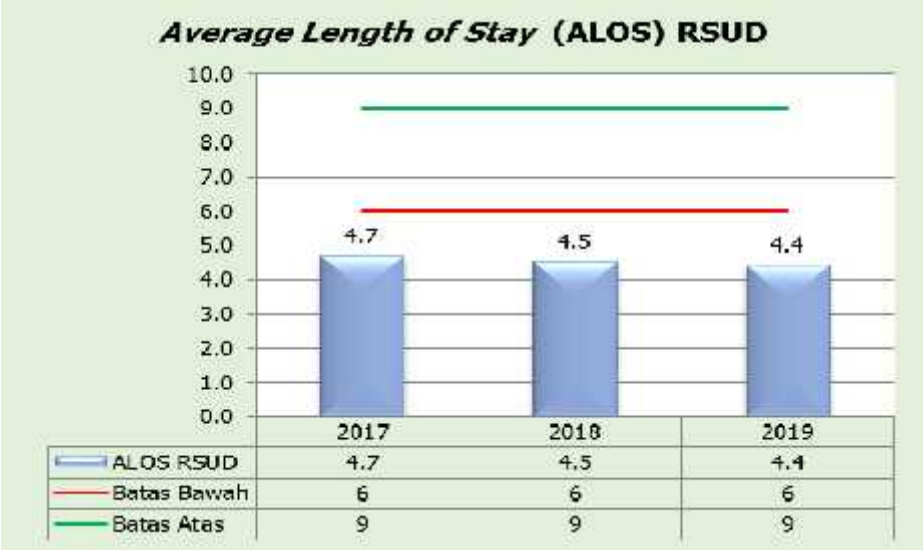

Sumber data: Bidang Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Sidoarjo

Capaian ALOS pada tahun 2019 berada pada nilai 4,4 hari, sedangkan pada tahun 2018 capaian ALOS sebesar 4,5 hari dan pada tahun 2017 sebesar 4,7 hari. Selama 3 tahun terakhir, ALOS RSUD berkisar pada nilai 4,4 – 4,7 hari.

Nilai ALOS ini didukung oleh data 10 besar diagnosis penyakit rawat inap yang memilki rata-rata waktu perawatan pasien selama 4-5 hari. Berikut data 10 besar diagnosis penyakit rawat inap tahun 2019:

No	ICD X	Diagnosis	Persentase
1	A09	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	19,0%
2	K30	Dyspepsia	15,4%
3	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	13,4%
4	A91	Dengue haemorrhagic fever	11,3%
5	I63.9	Cerebral infarction, unspecified	8,8%
6	N18.0	End-stage renal disease	7,9%

No	ICD X	Diagnosis	Persentase
7	A90	Dengue fever [classical dengue]	7,7%
8	E11.2	Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal complications	6,8%
9	Z38.0	Singleton, born in hospital	4,9%
10	A01.0	Typhoid fever	4,8%

Sumber data: Bidang Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Sidoarjo

ALOS RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017-2019 yang berkisar pada nilai 4,4 – 4,7 hari berada di bawah standar Kemenkes RI karena pasien yang dirawat di RSUD Kabupaten Sidoarjo memiliki ALOS <6 hari. Namun apabila standar ALOS menggunakan kriteria Pedoman Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, nilai ALOS RSUD masih memenuhi standar karena berada pada nilai 3-5 hari. Rendahnya nilai ALOS juga bisa bermakna bahwa pelayanan diberikan secara cepat dan tepat sehingga pasien dapat segera pulih.

c) Turn Over Interval (TOI)

Turn Over Interval (TOI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur waktu rata-rata tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh pasien lain. Interval ini dimaksudkan agar diperoleh waktu yang cukup untuk persiapan pergantian pasien baru sehingga tidak terjadi infeksi nosokomial. Standar yang ditetapkan Kemenkes RI untuk TOI sebesar 1-3 hari.

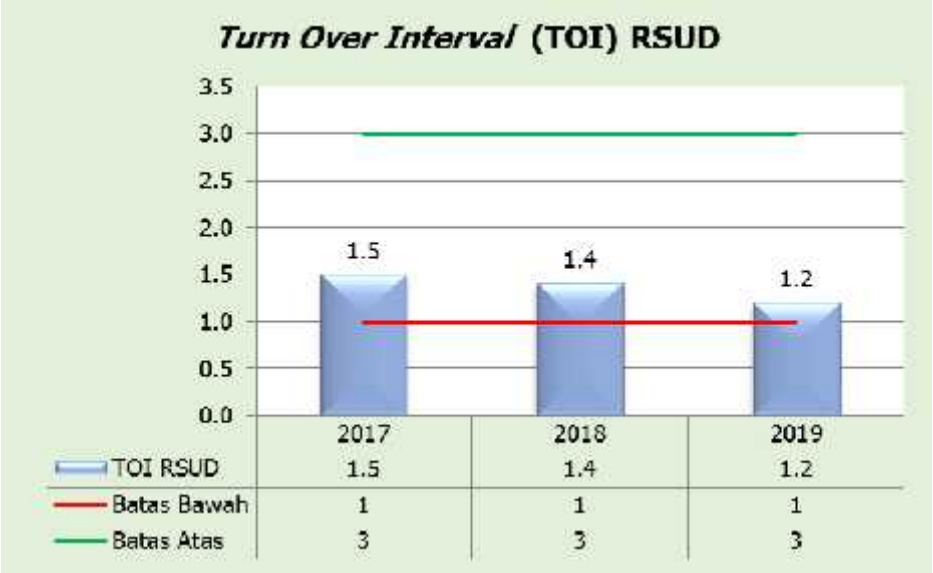

Sumber data: Bidang Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Sidoarjo

Realisasi yang dicapai oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 adalah 1,2 hari yang artinya rata-rata tempat tidur tidak dihuni pasien selama 1,2 hari. Hal ini menunjukkan bahwa TOI RSUD Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ideal karena masih berada dalam kisaran standar 1-3 hari. Angka TOI tahun 2018 sebesar 1,4 hari dan tahun 2017 sebesar 1,5 hari menunjukkan selama 3 tahun terakhir capaian TOI sudah ideal karena masih berada dalam kisaran standar. Oleh karena itu, RSUD Kabupaten Sidoarjo tetap harus memperhatikan proses sterilisasi ruangan sebelum digunakan kembali sehingga tidak berdampak kepada menurunnya mutu pelayanan rumah sakit.

d) Net Death Rate (NDR)

Net Death Rate (NDR) merupakan salah satu Key Performance Indicator sebuah rumah sakit. Meningkatnya NDR pada suatu rumah sakit merupakan sebuah indikasi telah terjadi penurunan kinerja yang berakibat menurunnya kualitas atau mutu pelayanan di rumah sakit tersebut. Adapun perkembangan NDR pada RSUD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

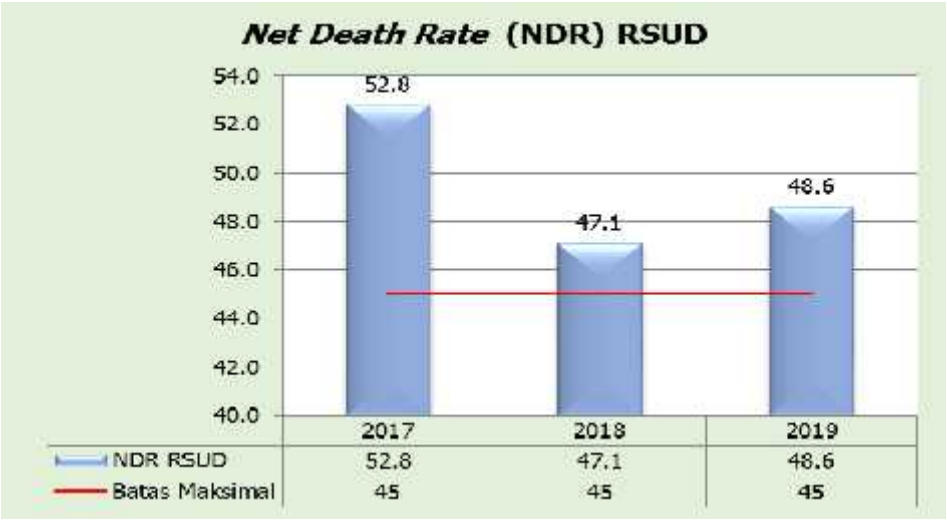

Sumber data: Bidang Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Sidoarjo

NDR diperoleh dari jumlah pasien keluar mati >48 jam dibagi dengan jumlah pasien keluar hidup dan mati dikalikan 1.000‰. Pada tahun 2019, jumlah pasien keluar mati >48 jam sebanyak 2.379 orang. Sedangkan jumlah pasien keluar hidup dan mati sebanyak 48.999 orang, sehingga diperoleh NDR sebesar 48,6‰.

Realisasi NDR tahun 2019 sebesar 48,6‰ dari target yang ditetapkan sebesar ≤35‰. NDR pada tahun 2019 yang tinggi disebabkan oleh kondisi pasien pra rujukan yang datang sudah dalam kondisi kritis. Data pasien pra rujukan dalam kondisi kritis merujuk pada level Emergency Severity Index (ESI) atau Indeks Kegawatdaruratan. Semakin rendah angka ESI maka

semakin membahayakan nyawa seseorang. Pada tahun 2019, pasien dengan ESI level 1 dan 2 atau pasien dengan kondisi buruk yang masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,61%. Instalasi Gawat Darurat (IGD) melayani pasien True Emergency (ESI level 1, 2, 3 dan 4) pada tahun 2019 sebanyak 99,01% dari total kunjungan IGD.

Selain disebabkan karena kondisi pasien pra rujukan yang datang sudah dalam kondisi kritis, tingginya NDR juga disebabkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu dari 7 (tujuh) pusat rujukan regional di Jawa Timur. Sehingga pasien yang masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo tidak murni berasal dari Kabupaten Sidoarjo saja, namun juga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo. Sebagai contoh, pasien dalam kondisi kritis yang berasal dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain di wilayah Pasuruan dan Mojokerto akan dirujuk dengan tujuan utama RSUD Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, pasien keluar mati >48 jam dalam perhitungan NDR bisa juga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo.

Upaya yang akan dilakukan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan antara lain:

- Optimalisasi layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 4 lantai, layanan Gedung Baru Hemodialisis 4 lantai dengan kapasitas 100 tempat tidur; dan 11 kamar operasi baru di Gedung Instalasi Bedah Sentral;
- Penggunaan alat-alat kesehatan yang berteknologi canggih untuk menunjang pelayanan seperti USG 4D (Ultrasonografi), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Echokardiografi, dan Elektroensefalogram (EEG); dan CT-Scan 128 Slices;
- Pengembangan dan optimalisasi layanan Cathlab, Home Care Service, Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu (IPIT), Laparoscopy, Endoscopy, Klinik Estetika, layanan Stroke Unit, layanan Geriatri, dan Pain Center;

- Monitoring yang berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Panduan Pelayanan Klinik, Clinical Pathway, Daftar Obat Medik dan Audit Medik);
- Optimalisasi PPI (Pengendalian dan Pencegahan Infeksi), K3RS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit), dan PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antimikroba);
- Pengadaan Alat Kedokteran MRI 3 tesla;
- Pembangunan Gedung Radioterapi Onkologi Terpadu, Gedung Parkir Pengunjung 4 lantai, drainase dan bozem;
- Renovasi gedung CSSD dan Laundry, Gudang Umum dan Farmasi, serta Perluasan Parkir Pegawai.

e) Persentase Pasien Keluar Hidup

Pasien Keluar Hidup merupakan indikator kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo hasil dari Reviu Renstra pada Tahun 2017. Indikator ini menggambarkan jumlah pasien keluar hidup yang dirawat inap di RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam 1 (satu) tahun. Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pasien keluar hidup dengan jumlah pasien masuk rawat inap dikalikan 100%. Pada tahun 2019, jumlah pasien keluar hidup sebanyak 55.119 orang, sedangkan jumlah pasien masuk rawat inap sebanyak 58.853 orang. Sehingga diperoleh hasil Persentase Pasien Keluar Hidup sebesar 93,7%.

Sumber data: Bidang Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2018 Persentase Pasien Keluar Hidup mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan. Secara keseluruhan, mulai dari tahun 2016 hingga 2019 Persentase Pasien Keluar Hidup belum mencapai target.

Salah satu penyebab belum tercapainya target indikator Persentase Pasien Keluar Hidup adalah tingginya Net Death Rate (NDR) pada tahun 2019. NDR diperoleh dari jumlah pasien keluar mati >48 jam dibagi jumlah pasien keluar hidup dan mati dikalikan 1.000‰. Realisasi NDR tahun 2019 sebesar 48,6‰ melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar ≤45‰. NDR yang tinggi disebabkan oleh kondisi pasien pra rujukan yang datang sudah dalam kondisi kritis. Data pasien pra rujukan dalam kondisi kritis merujuk pada level Emergency Severity Index (ESI) atau Indeks Kegawatdaruratan. Semakin rendah angka ESI maka semakin membahayakan nyawa seseorang. Pada tahun 2019, pasien dengan ESI level 1 dan 2 atau pasien dengan kondisi buruk yang masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,61%. Instalasi Gawat Darurat (IGD) melayani pasien True Emergency (ESI level 1, 2, 3 dan 4) pada tahun 2019 sebanyak 99,01% dari total kunjungan IGD.

Selain disebabkan oleh kondisi pasien pra rujukan yang datang dalam kondisi kritis, tingginya NDR juga disebabkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu dari 7 (tujuh) pusat rujukan regional di Jawa Timur. Sehingga pasien yang masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo tidak murni berasal dari Kabupaten Sidoarjo saja, namun juga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo. Sebagai contoh, pasien dalam kondisi kritis yang berasal dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain di wilayah Pasuruan dan Mojokerto akan dirujuk dengan tujuan utama RSUD Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, pasien keluar mati >48 jam dalam perhitungan NDR bisa juga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo.

f) Status Akreditasi Rumah Sakit

Status Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan kepada Rumah Sakit oleh Pemerintah melalui badan yang berwenang dalam hal ini Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk memenuhi standar pelayanan dengan tingkat kelulusan yang telah ditentukan. Pada Tahun 2017, RSUD Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Akreditasi yang kedua dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Status Akreditasi Rumah Sakit	Keterangan
2014	Paripurna	Akreditasi ke-I
2017	Paripurna	Akreditasi ke-II

Sumber data: Bidang Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Sidoarjo

Data tersebut menunjukkan bahwa RSUD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan akreditasi yang pertama tahun 2014 dengan hasil paripurna dan akreditasi kedua pada tahun 2017 dengan hasil paripurna pula. Penilaian akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk kemudian dilakukan reakreditasi. Tingkat paripurna adalah tingkat kelulusan tertinggi yang dapat diraih oleh rumah sakit.

Rumah Sakit dikatakan lulus akreditasi paripurna apabila memenuhi 15 (lima belas) standar akreditasi Rumah Sakit versi 2012 dengan nilai minimum 80%. 15 standar akreditasi rumah sakit versi 2012 meliputi:

1) Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Rumah Sakit;
2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK);
3) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK);
4) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP);
5) Millenium Development Goal's (MDG's);
6) Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK);
7) Asesmen Pasien (AP);
8) Pelayanan Pasien (PP);
9) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB);
10) Manajemen Penggunaan Obat (MPO);
11) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI);
12) Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS);
13) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
14) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP);
15) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).

Pada tahun 2017, RSUD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan akreditasi yang kedua dengan nilai 92,6% dari target Renstra RSUD sebesar ≥80%. Pada tanggal tanggal 13-14 November 2019, RSUD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan survei verifikasi akreditasi dan tetap memperoleh status Akreditasi Paripurna sesuai Akreditasi RS tahun 2017.

Akreditasi ke-3 (tiga) akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan target Status Terakreditasi Internasional sesuai Rencana Strategis RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Rumah sakit dikatakan memperoleh

Status Akreditasi Internasional apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Rumah sakit harus sudah lulus akreditasi nasional dengan hasil paripurna.
b. Nilai untuk setiap standar akreditasi harus mencapai ≥95%. Berdasarkan hasil survei akreditasi tahun 2017 oleh KARS, standar akreditasi rumah sakit yang belum mencapai nilai 95% yaitu SKP, HPK, PMKP, MDG's, PP, MPO, KPS, PPI, TKP, dan MFK. Untuk mencapai nilai 95% upaya yang dilakukan yaitu optimalisasi pelaksanaan pelayanan dan menindaklanjuti catatan-catatan dari hasil survei verifikasi akreditasi tahun 2019.
c. Rumah Sakit harus tetap melaksanakan Program Nasional meliputi:
    1) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi melalui aplikasi Si-Manies (Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency SMS Gateway) sehingga pasien rujukan tidak lagi mengalami keterlambatan penanganan yang disebabkan oleh penuhnya kapasitas daya tampung fasilitas, tidak adanya sarana, tidak adanya dokter spesialis di fasilitas yang langsung menangani pasien rujukan maupun faktor lainnya;
    2) Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS dengan adanya klinik khusus untuk pasien HIV/AIDS yaitu Klinik Mawar Merah;
    3) Penurunan Angka Kesakitan Tuberkulosis melalui Klinik Paru yang menyediakan fasilitas pengobatan Tuberkulosis dan Tuberkulosis MDR (Multi Drug Ressistant);
    4) Pengendalian Resistensi Antimikroba dengan adanya Komite PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antimikroba);
    5) Pelayanan Geriatri dengan adanya Klinik Geriatri;
    6) Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Sekolah Kesehatan, serta di tahun 2016 RSUD Kabupaten Sidoarjo telah memperoleh

Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan dengan nilai A yang berlaku selama 5 tahun.

Upaya–upaya peningkatan status akreditasi baik dari aspek kualitas maupun pelayanan, antara lain:

a. Melakukan inovasi dan terobosan di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya aplikasi SiManeis (Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency SMS Gateway), SAntri Android RS (Sistem Antrian Android Rumah Sakit), InKamRS, e-Tamat (Elektronik Akta Kematian), Alamak (Anak Lahir Membawa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga), ReMics (Rekam Medis Elektronik); Aplikasi SantriRS yang berbasis android; Pengembangan aplikasi pelayanan publik seperti Public Safety Center 119 (PSC 119) yang terintegrasi dengan SiManeis, Health Command Center, e-Medivo Complain, dan Bridging Vendika BPJS;
b. Peningkatan dan penambahan sarana prasarana kesehatan yang berteknologi canggih untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, misalnya USG 4D (Ultrasonografi), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Echokardiografi, Elektroensefalogram (EEG), pengembangan vascular center dan layanan CT-Scan 128 Slices;
c. Penguatan kapasitas kelembagaan;
d. Peningkatan SDM yang kompeten di bidangnya;
e. Optimalisasi Tim dan Komite yang ada di rumah sakit;
f. Monitoring yang berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Panduan Praktik Klinik, Clinical Pathway, Daftar Obat Medik dan Audit Medik).

g) Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. RSUD Kabupaten Sidoarjo juga menjadi Rumah Sakit Pendidikan sejak tahun 2013 dan sudah melakukan akreditasi sebagai rumah sakit pendidikan sejak tahun 2013. Status akreditasi Rumah Sakit Pendidikan yang telah dicapai sebagai berikut:

Tahun	Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan
2013	B (berlaku 3 tahun)
2016	A (berlaku 5 tahun)

Sumber data: Bagian SDM dan Diklit RSUD Kabupaten Sidoarjo

Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Kabupaten Sidoarjo yang terakhir dilakukan pada tahun 2016 dengan hasil akreditasi A. Status Akreditasi A berlaku selama 5 tahun (2016–2021). Status akreditasi Rumah Sakit Pendidikan A harus memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar Visi, Misi, Komitmen dan Persyaratan;
2. Standar Manajemen dan Administrasi;
3. Standar Sumber Daya Manusia untuk program pendidikan klinik;
4. Standar penunjang pendidikan;
5. Standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinis yang berkualitas.

Dengan nilai pencapaian Standar Rumah Sakit Pendidikan antara 79%-100%, pada tahun 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 90% dari target 90% sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021.

f. Program dan Kegiatan

RSUD Kabupaten Sidoarjo menerapkan pola pengelolaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yaitu sistem yang diterapkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. RSUD Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah dan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan didukung pemenuhan sarana dan prasarana, SDM, SIM, dan Tata Kelola.

Program Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah dengan anggaran sebesar Rp 541.271.456.631,42 dan terealisasi sebesar Rp 456.243.389.831,51 atau tercapai 84,29%. Program tersebut memiliki 22 indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN
1. Presentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi	≥85%	92,36%	108,66%
2. Persentase indikator SPM Bidang Pelayanan Medis yang mencapai target	90%	78,57%	87,30%
3. Bed Occupancy Rate (BOR)	60-85%	77,9%	100%
4. Average Length of Stay (ALOS)	6-9 hari	4,4 hari	101,60%
5. Turn Over Interval (TOI)	1-3 hari	1,2 hari	100%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN
6. Bed Turn Over (BTO)	40-50 kali	67,6 kali	82,40%
7. Net Death Rate (NDR)	≤35 ‰	48,6 ‰	86,40%
8. Gross Death Rate (GDR)	≤55 ‰	75,9 ‰	79,10%
9. Persentase indikator SPM Bidang Penunjang Medis dan Non Medis yang mencapai target	90%	78,13%	86,81%
10. Persentase terlaksananya evaluasi Standar Asuhan Keperawatan	100%	100%	100%
11. Persentase indikator SPM Bagian Perencanaan dan Pemasaran yang mencapai target	90%	100%	111,11%
12. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	83,33%	83,33%
13. Persentase KSO baru dibidang pelayanan kesehatan yang diselesaikan	17%	17,07%	100,41%
14. Persentase KSO baru dibidang non pelayanan kesehatan yang diselesaikan	26%	28%	107,69%
15. Persentase indikator SPM Bagian SDM dan Diklit yang mencapai target	90%	100%	111,11%
16. Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi	90%	100%	111,11%
17. Persentase diterbitkannya penelitian dalam jurnal ilmiah	10%	0%	0%
18. Persentase indikator SPM Bagian Keuangan yang mencapai target	90%	100%	111,11%
19. Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar	100%	62,5%	62,5%
20. Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%
21. Persentase indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target	90%	88,89%	98,77%
22. Persentase keluhan pelanggan (Number of complain)	0,02%	0,02%	100%

Dari 22 indikator kinerja program tersebut, terdapat 9 (sembilan) indikator yang tidak mencapai target antara lain Persentase indikator SPM Bidang Pelayanan Medis yang mencapai target, Bed Turn Over (BTO), Net Death Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR), Persentase indikator SPM Bidang Penunjang Medis dan Non Medis yang mencapai target, Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu, Persentase diterbitkannya penelitian dalam jurnal ilmiah, Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar, dan Persentase indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target. Sebagai contoh, indikator Persentase diterbitkannya penelitian dalam jurnal ilmiah belum memenuhi target dengan realisasi dan capaian sebesar 0%. Hal ini dikarenakan syarat untuk menerbitkan jurnal ilmiah detail dan ketat. Selain itu, lamanya proses dalam penerbitan jurnal ilmiah menyebabkan pembayaran tidak dapat diklaim apabila telah lewat dari tahun penelitian, sehingga peneliti harus menggunakan biaya pribadi. Meskipun demikian, tidak tercapainya beberapa indikator kinerja tersebut tidak mempengaruhi kinerja program RSUD Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

No.	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara lebih memadai	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ke-PU-an

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab.Sidoarjo

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Penyusunan Perencanaan teknis dan Pengolaan Data ke-PU-an
2. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir
3. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan

a. Atas Target dan Capaian Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara lebih memadai	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	84%	80%	95%	85,00%	93,06%	109,48%	87%	91,48%	105,14%
	Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi	82%	72%	87%	84%	85,73%	102,06%	85%	83%	97%
	Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani	60%	44%	74%	64%	55,00%	85,94%	65%	53.3%	82%
	Prosentase bangunan yang ber-IMB	60,50%	50%	82%	61%	53,00%	86,89%	-	-	-
	Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	66%	60%	90%	60%	55,00%	91,67%	-	-	-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, bahwa bidang tata Bangunan dan bidang Tata Ruang yang sebelumnya di Dinas PU dan Penataan Ruang pindah ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh sebab itu, indikator kinerja atas bangunan yang ber-IMB dan peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang penanganannya menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur ke-PU-an, dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	83%	82%	98,79 %	84%	80%	95%	85,00%	93,06%	109,48 %	87%	91,48%	105,14 %
Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi	95,95%	86,99 %	90,66 %	82%	72%	87%	84%	85,73%	102,06 %	85%	83%	97%
Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani	0,98%	2,35%	41,70 %	60%	44%	74%	64%	55,00%	85,94%	65%	53.3%	82%
Prosentase bangunan yang ber-IMB	64%	61,22 %	95,66 %	60,50%	50%	82%	61%	53,00%	86,89%	-	-	-
Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	100%	100%	100%	66%	60%	90%	60%	55,00%	91,67%	-	-	-

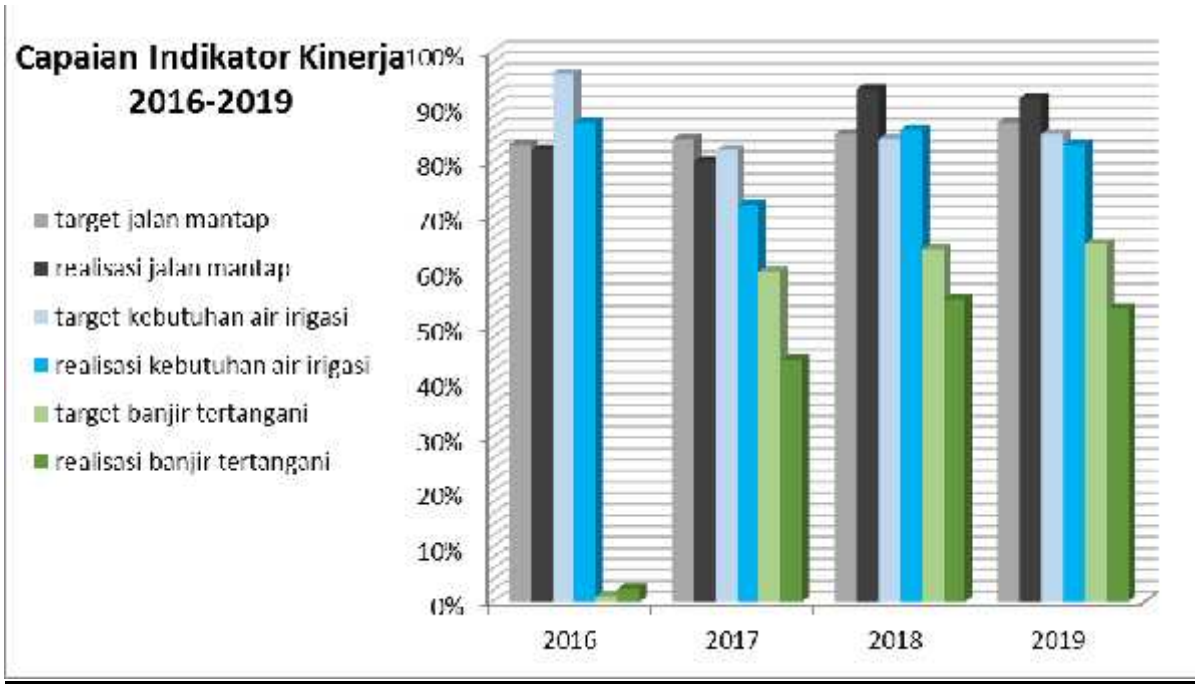

Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat. Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2019 sepanjang 1012,08 km. Adapun Jalan Mantap itu sendiri adalah jalan

dengan kondisi konstruksi yang mana untuk penanganannya hanya membutuhkan kegiatan pemeliharaan. Jalan mantap konstruksi ditetapkan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, dengan besar IRI < 6 m/km *(Parameter kerataan jalan atau International Roughness Index)*. Sedangkan Jalan Tak Mantap Konstruksi adalah jalan dengan kondisi di luar koridor mantap yang mana untuk penanganan minimumnya adalah pemeliharaan berkala dan maksimum peningkatan jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksi. Berikut kondisi seluruh jalan kabupaten baik mantap maupun tak mantap sebagai berikut :

No	Kondisi	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	Baik	849,446	*84,6*	887,153	*87,9*	826,68	*81,68*	683,037	*67,49*
2	Sedang	107,5	*10,7*	80,581	*8,0*	115,15	*11,38*	242,808	*23,99*
Jalan Mantap		956,946	*95,3*	967,734	*95,9*	941,83	*93,06*	*925,845*	*91,48*
3	Rusak	47,006	*4,7*	41,946	*4,1*	70,25	*6,94*	86,217	*8,52%*
Jumlah		1003,95	*100*	1009,68	*100*	1012,08	*100*	*1012,08*	*100%*

Pada Pembangunan Jalan nilai realisasinya rendah, namun target Jalan mantap dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena pembangunan Jalan Frontage Road Waru Buduran sebesar 98 Milyar (75% dari Pagu Pembangunan Jalan) belum terealisasi. Sehingga untuk menjaga kondisi jalan di kabupaten Sidoarjo agar menjadi Jalan Mantap dilakukanlah Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Jalan.

Kondisi jalan mantap mengalami penurunan dengan tahun 2018 dikarenakan:

1. Anggaran dialihkan kedalam kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan kontruksi Jalan beton dengan maksud untuk memperpanjang umur teknis jalan, sehingga anggaran penanganan jalan rusak melalui swakelola dan pemeliharaan rutin jalan banyak terserap di kegiatan atas.

2. Harga satuan untuk pembangunan jalan beton lebih lebih tinggi dari jalan aspal, sehingga pembangunan yang diperoleh juga tidak sepanjang menggunakan harga satuan jalan aspal.
3. Adanya penetapan PAPBD yang terlambat, sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
4. Terdapat kegiatan Peningkatan Jalan yang gagal lelang dan peningkatan jembatan yang mengalami putus kontrak dikarenakan penyedia wanprestasi.

Grafik IV.A.20

Meskipun begitu target tahun 2019 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap 87% dapat terealisasikan menjadi 91,48%, sehingga capaian atas target tersebut sebesar 105,14 %.

Adapun pada tahun 2019 upaya yang dilakukan untuk meningkatkan panjang jalan dalam kondisi mantap, antara lain :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 1.458 meter dengan biaya Rp.25.800.216.166,00;

2. Kegiatan Peningkatan Jalan sepanjang 20.350 meter dengan biaya Rp.86.151.303.979,00;
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan sepanjang 133.543 meter dengan biaya Rp.37.958.455.427,72.

Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi

Luas baku sawah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan Daerah irigasi (DI) Delta Brantas pada tahun 2019 seluas 21,371 Ha, dengan kebutuhan air irigasi sebesar 17.745 liter/detik sesuai Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2019 sedangkan ketersediaan air irigasi untuk wilayah Daerah Irigasi (DI) Delta Brantas sebesar 17.212 liter/detik berdasarkan Pola Operasi Waduk dan Alokasi Air (POWAA) yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah Sungai Brantas.

Adapun realisasi luas sawah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 yang dapat diairi adalah sebagai berikut:

	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
Luas sawah yang dapat diairi	18,227.4	85%	17,737.9	83%
Luas sawah yang ada	21,444.0		21,371.0	

Adapun tahun 2019, layanan irigasi di Kabupaten Sidoarjo dapat terealisasikan dengan baik. Hal tersebut dapat diatasi melalui :

1. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplisi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi.
2. Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam
3. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.

Cakupan layanan irigasi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Cakupan Layanan irigasi Tahun 2019

URAIAN	ketersediaan (liter/detik)	kebutuhan (liter/detik)	%
2016	20235.56	23262.10	86.99%
2017	15185.00	16777.00	90.51%
2018	11668.00	12785.00	91.26%
2019	17212.00	17745.00	96,99%

Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani

Adapun target tahun 2019 adalah sebesar 65%, sedangkan tahun 2019 kondisi genangan di Kabupaten Sidoarjo adalah 523,4 Ha, jadi realisasi hanya 53,3% yang diperoleh dari 523,4 Ha / 982 Ha. Sehingga capaian atas realisasi dibagi target adalah 85%.

Target	Realisasi	Capaian
65%	53,3%	82%

Untuk mengendalikan genangan / banjir di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah delta telah dilakukan pengendalian/ penanganan secara koordinatif antar dinas terkait.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Ketepatan dalam manajemen pengelolaan air
2. Normalisasi saluran dan afvoer
3. Operasional dan pemeliharaan pintu – pintu air pada Dam / bending
4. Operasional rumah pompa / busem
5. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuang yang menuju afvoer utama

Rincian lebih lanjut lokasi genangan yang terjadi sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Lokasi Genangan

	Lokasi	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)	2019 (Ha)
1	Pertanian	509	490	405	471,4
2	Permukiman	90	82	68	52
	Jumlah	**599**	**572**	**503**	**523,4**

Adapun Grafiknya adalah sebagai berikut:

Grafik IV.A.21

Adapun data lokasi genangan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Data Lokasi Genangan per kecamatan

No.	Pertanian	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Segodobancang	Tarik	35.4
2	Kemuning	Tarik	25
3	Pesawahan	Porong	45
4	Candipari	Porong	45
5	Pamotan	Porong	50
6	Kupang	Jabon	90
7	Pertapan Maduretno	Taman	80

8	Tawangsari	Taman	23
9	kloposepuluh	Sukodono	68
10	Bringinbendo	Taman	10
A	**JUMLAH**		**471.4**
No.	Permukiman	Kecamatan	
1	Tawangsari	Taman	3
2	Tropodo	Waru	1
3	Tambaksawah	Waru	7
4	Tambakrejo	Waru	4
5	Semambung	Gedangan	3
6	Sidokare	Sidoarjo	2
7	Sepande	Sidoarjo	2
8	Kedungbanteng	Tanggulangin	3
9	Banjarasri	Tanggulangin	3
10	Candipari	Porong	1
11	Kupang	Jabon	5
12	Siring	Porong	6
13	Pesawahan	Porong	2
14	Kepuhkiriman	Waru	3
15	Wage	Taman	1
16	Bringinbendo	Taman	3
17	Sidodadi	Candi	3
B	**JUMLAH**		**52**
(A+B)	**TOTAL**		523.4

Penurunan luas genangan baik di pertanian dan pemukiman juga dikarenakan koordinasi antar *stakeholder.* Selain itu upaya penurunan genangan diantaranya adalah adanya peran serta pengembang untuk menyediakan lahan resapan/buzem serta peran masyarakat tidak membuang sampah di saluran, sehingga air yang tergenang dapat mengalir pada saluran yang tersedia.

c. Program dan Kegiatan

1. Program Penyusunan Perencanaan teknis dan Pengolaan Data ke-PU-an dengan anggaran sebesar Rp.11.343.325.215,00

   Meskipun realisasi anggaran kurang dari 80% tapi kinerja yang dilakukan sudah hampir 100% dikarenakan dokumen perencanaan teknis yang disusun sudah terselesaikan untuk kebinamargaan sebesar 95%, untuk irigasi 100%, dan pematusan 81 %. Dan sisa anggaran yang tidak diserap

adalah sebesar 26,67% dikarenakan silpa dari sisa antara pagu anggaran dan nilai kontrak paket yang ditetapkan.

Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
a. Persentase perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun b. Persentase perencanaan teknis irigasi yang disusun c. Persentase perencanaan teknis pematusan dan pengendalian banjir yang disusun	a. 100% b. 100% c. 100%	a.95% b.100% c. 81%	a.95% b.100% c. 81%

Permasalahan:

Kegiatan perencanaan teknis yang menghasilkan dokumen perencanaan teknis (DED) dibayar 80% sesuai dengan Perbup No. 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 2019, sehingga ada selisih 20% yang akan dibayarkan setelah fisik dikerjakan/ dimanfaatkan termasuk apabila ada kebutuhan penyesuaian desain, dan biasanya realisasi pembayaran atas dana yang sebesar 20% baru dilakukan tahun berikutnya (n+1)

Solusi:

Optimalisasi pelaksanaan atas perencanaan yang disusun.

2. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir dengan anggaran sebesar Rp 113.221.624.302,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.478.012.387,- atau 64,90%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
a. Persentase jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan dan dipelihara b. Persentase saluran pematusan yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara c. Persentase pemenuhan sarpras pengendalian banjir d. Persentase kecamatan yang mendapatkan sosialisasi SPS e. Persentase aset pengairan tertangani	a. 85% b. 21% c. 55% d. 83% e. 34,4%	a. 80% b. 18% c. 50% d. 20% e. 30%	a. 94,12% b. 85,71% c. 90,91% d. 24,09% e. 87,21%

Permasalahan:

Adanya beberapa paket pekerjaan yang gagal lelang (penangguhan pekerjaan) yang nilainya cukup besar diantaranya adalah sebagai berikut:

Paket Pekerjaan	Nilai
Pembangunan Pintu Air dan Pompa Ds. Lebo Kec. Sidoarjo	1,800,000,000.00
Pembangunan / peningkatan saluran, Afv. Wilayut - SAWOCANGKRING	1,210,705,000.00
Peningkatan Pintu dan Pompa Air di DAM Kedungpeluk Kec.Candi	500,000,000.00
Perbaikan pintu air Afv. Pranti Ds. Sedatigede Kec. Sedati	400,000,000.00
Pembangunan / peningkatan saluran, Dsn Beciro RT 11 RW 03 - JUMPUTREJO	337,280,000.00

Selain itu hal tersebut juga adanya efisiensi dari sisa Hasil Penawaran, sehingga realisasi anggaran sebesar 64,90%.

Solusi:

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik agar sesuai jadwal

3. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan dengan anggaran sebesar Rp. 510.033.637.631,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 268.652.257.424.72,- atau 52,67%

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
a. Persentase panjang jalan kabupaten yang dibangun	a. 1,65%	a. 0,14%	a. 8%
b. Persentase panjang bagian-bagian jalan kabupaten yang dibangun	b. 1,70%	b. 1-,32%	b. 77,69 %
c. Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	c. 1,80%	c. 2,01%	c. 111 %
d. Persentase panjang jalan dan jembatan yang dipelihara	d. 16,00%	d. 9,12%	d. 57 %
e. Persentase pemanfaatan jalan dan jembatan yang berijin	e. 100%	e. 100%	e. 100 %

Adapun pada pembangunan jalan nilai realisasinya rendah dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam Pembangunan Jalan Frontage Road

Waru-Buduran. Pada Pembebasan Lahan hingga tahun 2019 untuk Pembangunan Frontage Road Waru-Buduran, adapun tanah yang sudah dibebaskan dan yang belum dibebaskan adalah sebagai berikut:

KEPEMILIKAN TANAH	LAHAN SUDAH DIBEBASKAN (m^2)	LAHAN BELUM DIBEBASKAN (m^2)	TOTAL (m^2)
TNI-AL (Hibah)	18.530	-	**18.530**
Perusahaan	7.731	18.762	**26.493**
Masyarakat	15.085	13.822	**28.907**
TOTAL	**41.346**	**32.584**	**73.930**

Dari anggaran Rp.152.659.808.355,00 yang dapat terserap sebesar 86,151,303,979.00, yakni 56,43% dari Anggaran.

Permasalahan:

1. Untuk kegiatan peningkatan jalan, satu kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan terjadinya gagal lelang pada proses pelelangan dan tidak dilakukan lelang ulang karena waktu tidak mencukupi
2. Untuk kegiatan Pembangunan Jalan, dua kegiatan belum bisa dilaksanakan karena belum selesainya BAST Hibah Tanah dari Kementrian Pertahanan RI dan sebagian tanah yang akan dibangun statusnya milik PT.KAI
3. Untuk pembangunan Jembatan lima kegiatan belum bisa dilaksanakan dikarenakan Gagal Lelang pada proses pelelangan dan tidak dilakukan lelang ulang karena waktu tidak mencukupi, Tanah yang akan dibangun statusnya milik Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) VIII Surabaya sehingga diperlukan ijin, Penyedia Jasa tidak melaksanakan kegiatan sehingga dimasukkan daftar hitam (Black List), dan Jembatan sudah dibangun oleh OPD lain.
4. Untuk pembebasan lahan hasil nilai appraisal yang disampaikan ke warga sebagian masih belum disetujui atau diterima oleh warga terdampak jalan Frontage Road.

Solusi:

1. Diusulkan kembali kegiatan yang gagal lelang atau kegiatan yang tertunda pelaksanaanya untuk dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Melayangkan surat dan koordinasi dengan Kemenhan dan PT. KAI Daop VIII terkait BAST hubah dan terkait tanah PT KAI.

3. Melayangkan surat dan koordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) VIII terkait rencana pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
4. Menjelaskan kembali hasil nilai appraisal ke warga bahwa nilai appraisal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara umum sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR).

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterkaitan antara sasaran RPJMD
dengan tujuan dan sasaran Dinas P2CKTR

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra Dinas P2CKTR	Sasaran Renstra Dinas P2CKTR
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Tata Ruag 2. Terwujudnya akses masyarakat terhadap pelayanan kebutuhan dasar dan kualitas lingkungan yang sehat	1. Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur 2. Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang 3. Prosentase masyarakat yang menggunakan air bersih 4. Prosentase masyarakat yang mempunyai sanitasi sehat 5. Prosentase Rumah Layak Huni 6. Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik

	3. Terwujudnya bangunan pemerintah yang layak fungsi 4. Terwujudnya bangunan gedung yang berijin	7. Prosentase bangunan gedung negara yang layak fungsi 8. Prosentase bangunan yang ber-IMB

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Penataan Bangunan
2. Program Pengawasan Bangunan
3. Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Atas Target dan Capain Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Tata Ruag	Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang				61	158,34	259,6	63	136	216
	Persentase peningkatan rumah layak huni		280			395			501	
	Persentase Prasarana Sanitasi yang disediakan sesuai target		415.057			417.665		91	93	102
	Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target		134.663 3,94%			137.094 4,01%		3.5	139.141 4,07%	116
	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh		298.98 82,78%			249.85 79,95%		67	218.63 69,96%	133
Terwujudnya bangunan pemerintah yang layak fungsi	Prosentase bangunan gedung negara yang layak fungsi							30	29,27	97,59
Terwujudnya bangunan gedung yang berijin	Prosentase bangunan yang ber-IMB	60,05%	60,05% 280.409	100	61%	61% 281.918	100	63% 341.538	148% 438.388	128,4

Secara garis besar indikator kinerja yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai realiasi yang selalu meningkat. Secara rinci atas capaian kinerja Tujuan diuraikan dalam target dan capaian kinerja sasaran.

b. Atas Target dan Capaian Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya efektifitas pemanfaatan ruang

Dengan Target dan Capaian Kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1) Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur	100	100	100	100%	80	80
2) Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang				63%	136	216

1) **Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang**

Terjadi peningkatan pemanfaatam lahan sesuai dengan rencana tata ruang, dari 95 Ha pada tahun 2018 menjadi 200 Ha pada tahun 2019 (dengan besaran target yang berbeda), yaitu sebagai berikut:

Uraian	2018	2019
Target	60 Ha	120 Ha
Realisasi	**95 Ha**	**200 Ha**
%	158,34	125

Grafik IV.A.22

Capain kinerja pemanfaatan lahan **sesuai dengan rencana tata ruang secara luasan meningkat walaupun secara prosentase terjadi sedikit penurunan.** Namun demikian masih terdapat perkembangan pertumbuhan bangunan tidak sejalan dengan Dokumen RTRW, karena banyak terjadi proses pengurusan perijinan dilakukan pada saat proses pembangunan sedang dilaksanakan atau pembangunan sudah selesai baru perijinan diproses.

Sasaran 2:

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kebutuhan dasar dan kualitas lingkungan yang sehat

Dengan Target dan Capaian Kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1) Persentase peningkatan rumah layak huni		229			280			395			435	
2) Persentase Prasarana Sanitasi yang disediakan sesuai target					415.057			417.665		91	93	102
3) Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target					134.663 3,94%			137.094 4,01%		3.5	139.141 4,07%	116
4) Persentase penurunan luasan kawasan kumuh		300.03 83,07%			298.98 82,78%			249.85 79,95%		67	218.63 69,96%	133

1) Persentase peningkatan rumah layak huni

Sampai Tahun 2019 kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selain memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) juga memperoleh bantuan dari APBD Propinsi yang dilaksanakan oleh KODIM dan dana Corporation Social Responbility (CSR). Dengan Jumlah rumah yang tidak layak huni sebanyak 443.360 unit, sampai dengan akhir tahun 2019 telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 442.857 unit rumah tinggal,

atau sekitar 99,89% dari jumlah keseluruhan rumah tinggal di Kabupaten Sidoarjo.

Rincian rumah tidak layak huni yang dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Unit rumah	Keterangan
1	**Target Awal rumah tidak layak huni**		**443.360**
2	Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah dilakukan rehabilitasi s/d tahun 2014	**442.356**	
3	Tahun 2015	159	
4	Tahun 2016	70	
5	Tahun 2017	51	
6	Tahun 2018	115	
7	Tahun 2019	105	
8	Jumlah rehabilitasi 2015 - 2019	501	
9	Jumlah seluruh rumah yang direhabilitasi		**442.867**
10	Sisa yang belum direhabilitasi		**503**

Secara akumulasi sejak masa RPJMD/Rentra rumah tidak layak huni yang dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi perbaikan RTLH (unit Rumah)	159	229	280	395	501

Grafik IV.A.23

Pada Tahun 2019 telah dilakukan realisasi peningkatan rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 106 Unit. Sehingga pada akhir tahun 2019 tersebut diketahui terdapat 503 Unit rumah yang belum dilakukan rehabilitasi. Keberhasilan peningkatan rumah layak huni ini telah banyak dilakukan oleh kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat,

1) **Persentase Prasarana Sanitasi yang disediakan sesuai target**

Rumah Tangga yang bersanitasi sehat pada Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 berjumlah 421.070 KK. Terdapat kenaikan jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi sehat sebesar 3.405 KK pada Tahun 2019.

Uraian	2017	2018	2019
RT bersanitasi sehat	415.057	417.665	421.070

Grafik IV.A.24

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidaorjo keseluruhan sebesar 2.266.533 jiwa atau 718.982 KK, maka 92,9% penduduk Kabupaten Sidoarjo bersanitasi sehat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga ber sanitasi sehat, antara lain :

- Pembangunan jamban sehat di wilayah tidak padat penduduk
- Pembangunan IPAL Komunal di wilayah padat penduduk

2) Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target

Untuk tahun 2019 jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih yang dibangun oleh PDAM sebesar 138.128 SR dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar 2.047 SR dengan capaian sebesar 4,45% dari target kewajiban OPD sebesar 10% (RISPAM Kabupaten Sidoarjo), sehingga total SR yang dikelola oleh Pemda sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 6.671 SR/KK.

Uraian	2017	2018	2019
SR pengguna air bersih	134.663	137.094	140.175
PDAM	134.897	137.094	138.128
PEMDA	3.001	4.624	6.671

**SR = Sambungan Rumah*

Grafik IV.A.25

Dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan PEMDA Kabupaten Sidoarjo di bawah cakupan pelayanan PDAM. Hingga akhir Tahun 2019 terdapat selisih sebesar 19,62% pencapaian pelayanan antara PDAM dan Pemda Kabupaten Sidoarjo. Namun dari masing-masing pelayanan baik PDAM maupun Pemda Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk terlayani yang cukup signifikan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sidaorjo keseluruhan sebesar 2.266.533 jiwa atau 718.982 KK, maka 30,9% penduduk Kabupaten Sidoarjo terlayani air bersih.

4) Persentase penurunan luasan kawasan kumuh

Hingga tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui SK Bupati No.188/452/404.1.3.2/2015 tanggal 27 April 2015 tentang kawasan permukiman kumuh Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa Luasan kawasan kumuh adalah 301,08 Ha.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	301,08	300,03	298,98	249,85	218.63

Grafik IV.A.26

Pada Tahun 2019 terjadi penurunan luas kawasan kumuh sebesar 69,96% dari keseluruhan luasan kawasan kumuh 301,08 Ha yaitu 31,22. Sehingga didapatkan sisa luasan kawasan kumuh sebesar 218,63 Ha.

Untuk mendukung indikator sasaran tersebut di atas, didukung dengan indikator program yang memberikan konstribusi atas sasaran diatas yaitu:

- Masyarakat bersanitasi sehat
- Masyarakat pengguna air bersih
- Pembuatan/Pembangunan taman – taman/penghjijauan pada masing masing lingkungan
- Pembersihan lingkungan secara swadaya/gotong royong oleh masyarakat.

Secara garis besar indikator kinerja yang ada pada sasaran **Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kebutuhan dasar dan kualitas lingkungan yang sehat** mempunyai realiasi yang selalu meningkat. Meskipun beberapa indikator ada yang belum mencapai target tahunan terkait anggaran yang terbatas.

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak dijumpai permasalahan yabg signifikan, namun demikian seringkali anggaran yang terbatas mempengaruhi terhadap optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam hal penanganan kawasan kumuh termasuk kegiatan Penyelesaian kajian saluran dilakukan bertahap menyesuaikan tersedianya dana dalam DPA.

Solusi:

Menambah Anggaran/Optimalisasi penggunaan Anggaran pada bidang yang urgent dan berkoordinasi dengan Provinsi dan Kementerian PUPR dan pihak terkait lainnya termasuk partisipasi mayarakat dalam penanganan masalah kawasan kumuh

Sasaran 3:

Meningkatnya bangunan pemerintah yang layak fungsi.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%
Prosentase bangunan gedung negara yang layak fungsi	30	29,27	97.59

Bangunan Gedung yang layak fungsi dimaksudkan adalah bangunan yang dibangun dan memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Dalam hal ini Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung pemerintah yang telah diajukan oleh OPD lain sesuai dengan ketentuan (dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00). Selain itu Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga memfasilitasi pelayanan pengajuan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Permasalahan:

Belum adanya keputusan terkait pelaksanaan Pembangunan RSUD Wilayah Barat, sehingga mengakibatkan adanya SILPA pada program/kegiatan ini dan target kinerja tidak sepenuhnya dapat tercapai.

Solusi:

Sambil meneunggu kesepakatan Eksekutuif dan Legislative tentang kepastian pendanaan RSUD Krian, apakah sepenunya dengan APBD atau bekerjasama dengan pihak ketiga melalui mekanisme KPBU, telah dilakukan penganggaran kembali pada Tahun 2020.

Sasaran 4:

Meningkatnya bangunan gedung yang berijin

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase bangunan yang ber-IMB		277.999			280.409			281.918		63	128,4	203,8

Di tahun 2019 bangunan ber IMB sebesar 438.388 lebih banyak apabila dibandingkan dengan bangunan ber IMB di tahun 2018 sebanyak 281.918, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 156.470 bangunan yang ber IMB. Kenaikan bangunan ber IMB disebabkan :

a. Kesadaran masyarakat akan perijinan bangunan.
b. Adanya ketentuan yang mengharuskan bangunan ber-IMB untuk pengajuan ke Bank.
c. Kemudahan pelayanan perijinan berbasis Informasi Teknologi / IT.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Bangunan ber-IMB	183.025	277.999	280.409	281.918	438.388

Grafik IV.A.27

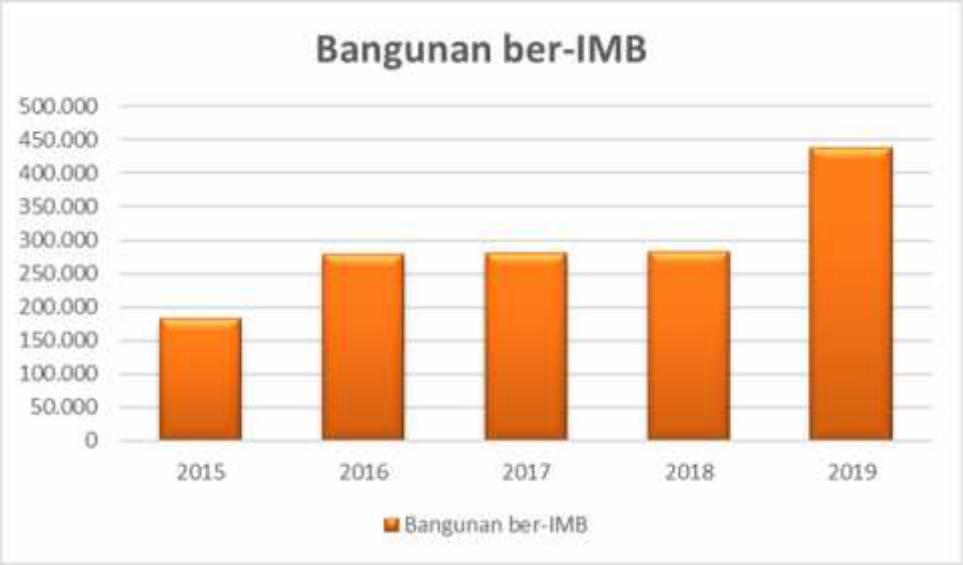

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah bangunan ber IMB adalah :

a. Masih banyak pengajuan IMB yang tidak sesuai kondisi di lapangan
b. Perkembangan pertumbuhan bangunan tidak sejalan dengan RTRW
c. Pembangunan yang tidak didukung IMB tanpa penertiban.

Sedangkan apabila diperbandingkan dengan target di tahun 2019 sebanyak 438.388 bangunan, maka tercapai sekitar 100%.

Permasalahan :

a. Subjek data / pemilik hunian sulit ditemui / tidak mengetahui terkait kepemilikan IMB dimaksud dan atau permasalahan lain yang berhubungan dengan IMB rumah/bangunan yang dihuni.
b. Data base rumah ber IMB tidak sepenuhnya Up date.
c. Subyek data masih banyak yang belum tahu terkait pemberlakuan perda No. 4 Tahun 2012 Tentang IMB di wilayah kabupaten Sidoarjo.
d. Maraknya pembangunan-pembangunan tanpa memiliki IMB.

Solusi:

a. Berkoordinasi secara terus menerus dengan pemerintahan wilayah guna memantau perkembangan masyarakat yang melakukan pengurusan IMB.
b. Bekerjasama dengan instansi terkait guna melakukan kegiatan sosoalisasi Perda No.4 Tahun 2012 Tentang IMB.

1. Sosialisasi kepada warga dan ASN yang ada di wilayah (Kelurahan/Desa, Kecamatan).
2. Melakukan pemberian teguran 1,2,3, penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak ber-IMB.
3. Permintaan data rekanan pada asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan OPD Penerbit IUJK.
4. Dilakukan bimbingan teknis Uji Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja terampil.

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Penataan Bangunan** dengan anggaran sebesar Rp.322.126.859.139,07,- dan terealisasi sebesar Rp.176.757.276.537,- atau 54,87%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
Prosentase bangunan gedung negara yang layak fungsi	30%	29,27%	97.59%

Permasalahan:

Sampai dengan akhir tahun 2019 belum terlaksananya pembangunan RSUD Krian, karena belum adanya keputusan/kesepakatan antara legislative dan eksekutif terkait pendanaannya, apakah selrunmya dengan APBD atai dengan model KPBU bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai komitmen dan kompetensi di bidangnya.

Solusi:

Diupayakan dan diharapkan tahun 2020 sudah ada kejelasan dan titik temu antara Legislatif dan Eksekutif terkait kepastian metode pembangunan RSUD Krian, melalui mekanisme KPBU atau APBD.

2. **Program Pengawasan Bangunan** dengan anggaran sebesar Rp.1.485.988.460,- dan terealisasi sebesar Rp.1.235.721.180,- atau 83,16%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
Prosentase bangunan yang ber-IMB	63%	128,4%	203,8%

Permasalahan:

a. Subyek data masih banyak yang belum tahu terkait pemberlakuan perda No. 4 Tahun 2012 Tentang IMB di wilayah kabupaten Sidoarjo.
b. Maraknya pembangunan-pembangunan tanpa memiliki IMB.
c. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mempunyai peta per wilayah/Kecamatan dan data base terhadap rumah yang seharusnya ber IMB dan permasalahan yang berhubungan dengan IMB rumah yang dihuni

Solusi:

a. Melakukan inventarisasi/ indentifikasi/ pemetaan dan penyusunan/ membangun data base terhadap rumah yang harus/ wajib ber IMB
b. Bekerjasama dengan instansi terkait guna melakukan kegiatan sosoalisasi Perda No.4 Tahun 2012 Tentang IMB.
c. Melakukan pemberian teguran 1,2,3, penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak ber-IMB.

d. Permintaan data rekanan pada asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan OPD Penerbit IUJK.

3. **Program Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, dan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan** dengan anggaran sebesar Rp. 14.733.262.273,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.671.315.358,- atau 92,79%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur	100	80	80
Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	63%	136	216

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak dijumpai permasalahan terkait dengan pengadaan hambatan yang terjadi karena Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan belum terlaksana secara maksimal karena bergantung dari permasalahan pertanahan yang diajukan oleh pemohon.

Solusi:

a. Memberikan informasi terkait dengan adanya fasilitas penyelesaian pertanahan.
b. Koordinasi secara internal maupun eksternal (BPN dan pihak terkait lainnya) untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

4. **Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman** dengan anggaran sebesar Rp. 75.364.191.458,- dan terealisasi sebesar Rp.57.875.407.124,- atau 76,79%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
Prosentase jalan lingkungan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	90%	5%	5,5
Persentase Prasarana Sanitasi yang disediakan sesuai target	91%	93%	102
Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	3.5%	4,07%	116
Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	67%	89,63%	133
Prosentase penanganan drainase sesuai dengan kajian	65%	10%	15,3
Persentase pelayanan PALD sesuai target	8%	13,36%	167
Persentase jumlah hunian RUSUNAWA yang dihuni	95%	105,45%	111

Permasalahan:

a. Anggaran terbatas terkait pelaksanaan pengembangan sarana prasarana permukiman, khususnya untuk pencapaian indikator Prosentase jalan lingkungan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik.
b. Penyelesaian kajian saluran dilakukan bertahap karena dana yang tesedia.

Solusi:

a. Untuk pencapaian indikator Prosentase jalan lingkungan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik tetap dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
b. Menambah anggaran dan berkoordinasi dengan Provinsi dan Kementerian.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum yang berkeadilan	Terwujudnya Sidoarjo aman, tertib dan tentram	1. Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat 2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Program pembangunan untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah :

Program Pembangunan yang dilaksanakan

1. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Program pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang undangan daerah
3. Program perlindungan masyarakat

Untuk mendukung capaian sasaran RPJMD tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan sebagai berikut :

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya sidoarjo yang aman, tertib dan tentram	Indeks Rasa Aman	72,44	72,44	100 %	73,89	73,77	99,83%	75,37	76,01	100,8%

Grafik IV.A.28

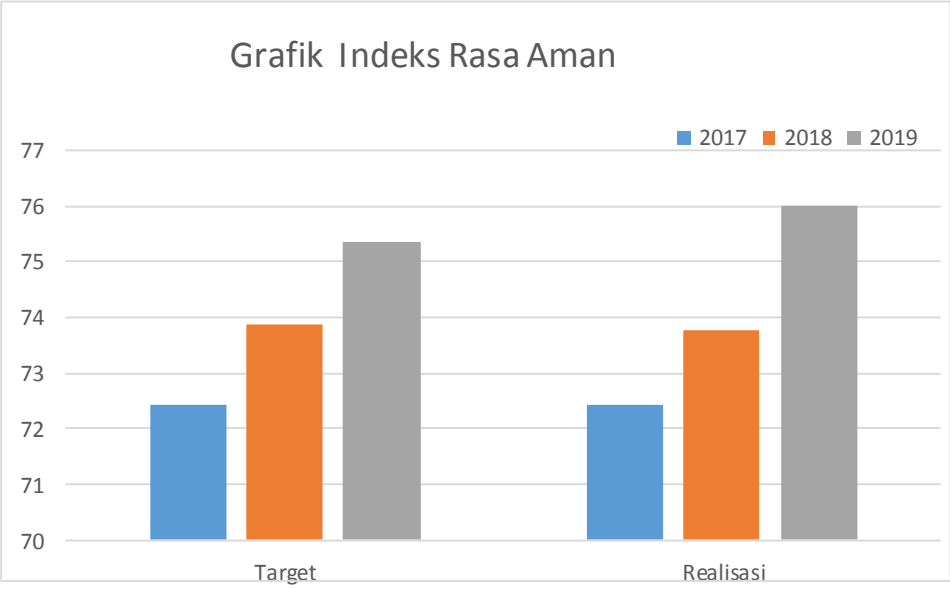

Indeks Rasa Aman digunakan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD untuk indeks rasa aman adalah 75,37% , sedangkan capaian tahun 2019 adalah 76,01%, sehingga tercapai 100,8%.

Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Kenyamanan/rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia salah satunya yaitu kebutuhan akan ketentraman.

Mendasari definisi rasa aman diatas, indeks rasa aman dalam hal ini dapat diartikan sebagai petunjuk angka sebagai tolak ukur untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana tingkat rasa aman/nyaman/ketentraman yang dirasakan warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Pada tahun 2019 telah dilakukan survey/pengukuran indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo, dengan responden 150 orang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan memperoleh hasil Nilai Indeks Rasa Aman 76,01 % dengan kategori Rasa Aman Tinggi.

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT	1:0,88	1:0,90	102	1:0,95	1:0,94	98,9%	1:1	1:1	100
Persentase poskamling yang aktif	NA	NA	NA	30%	32%	107%	32%	33%	103

Grafik IV.A.29

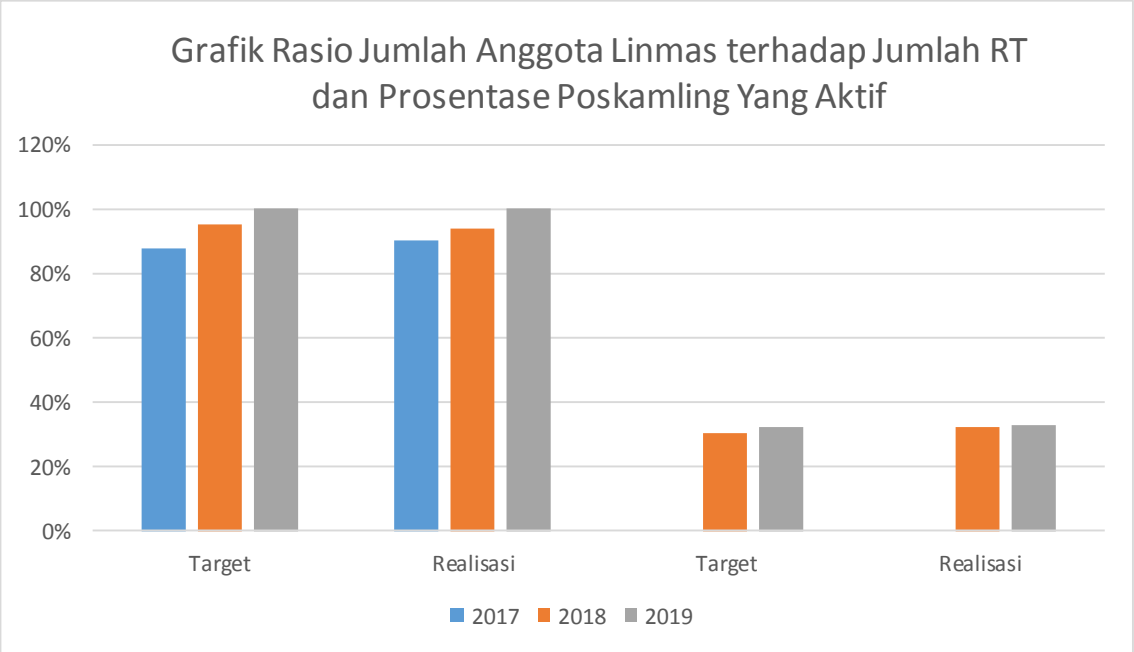

b. Persentase anggota Satlinmas yang aktif dalam pengendalian lingkungan

Penjelasan mengenai indikator program ini menguraikan 2 (dua) variabel pendukung, antara lain sebagai berikut :

1) Rasio jumlah Satlinmas terhadap Jumlah RT (Rukun Tetangga)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 ahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, disebutkan ideal komposisi personil Satlinmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah personil Satlinmas berbanding dengan jumlah RT (Rukun Tetangga).

Kondisi riil jumlah RT di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 8.427, sedangkan jumlah personil Satlinmas yang ada sampai dengan tahun 2019 terdata sebanyak 8.051 Personil. Target pemenuhan/penambahan anggota Satlinmas pada tahun 2019 adalah 1% (80 personil). Pencapaian target dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat. Secara eksplisit kegiatan dimaksud berupa Sosialisasi terhadap warga masyarakat perihal urgensi keberadaan dan partispasi satlinmas dalam pengendalian keamanan lingkungan, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan tanggap bencana. Sasaran utama *locus* sosialisasi ditujukan pada Desa/Kelurahan yang masih minim jumlah personil satlinmasnya.

Dari penetapan target tahun 2019 (1%/80 personil), pemenuhan/penambahan anggota satlinmas telah tercapai pada angka 8.051 personil. Berikut penyajian data perihal pemenuhan anggota satlinmas.

NO	URAIAN DATA	TARGET RENSTRA 2019	REALISASI KINERJA 2018
1	Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (sesuai SPM 1 RT / 1 anggota linmas)	1 : 1 (80 Orang)	1 : 1 (80 Orang)

NO	URAIAN DATA	JUMLAH
1	Jumlah RT Se-Kabupaten Sidoarjo	8.427
2	Jumlah linmas desa yang harus dipenuhi/direkrut selama 3 tahun (2017 – 2019)	1.109
3	Jumlah Linmas yang harus direkrut tahun 2019 (target)	80 (1%)
4	Jumlah Linmas Desa yang telah direkrut tahun 2019 (pencapaian target)	8.051
5	Jumlah total anggota satlinmas se-Kabupaten Sidoarjo tahun 2019	8.051

Berikut Grafik Peningkatan/Penambahan Anggota Satlinmas di Kabupaten Sidoarjo

Grafik IV.A.30

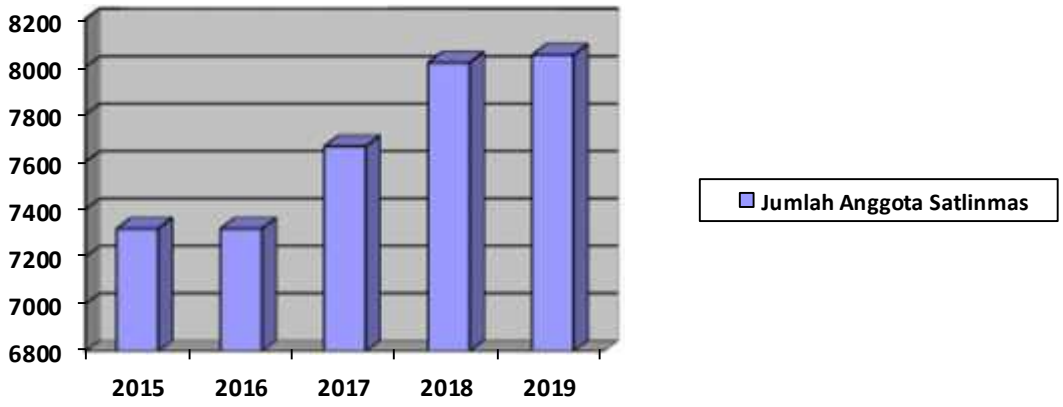

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam perekrutan anggota satlinmas desa/kelurahan antara lain :

- Rata-rata personil anggota linmas di desa/kelurahan sudah lanjut usia
- Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses perekrutan
- Pemerintah desa/kelurahan masih banyak yang belum memahami fungsi kelinmasan
- Pemerintah desa/kelurahan masih banyak belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan linmas

Upaya/langkah untuk pemenuhan personil Satlinmas pada tahun selanjutnya antara lain :

- Melakukan inventarisasi dan menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT
- Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan Satlinmas di setiap RT kepada Kepala Desa/lurah dan Kepala RW
- Melakukan Sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada Camat, Kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM

2) Peran Aktif Satlinmas Dalam Pelaksanaan Fungsi Kelinmasan

Pengkoordinasian dan pengerahan satlinmas desa/kelurahan merupakan tupoksi dari Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pengerahan anggota satlinmas desa/kelurahan ditujukan pada partisipasi dan fungsi kelinmasan seperti pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tanggap bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan (*sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat*).

8. Program Perlindungan Masyarakat

dengan anggaran sebesar Rp. 500.826.225 dan terealisasi sebesar Rp. 450.876.225,- atau 90,93 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase satlinmas yang aktif dalam pengendalian lingkungan	100%	100%	100%

Sasaran 2: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase penanganan gangguan tibuntranmas yang diselesaikan	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Grafik IV.A.31

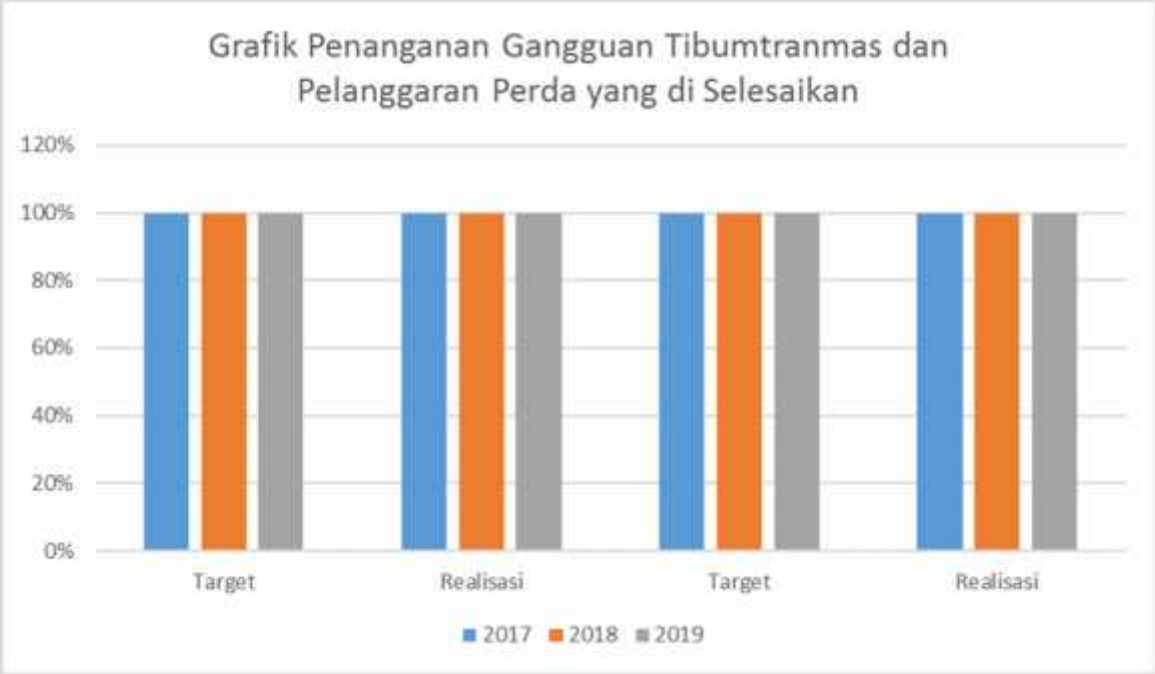

c. Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani

Ruang lingkup penegakan peraturan daerah salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadinya pelanggaran peraturan daerah dengan langkah penindakan represif yustisial.

Bentuk pelaksanaannya diimplementasikan dengan penyelenggaraan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelaku pelanggaran peraturan daerah.

Jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah melalui proses sidang tipiring pada tahun 2019 sebanyak 434 pelanggar. Kondisi ini mengalami penurunan 25 % dari tahun 2018 yang menyidangkan sebanyak 576 pelanggar.

Grafik IV.A.32

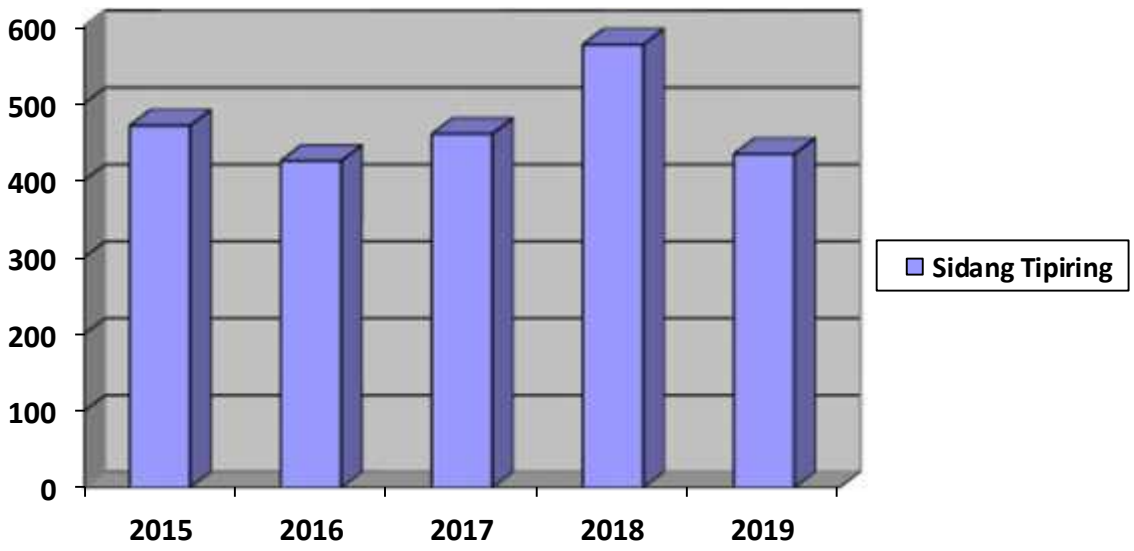

Dari data grafik diatas dapat diketahui terjadi penurunan jumlah pelanggar yang ditindak secara pro yustisial pada tahun 2019, hal tersebut dikarenakan sosialisasi penegakan perda tahun 2019.

Penegakan peraturan daerah secara pro yustisial pada tahun 2019 dititikberatkan pada lokasi – lokasi yang ditentukan guna mendukung dan sinkron dengan penanganan gangguan tibumtranmas. Prioritas utama penegakan peraturan daerah dan gangguan tibumtranmas adalah pada wilayah 9 (sembilan) jalur utama seperti yang dijelaskan pada point sebelumnya.

Narasi positif yang dapat disampaikan dalam hal ini adalah peningkatan frekuensi penindakan pro yustisia dan peningkatan jumlah pelanggar peraturan daerah berefek pada peningkatan prosentase wilayah atau lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah. Dalam hal ini dapat dilihat secara real di lokasi – lokasi seperti

Jl. Gajah Mada, Jl. Mojopahit, Jl. Sisingamangaraja, Sepanjang Jalan Raya waru, Jalan Raya Porong, Jalan Raya Gading Fajar, Sepanjang Taman Pinang dan Pondok Jati serta area Gor dan Jl. Raden Patah.

Berikut Tabel Jumlah Penindakan Yustisial terhadap Pelanggar Perda tahun 2019.

REKAP DATA TIPIRING TAHUN 2019

No.	Tanggal Sidang	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar (Orang)	KET
1.	20 Februari 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	43	100%
2.	3 Maret 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	55	100%
3.	10 April 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	35	100%
4.	18 Juni 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	63	100%
5.	10 Juli 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	23	100%
6.	24 Juli 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	63	100%
7.	11 September 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	80	100%
8.	18 September 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	23	100%
9.	9 Oktober 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	35	100%
10.	13 November 2019	Perda 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	32	100%
		Total	**434**	

1. **Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 605.072.120 dan terealisasi sebesar Rp. 582.865.202,48,- atau 96,33 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	100%	100%

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah secara yustisial antara lain :

- Pelaksanaan sanksi administrasi belum berjalan dengan optimal (OPD pengampu perda belum optimal melaksanakannya)
- Kebanyakan perda yang ada saat ini memuat sanksi 6 (enam) bulan sehingga dalam penegakannya membutuhkan waktu yang lama (pemberkasan biasa)
- Tenaga PPNS yang ada saat ini kurang mencukupi
- Kurangnya dukungan anggaran di Kesekretariatan PPNS

Adapun upaya – upaya untuk pencegahan pelanggaran peraturan daerah antara lain :

- Intensifitas kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan di masyarakat yang berpotensi melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah
- Melaksanakan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah (OPD) penginisiasi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah
- Melakukan pengarahan/penyuluhan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah bersama

dengan OPD lainnya dan Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah

a. Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan

Penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal ini adalah tindakan Non Yustisial. Temuan indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarkat didapat dari hasil patroli dan penertiban non yustisial. Berikut penyajian data penyelesaian gangguan tibumtranmas tahun 2019

NO	Jenis Gangguan Tibumtranmas	Jumlah Gangguan Tibumtranmas	Jumlah yang diselesaikan
1	PKL	434	434
2	PMKS	121	121
3	Bangunan Liar	124	124
4	RHU (Rumah hiburan umum)	19	19
5	Reklame Insidentil dan Tetap	72	72
	JUMLAH	**770**	**770**

Pada tahun 2019, prosentase gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengalami penurunan 16,36 % dari tahun 2018 dari sebanyak 896 pelanggar (Thn 2018) menjadi sebanyak 770 pelanggar (thn 2019). Berikut grafik penyelesaian gangguan tibumtranmas per-tahunnya.

Grafik IV.A.33

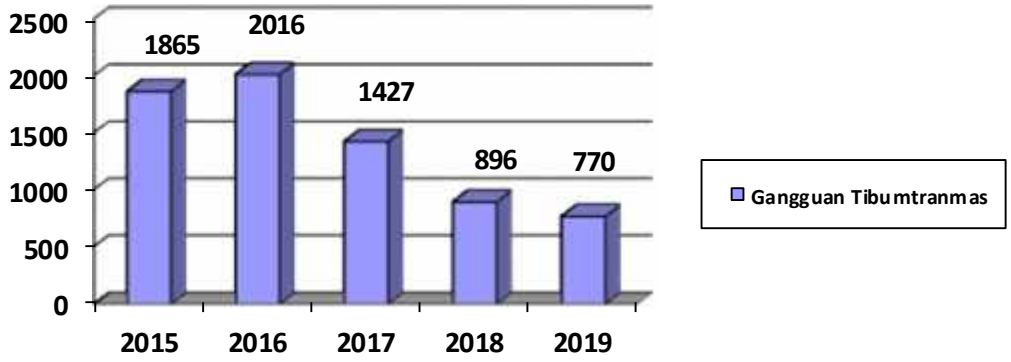

Penindakan terhadap gangguan tibumtranmas pada tahun 2019 fokus utamanya masih sama dengan tahun 2018 yaitu penertiban keberadaan bangunan liar dan sterilisasi lokasi dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini guna mendukung program-program yang dilakukan instansi/OPD teknis seperti pengendalian banjir, penataan parkir dan estetika kota. Mendasari hal tersebut, sepanjang tahun 2019 Satpol PP Kabupaten Sidoarjo telah menertibkan sejumlah 124 bangli di beberapa titik lokasi dan PKL sejumlah *Locus,* upaya penertiban bangli dan PKL dititiberatkan pada sepanjang 9 (sembilan) jalur utama, yaitu dari batas utara Jl. Raya Waru sampai dengan Batas selatan Jl. Raya Porong.

Sebagai bentuk upaya lanjutan dari tahun sebelumnya, konsentrasi penertiban PKL terfokus pada pada Jl. Raya Gajah Mada dan Jl. Mojopahit serta jalur pendukung di sekitar Jl. Gajah Mada seperti pada Jl. Raden Patah dan JL. Sisingamangaraja. Khusus upaya sterilisasi PKL di Jl. Gajah Mada didukung juga dengan upaya penataan PKL yaitu memindahkan PKL ke tempat relokasi di lahan eks makam cina (dokumentasi terlampir). Sedangkan penertiban bangli dilakukan di Jl. Raya Sumorame, Candi.

Selain penertiban skala prioritas bangli dan PKL pada daerah tertentu, juga dilakukan penertiban di lokasi lain atas dasar aduan dan koordinasi dengan pihak

kecamatan dan OPD teknis, seperti di Kec. Tarik dan Desa Pagerwojo Kec. Buduran.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan dengan capaian kinerja 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Adapun Program dan Kegiatan guna mendukung sasaran tersebut diatas adalah :

2. **Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp. 5.609.871.240 dan terealisasi sebesar Rp.5.424.328.791,68,- atau 96,69 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Cakupan wilayah pengamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	18 kecamatan	18 kecamatan	100%
Nilai SKM ketertiban dan ketentraman	86	86,204	100%
Cakupan wilayah patroli	18 Kecamatan	18 Kecamatan	100%

Keterkaitan Sasaran RPJMD, Tujuan OPD, dan Sasaran OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD dalam Renstra	Sasaran OPD dalam Renstra
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	Meningkatkan pencegahan terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat	Meningkatnya pencegahan terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik

OPD Penyelenggara Urusan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3. Pogram Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan pencegahan terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat	Indeks Toleransi	NA	7,25	100	73,70	72,84	98,83	75,17	75,19	100,03
	Persentase potensi konflik yang dapat dicegah	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik nya	Persentase partisipasi masyarakat dalam PEMILU (Pilkada, Pilgub, Pilpres dan Pileg)	0%	0%	%	75%	64.69%	86,25 %	80%	82,89	118.8 %

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politikyang telah dicapai berdasarkan sasaran, sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pencegahan terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Indeks Toleransi	NA	7,25	100	73,70	72,84	98,83	75,17	75,19	100,03
Persentase potensi konflik yang dapat dicegah	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- **Indeks Toleransi**

Indeks Toleransi digunakan untuk mengukur kohesi sosial, yaitu toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal, dengan tujuan :

a. Mendeskripsikan tingkat toleransi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
b. Mendiskripsikan pengalaman masyarakat terkait toleransi di Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 2019 telah dilakukan survei/pengukuran indeks toleransi di Kabupaten Sidoarjo dengan 100 Responden/orang tersebar di 5 (lima) Desa dengan memperoleh hasil nilai indeks toleransi 75.19 dengan kategori Toleransi Tinggi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 72.84 maka capaian di tahun 2019 meningkat sebesar 2,35 point.

Berikut perkembangan indeks tolerasi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik IV.A.34

Perkembangan Indeks Toleransi

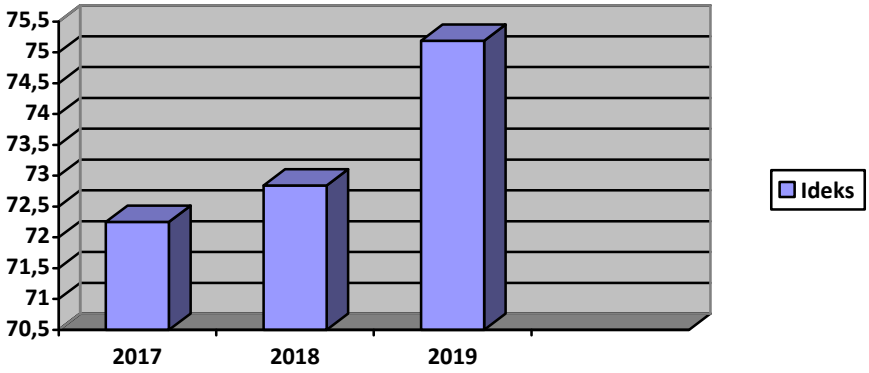

Sumber Data : Bappeda Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas Warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan;
2. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan kearah kehidupan politik yang menghormati HAM dan SARA, berkeadilan, bertanggung jawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis;
3. Menjalin komunikasi antar tokoh/pemuka agama mengenai pendirian rumah ibadah Harus kooperatif dengan warga di sekitar tempat ibadah yang didirikan. Persyaratan, kejujuran, tidak ada rekayasa dan arif dengan lingkungan tersebut berlaku untuk semua umat beragama tidak hanya untuk Islam saja atau Kristen saja;
4. Menjalin kerukunan dan Intern umat beragama/kerukunan antar umat beragama dan saling menghormati antar sesamanya, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang mempunyai tendensi menyinggung secara langsung dan negative masalah suku, agama, dan Ras (SARA), termasuk didalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta

segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/lembaga instansi lain.

Terkait Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 75,19 % termasuk dalam kategori tinggi, hal ini menunjukkan toleransi masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi yang baik jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yang nilainya 72,84, maka dapat kenaikan 2,33 point. Capaian ini menunjukkan bahwa persepsi, sikap dan kerjasama dalam interaksi sosial antarumat beragama di Kabupaten Sidoarjo sudah berlangsung secara kondusif.

- **Persentase potensi konflik yang dapat dicegah**

  Capaian kinerja dari indikator kinerja tujuan 1 yaitu Persentase potensi konflik yang dapat dicegah yaitu mencapai 100% dari target 100%, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Karena kabupaten Sidoarjo dinilai kota yang terbilang aman dikarenakan tidak ada konflik yang terjadi

Grafik IV.A.35

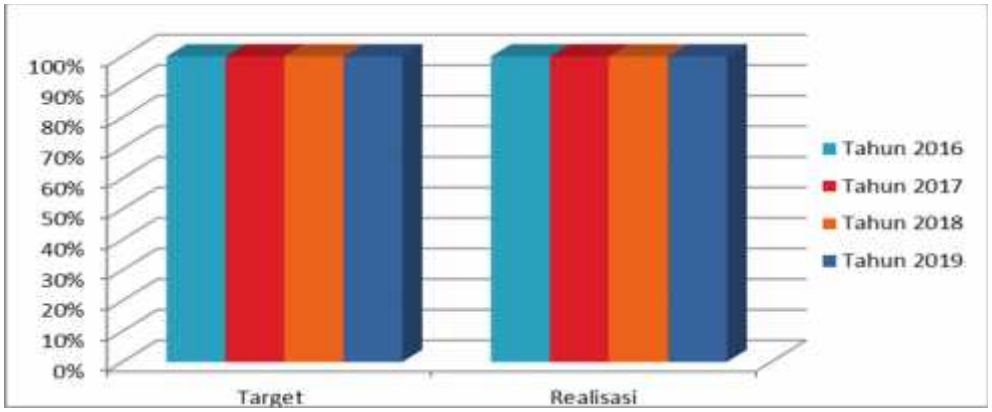

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi masyara kat dalam menggunakan hak politiknya

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase partisipasi masyarakat dalam PEMILU (Pilkada, Pilgub, Pilpres dan Pileg)	0%	0%	%	75%	64.69%	86,25 %	80%	82,89%	118.8 %

Pada tahun 2016 s.d 2017 tidak ada pemilu jadi untuk target dan realisasi kinerja mencapai 0%. Pada tahun 2018 ada Pilkada serentak dengan target 75% dengan realisasi 64.69% hal ini tidak berhasil dalam pencapaian target.

Di tahun 2019 ada Pileg mencapai realisasi 82.9% dari target 80%, (meningkat) dari tahun 2018, dengan (kenaikan) sebesar 18.3%. Dari table tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dari tahun sebelumnya meningkat dan berhasil mencapai target yang telah ditentukan.

Grafik IV.A.36

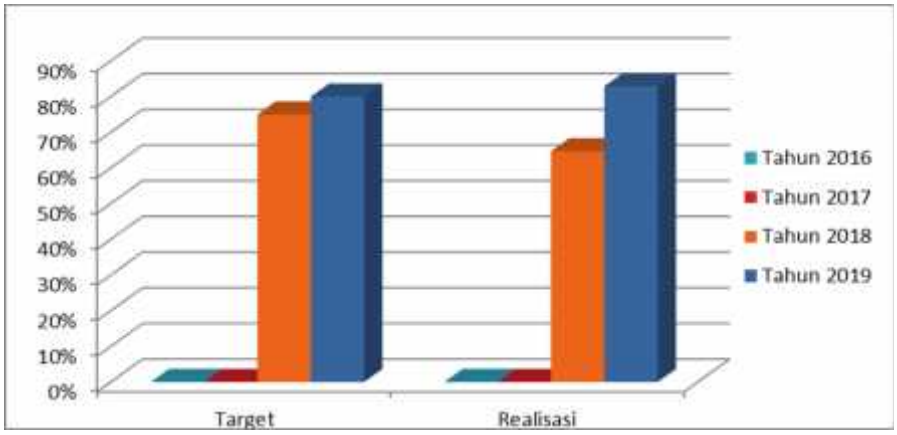

c. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp.2.637.862.650,- dan terealisasi sebesar Rp.2.459.373.200,- atau 93.2 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini	90%	100%	111.12%
Persentase konflik yang berhasil ditangani	90%	100%	111.12%

2. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp.1.629.577.975,- dan terealisasi sebesar Rp.1.432.520.335,- atau 87.9 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan	100 Orang	100 Orang	100%
Kategori Kabupaten Peduli HAM	90%	100%	111.12%

3. Program peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dengan anggaran sebesar Rp.1.319.182.635,- dan terealisasi sebesar Rp.1.173.221.000,- atau 88.9%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	80%	82,89%	118.8%

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	40%	38,55%	96,25%	45%	32,87%	73%	45%	35,31%	78,46%
	Indeks Resiko Bencana	140.6	126.75	109.85%	131.65	128.6	102.3%	105	117.95	87.67%

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Peningkatan Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	40%	38,55%	96,25%	45%	32,87%	73%	45%	35,31%	78,46%
	Indeks Resiko Bencana	140.6	126.75	109.85%	131.65	128.6	102.3%	105	117.95	87.67%

Catatan :

1. Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo) merupakan persentase yang dihitung dari Jumlah kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap 15 menit (se-Kabupaten Sidoarjo) dibanding dengan jumlah keseluruhan kejadian kebakaran;

2. Indeks Resiko Bencana

Pengkajian resiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi benana. Dalam pelaksanaannya, pengkajian resiko menggunakan rumus umum sebagai berikut :

$$R_{isk} = H_{azard} \frac{V_{ulnerability}}{C_{apacity}}$$

Dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari tiga parameter pembentuk risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana.

Target penurunan indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, makaindeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%.

Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, maka komponen kerentanan berupa coping capacities dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah komponen coping capacities dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun (2015-2019). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

Perhitungan IRB Tahun 2019 pada Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan menyelengarakan Focus Group Discussion (FGD), dengan berbagai pihak terkait yang berkompeten dengan kegiatan perhitungan Indeks Risiko Bencana, baik dengan kelompok pakar (perguruan tinggi/NGO), kelompok dinas/instansi pemerintah, dan pihak swasta / masyarakat lainnya (2 kali pelaksanaan).

Perhitungan untuk skor Indeks Risiko Bencana tahun 2019 didasarkan atas kalkulasi Indeks Ketahahan Daerah (IKD) yang terdiri dari 7 (tujuh) fokus prioritas dan 16 (enam belas) sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Dari pencapaian 71 indikator tersebut, diperoleh nilai ketahanan daerah dengan rentang nilai ketahanan antara 1 s/d 5, dimana nilai 1 (satu) paling rendah, 5 (lima) paling tinggi.

Adapun makna nilai ketahanan adalah sebagai berikut :

1. Level 1,belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan / menghasilkannya;
2. Level 2,hasil / penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum dengan kualitas standard;
3. Level 3,tersedia / terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh;
4. Level 4,telah dirasakan manfaatnya secara optimal, dan
5. Level 5,manfaat dari hasil / penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang

Permasalahan:

1. Belum masuknya urusan kebencanaan ke dalam urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga belum masuk ke dalam prioritas penganggaran daerah. Hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran tidak bisa efektif;
2. Benturan aturan pendukung yang bersifat teknis mengakibatkan tema penanggulangan bencana belum menjadi “mandat pokok” pendanaan, sehingga pendanaan Penanggulangan Bencana di daerah tidak masuk dalam prioritas utama;
3. Kuantitas dan kualitas sumber-daya manusia terbatas ;

4. Fasilitas / sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang terbatas;
5. Logistik dan peralatan yang masih terbatas dan belum dapat hadir pada waktu dan tempat dibutuhkan;
6. Politik lokal dukungan legislatif sangat minim;
7. Luasnya cakupan wilayah yang rawan bencana dan kebakaran yang harus dilayani dengan akses terbatas;

Solusi:

1. Dukungan anggaran / pendanaan untuk efektifitas penyelenggaran Penanggulangan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana dan Kebakaran;
2. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo;
3. Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
4. Pembentukan dan atau Penguatan Forum PRB;
5. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah;
6. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah;
8. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana dan kebakaran lintas lembaga;
9. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
10. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah

g. Program dan Kegiatan

1. Program Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.450.516.470,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.263.016.550,- atau 87,07 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase pelayanan informasi rawan bencana	60%	57,6%	96%

Jumlah peserta peningkatan kapasitas masyarakat / aparatur dalam bidang kebencanaan	500 orang	500 orang	100%
	**Capaian lainnya : 1790 orang Dikarenakan terdapat inisiatif dari stakeholder kebencanaan untuk pelaksanaan pembinaan pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana		
Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%

Keterangan :

1. Persentase pelayanan informasi rawan bencana = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi (:) Jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana x 100%;
2. Jumlah peserta peningkatan kapasitas masyarakat / aparatur dalam bidang kebencanaan = Jumlah anggota kelompok / komunitas kebencanaan yang mengikuti pelatihan
   Capaian keseluruhan pada indikator kinerja ini sebanyak 2,290 orang, dengan 1790 orang berasal dari pelaksanaan kegiatan diluar pembiayaan APBD (berasal dari inisiatif stakeholder kebencanaan)
3. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan = Jumlah korban yang mendapatkan bantuan logistik (:) Jumlah seluruh korban di kawasan terdempak x 100%

Permasalahan:

4. Keterbatasan SDM Penanganan bencana;
5. Keterbatasan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana dikarenakan urusan kebencanaan belum masuk ke dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana

Solusi:

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas BPBD dan SDM, dengan indikator:
   - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat BPBD dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana dan Penanaganan bencana
   - Menambah personel rescue dan tenaga operator kendaraan dan peralatan komunikasi HT karena terdapat 3 frekwensi yang dikelola.
   - Penegasan tupoksi rescue secara kontraktual harus jelas berada di Bidang apa untuk percepatan peningkatan kapasitas pelayanan penanganan bencana.
2. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana, dengan indikator :
   - Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
   - Jumlah terwujudnya desa tangguh bencana
   - Tingkat interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara telaporan, terpadu, dan menyeluruh, dengan indikator :
   - Tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana
   - Tingkat koordinasi penanganan kedaruratan
   - Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
   - Tingkat ketersediaan dan distribusi logistik

2. Program Peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.6.558.818.330,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.417.654.239,- atau 82,6 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase wilayah Kabupaten yang sudah mempunyai pos PMK	35%	28%	80%
Persentase satuan petugas PMK yang	50%	38,18%	76.36%

memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi			
Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi	60%	60%	100%

Keterangan :

1. Persentase wilayah Kabupaten yang sudah mempunyai pos PMK = Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK/pos pemadam) yang terbentuk (:) Jumlah kebutuhan WMK x 100%;
2. Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi = Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi (:) Jumlah Satgas Damkar x 100%
3. Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi = Jumlah mobil pemadam kebakaran layak pakai (:) Jumlah keseluruhan mobil pemadam kebakaran x 100%

Permasalahan:

1. Luasnya cakupan wilayah yang harus dilayani tidak sebanding dengan jumlah pos pemadam kebakaran yaitu 5 (lima) pos;
2. Keterbatasan SDM Teknis Penanganan kebakaran dan Penyelamatan;
3. Keterbatasan sarana prasarana;
4. Faktor eksternal lainnya seperti kondisi jalan yang padat, kemacetan lalu lintas atau lokasi kebakaran yang sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam penanganan kebakaran

Solusi:

1. Melakukan upaya pembentukan Pos Pemadam Kebakaran baru dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha;
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Pemadam Kebakaran, dengan indikator :
   - Menambah personel rescue dan tenaga operator kendaraan dan peralatan komunikasi

- Penegasan tupoksi rescue secara kontraktual harus jelas berada di Bidang apa untuk percepatan peningkatan kapasitas pelayanan penanganan kebakaran

3. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanganan kebakaran, dengan indikator :
   - Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran
   - Membentuk relawan penanganan kebakaran

3. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 715.704.795,- dan terealisasi sebesar Rp. 492.254.424,- atau 68,78%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase korban bencana yang terehabilitasi	100%	100%	100%
Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna	100%	100%	100%

Keterangan :

1. Persentase korban bencana yang terehabilitasi = jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan trauma healing pasca bencana (:) jumlah korban terdampak x 100%
2. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna = jumlah bantuan pasca bencana yang disalurkan (:) jumlah korban terdampak x 100%

Permasalahan:

Anggaran yang penyerapannya berhubungan langsung dengan penanganan pasca bencana tidak teralisasi karena tidak ada kejadian bencana

Solusi:

Lebih mencermati lagi setiap usulan kegiatan dan anggaran yang masuk sehingga dapat dilaksanakan dengan baik;

Urusan Sosial

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada **Dinas Sosial** seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : **"**Menurunnya jumlah penduduk miskin**"**

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Sosial yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	1,93	1,90	101,55	1,90	1,89	100,53	1,87	1,83	102,14

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas Sosial yang telah dicapai berdasarkan sasaran Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase Penurunan PMKS terhadap penduduk	1,93	1.90	101,55	1,90	1,89	100,53	1,87	1,83	102,14

Dari tabel di atas, tercapainya persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap jumlah penduduk dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2017 - 2019 memenuhi target yang ditetapkan (tercapai di atas 100%), yaitu pada tahun 2017 tercapai 101,55% (realisasi 1,90% dari target 1,93%). Pada tahun 2018 tercapai 100,53% dengan realisasi sebesar 1,89% dari target 1,90%. Pada tahun 2019 tercapai 102,14 persen dengan realisasi sebesar 1,83% dari target 1,87%.
2. Persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari tahun 2017 - 2019 menunjukkan trend penurunan yaitu pada tahun 2017 sebesar 1,90% (0,03%) dari tahun 2016 pada tahun 2018 sebesar 1,89% (0,04%) dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 sebesar 1,83% (0.06%) dari tahun 2018.

Penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut tidak lepas dari keberhasilan kegiatan Penanganan PMKS yang telah dilakukan antara lain :

1. Persentase Fakir Miskin yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya

   Idikator program ini bisa di lihat dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Non Tunai (BPNT) dari anggaran APBD sebanyak 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terealisasi 100 %.

2. Persentase Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)

   Indikator program ini bisa dilihat dari jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dari anggaran APBD dengan target 97.591 orang dan sudah terealisasi 100 %

3. Persentase Tuna Sosial yang terlayani

   Target tuna sosial yang dilayani sebanyak 220 orang dan terealisasi 100% dari target

4. Persentase penyandang disabilitas yang terlayani

   Target penyandang disabilitas yang terlayani sebanyak 60 orang dari data penyandang disabilitas sebanyak 2.154 orang, dengan demikian kontribusi capaian kinerja untuk indikator program ini adalah 100% dari target

5. Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani

   Target anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani sebanyak 250 anak/lansia, dan sudah terealisasi 100% dari target.

6. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani di Liponsos

   Target Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan berada di Liponsos sebanyak 75 orang / bulan (900 orang/tahun) dan sudah terlayani seluruhnya sehingga terealisasi 100%

7. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Target Pelatihan bagi keluarga miskin sebanyak 510 keluarga dan terealisasi 100% dari target

DATA PENANGANAN PMKS TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	Capaian Tahun 2018	Target 2019 Kegiatan (Orang)	Capaian 2019 Kegiatan (Orang)
1	Bantuan Permakanan Panti Asuhan	1.663	1.616	1.616
2	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan PSM	450	200	200
3	Penanganan PMKS di Liponsos	900	900	900
4	PMKS tercover PBI JKN APBD	87.159	97.591	97.591
5	Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	25	58	58
6	BPNT APBD bagi Keluarga Penerima Manfaat	4.548	5.000	5.000
7	Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas	80	60	60
8	Pembinaan ODHA	200	200	200
9	Pelatihan Keterampilan bagi Keluaga Miskin	-	510	510
10	Bantuan Bagi Perintis Kemerdekaan	7	7	7
11	Bantuan Bagi Warakawuri	100	100	100
12	Pembinaan anak dan lansia	450	250	250
	JUMLAH	95.618	106.492	106.492

Sumber : Data PMKS Tahun 2019

Dari data pada tabel penanganan PMKS tahun 2019 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Kinerja penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 106,492 jiwa dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 95,618 jiwa.

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PKMS) YANG DI TANGANI TAHUN 2017 - 2019

NO	TAHUN	PMKS YANG DI TANGANI
	2017	31.667
	2018	95.618
	2019	106.492

Grafik IV.A.38

c. Program dan Kegiatan

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 5.142.234.065,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.413.116.675,- atau 85,82 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase Fakir Miskin yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya	60	60	100
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60	60	100

Keterangan :

1. Formula perhitungan :
   Jumlah Fakir Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibandingkan jumlah seluruh fakir miskin yang ada di Sidoarjo
2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdiri dari :
   - Karang Taruna
   - LK3 (Lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga)
   - LKSA (Lembaga Kesehajteraan Sosial Anak)
   - TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
   - SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)
   - PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)
   - TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

   Partisipasi aktif PSKS di dalam masyarakat antara lain :
   - Sosialisasi data kemiskinan
   - Menampung Pengaduan masalah sosial dari masyarakat
   - Verivikasi data kemiskinan di wilayah masing-masing
   - Menampung dan membina anak yatim
   - Memberikan pelayanan sosial di masyarakat (Modin)
   -

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp.2.132.234.066,- dan realisasi sebesar Rp.1.819.771.190,- atau 85,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase tuna sosial yang terlayani	17,92	17,92	100
Persentase Penyandang Disabilitas yabg terlayani	2,90	2,90	100
Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	47,08	47,08	100
Persentase PMKS yang terlayani	100	100	100

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.312.966.750,- dan terealisasi sebesar Rp.300.441.043,- atau 96 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase korban bencana alam yang tertangani	90	90	100
Persentase korban bencana sosial yang tertangani	80	80	100
Persentase penduduk miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	80	80	100

Urusan Ketenagakerjaan

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan, dan Sasaran OPD

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	Meningkatnya Peme-rataan Distribusi Penda-patan Masyarakat	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1. Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja 2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif

OPD Penyelenggara Urusan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Tenaga Kerja merupakan perangkat daerah yang membantu tugas Bupati dalam urusan Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam urusan ketenagakerjaan, diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 92 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Tenaga Kerja berperan langsung pada pencapaian misi 2 RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 dengan sasaran yang ditetapkan : Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat, dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam mendukung capaian sasaran dan indikator RPJMD tersebut diatas Renstra Dinas Tenaga Kerja pada dasarnya sama dengan sasaran RPJMD tersebut diatas yaitu : Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja
2) Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan
3) Persentase pencari kerja yang telah membuka usaha secara mandiri
4) Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB).

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditingkat RPJMD dan sasaran utama Renstra OPD dan dalam pencapaian progam pembangunan, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tiga progam pembangunan antara lain:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran RPJMD "***Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat"***, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran tahun 2015 sampai dengan 2019.

Grafik IV.B.1

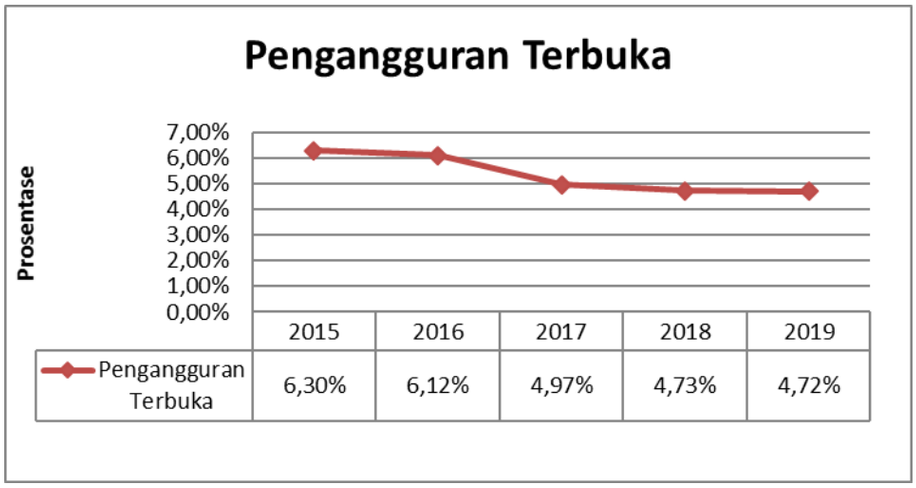

Sumber Data : BPS dan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker RI

Dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dari 6,30 pada tahun 2015, mengalami penurunan menjadi 6,12% pada tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,97%. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan menjadi 4,73%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,72%.

Hal ini disebabkan karena adanya Stabilitas perekonomian di Kabupaten Sidoarjo yang cukup mendukung dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah investasi.

Capain target tahun 2019 tersebut diatas sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 5,56%.

Dalam upaya mengurangi pengangguran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada perencanaan tenaga kerja melalui Buku Rencana Tenaga Kerja 2017-2021 yang bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka, antara lain :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.

3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan, terdapat indikator kinerja daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase pencari kerja yang telah membuka usaha secara mandiri

Perluasan kesempatan kerja merupakan salah satu prioritas dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu upaya dalam perluasan kesempatan kerja yaitu penciptaan wirausaha baru tenaga kerja mandiri. Berikut ini grafik perkembangan peserta pelatihan wirausaha yang telah membuka usaha mandiri.

Grafik IV.B.2

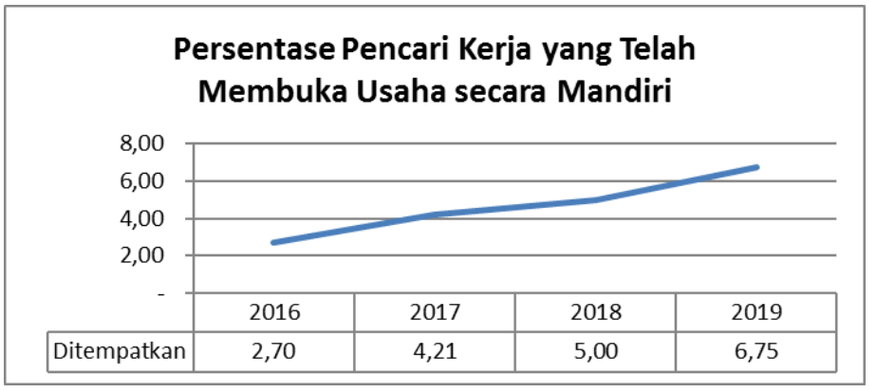

Dari grafik di atas menunjukkan peningkatan wirausaha baru dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebanyak 2,70 persen menjadi 6,75 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ada sebanyak 27 peserta pelatihan kewirausahaan yang telah membuka usaha mandiri dari 400 peserta pelatihan.

b. Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 Sektor

Tenaga kerja yang terserap di 9 sektor merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Berikut ini adalah grafik perkembangan Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 sektor.

Grafik IV.B.3

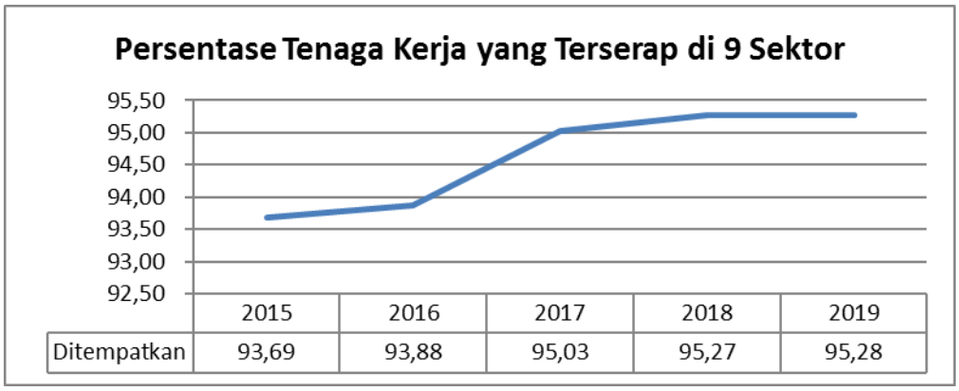

Dalam perencanaan tenaga kerja daerah 2017 – 2021 perkembangan kesempatan kerja diproyeksikan akan terus meningkat sehingga angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo akan semakin menurun. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.015.208 orang meningkat menjadi 1.044.633 orang pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 banya peralihan angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja yang mengurangi jumlah penduduk yang bekerja menjadi 1.021.884. Pada tahun 2018 penduduk yang bekerja kembali mengalami peningkatan menjadi 1.042.877 orang dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 1.099.068 orang.

c. Persentase pencari kerja yang ditempatkan

Perkembangan persentase pencari kerja ditempatkan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik IV.B.4

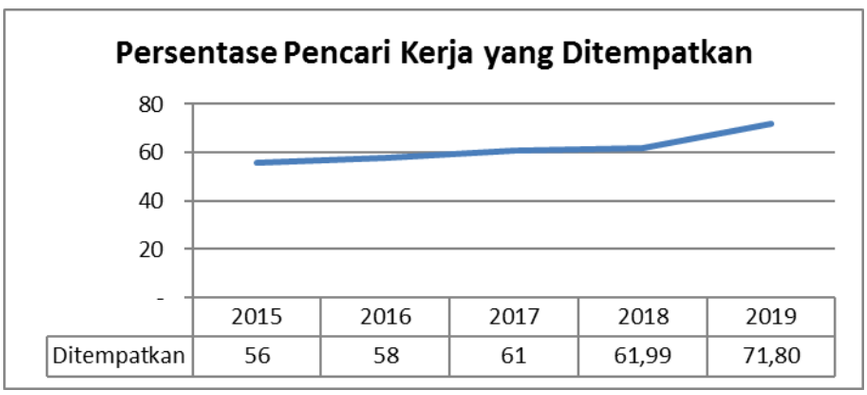

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa kinerja pegawai Pengantar Kerja dalam meningkatkan penempatan pencari kerja yang mendaftar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Grafik IV.B.5

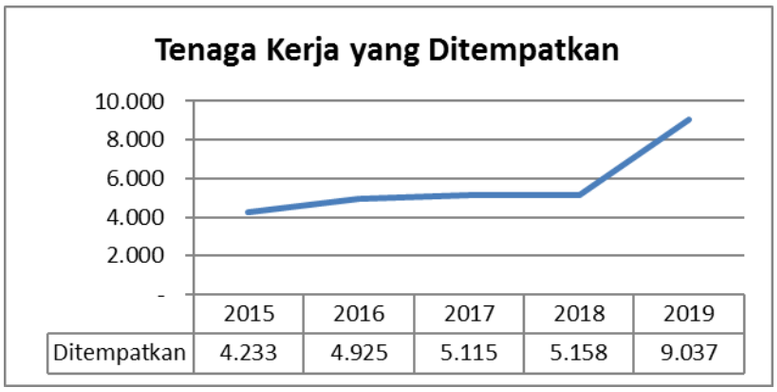

	2015	2016	2017	2018	2019
Ditempatkan	4.233	4.925	5.115	5.158	9.037

Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan dan terlaporkan sebanyak 5.115 orang dan meningkat dari tahun 2016 sebanyak 190 orang atau 3,86% dan pada tahun 2018 sebesar 5158 orang dan terus mengalami peningkatan menjadi 9.037 orang pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi masalah pengangguran.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Bursa Kerja baik Bursa Kerja Terbuka Maupun Bursa Kerja Khusus.
2. Bekerjasama dengan sektor swasta dalam hal rekruitmen tenaga kerja

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Tenaga Kerja yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	6,12	6,12	5,93	4,97	5,74	4,73	5,56	4,72

Grafik IV.B.6

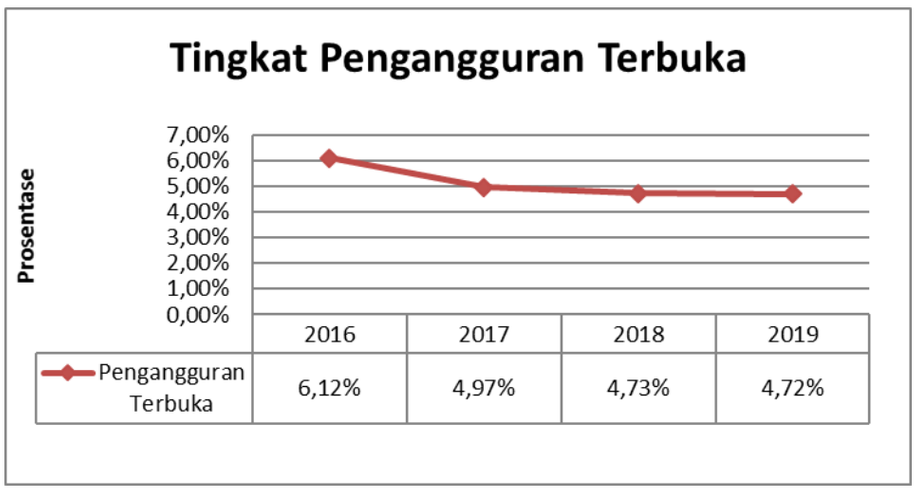

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data BPS untuk tahun 2019 telah melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,72 dari target 5,56 dan apabila dibandingkan tahun 2018 pada angka 4,73 terjadi tren yang semakin menurun.

b. Sasaran

Untuk mendukung target tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran dengan target kinerja sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya angkatan kerja terlatih yang telah bekerja

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase lulusan pelatihan yang telah bekerja	60	61,33	102,22	65	70,88	109,05	70	76	108,57

Grafik IV.B.7

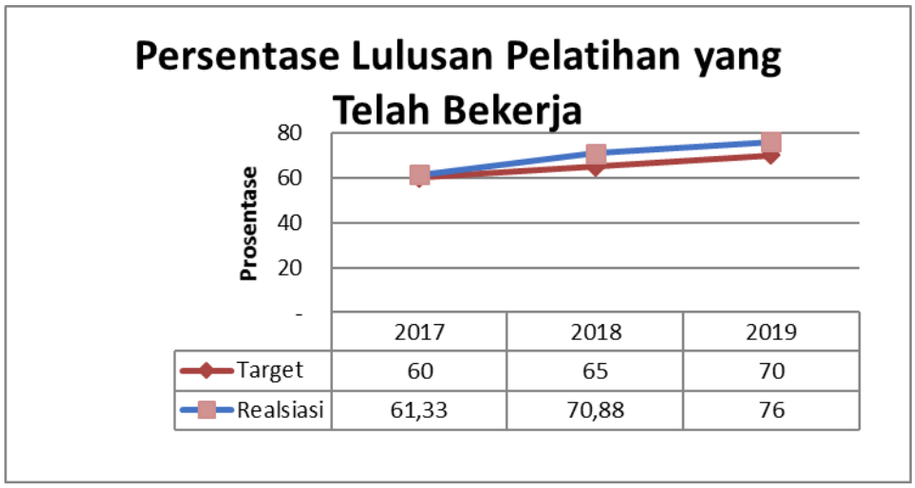

Pada grafik di atas, dapat dijelaskan terjadi tren peningkatan lulusan pelatihan yang telah bekerja. Pada tahun 2019 capaian telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 76 persen atau 290 orang dari 384 orang peserta pelatihan.

Sasaran 2: Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	61	62,18	101,93	63	61,99	98,40	65	71,8	110,4
Persentase pencari kerja yang telah membuka usaha secara mandiri	3	4,21	140,33	5	5,26	102,2	6	6,75%	112,5

Grafik IV.B.8

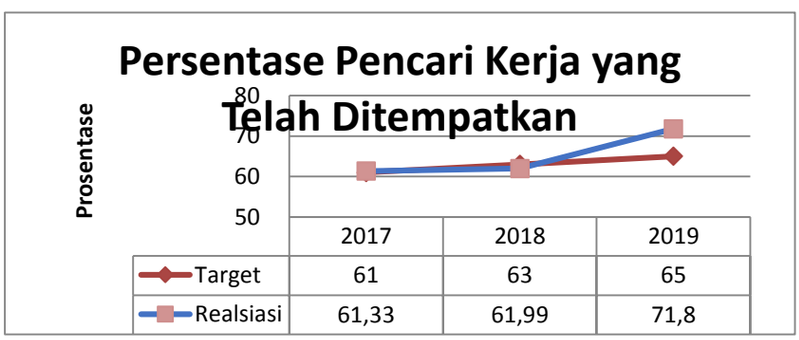

Pada grafik di atas, dapat dijelaskan terjadi tren peningkatan penempatan kerja dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan penempatan kerja yang cukup tinggi yaitu sebesar 71,8 persen atau 9.978 orang dari 13.893 pencari kerja dan telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Grafik IV.B.9

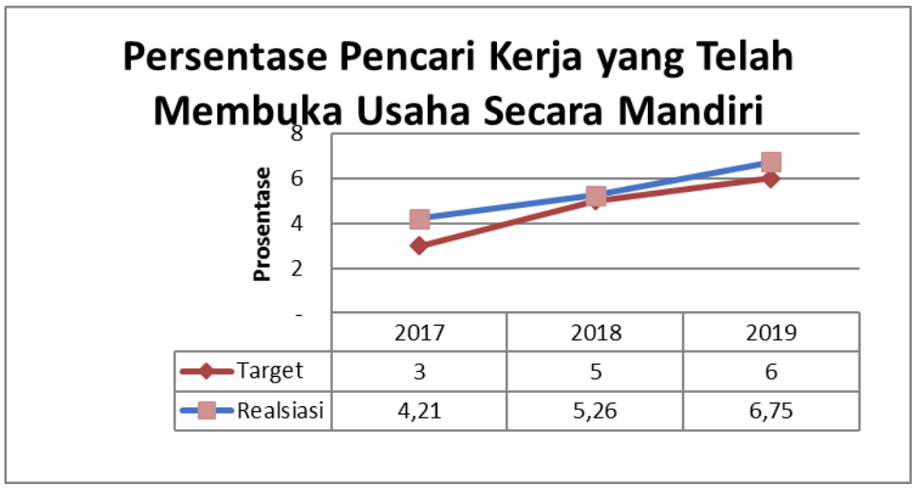

Pada grafik di atas, dapat dijelaskan terjadi tren peningkatan pencari kerja yang telah membuka usaha secara mandiri dari tahun ke tahun. Pencari kerja yang telah membuka usaha mandiri juga merupakan salah satu program prioritas nasional dalam urusan ketenagakerjaan. Pada tahun 2019 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 6,75 persen atau 27 orang dari 400 orang peserta pelatihan berbasis wirausaha dari target 6 persen.

Sasaran 3: Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%
Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melalui Perjanjian Bersama (PB)	9	9,52	105,78	10	9,62	96,15	11	19,6	178,18

Grafik IV.B.9

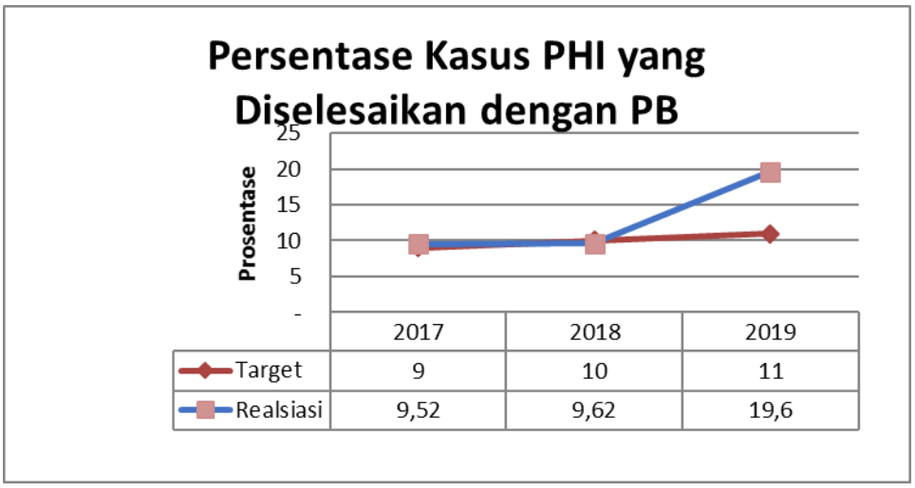

Pada grafik di atas, dapat dijelaskan terjadi tren peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 19,6 persen atau 20 PB dari 102 perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja. Namun dengan banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial tersebut, semua perselisihan hubungan industrial dapat tertangani atau diselesaikan selain selesai melalui PB (Perjanjian Bersama) juga diselesaikan dengan anjuran tertulis oleh Mediator Hubungan Industrial.

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** dengan anggaran sebesar Rp 2.145.372.940,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.052.116.920,00 atau 95,65 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase lembaga pelatihan tenaga kerja yang terakreditasi	17%	18%	105,88%
Persentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan / kompetensi	79%	84,42%	106,86%

2. **Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi** dengan anggaran sebesar Rp 1.564.529.152,50 dan terealisasi sebesar Rp. 1.452.337.450,00- atau 92,8 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
persentase pencari kerja yang telah difasilitasi penempatannya	65%	71,8% (9978 dari 13893 orang)	110,4%
Persentase peserta bimtek TKMT & kewirausahaan yang telah membuka usaha	6%	6,75% (27 dari 400 orang)	112,5%
persentase transmigran yang berhasil (bekerja sendiri/membuka lapangan usaha atau ke orang lain)	80%	80% (4 dari 5 KK yang diberangkatkan	100%

3. **Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan** dengan anggaran sebesar Rp 264.267.870,00 dan terealisasi sebesar Rp. 261.455.370,- atau 98,9%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi penyelesaiannya melalui Perjanjian Bersama (PB)	11%	19,6%	178,18%
Persentase perusahaan yang memiliki LKS Bipartit	20 %	23%	115%
Persentase perusahaan yang menerapkan fasilitas kesejahteraan pekerja	30%	31,32%	104%

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan	Meningkatnya kesetaraan gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

Program pembangunan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah Program Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : *"*Mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan*"*

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,35	93,33		94,45	93,33		94,55	N/A	

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data BPS untuk tahun 2019 belum dapat dikeluarkan dikarenakan masih dalam proses perhitungan oleh BPS, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2018.

Grafik IV.B.10

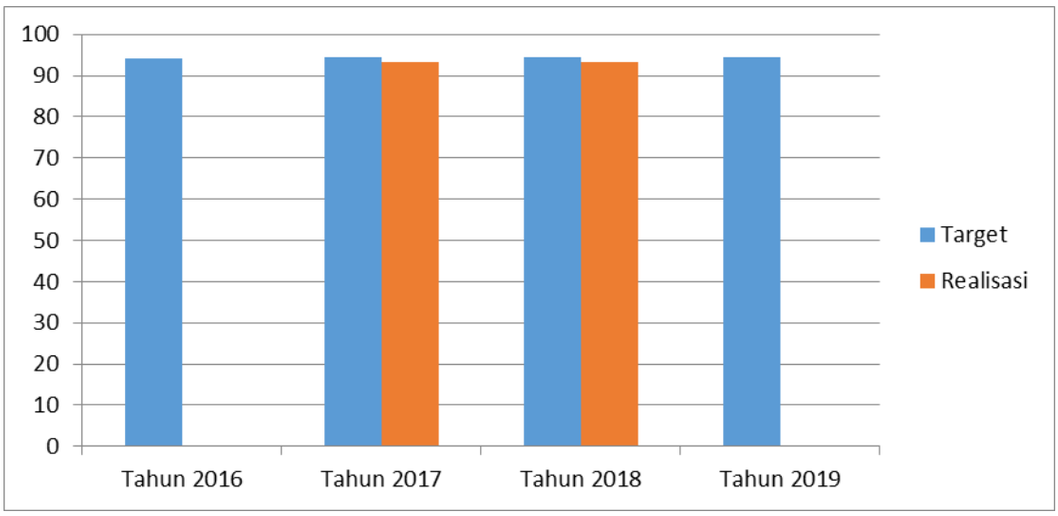

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 2: Meningkatnya kesetaraan gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%	TARGET	REALI SASI	%
Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	63,99	64,6	100	86,95	87,5	100	87,78	87,9	100	88,3	N/A	0
Persentase kasus kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Grafik IV.B.11

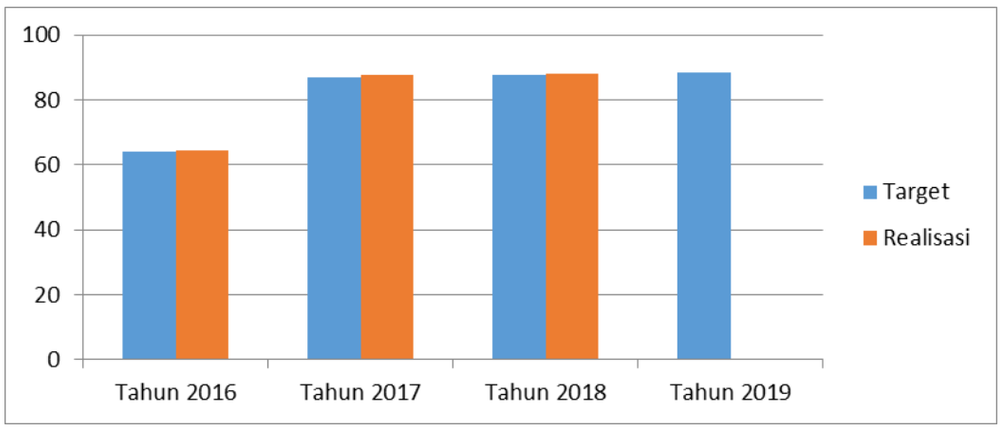

Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Grafik IV.B.12

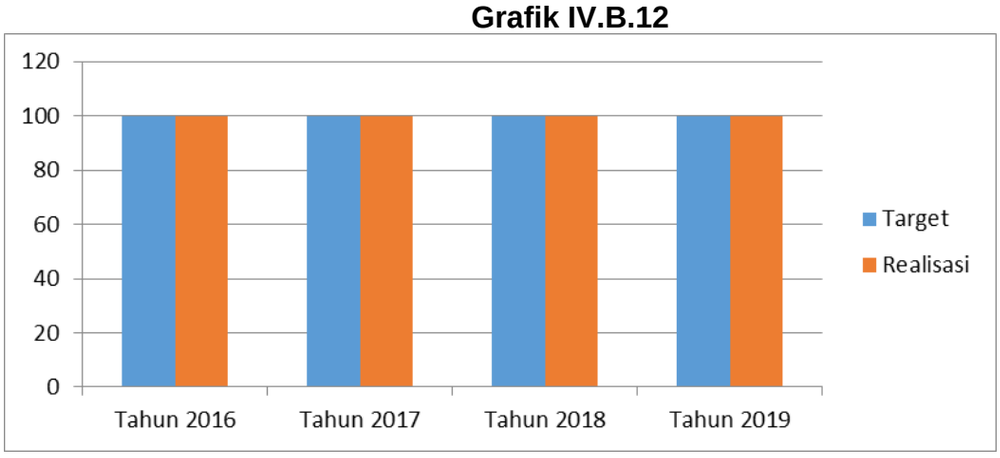

Persentase kasus kekerasan dan Traficking

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran ***"Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan ",*** dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender Development Indeks (GDI) atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengetahui adanya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan disparitas jender. Komponen pendukung IPG sama dengan komponen pendukung IPM yaitu meliputi dimensi Kesehatan yang digambarkan dari Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang digambarkan dari Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata lama Sekolah serta Ekonomi yang digambarkan dengan Pengeluaran Perkapita. Perbedaannya adalah

bahwa dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) komponen pendukungnya disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dengan nilai minimum dan maksimum.

Perkembangan IPG adalah sebagai berikut:

Grafik IV.B.13

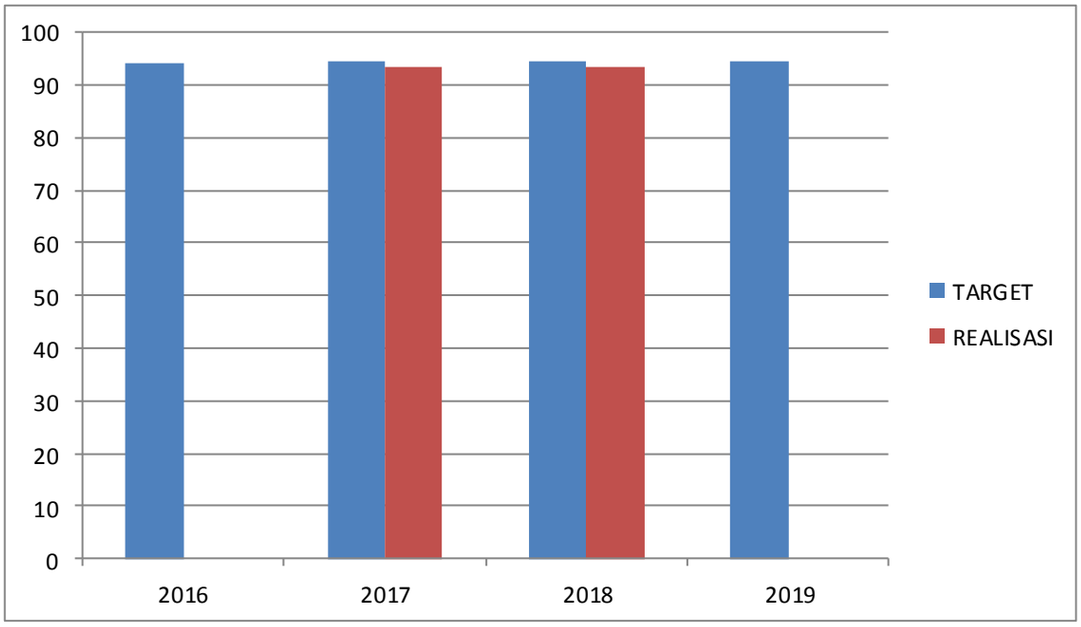

Adapun komponen pendukung IPG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 50,24% sedangkan perempuan sebesar 49,76 %;
2) Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo untuk penduduk laki-laki dari 71,78 tahun sedangkan untuk penduduk perempuan 75,54 tahun;
3) Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu untuk penduduk laki-laki 14,37% sedangkan untuk penduduk perempuan 14,28%;
4) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu untuk penduduk laki-laki dari 10,77 tahun, sedangkan untuk penduduk perempuan 9,70 tahun;
5) Pengeluaran perkapita, laki-laki 19,05% sedangkan perempuan 13,23%;

Dari hasil penghitungan komponen pendukung Indek Pembangunan Gender (IPG) dapat dilihat bahwa pencapaian Indek Pembangunan Gender tahun 2018 sebesar 93,33% atau tercapai 98,81% dari target IPG tahun 2018 sebesar 94,45%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 93,33%, terjadi stagnansi

sebanyak 0,00% pada tahun 2018. Sedangkan capaian 2019 belum dapat diukur dengan target sebesar 94,55% karena belum dilakukan penghitungan oleh BPS.

Kendalanya yaitu : Kurangnya peran perempuan dalam pemberdayaan usaha ekonomi.

Upaya yang dilakukan yaitu : Memberikan pelatihan ketrampilan bagi perempuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Jender (IDG) digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan dalam pengambilan keputusan.

Perkembangan IDG adalah sebagai berikut :

Grafik IV.B.14

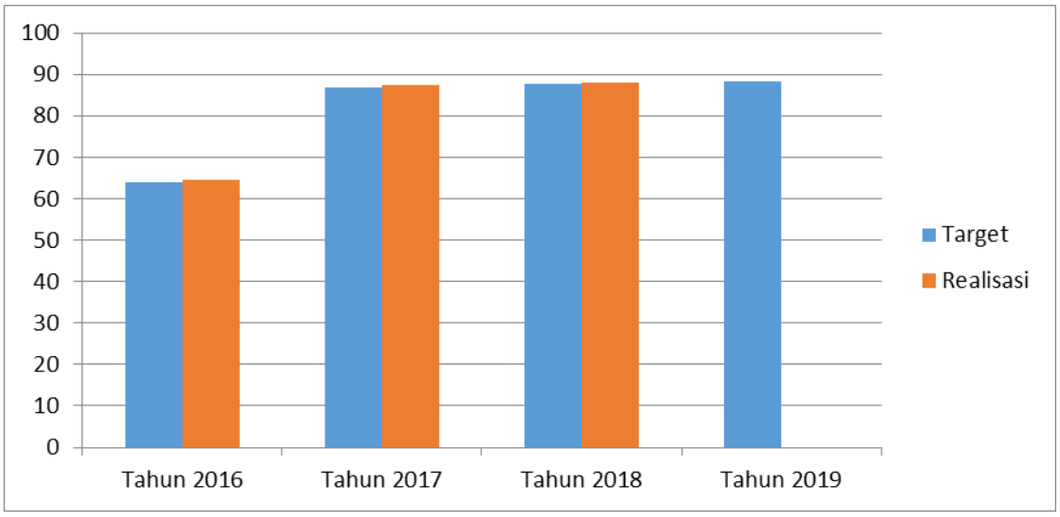

Adapun variabel penyusun IDG Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 50,24% sedangkan perempuan sebesar 49,76%
2) Keterwakilan di parlemen, laki-laki 76,00% sedangkan perempuan 14,00%
3) Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-laki 52,79 % sedangkan perempuan 47,21 %
4) Proporsi angkatan kerja (persentase penduduk aktif dalam kegiatan ekonomi), laki-laki 70,64 % sedangkan perempuan 29,36 %

Dari hasil penghitungan komponen pendukung Indek Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dilihat bahwa pencapaian Indek Pemberdayaan Gender tahun 2018 sebesar 87,9% atau tercapai 100,00% dari target IDG tahun 2018 sebesar 87,78%. Sedangkan capaian 2019 dengan target IDG sebesar 88,33% belum dapat diukur karena belum ada penghitungan dari BPS.

Kendalanya yaitu : Kurangnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, Jumlah keanggotaan Legeslatif perempuan belum mencapai 30% dan Kabupaten Sidoarjo hanya 7 orang atau 14% dari jumlah DPRD keseluruhan sebanyak 50 orang.

3. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak

Untuk mengukur perhatian pemerintah kabupaten terhadap perlindungan perempuan dan anak adalah dengan mengukur sampai sejauhmana fasilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo penanganannya di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan tahun 2019 melalui P2TP2A sebanyak 155 kasus dan 100% teradvokasi dan terselesaikan kasus yang masuk dalam daftar pengaduan yang ada.

Perkembangan Temuan Kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah sebagai berikut :

Grafik IV.B.15
Kasus Kekerasan Dan Trafiking Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Diselesaikan

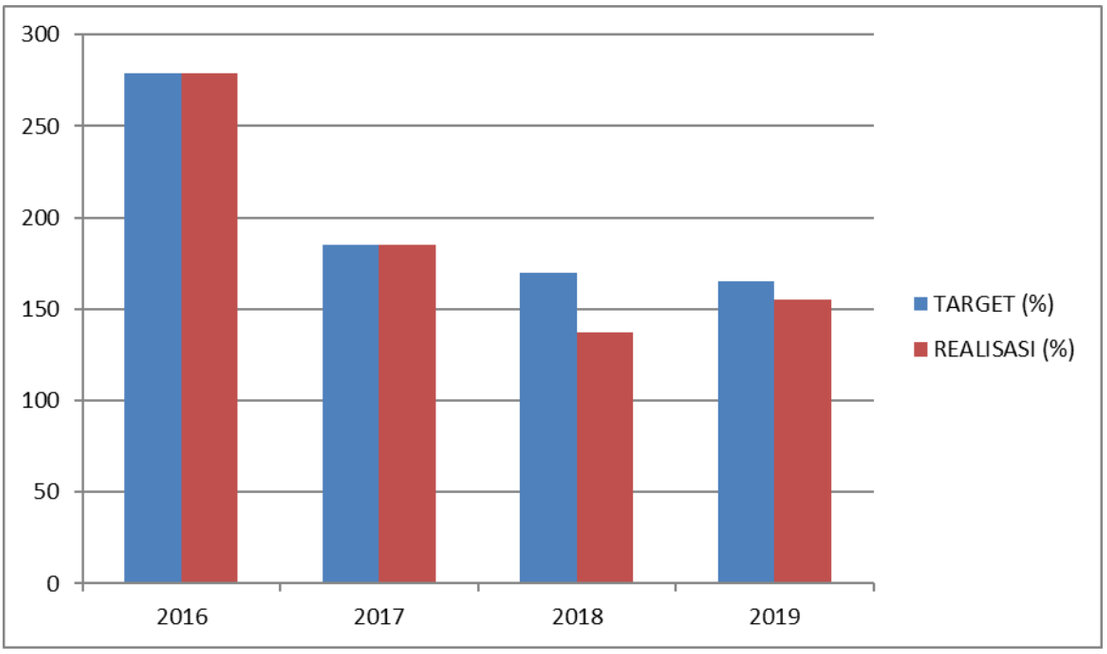

DATA RINCIAN JENIS KEKERASAN YANG DIALAMI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	TERADVOKASI	%
1	KDRT UMUM	73	73	100
2	KDRT KHUSUS (Kekerasan Terhadap Istri / KTI)	0	0	0
3	KEKERASAN TERHADAP ANAK (KTA)	14	14	100
4	KEKERASAN DALAM HUBUNGAN KERJA (KDK)	0	0	0
5	KEKERASAN DALAM PACARAN (KDP)	0	0	0
6	KEKERASAN EKONOMI (KE)	5	5	100
7	PELECEHAN SEKSUAL	7	7	100
8	PENCABULAN	12	12	100
9	PERKOSAAN	4	4	100
10	TRAFIKING	0	0	0

11	PENGANIAYAAN	3	3	100
12	LAIN – LAIN	37	37	100
	TOTAL	**155**	**155**	**100**

Data Kasus Kekerasan Dan Trafiking Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Diselesaikan mengacu pada setiap laporan masuk yang diselesaikan. Adapun target yang ditetapkan adalah angka perkiraan laporan kasus yang masuk. Tren penurunan angka Kasus Kekerasan Dan Trafiking Terhadap

Perempuan Dan Anak Yang Diselesaikan menunjukkan perkembangan yang baik.

Upaya advokasi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu :

1. Bekerjasama dengan LSM, Perguruan tinggi, Organisasi profesi, Organisasi masyarakat, Relawan dan Pemerintah
2. Membangun penguatan dan pengembangan jaringan dengan kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit Umum (RSU), Dinkes, Psikiater, Kemeterian Agama.
3. Melakukan validasi data korban kekerasan terhadap perempiuan dan anak kesemua pelayanan yang menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan yang berpotensi dialami dilakukan Pencegahan yaitu Mensosialisasikan tentang undang undang perlindungan perempuan dan anak melalui sekolah-sekolah, Jaringan P2TP2A kecamatan, Organisasi kemasyarakatan dan Keluarga dan peran serta Desa dalam penyediaan anggaran untuk berperan aktif mensosialisasikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Program dan Kegiatan

1. Program Keseteraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan anggaran sebesar Rp. 1.787.325.956,50 terealisasi sebesar Rp.1.567.187.445 atau 87,68 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	PERSENTASE
Persentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan PUG dan pemberdayaan perempuan	52,98%	52,98%	100%
Persentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak	39,53 %	39,53%	100%
Persentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	18,84%	18,84%	100%
Prosentase kasus kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	100%	100%	100%

PERMASALAHAN :

Tidak ada kendala dan masalah berarti dalam pelaksanaan kegiatan**.**

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. Terus melakukan advokasi dan sosialisasi terhadap kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Penguatan jejaring pelayanan pengaduan masyarakat 9 Gugus tugas PPA)
3. Advokasi dan koordinasi pada instansi terkait.

Permasalahan dan solusi dari kegiatan sebagai berikut :
Sasaran Kegiatan :

- Kendala/Permasalahan yang hadapi
  1. Program/kegiatan belum sepenuhnya responsif gender
  2. Pemahaman kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak belum sepenuhnya dipahami
  3. Dukungan pengambil kebijakan belum maksimal
  4. Jumlah rekomendasi yang di tindaklanjuti peningkatan perlindungan peremuan dan anak yang rendah sebenarnya tidak menggambarkan kegagalan, dikarenakan berdasarkan laporan dan temuan kasus yang ditangani di lapangan

- Upaya yang telah dilakukan
  1. Melakukan sosialisasi program /kegiatan yang responsif gender secara intensif
  2. Melakukan advokasi dan koordinasi kepada gressroot
  3. Melakukan FGD terkait perlindungan perempuan dan perlindungan anak
- Rencana tindak lanjut tahun berikutnya
  1. Melakukan inovasi dalam sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Urusan Pangan

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
1	Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketahanan pangan daerah

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh **Dinas Pangan dan Pertanian.**

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan Pangan yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi:

1. Program Peningkatan ketahanan pangan daerah;

Pada **Dinas Pangan dan Pertanian** program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : **"**Meningkatkan ketahanan pangan daerah**"**

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	1.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	87,5	87,78	100,3%	87,9	88,3	100,5%	88,4	89,30	101%
	2.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,32	89,32	100,0%	89,77	88,72	98,8%	89,45	89,41	100%

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas Pangan dan Pertanian yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	87,5	87,78	100,3%	87,9	88,3	100,5%	88,4	89,30	101%
2.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,32	89,32	100,0%	89,77	88,72	98,8%	89,45	89,41	100%

1). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan.

Dalam perhitungan dan pencapaian skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan mengalami perubahan rumusan. Untuk tahun 2015 dan tahun sebelumnya PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan analisa GAP antara produksi dan konsumsi pangan di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi mulai tahun 2016 PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan produksi, cadangan dan pasokan pangan dari daerah lain yang dituangkan dalam Neraca Bahan Makan (NBM). Perubahan rumus dalam perhitungan PPH Ketersediaan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian perhitungan PPH Ketersediaan yang dilakukan pusat.

Skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2019 menunjukkan skor 89,41, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,8%.

Perkembangan realisasi pola pangan harapan ketersediaan tahun 2019 terlihat pada data berikut :

Grafik IV.B.16

PPH Ketersediaan

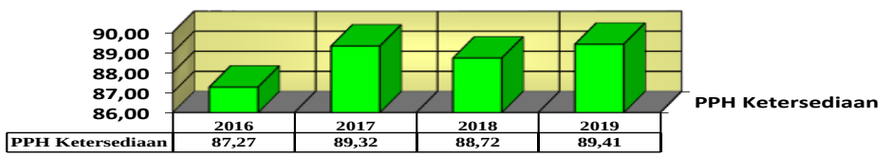

Skor PPH ketersediaan di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2019 menunjukkan skor 89,41 persen, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,8% hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di kabupaten Sidoarjo sudah cukup beragam.

Sedangkan PPH Ketersediaan di Kab. Sidoarjo tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

SKOR PPH KETERSEDIAAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor riil	Skor Maks	Gap Skor AKE	Skor PPH
1.	Padi-padian	43,2	25,0	18,2	25,0
2.	Umbi-umbian	1,1	2,5	1,4	1,1
3.	Pangan Hewani	173,3	24,0	149,3	24,0
4.	Minyak dan Lemak	6,1	5,0	1,1	5,0
5.	Buah/biji berminyak	4,2	1,0	3,2	1,0
6.	Kacang-kacangan	15,8	10,0	5,8	10,0
7.	Gula	26,5	2,5	24,0	2,5
8.	Sayuran dan buah	20,8	30,0	9,2	20,8
	Jumlah	**291,1**	**100,0**		**89,41**

2). Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Adalah nilai capaian yang mencerminkan tingkat konsumsi pangan masyarakat dibanding tingkat konsumsi pangan ideal yang memenuhi kaidah pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Kondisi ini dapat dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Dari aspek kuantitatif digunakan untuk mengetahui cukup tidaknya jumlah konsumsi pangan yang dikonsumsi, sedang kualitatif digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi dari aneka ragam pangan yang dikonsumsi penduduk.

Perkembangan realisasi pola pangan harapan konsumsi tahun 2019 terlihat pada data berikut :

Grafik IV.B.17

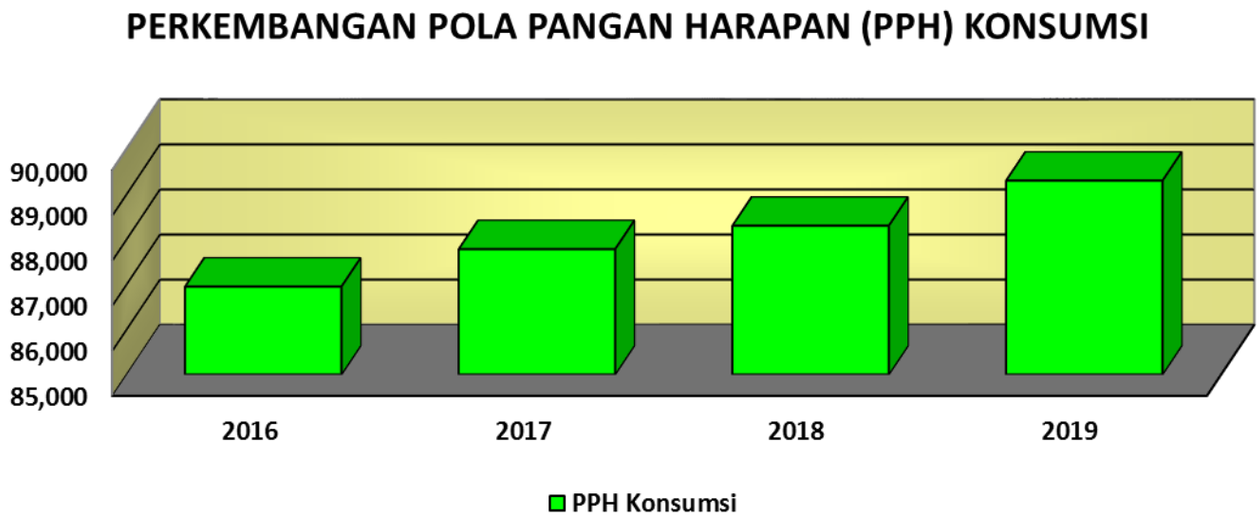

Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor PPH Konsumsi. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Capaian Skor PPH Konsumsi pada tahun 2019 sebesar 89,3 , apabila dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,00. Sedang PPH Konsumsi Kab. Sidoarjo tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

SKOR PPH KONSUMSI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019

No.	Kelompok Pangan	Skor AKE	Skor Maksimal	Gap Skor AKE dan Skor Maksimal	Skor PPH
1	Padi – Padian	22,7	25	-2,3	22,7
2	Umbi – Umbian	1,3	2,5	-1,2	1,3
3	Pangan Hewani	23,6	24	-0,4	23,6
4	Minyak dan Lemak	12,5	5	7,5	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,7	1	-0,3	0,7
6	Kacang - Kacangan	7,5	10	-2,5	7,5
7	Gula	1,9	2,5	-0,6	1,9
8	Sayur dan Buah	26,5	30	-3,5	26,5
	Jumlah Skor PPH	96,8	100		89,3

Perkembangan pola pangan harapan diupayakan selalu meningkat dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengembangkan rumah pangan lestari dengan menitikberatkan pada budidaya sayuran dan buah.
b. Pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari produksi kabupaten, cadangan pangan dalam maupun luar kabupaten
c. Internalisasi konsumsi B2SA untuk meningkatkan kesadaran konsumsi bahan lokal melalui advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi serta jalur pendidikan formal maupun informal

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran di urusan pangan, Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan ketahanan pangan daerah dengan anggaran sebesar Rp.753.543.560,00 dan terealisasi sebesar Rp. 726.965.497,00 atau 96,47%
   Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Persentase
Fluktuasi harga (constant of variant)	angka	12	11,53	104%
Prosentase pangan segar yang aman dikonsumsi	%	83,4	86,53	103,8%
Prosentase Peningkatan cadangan pangan	%	0,2	0,28	140,0%
Tingkat konsumsi beras	gram/kapita/hari	249,9	249,3	100,2%

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja program peningkatan ketahanan pangan daerah sangat baik karena Dinas melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Sosialisasi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman untuk anak – anak sekolah dan kelompok masyarakat serta pelatihan pangan Non Beras Non Terigu untuk Ibu – Ibu.
b. Sosialisasi pentingnya keamanan pangan pada usia dini dan sosialisasi pemberdayaan pekarangan pangan di sekolah dan masyarakat.
c. Koordinasi lintas sektor lebih insentif dan melaksanakan pasar murah pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan

d. Melakukan koordinasi teknis lebih intensif kepada kelompok tani dan pengelola Rice Milling Unit.

Urusan Pertanahan

Prosentase terfasilitasinya permasalahan pertanahan dan Pengadaan Tanah sesuai prosedur

Untuk kegiatan pengadaan tanah pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan banyaknya usulan atau pengajuan dari beberapa OPD lain yang membutuhkan.

Uraian	2018	2019
Pengadaan Tanah	3	2

Pada tahun 2018 terdapat 3 pengadaan tanah yang diajukan oleh OPD lain dan dapat terselesaikan sejumlah usulan tersebut. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 2 pengadaan tanah yang diajukan oleh OPD lain yang juga dapat terselesaikan pada tahun tersebut,

Permasalahan:

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan belum terlaksana secara maksimal karena bergantung dari permasalahan pertanahan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini SKPD yang membutuhkan bidang tanah.

Solusi:

a. Memberikan informasi terkait dengan adanya fasilitas penyelesaian pertanahan.
b. Koordinasi secara internal maupun eksternal yaitu dengan BPN dan pihak lain yang terkait akan dioptimalkan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup secara umum sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

No	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD
1	Meningkatnya kelestarian lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara 2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo

Urusan Lingkungan hidup dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Program pembangunan untuk urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah :

1. Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran
2. Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, seluruh program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : "***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup***"

a. Atas Target dan Capaian Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019, kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	50,01	48,79	98	51,01	55,1	108	52,01	61,03	117
	Indeks Kualitas Air	50,29	49,77	99	51,29	49,59	97	52,29	49,05	94
	Indeks Kualitas Udara	84,79	82,05	97	85,79	85,04	99	86,79	86,26	99
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	23,72	23,11	97	24,72	36,77	149	25,72	51,09	199

Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 52,01 sedangkan realisasi Tahun 2019 sebesar 61,03 dimana nilai tersebut termasuk dalam rentang **kategori IKLH Kurang** walaupun capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 117 %. Dalam rentang penilaian IKLH, nilai IKLH tersebut masuk dalam penilaian 58 – 66 (Kategori Kurang). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 55,10 maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan salah satu komponen Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan/ Vegetasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018. Hasil Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung melalui metode analisis citra satelit dengan skala yang lebih tinggi dibanding tahun 2018 sehingga luas tutupan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat terinventarisasi dengan baik dan menyeluruh. Terhadap Nilai / Skor IKLH dalam kategori Kurang seyogyanya masih dalam posisi yang cukup aman karena Target IKLH Nasional Tahun 2019 pun hanya sebesar 66,5 - 68,5 (kategori cukup) berada pada 1 (satu) tingkat kategori di atas Kabupaten Sidoarjo. Nilai / Skor IKLH dalam kategori Kurang disebabkan:

1) Baseline IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 dengan nilai/skor 49,26 (kategori waspada) sehingga sulit untuk meningkatkan nilai/skor IKLH ke kategori baik;
2) Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas menyebabkan tingkat pencemaran air sungai di Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi sehingga sulit untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) secara signifikan;

Adapun perkembangan nilai/skor IKLH tiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik IV.B.18

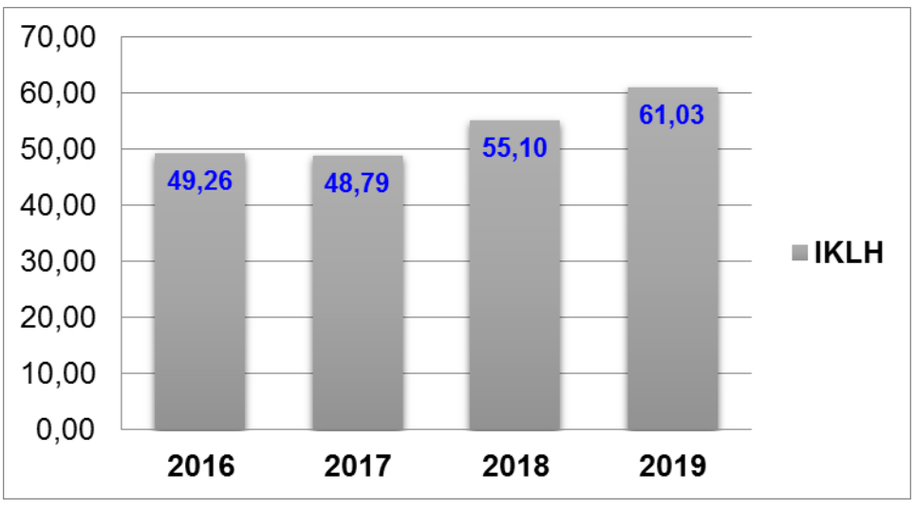

➢ **Indeks Kualitas Air**

Indeks Kualitas Air merupakan hasil dari penjumlahan nilai status mutu air. Jumlah pemantauan kualitas air dilakukan sebanyak 42 pemantauan. Pemantauan kualitas air dilakukan di 3 sungai antara lain Sungai Buntung, Sungai Kedunguling dan Sungai Pucang. Pemantauan dilakukan masing-masing Saluran / kali terdapat 7 lokasi dengan intensitas 2 kali pemantauan di Bulan Maret dan Bulan Agustus. Metodologi perhitungan Indeks Kualitas Air berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. **Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 52,29** sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 49,05 sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 49,59 maka realisasi di Tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh:

a. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas akan menambah kontribusi pencemaran yang signifikan karena pencemaran air badan air sudah terjadi mulai dari hulu;
b. Adanya peningkatan jumlah penduduk dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang strategis sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur akan menambah kontribusi pencemaran limbah domestik ke sungai dan semakin diperparah oleh aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai;

c. Adanya sumber pencemar yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi (*non-point sources*), misal: kegiatan rumah tangga atau permukiman yang tidak dilengkapi dengan IPAL Komunal, kegiatan pertanian dan peternakan sehingga menyebabkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) berfluktuatif tiap tahunnya;

d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga di sungai.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air antara lain:

a. Menyusun sistem informasi yang lengkap terkait kondisi kualitas sungai dalam mendukung kebijakan pengendalian pencemaran air dan dapat diakses oleh setiap orang.
   1) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (DLHK) telah menyusun suatu sistem informasi “Geo Lingkungan” yang menggambarkan berbagai sumber pencemar air sungai di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar, hasil uji kualitas air sungai, foto kondisi sungai, foto kegiatan pengambilan sampel air sungai. Sistem informasi tersebut dapat diakses secara online oleh publik yang akan terus diupdate sesuai sungai-sungai hasil Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar tiap tahunnya.
   2) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (DLHK) bekerja sama dengan KLHK memasang alat pemantauan kualitas air secara online (Onlimo) dengan hasil berupa status mutu air Saluran Pelayaran (yang merupakan intake PDAM, Tawangsari, Taman) dalam kondisi memenuhi, tercemar ringan, tercemar sedang atau tercemar berat. Hasil tersebut ditampilkan pada media televisi yang terpasang di Kantor DLHK.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air bagi UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo;

c. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran, berupa sosialisasi bagi masyarakat di sepanjang sungai, sosialisasi bagi pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah;

d. Meningkatkan edukasi masyarakat dalam pengolahan sampah secara terpadu dan pengolahan sampah secara 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) atau tuntas di tempat (berbasis “Zero Waste”), melalui SBH, Zero Waste Academy, pembinaan sekolah Adiwiyata, pembinaan Desa Berseri dan Sidoarjo Green Industry, Sidoarjo Green School;

e. Pembuatan taman di sempadan sungai;

Untuk kawasan konservasi pada bantaran sungai, dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau secara maksimal, yang berfungsi penahan erosi, resapan air, dan taman kota / hutan kota. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa taman pada sempadan sungai yaitu Taman Prahu, Hutan Kota “Delta Putri”, Taman Belokan Pagerwojo, dan Taman Berbek Waru Sidoarjo dam di tempat lain yang banyak dikembangkan masyarakat dan pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo

f. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri dan kegiatan/usaha lainnya dalam pengendalian pencemaran air dan kesadaran terhadap pemenuhan Izin pembuangan Air Limbah;

g. Melakukan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air yang ditindaklanjuti dengan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup bagi ekosistem air sungai;

h. Penegakan hukum terhadap pengendalian pencemaran air sesuai peraturan yang berlaku, seperti melakukan verifikasi lapang terkait pengaduan pencemaran air;

i. Melakukan kegiatan patroli air;

Kegiatan patroli air yang dilakukan bertujuan untuk dapat menemukan dan menindak tegas oknum-oknum atau masyarakat yang melakukan pencemaran air diikarenakan sampai saat ini, di Kabupaten Sidoarjo masih marak pencemaran air limbah industri. Saat ini tim DLHK Kabupaten Sidoarjo masih secara rutin mengikuti kegiatan Patroli air bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Perum Jasa Tirta;

j. Menggalakkan aksi bersih-bersih sungai yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat;

Aksi bersih sungai ini adalah kegiatan kerja bakti mengambil sampah di sungai dan di area sepanjang sungai. Aksi ini mendapat antusias yang tinggi karena diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, antara lain: Bupati Sidoarjo dan jajarannya, seluruh OPD di Kabupaten Sidoarjo, TNI, Polisi, Akademisi pelajar dan warga.

k. Melakukan monitoring kualitas air secara berkala;

Kegiatan pemantauan air badan air merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui trend analisis kualitas air sungai secara *time series* sebagai dasar dalam penentuan program kegiatan serta kebijakan di tahun berikutnya.

l. Memasang papan peringatan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kegiatan tersebut telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang mana papan peringatan akan dipasang di titik pantau sungai prioritas IKLH.

- **Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara merupakan hasil rerata IEU SO_2 dan IEU NO_2 yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan Indeks Kualitas Udara. Indeks Kualitas Udara diperoleh dari data passive sampler di 4 Kawasan yaitu Transportasi, Industri / Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran / Komersial dilakukan sebanyak 2 kali pemantauan di Semester 1 dan 2. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu "Common Information to European Air" (Citeair II) dengan judul CAQI Air Quality Index: *Comparing Urban Air Quality across Borders – 2012*. **Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 86,79** Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 86,26 sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 85,04 maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh:

a. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sidoarjo semakin peduli terhadap pengendalian pencemaran udara;
b. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sidoarjo semakin peduli terhadap penggunaan energi yang dulunya menggunakan bahan bakar minyak beralih menjadi bahan bakar gas;
c. Masyarakat semakin peduli dalam penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang ramah lingkungan;
d. Pengguna kendaraan bermotor semakin peduli dalam melakukan perawatan terhadap kendaraannya;
e. Pelaksanaan kegiatan *Car Free Day* (CFD) yang semakin baik.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara antara lain :

a. Menyusun sistem informasi yang lengkap terkait kondisi kualitas udara ambien dalam mendukung kebijakan pengendalian pencemaran udara;

   Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (DLHK) bekerja sama dengan dibantu BMKG pada Tahun 2019 memasang alat pemantau kualitas udara Air Quality System (AQS) di area Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan hasil pengujian real time yang dapat dikonversikan ke Indeks standart Pencemar Udara (ISPU) untuk menentukan kualitas udara dalam kondisi sehat atau tidak. Hasil tersebut dapat

ditampilkan dalam videotron yang terpasang di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara bagi UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo;

c. Melakukan monitoring kualitas udara ambien berkala;

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 4 (empat) kawasan yaitu kawasan perumahan, tranportasi, industri dan kawasan perdagangan.

d. Meningkatkan pembinaan/pelatihan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat, seperti: Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim;

e. Melakukan pemantauan kualitas udara pada saat Car Free Day;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada saat Car Free Day di 6 (enam) titik lokasi pemantauan, yaitu Alun-Alun depan Monumen Jayandaru, Alun-Alun depan Masjid Agung, Depan Pemkab Sidoarjo, Depan Pendopo Sidoarjo, Depan Bank Delta Artha, Pertigaan Jl. Yos Sudarso.

f. Melakukan kegiatan pengujian emisi kendaraan bermotor secara berkala yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, laboratorium, dan berbagai pihak swasta;

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas udara emisi gas buang kendaraan bermotor dan mensosialisasikan pentingnya menjaga emisi kendaraan agar tidak melebihi ambang batas baku mutu yang telah ditetapkan.

g. Melakukan kegiatan penghijauan;

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penghijauan pada median dan pedestrian jalan, utamanya tanaman penyerap polutan.

h. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri dan kegiatan/usaha lainnya dalam pengendalian pencemaran udara;

i. Penanganan perlakuan industri dan usaha/kegiatan lainnya terhadap perlakuan emisi cerobongnya, yaitu dengan memasang penyaring udara pada cerobong asap;

Membantu para pelaku usaha Industri Tahu di Tropodo Kecamatan Krian yang diketahui menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar dengan dukungan dan koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sedang dirumuskan solusi bahan bakar yang ramah lingkungan

j. Penegakan hukum terhadap pengendalian pencemaran udara sesuai peraturan yang berlaku, seperti melakukan verifikasi lapang terkait pengaduan pencemaran udara.

- **Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi**

Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi merupakan hasil pembagian luas tutupan lahan di Sidoarjo dan luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi. **Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 25,72** sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 51,09 sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 199%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 36,77 maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2019 hasil Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung melalui metode analisis citra satelit dengan skala yang lebih tinggi dibanding tahun 2018 sehingga luas tutupan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat terinventarisasi dengan baik dan menyeluruh. Namun demikian, kedepannya masih akan dilakukan peningkatan luas tutupan vegetasi melalui penambahan Ruang Terbuka Hijau.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi antara lain:

1. Melakukan inventarisasi tutupan lahan/ vegetasi secara periodik;

   Pada tahun 2018, DLHK menyusun Dokumen Inventarisasi tutupan vegetasi dan dilanjutkan pada tahun 2019 namun terlingkup pada kegiatan penyusunan Dokumen IKLH.

Inventarisasi Vegetasi di Median Jalan

Inventarisasi Vegetasi Tanaman Bakau

Inventarisasi Vegetasi
di Sempadan Sungai

Inventarisasi Vegetasi
di Taman Perumahan

2. Monitoring dan evaluasi kualitas tanah untuk mengetahui tingkat kerusakan tanah di lahan kering;

3. Melakukan penghijauan;

   Kegiatan penghijauan merupakan kegiatan penanaman pada lahan kosong terutama pada tanah milik rakyat dengan tanaman keras, misalnya jenis-jenis pohon hutan, pohon buah, tanaman perkebunan, tanaman penguat teras, tanaman pupuk hijau, dan rumput pakan ternak. Tujuan penanaman agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan, dan ditingkatkan kembali kesuburannya.

4. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang upaya penghijauan, seperti: melalui kegiatan pelatihan hidroponik, adiwiyata sekolah, desa berseri, Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH), dan lain-lain;

5. Meningkatkan kualitas tutupan lahan di Kawasan Lapindo sebagai Area Terdampak bencana lumpur lapindo.

   Kawasan mangrove pesisir lebih tepatnya di Kecamatan Jabon merupakan hutan mangrove yang terbentuk akibat endapan lumpur sidoarjo sehingga dikenal dengan PULAU LUSI (Pulau Lumpur Sidoarjo).

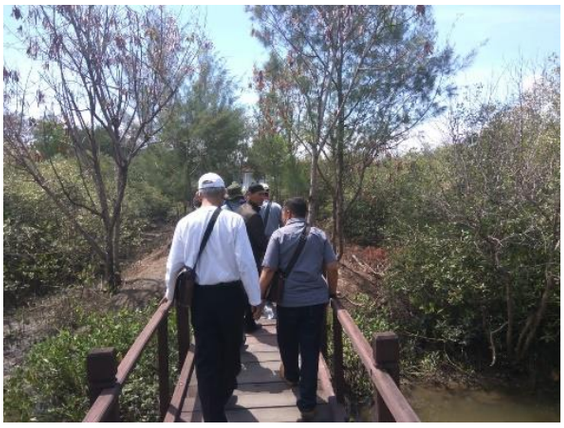

6. Memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum dimanfaatkan untuk digunakan sebagai lahan penanaman tanaman keras yang dapat menjadi bahan pembuatan biomassa (wood pellet) dan sekaligus bagi manfaat peningkatan luasan tutupan lahan.

3. Atas Target dan Capaian Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019, kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air	28 %	25,58 %	91	25 %	28,18 %	113	28 %	43 %	154
Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

a. Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air

Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air diperoleh dari Jumlah sample dengan BOD sesuai baku mutu air dibagi Jumlah sample Air Badan Air yang ada kemudian dikalikan 100%. Jumlah pengujian kualitas air badan air sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) pengujian. Pemantauan dilakukan sebanyak 2 (Dua) periode yaitu Semester 1 pada musim penghujan dan Semester 2 pada musim kemarau. Pemantauan kualitas baku mutu udara ambien di titik lokasi sampling diuji terhadap 7 (Dua) parameter antara lain TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. **Target yang ditetapkan di Tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 28%.** Sedangkan realisasi Tahun 2019 sebesar 43% sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 154%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 28,18 % maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan, target yang ditetapkan pada Tahun 2019 merupakan hasil review dari Tahun 2018 dimana Target pada Tahun 2018 dan seterusnya diturunkan. Kondisi saat dilakukan review, hasil dari titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air dibawah target yang telah ditentukan sehingga dilakukan review.

Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas air badan air antara lain

a. Melakukan pemantauan air badan air secara periodik;
b. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air;
c. Melakukan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
d. Melakukan monitoring IPAL Komunal;
e. Melakukan kegiatan Sosialisasi bagi masyarakat di sepanjang sungai;
f. Melakukan kegiatan Sosialisasi bagi pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah;
g. Melakukan Bintek Pengelolaan Limbah Industri dan Kegiatan Lainnya;
h. Melakukan kegiatan pengawasan langsung atau SKPL dalam upaya pengendalian pencemaran air;
i. Menindaklanjuti pengaduan lingkungan terkait pencemaran air;
j. Melakukan pengelolaan sampah secara terpadu utamanya tumpukan sampah di pinggiran sungai;
k. Pembangunan taman di sempadan sungai;

l. Menyediakan TPS di setiap wilayah untuk mengurangi pembuangan sampah ke badan air.

b. Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara

Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara diperoleh dari Jumlah sample dengan parameter SO_2 dan NO_2 sesuai baku mutu udara ambien dibagi Jumlah sample udara ambien yang ada dikalikan 100%. Pemantauan kualitas mutu udara ambien tahun 2019 untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo dilakukan di 48 (empat puluh delapan) titik pantau atau 102 (Seratus Dua) pemantauan yang terletak di 6 (Enam) Kawasan antara lain Kawasan Car Free Day, di luar Car Free Day, Industri, Perdagangan, Perumahan dan Transportasi. Pemantauan dilakukan sebanyak 2 (Dua) periode yaitu Semester 1 dan Semester 2. Pemantauan kualitas baku mutu udara ambien di titik lokasi sampling diuji terhadap 2 (Dua) parameter yaitu SO_2 dan NO_2. **Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 100%** sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 100% sehingga capaian kinerja di Tahun 2018 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100% maka realisasi di Tahun 2019 dapat mempertahankan realisasi dari tahun sebelumnya.

Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas udara ambien antara lain :

(1) Melakukan kegiatan Sosialisasi Adaptasi Perubahan iklim;
(2) Melakukan penghijauan pada median dan pinggir jalan, utamanya tanaman penyerap polutan;
(3) Melakukan kegiatan pengawasan langsung atau SKPL dalam upaya pengendalian pencemaran udara;
(4) Melakukan kegiatan pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat secara berkala yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, laboratorium, dan berbagai pihak swasta;
(5) Melakukan pemantauan kualitas udara pada saat Car Free Day;
(6) Monitoring kualitas udara ambien;
(7) Menggalakkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari luas lahan utamanya penyediaan tanaman penyerap polutan termasuk kebisingan yang tertuang dalam Dokumen Lingkungan;

(8) Melakukan pendampingan kegiatan Desa Berseri dan Program kampung Iklim (Proklim)

Sasaran 2 : Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase sampah yang terkelola	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	1,66 %	0,96 %	58	1,67 %	1,04 %	62	1,67 %	1,04	62	1,67 %	1,05 %	63
Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	74 %	74 %	100	76 %	76 %	100	78 %	78 %	100	80 %	80 %	100

c. Persentase sampah yang terkelola

Indikator ini menggambarkan jumlah sampah yang berhasil dikelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan semakin banyaknya jumlah sampah yang terkelola maka dapat menghemat sumber daya alam, menghemat lahan tempat pembuangan akhir dan menambah nilai ekonomis suatu barang. Penanganan sampah tersebut difasilitasi dengan adanya sarana prasarana yang mendukung seperti adanya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Sampai Tahun 2019, telah terbangun 116 (Seratus Enam Belas) TPST. Dari jumlah 116 TPST yang telah terbangun terdapat 96 TPST yang aktif dan 20 TPST yang tidak aktif. Rincian pembangunan TPST adalah sebagai berikut

No	Jenis TPST	Jumlah
1	TPST Kawasan	9
2	TPST 3 R	9
3	TPST	98
TOTAL		**116**

Target yang ditetapkan di Tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 100 % sedangkan realisasi Tahun 2019 sebesar 100 % sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 103%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100 % maka realisasi di Tahun 2019 dapat mempertahankan realisasi dari tahun sebelumnya. Dari jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo dilakukan pengelolaan oleh DLHK yaitu antara lain di TPST, TPST 3R dan TPST Kawasan serta TPA. Selain pengelolaan yang dilakukan DLHK, pengelolaan sampah juga dilakukan masyarakat secara mandiri seperti penimbunan di pekarangan rumah dan dikelola menjadi pupuk anorganik. Perkembangan persentase sampah yang terkelola Tahun 2016-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

URAIAN	SATUAN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
Jumlah sampah yang terkelola (TPST 3R + TPST Kawasan + TPST)	ton / hari	266	282	292	308
a. TPST 3R	ton / hari	63	68	72	77
b. TPST Kawasan	ton / hari	109	114	117	122
c. TPST	ton / hari	94	100	103	109
Sampah Masuk TPA	ton / hari	420	442	465	520
Jumlah sampah yang terkelola di TPST dan TPA	ton / hari	686	724	757	828
Jumlah sampah terkelola secara mandiri oleh Masyarakat	ton / hari	482	468	459	412
Total jumlah sampah yang terkelola	**ton / hari**	**1168**	**1192**	**1216**	**1240**
Jumlah timbulan sampah	**ton / hari**	**1168**	**1192**	**1216**	**1240**
Persentase sampah yang terkelola ((Jumlah sampah yang terkelola / Jumlah timbulan sampah) x 100 %)	%	100	100	100	100

Upaya yang dilakukan untuk penanganan sampah yang terkelola antara lain :

1. Pengolahan Sampah Organik

   Yaitu pengolahan sampah rumah tangga yang berupa sampah organik atau sampah mudah busuk menjadi pupuk organik/kompos, sampah tersebut berasal dari sisa sampah dapur, dedaunan, tanaman hias, dan sebagainya yang dapat diproses menjadi pupuk organik atau kompos. Sarana pemrosesan kompos tersebut dengan menggunakan komposter dan takakura untuk pemrosesan kompos pada tingkat rumah tangga, windrus airrop digunakan untuk pemrosesan kompos pada TPS 3R atau TPST. Kompos selanjutnya digunakan sebagai pemupukan tanaman di masing-masing rumah, jika sudah tercukupi maka kompos hasil pengolahan sampah tersebut dapat dikemas menjadi produk unggulan rumah tangga yang siap dipasarkan.

2. Bank sampah

   Merupakan suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah kering bernilai ekonomi pada

pasar sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Selain itu bank sampah merupakan tempat yang efektif untuk melakukan edukasi lingkungan kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan sampah kering yang ada menjadi kreasi inovatif kerajinan rumahan yang bernilai guna untuk dimanfaatkan kembali di masyarakat.

3. Pembuatan Gas Metan (CH_4)

   Dibalik sampah terdapat suatu kandungan yang mampu dimanfaatkan. Penelitian telah membuktikan bahwa dalam sampah terkandung gas yang sangat potensial bagi kehidupan, yaitu gas methan. Cara yang dilakukan ialah dengan menimbun sampah di dalam lapisan tanah kemudian diberi saluran pipa instalasi gas methan. Dan hasil gas tersebut disalurkan ke pemukiman warga untuk listrik dan bahan bakar kompor. Ini merupakan terobosan baru yang sangat menginspirasi kita.

4. Mengubah sampah anorganik menjadi produk kerajinan tangan

   Sampah anorganik berbahan dasar plastik dan kertas dapat diolah lebih lanjut menjadi produk kerajinan tangan yang unik dan menghasilkan. Contohnya adalah bros, tas plastik, dompet, hiasan ruangan dan lain sebagainya.

d. Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mempunyai manfaat Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Ketersediaan RTH publik yang dikelola di Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Rencana luasan RTH dalam Masterplan yaitu sebesar 2510,88 Ha. **Target yang ditetapkan di Tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 1,67 % (42 Ha)** sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 1,05 % (26,47 Ha) sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 63 %. Hal ini dikarenakan penambahan pada lahan / aset yang dikelola DLHK terutama pada fasum-fasum Perumahan yang telah diserahkan ke Pemkab dan pengelolaan diarahkan ke DLHK luasannya memang sedikit.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 1,05 % maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan. Realisasi Luas Wilayah RTH tersebut merupakan luas RTH yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Upaya dan Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yaitu :

1. Pembangunan RTH (taman aktif, taman pasif, taman kota, pemakaman, hutan kota, lapangan olah raga) baru. Pemerintah dapat membeli / membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman.
2. Bekerja sama menghijaukan sempadan sungai dan situ/waduk/danau (dinas pekerjaan umum dan Jasa Tirta), sempadan rel kereta api (PT KAI), Sutet (PLN), Kolong jalan layang (Jasa Marga) yang dikembangkan sebagai taman penghubung RTH kota.
3. Mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota.
4. Untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan keberadaannya perlu dimanfaatkan secara maksimal, seperti dengan penanaman bunga, pepohonan, lampu hias, dan lain-lain yang mempunyai nilai seni dan estetika
5. Untuk kawasan konservasi pada bantaran sungai, dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau secara maksimal, yang berfungsi penahan erosi, resapan air, dan taman kota / hutan kota
6. Mempertahankan yang sudah ada dan dihindari untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, dan hanya difungsikan untuk ruang terbuka hijau, baik berupa taman, tempat olah raga, maupun sebagai daerah resapan air;
7. Dibuatnya kawasan penyangga (buffer zone) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman;
8. Peningkatan RTH dengan Pembangunaan Green Belt pada setiap usaha dari para pelaku usaha

Perkembangan Luasan RTH Publik yang dikelola dari Tahun 2016 s.d Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Grafik IV.B.19

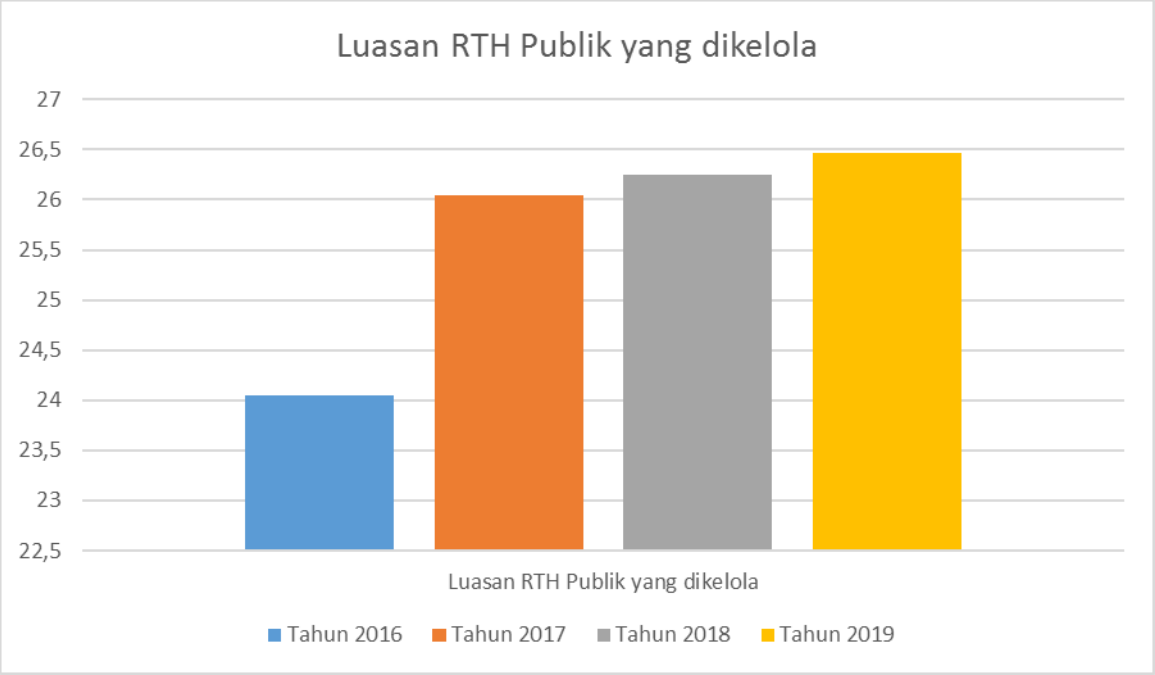

Rekapitulasi Luasan RTH Publik yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo **sebesar 26,47 Ha** adalah sebagai berikut

Rekapitulasi Luasan RTH Publik yang Dikelola DLHK Sidoarjo sampai Tahun 2019 :

No	Jenis RTH	Luas RTH
		m^2
1	Taman Aktif	136.522,94
2	Taman Pasif terdiri dari	
	1) Fasum	22.922,77
	2) Median Jalan	50.469,20
	3) Bahu Jalan	12132
	4) Pedestrian	42.710,72
Jumlah		264.757,63
Luasan RTH dalam Ha		**26,47**

Rekapitulasi Luasan RTH Publik yaitu Taman aktif antara lain :

No	Taman	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan
1	Taman Tanjung Puri	Desa Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo	24000	Bekas tempat pembuangan akhir (TPA)
2	Alun-Alun	Sidoarjo	33480	Utara Kantor Bupati Sidoarjo
3	Hutan Kota Delta Putri	Sidoarjo, Jl. Pahlawan	8950	Sebelah Timur Kantor KONI
4	Taman Gelora	Fasum Perumahan PEMDA	3000	Jalan Jenggolo Sidoarjo
5	Taman Abirama	Perum. Pondok Jati, Kec. Sidoarjo	4374	Fasum Perum. Pondok Jati
6	Taman Mangundiprojo	Kecamatan Buduran	1050	Sempadan Fly Over Buduran
7	Taman Monumen Perjuangan	Kecamatan Gedangan	1050	Sempadan jalan dan Rel KA
8	Taman RTH Abisatya	Depan Kantor Kelurahan Taman, Kec. Taman	13327	Ex. Tanah TKD Kelurahan Taman
9	Taman Abirupa	Tambak kemerakan, Kec. Krian	9787	Bekas Pasar Sapi
10	Taman Apkasi	Jl. Raya Porong Kec. Porong	6500	Bekas Pasar Porong
11	Taman Dwarakerta	Jl. Raya Porong Kec. Porong	6009	Bekas Kawedanan Porong
12	Taman RTH Makam Mbah Djaelani	Desa Kajeksan, Kec. Tulangan	4751	Tanah TKD Kelurahan Jatirejo, Kec. Porong
13	Taman RTH Kec. Wonoayu	Desa Mulyo Dadi, Kec. Wonoayu	8000	Kebun Bibit
14	Taman ASEAN	Kelurahan Pagerwojo, Kec. Buduran	4400	Tanah DPRD Kab Sidoarjo
15	Taman RTH Gading Fajar	Desa Sepande, Kec. Candi	4800	Sempadan Sutet
16	Taman Dermaga	Jl. Raya Pagerwojo	101,5	Depan Taman Abhirama
17	Fasum Pondok Jati Sisi Timur	Raya Pagerwojo	1550	Depan Taman Abhirama

No	Taman	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan
18	RTH Perumtas III	Desa Grabagan Wonoayu	407,5	Perumtas III Wonoayu
19	Taman Lansia	Wisma Delta Sekardangan	550	
20	Perumtas II	Perumtas II Tanggulangin	435	

e. **Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi**

Untuk mendukung keindahan dan dekorasi kota, dipenuhi pula ketersediaan penerangan jalan dan lingkungan, dengan jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun sampai Tahun 31.092 titik. Selain itu, Perkembangan Jumlah Penerangan Jalan Umum dengan kondisi layak fungsi Tahun 2018-2019 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN	
	2018	2019
Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU)	30720	31092
Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) Kondisi Layak Fungsi	23962	24874
Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	78 %	80 %

Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kendaraan operasional yang tersedia kurang maksimal karena usia kendaraan yang sudah lama.
2. Pengadaan material PJU yang menyesuaikan anggaran yang ada.
3. Belum adanya penggantian lampu hemat energi sebanyak 20 %

Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja di tahun mendatang, yaitu :

1. Pengajuan kendaraan operasional yang memadai.
2. Pengajuan pengadaan material PJU.
3. Revitalisasi (penggantian) dan penggunaan lampu hemat energi

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran** dengan anggaran sebesar Rp 2.591.973.525 dan terealisasi sebesar Rp2.371.736.727,61 atau 91,50 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase pelaporan dokumen lingkungan	12,9 %	12,9 %	100 %
Persentase Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	5,35 %	5,35 %	100 %
Persentase Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	1,66 %	1,66 %	100 %
Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan	30 %	30 %	100 %
Persentase pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD	41 %	65 %	158,54 %
Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO_2 dan NO_2	46 %	77 %	167,39 %

<u>Permasalahan:</u>

1. Kurangnya personil teknis Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran;
2. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai (seperti laptop/PC, printer portable, dan kendaraan bermotor/mobil);
3. Kuranganya pemahaman pelaku usaha dalam penyusunan pelaporan dokumen lingkungan hidup dan periode pemantauan kualitas lingkungan hidup;
4. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir aliran sungai brantas dan diperparah dengan beban pencemaran dari berbagai sumber sehingga

mengakibatkan nilai hasil uji kualitas air sungai di Kabupaten Sidoarjo (termasuk kualitas BOD) yang fluktuatif bahkan cenderung menurun.

Solusi:

1. Sudah mengusulkan penambahan personil teknis bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran dan akan dipenuhi 1 (satu) orang personil (CPNS) penelaah dampak lingkungan di Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak pada Tahun 2020, sedangkan untuk Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan untuk sementara memaksimalkan SDM yang ada;
2. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana (seperti laptop/PC dan printer portable) yang ada, sedangkan jika kekurangan kendaraan dinas untuk sementara meminjam kendaraan operasional bidang lain;
3. Merencanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan pelaporan dokumen lingkungan hidup bagi pelaku usaha yang belum pernah mengikuti bimbingan teknis dan yang belum memahami penyusunan pelaporan dokumen lingkungan hidup. Kegiatan tersebut telah masuk pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020;
4. Koordinasi dengan Kepala Seksi dan Staf untuk mereview titik pantau air sungai dan mengevaluasi hasil kualitas air sungai secara periodik sebagai bahan penyusunan Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air serta bahan koordinasi dengan OPD/instansi terkait dalam pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Sidoarjo serta menyusun Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk ekosistem air sungai secara periodik (sebagai tindak lanjut Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air) untuk mengetahui beban pencemaran dan rencana penetapan kelas masing-masing sungai di Kabupaten Sidoarjo.

2. **Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup** dengan anggaran sebesar Rp 3.298.588.500 dan terealisasi sebesar Rp2.819.556.334,82 atau 85,48 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase pengawasan pelaku usaha dan kegiatan	3,3 %	91 Pengawasan : 2712 Rekomtek Dokumen Lingkungan = 3,35 %	101,5 %
Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang diselesaikan	100 %	59 Pengaduan : 60 Pengaduan = 98,87 %	98,87 %
Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	5,9 %	87 Kelembagaan : 1574 Kelembagaan = 5,53 %	93.55 %

Permasalahan:

1. Kurangnya pejabat fungsional PPLHD
2. Kurangnya kompetensi petugas pengaduan
3. Kurangnya jumlah PNS yang bertugas sebagai pengawas

Solusi:

1. Mengusulkan formasi pejabat fungsional PPLHD
2. Mengusulkan diklat PPLHD bagi PNS
3. Mengusulkan penambahan petugas pengawas

3. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** dengan anggaran sebesar Rp. 32.563.474.525 dan terealisasi sebesar Rp28.442.586.852 atau 87,35 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase penduduk yang terlayani oleh TPST	10,12 % (232.435 Orang/ 2.296.790 Orang)	24,35 % (551.852 Orang/ 2.266.533 Orang)	240,6 %

Persentase penduduk yang terlayani pengangkutan sampah	54,16 % (1.243.894 Orang/ 2.296.790 Orang)	42,49 % (962.963 Orang/ 2.266.533 Orang)	78,5 %
Persentase berat sampah yang terlayani pengangkutan	54,16 % (245.171.530 Kg/ 452.697.000 Kg)	41,94 % (189.800.000 Kg/ 452.600.000 Kg)	77,4 %

Permasalahan:

1. Kedisiplinan petugas pramu kebersihan yang kurang

Solusi:

1. Pembinaan pramu kebersihan secara berkelanjutan

4. **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan Lingkungan** dengan anggaran sebesar Rp. 118.370.957.311 dan terealisasi sebesar Rp 83.981.810.011,5 atau 70,95 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Luas RTH yang dikelola	30 Ha	30 Ha	100 %
Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik	80 %	80 %	100 %

Permasalahan:

1. Pemeliharaan tanaman akibat musim kering yang panjang sehingga membutuhkan penyiraman dan tenaga lebih serta ketersediaan lahan untuk perluasan lahan RTH.

Solusi:

1. Perlu upaya untuk pemeliharaan dan penyediaan lahan untuk RTH

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan san Sasaran OPD

No	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA OPD
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipiL yang prima	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan dengan didukung meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program pembangunan untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah :

1. Program Pelayanan Pendaftaran Kependudukan.
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo seluruh Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan: Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima, dengan sasaran : ”Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan dengan didukung meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ”.

A. TUJUAN

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2016 (%)		TAHUN 2017 (%)		TAHUN 2018 (%)		TAHUN 2019 (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan mewujudkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan dengan didukung meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		80,02	79	84,43	81	85,17	82	84,99

B. SASARAN.

Untuk mendukung Target tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran dengan target kinerja sebagai berikut :

SASARAN	NDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016 (%)		TAHUN 2017 (%)		TAHUN 2018 (%)		TAHUN 2019 (%)	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	1. Prosentase penduduk yang ber-KTP elektron	78	82,37	85	84,01	90	90,5	95	95,79

dan pencatatan Sipil yang sesuai dengan data kependudukan.	2. Prosentase penduduk berKartu Keluarga (KK) 3. Prosentase penduduk berakta kelahiran jumlah penduduk usia 0-18 tahun	95 70	95,80 74	97 80	98,03 80,01	99 90	-99,2 89,34	100 100	99,22 91,59
Meningkatnya kuaiitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	78	80,02	79	84,43	81	85,17	82	84,99

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran RPJMD "**Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatkan teknologi Informasi"**, dengan indikator kinerja: "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan"

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan.

Pada tahun 2019 juga telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. IKM yang didapatkan setelah survei adalah sebesar 84,998 yang termasuk dalam mutu pelayanan kategori B dengan kategori kinerja :"Baik". Hal ini disebabkan adanya Permenpan Nomor.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sehingga ada perubahan penilaian indikator.

Berikut grafik perkembangan capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Grafik IV.B.20

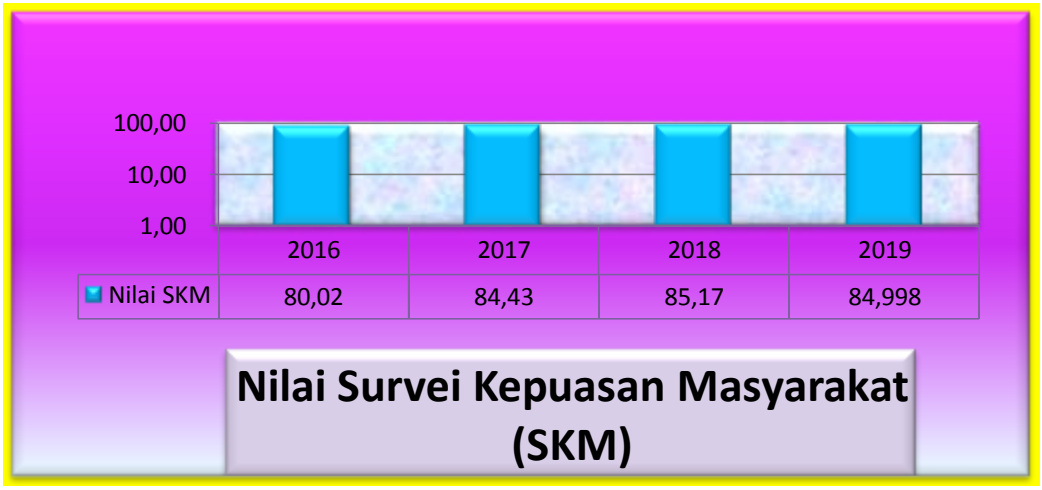

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan nilai capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) hingga tahun 2019 yang terus meningkat. Pada tahun 2018 nilainya SKM sebesar 85.17 dan di Tahun selanjutnya Tahun 2019 mencapai 84.99. Nilai SKM dari Tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya Permenpan nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sehingga ada perubahan indikator dan terbatasnya sarana dan prasarana kantor, serta terbatasnya ketersediaan Blangko KTP-el dari Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.

Hasil tersebut dapat dicapai dengan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan, antara lain :

1. Frekuensi kegiatan penyuluhan/ sosialisasi akta pencatatan sipil lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
2. Optimalisasi pelayanan Jemput Bola Terpadu Dokumen Kependudukan (*One Day Service*) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, UPTD Cabang Dinas Pendidikan, Panti Asuhan, sekolah sekolah, dll.
3. Memaksimalkan Sarpras yang ada, serta membagi akses layanan di Dispendukcapil dan Mall Pelayanan Publik (MPP)
4. Memastikan jaringan pada aplikasi SIAK berjalan lancar.

5. Melaksanakan Bimbingan Teknis para petugas Operator (Kecamatan dan Dispendukcapil), SIAK versi 6.
6. Optimalisasi Pelayanan sistem paket, artinya dalam satu proses pelayanan akta-akta tersebut diatas pemohon membawa pulang 4 (empat) produk layanan, yaitu akta kematian/ perkawinan/perceraian, KK, KTP-EL dan KIA (Kartu Identitas Anak) baru sesuai perubahan elemen data kependudukan yang baru.
7. Menerapkan inovasi-inovasi pelayanan, antara lain ALAMAK, e-tamat, salam 30 menit , Peduli DILAN (divabel dan lanjut usia), dll.
8. Tanggap dan responsif terhadap keluhan, pengaduan masyarakat dan paham masukan masyarakat.

Capaian Indikator Kinerja tersebut diatas didukung dengan capaian Indikator Kinerja di tingkat OPD (Renstra) dan ditingkat Program yaitu antara lain:

1. Kepemilikan KTP elektronik

Kepemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut grafik perkembangan kepemilikan KTP-el :

Grafik IV.B.21

	2016	2017	2018	2019
Wajib KTP-el	1.667.686	1.601.909	1.652.408	1.743.906
Ber-KTP-el	1.373.672	1.345.763	1.495.386	1.670.528
Persentase	82,37%	84,01%	90,50%	95,79%

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari grafik di atas dapat dilihat Jumlah penduduk wajib KTP-el pada tahun 2019 adalah 1.743.906 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1.670.528 jiwa atau sekitar 95,79 % dari jumlah wajib KTP-el Jumlah wajib KTP el pada tahun 2019 ada kenaikan sebesar 3,01 % dari tahun sebelumnya atau tepatnya sekitar 135.338 jiwa. Semua ini disebabkan berbagai faktor, antara lain adanya program percepatan pencetakan e-KTP, baik yang cetak di kantor Dispendukcapil, Mall Pelayanan Publik (MPP) maupun di 18 Kecamatan

Sedangkan untuk capaian target kepemilikan KTP-el pada Tahun 2019 sudah mencapai 95,79 % dari target 95 %, ada kelebihnan 0,79 % dari target kepemilikan KTP el yang sudah ditetapkan. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dijelas diatas. Namun capaian target kepemiikan KTP-el harus tetap ditingkatkan menjadi 100 %, sehingga semua masyarakat Sidoarjo sudah memegang KTP-el.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut yaitu:

1) Melakukan Pelayanan Jemput Bola Terpadu (JBT) perekaman dan cetak pada hari Sabtu dan Minggu ataupun hari kerja, baik untuk peduli DILAN (divabel dan Lajut usia), sekolah SMA, *Goes to Campus*, Lembaga Pemasyarakatan, dsb.
2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Ditjendukcapil Kementrian RI, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keendudukan (Dinas DP3AK) Propinsi Jawa Timur terkait ketersediaan Blangko KTP-el dan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3) Melakukan distribusi Blangko KTP-el dan penuntasan pencetakan KTP-el secara merata pada 18 Kecamatan, MPP dan Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo.
4) Melakukan pemeliharaan peralatan pendukung SIAK dan jaringan secara rutin, memastikan aplikasi SIAK berjalan lancar dan normal..

2. **Kepemilikan Kartu Keluarga**

Masing-masing keluarga perlu memiliki Kartu Keluarga untuk mendukung data kependudukan terutama bagi anggota keluarga yang belum wajib ber-KTP-el. Perkembangan keluarga yang memiliki Kartu Keluarga seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik IV.B.22

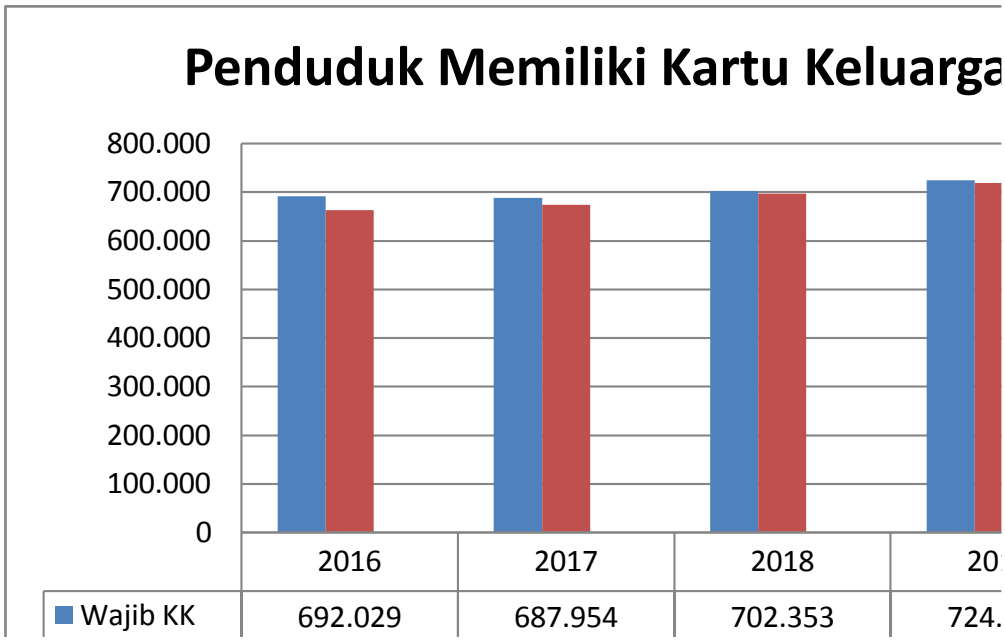

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah wajib KK yang naik dari tahun sebelumnya sebanyak 0,02 % atau sejumlah 22.248 KK. Kenaikan jumlah tersebut dapat disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat, kemudahan dalam mengurus KK dan perubahan data KK, melalui sistem paket layananan perubahan KK, KTP, KIA dan Akta Pencatatan Sipil. Sedangkan prosentase capaian penduduk yang memiliki KK tahun 2019 sebesar 99,22 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 % serta dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 99.20 % ada kenaikan sebesar 0,02 %.

Peningkatan penduduk yang memiliki KK ini disebabkan adanya upaya sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan paket layananan KK, KTP, KIA dan Dokumen Akta Pencatatan Capil.

2. Konsistensi pelaksanaan sosialisasi di bidang admindukcapil dalam mendukung kesadaran masyarakat .akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)
3. Bimbingan teknis bagi SDM Operator SIAK Kecamatan dan Dispendukcapil dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran

Untuk meregistrasi penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta Kelahiran bagi seluruh penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikkan sebesar 1 % atau sejumlah 28.464 orang yang disebabkan oleh faktor mutasi penduduk pindah masuk. Pada Tahun 2018 jumlah penduduk 2.238.069 orang dan pada tahun 2019 jumlah penduduk 2.266.533 orang.

Sedangkan penduduk yang mengurus Akta kelahiran sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebanyak 33 .980 orang, sehingga sampai dengan tahun 2019 penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 1.021.920 orang atau 45,12 % dari jumlah penduduk, ada kenaikan jumlah penduduk yg memiliki Akta Kelahiran dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3 %, dimana penduduk yg memiliki Akta kelahiran pada tahun 2018 sebesar 42,15 % atau 987.940 0rang. Kenaikan jumlah tersebut dapat disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran serta adanya kemudahan paket layanan dokumen Kependudukan.

Upaya peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran antara lain:

1. Pelaksanaan pelayananan Akta Kelahiran secara “jemput bola’ (One Day Service) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, UPTD Cabang Dinas Pendidikan, Panti Asuhan, dll.
2. penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur, kegunaan dan syarat-syarat pengurusan Akta Kelahiran lebih ditingkatkan serta dilaksanakan secara berkesinambungan, baik secara langsung maupun melalui WEB Dukcapil dan Medsos.
3. Inovasi pelayanan akta kelahiran ‘ALAMAK’ (Anak Lahir Membawa Akta Kelahiran) yang bekerja sama dengan RSUD dan Puskesmas.

4. Inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran 'Salam 30 Menit', yaitu penerbitan akta kelahiran dalam waktu 30 menit untuk anak usia 0-36 bulan.
5. Pengurusan Dokumen Adminduk Capil tidak dipungut biaya retribusi (gratis).

Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran anak pada penduduk usia 0 s.d 18 th pada tahun 2019 adalah sebesar 486.097 orang dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 th sebanyak 530.703 orang atau 91,59 %. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk usia 0 s.d 18 th yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 455.169 orang dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 th sebanyak 503.325 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 2,05 % dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik IV.B.23

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Dengan anggaran sebesar 1.994.523.153 dan realisasi sebesar Rp. 159.557.847,00 atau 92,59 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target (%) Tahun 2019	Realisasi (%) Tahun 2019	Persentase (%)
1. Persentase layanan kepemilikan KTP-EL yang sesuai ketentuan;	100	100	100
2. Persentase layanan kepemilikan KK yang sesuai ketentuan;	100	100	100
3. Persentase pelayanan pindah datang / keluar yang dapat diselesaikan tepat waktu d	100	100	100
4. Persentase desa / kelurahan yang rentan pendataan administrasi kependudukan	20	0	0

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sebagai berikut :

1. Terbatasnya distribusi blangko KTP-el dari Ditjen Dukcapil. Kementrian RI.
2. Masih banyak penduduk /masyarakat yg belum melakukan perekaman KTP el, karena faktor usia, kesehatan, bekerja, dsb.

2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dengan anggaran sebesar Rp. 663.289.550,00 dan realisasi sebesar Rp.616.628.138,00 atau 92,97 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target(%) Tahun 2019	Realisasi (%) tahun 2019	Perse(%)ntase
Persentase layanan kepemilikan akte kelahiran yang sesuai ketentuan	100	100	100

Permasalahan :

Permasalahan yang ada pada Program Pelayanan Pencatatan Sipil, yaitu kurangnya Kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen Akta-akta Pencatatan Sipil (meliputi : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi Penduduk Non Muslim, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pngesahan Anak dan Perbaikan/Pembetulan Akta;

3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.**

Dengan anggaran sebesar Rp.3.23.340.950,00 dan realisasi sebesar Rp.2.874.548.583,00 atau 95,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target (%) Tahun 2019	Realisasi (%) Tahun 2019	Persentase (%)
1. Prosentase Sarpras SIAK yang layak fungsi.	95	95	100
2. Persentase pelayanan kebutuhan data kependudukan yang tepat waktu.	95	95	100

4. **Program Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,** dengan anggaran sebesar Rp.1.323.200.040,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.218.572.005,00 atau 92,09 %..

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target (%) Tahun 2019	Realisasi (%) Tahun 2019	Persentase (%)
1. Persentase rekomendasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditindaklanjuti;	100	100	100
2. Persentase penduduk terjaring operasi yustisi yang ditindaklanjuti ;	100	100	100
3. Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	100	100	100

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Perekonomian masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa menuju desa maju	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
3. Program Pembinaan Penerintahan Desa
4. Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa

Pada **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : ***"Meningkatkan Perekonomian masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa menuju desa maju"***

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkat kan Perekonomian Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menuju Desa Maju	Persentase Desa maju	18,63%	20,49%	109,98%	23,60%	12,73%	53,94%	27,33%	32,92%	120,45%

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indek Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju.

Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

a. komponen Indeks Desa Membangun;
b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam RPJMD ditetapkan Status Desa Maju pada tahun 2019 sebesar 27,33% atau 88 Desa dengan capaian sebesar 106 desa atau 32,92% dari jumlah desa keseluruhan yaitu sebanyak 322 desa, Maka capaian kinerja Persentase Desa maju tahun 2019 sebesar 120,45%.

Apabila realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 32,92% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 persentase desa maju sebesar 12,73% yaitu 41 desa, maka capaian kinerja tahun 2019 terdapat peningkatan sebanyak 65 desa atau 20,19%.

Jika realisasi capaian kinerja Desa Maju tahun 2019 sebesar 32,92% dibandingkan dengan target RPJMD diakhir periode (tahun 2021) yaitu 36,65% maka capaian kinerja Desa Maju tercapai sebesar 89,82%.

TREND STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA UPDATE IDM

No.	Status Desa	TAHUN 2019		TAHUN 2018		TAHUN 2017		TAHUN 2016	
		Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1.	Desa Mandiri	2 Desa	0,62%	0 desa	0%	0 desa	0%	0 desa	0%
2.	Desa Maju	106 Desa	32,92%	41 Desa	12,73%	66 desa	20,49%	57 desa	17,70%
3.	Desa Berkembang	211 Desa	65,53%	278 Desa	86,34%	207 desa	64,29%	189 desa	58,70%
4.	Desa Tertinggal	2 Desa	0,62%	1 Desa	0,31%	48 desa	14,91%	71 desa	22,05%
5.	Desa Sangat Tertinggal	1 Desa	0,31%	2 Desa	0,62%	1 desa	0,31%	5 desa	1,55%
	JUMLAH DESA	322 Desa		322 Desa		322 Desa		322 Desa	

Grafik IV.B.24

Realisasi capaian Kinerja Persentase Desa Maju

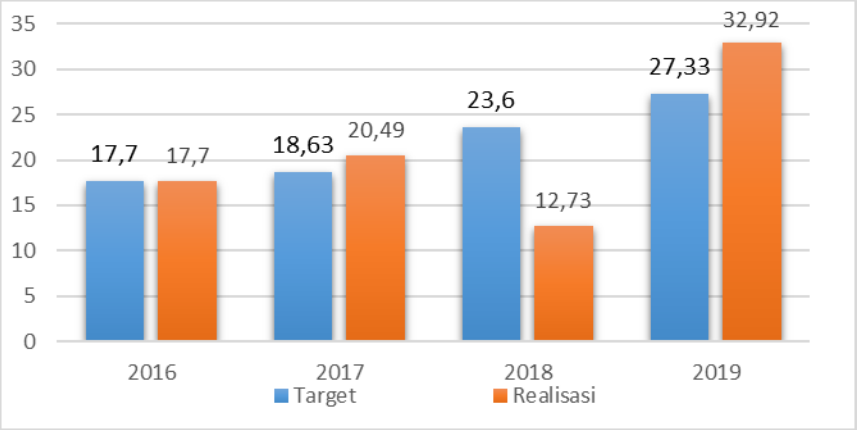

Dari table tersebut diatas dapat disampaikan bahwa di Kabupaten Sidoarjo masih terdapat 2 Desa dengan status Tertinggal yaitu Desa Reno Kenongo Kecamatan Porong dan Desa Besuki Kecamatan Jabon. Sedangkan Desa Kedungbendo kecamatan Tanggulangin dengan status Desa Sangat Tertinggal. Ketiga desa tersebut merupakan desa yang terdampak Lumpur

Lapindo, namun demikian secara administrasi desa tersebut masih ada dan mendapatkan dana operasional yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Retribusi dan Cukai.

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga Desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Oleh karenanya optimalisasi Pendapatan Asli Desa sumber utamanya dari BUMDES menjadi hal yang sangat penting karena ;

1. Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing desa. Jika Pendapatan Asli Desa bisa ditingkatkan, maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, fasilitas fasilitas umum di desa.
2. Meningkatkan dan mengembangkan segala potensi – potensi sumber daya ekonomi yang ada di desa, sebagai salah satu sumber pendapatan di Desa.

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Indikator kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1. Persentase Desa dengan Nilai IDM (Indek Desa Membangun) minimal kategori Berkembang	64,29%	84,78%	131,87%	68,32%	99,07%	145,01%	69,88%	99,07%	141,77%

2. Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UPPKS Mandiri	23%	18,84%	81,91%	23%	19%	82,61%	31%	31,22%	100,71%
3. Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UED-SP Mandiri	21%	20%	95,24%	21%	21,54%	102,57%	27%	26,92%	99,70%
4. Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan P3EL Mandiri	20%	16,06%	80,30%	20%	15,88%	79,40%	26%	26,18%	100,69%
5. Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan BUMDES Mandiri	20%	4,55%	22,75%	20%	5,56%	27,80%	24%	24,46%	101,92%

- Realisasi capaian kinerja Persentase Desa dengan Nilai IDM minimal kategori Berkembang pada Tahun 2019 sebesar 99,07% yaitu 319 desa atau tercapai 141,77% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 69,88%.

  Apabila realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebanyak 99,07% yaitu 319 desa dengan status minimal desa berkembang dibandingkan dengan capaian pada 2018 yaitu sebesar 99,07% atau 319 desa, maka capaian kinerja Desa dengan Nilai IDM minimal Berkembang pada tahun 2019 tidak terjadi peningkatan. Namun demikian dari table tersebut diatas menunjukkan perkembangan desa pada tahun 2019 ada peningkatan diantaranya sudah terdapat 2 Desa Mandiri, status Desa maju tahun 2019 meningkat menjadi 106 desa dari 41 desa.

  Jika realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 99,07% dibandingkan dengan target berakhirnya Renstra (2021) sebesar 72,05% maka

capaian kinerja IDM minimal Berkembang sudah tercapai yaitu sebesar 137,50%.

Grafik IV.B.25

Perkembangan IDM dengan kategori Minimal Berkembang

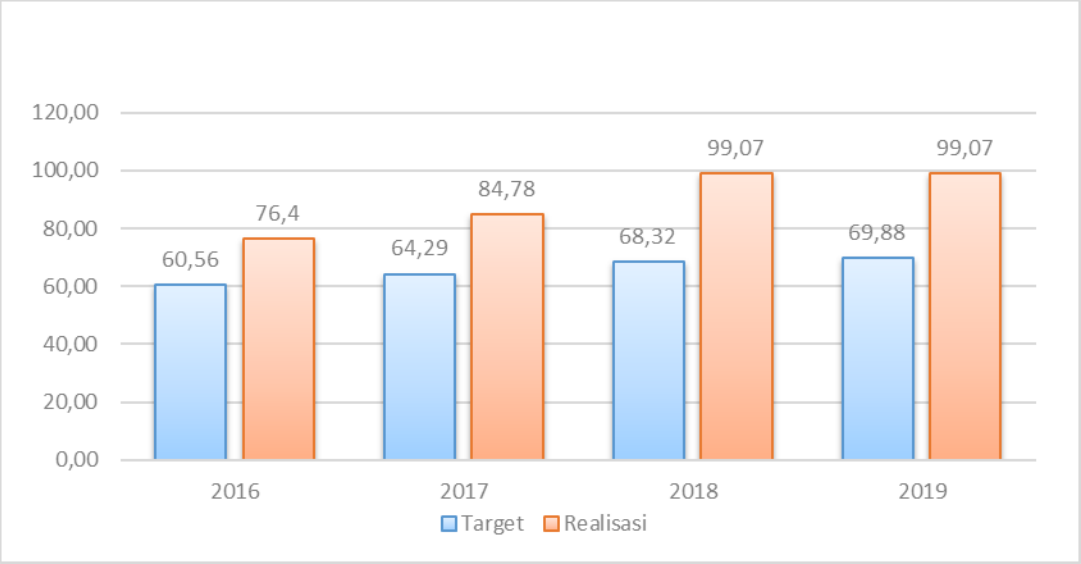

- **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Mandiri**

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan realisasi lembaga UPPKS Mandiri tahun 2019 sebesar 31,22% dari 221 lembaga usaha yaitu 69 lembaga. Dan capaian kinerja tercapai sebesar 100,71% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 31%.

Jika realisasi capaian kinerja UPPKS Mandiri tahun 2019 sebesar 31,22% yaitu 69 lembaga, dibandingkan dengan capaian 2018 yaitu 19% atau 42 lembaga, maka capaian UPPKS Mandiri tahun 2019 meningkat sebesar 12,22% atau sebanyak 27 lembaga usaha.

Apabila realisasi capaian kinerja UPPKS Mandiri tahun 2019 sebesar 31,22%, dan jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode

(2021) sebesar 39% maka capaian kinerja UPPKS Mandiri tercapai sebesar 80,05%

	2016		2017		2018		2019	
	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%
UPPKS Mandiri	37	18,69	39	18,84	42	19,00	69	31,22
UPPKS Berkembang	63	31,82	65	31,40	71	32,13	90	40,72
UPPKS Dasar	98	49,49	103	49,76	108	48,87	68	30,77
	198		207		221		221	

- **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam) Mandiri**

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan melalui Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) dengan realisasi UED-SP Mandiri tahun 2019 sebanyak 35 lembaga usaha atau 26,92% dari jumlah lembaga usaha keseluruhan yaitu sebanyak 130 lembaga. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 27% maka capaian kinerja UED-SP Mandiri tahun 2019 tercapai sebesar 99,70% .

Jika realisasi lembaga usaha UED-SP Mandiri tahun 2019 tercapai 26,92% yaitu 35 lembaga dari seluruh lembaga UED-SP sebanyak 130 lembaga, dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja UED-SP Mandiri Tahun 2018 sebesar 21,54% atau 28 lembaga usaha dari 130 lembaga usaha, maka lembaga usaha UED-SP Mandiri tahun 2019 terdapat peningkatan sebanyak 7 lembaga atau 5,38%.

Apabila realisasi capaian kinerja UED-SP Mandiri tahun 2019 sebesar 26,92%, jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode

(2021) sebesar 33% maka capaian kinerja UED-SP Mandiri tercapai sebesar 81,58%.

	2016		2017		2018		2019	
	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%
UED-SP Mandiri	26	20,00	26	20,00	28	21,54	35	26,92
UED-SP Berkembang	44	33,85	44	33,85	45	34,62	57	43,85
UED-SP Dasar	60	46,15	60	46,15	57	43,85	39	30,00
	130		130		130		130	

- **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan P3EL (Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) Mandiri**

  Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan melalui Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dengan realisasi P3EL Mandiri pada tahun 2019 sebanyak 61 lembaga usaha atau 26,18% dari jumlah lembaga usaha keseluruhan yaitu sebanyak 233 lembaga. Jika realisasi capaian kinerja P3EL Mandiri dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 26% maka capaian kinerja dari P3EL Mandiri tahun 2019 sebesar 100,69%.

  Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja P3EL Mandiri Tahun 2018 sebesar 15,88% atau 37 lembaga usaha dari 233 lembaga usaha, sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 26,18% dari 233 lembaga yaitu 61 lembaga, maka lembaga usaha P3EL Mandiri tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 10,30% yaitu sebanyak 24 lembaga usaha.

Apabila realisasi capaian kinerja P3EL Mandiri tahun 2019 sebesar 26,18% jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode (2021) sebesar 32% maka capaian kinerja P3EL Mandiri tercapai sebesar 81,81%.

	2016		2017		2018		2019	
	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%
P3EL Mandiri	35	17,07	35	16,05	37	15,88	61	26,18
P3EL Berkembang	57	27,81	57	26,15	60	25,75	90	38,63
P3EL Dasar	113	55,12	126	57,80	136	58,37	102	43,78
	205		218		233		233	

- **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Mandiri**

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan realisasi BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Mandiri pada tahun 2019 sebanyak 34 lembaga usaha atau 24,46% dari jumlah lembaga usaha keseluruhan yaitu sebanyak 139 lembaga. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 24% maka capaian kinerja dari BUMDES Mandiri tahun 2019 sebesar 101,92%

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja BUMDES Mandiri Tahun 2018 sebesar 5,56% atau 6 lembaga usaha dari 108 lembaga usaha yang ada, sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 24,46% maka capaian kinerja lembaga usaha BUMDES Mandiri tahun 2019 terdapat peningkatan sebanyak 18,90% yaitu 28 lembaga usaha.

Apabila realisasi capaian kinerja BUMDES Mandiri tahun 2019 sebesar 24,46% jika dibandingkan dengan target Renstra pada akhir periode

(2021) sebesar 28% maka capaian kinerja BUMDES Mandiri tercapai sebesar 87,36%.

	2016		2017		2018		2019	
	Jumlah BUMDES	%	Jumlah BUMDES	%	Jumlah BUMDES	%	Jumlah BUMDES	%
BUMDES Mandiri	4	9,76	4	4,55	6	5,56	34	24,46
BUMDES Berkembang	10	24,39	10	11,36	33	30,56	33	23,74
BUMDES Dasar	27	65,85	74	84,09	69	63,89	72	51,80
	41		88		108		139	

Grafik IV.B.26

Perkembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan Mandiri

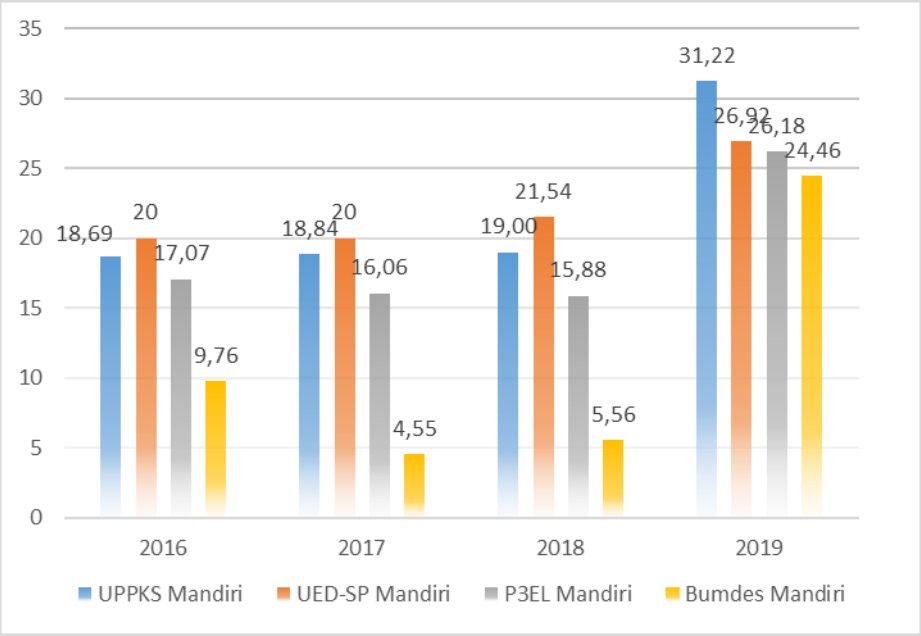

Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.522.819.500,00 dan terealisir sebesar Rp.1.459.692.407,00 atau 95,85%.
   Dengan Indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Persentase
Persentase Lembaga/ Organisasi Masyarakat Desa / Kelurahan yang mempunyai peran aktif dalam pembangunan Desa/ Kelurahan	70%	100%	142,86%

Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat desa/ Kelurahan yang mempunyai peran aktif dalam pembangunan Desa/Kelurahan " realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100% atau 142,86% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 70%.

2. **Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp. 727.627.190,00 dan terealisir sebesar Rp.704.648.000,00 atau 96,84%
   Dengan Indikator Kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Persentase
Persentase Lembaga Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Berkembang :			
UPPKS Berkembang	41%	40,72%	99,32%
UED - SP Berkembang	44%	43,85%	99,66%
P3EL Berkembang	39%	38,63%	99,05%
BUMDES Berkembang	24%	23,74%	98,92%

- **Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan UPPKS Berkembang** terealisir pada tahun 2019 sebesar 90 lembaga yaitu 40,72% dari jumlah lembaga UPPKS keseluruhan sebanyak 221 lembaga,

maka capaian kinerja UPPKS berkembang tahun 2019 sebesar 99,32% jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 41%.

- **Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan UED-SP Berkembang** pada tahun 2019 terealisir sebanyak 57 lembaga atau sebesar 43,85% dari jumlah UED-SP keseluruhan sebanyak 130 lembaga. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 44%, maka capaian kinerja UED-SP berkembang tahun 2019 tercapai sebesar 99,66%.
- **Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan P3EL Berkembang** pada tahun 2019 terealisir sebanyak 90 lembaga yaitu 38,63% dari jumlah P3EL keseluruhan. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 39%, maka capaian kinerja P3EL berkembang tanhun 2019 sebesar 99,05%.
- **Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan BUMDesa Berkembang** pada tahun 2019 terealisir sebesar 33 lembaga yaitu 23,74% dari jumlah keseluruhan BUMDES sebanyak 139 lembaga. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 24%, maka capaian kinerja BUMDES berkembang sebesar 98,92%.

4. **Program Pembinaan Pemerintahan Desa** dengan anggaran sebesar Rp. 999.863.600,00 dan terealisir sebesar Rp. 902.368.600,00 atau 90,25%
   Dengan Indikator Kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Persentase
Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan desa sesuai ketentuan	90%	90,06%	100,07%

Dalam tahun 2019 indikator kinerja Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan desa sesuai ketentuan terealisir sebesar 90,06% atau 290 desa dari keseluruhan jumlah desa sebanyak 322 desa. Jika realisasi kinerja 2019 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebesar 90%, maka capaian kinerja 2019 tercapai sebesar 100,07%.

5. **Program Pembinaan Keuangan Aset dan Kekayaan Desa** dengan anggaran sebesar Rp. 382.224.500,00 dan terealisir sebesar Rp.376.489.980,00 atau 98,50%.
   Dengan Indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Persentase
Persentase Desa yang menyusun tata kelola kuangan, asset dan kekayaan sesuai ketentuan	90%	80,33%	89,26%

Dalam tahun 2019 Desa yang menyusun tata kelola keuangan, asset dan kekayaan sesuai ketentuan terealisir sebesar 80,33% atau dengan capaian kinerja sebesar 89,26%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 90%.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya pengendalian penduduk melalui pengoptimalan pencapaian keluarga berencana	Meningkatnya pencapaian Keluarga Berencana dalam Pengendalian Penduduk

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

Program pembangunan untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan Keluarga Berencana yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2. Program Pengendalian Kependudukan

Pada **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.** seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : ***"Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"***

a. Prevalensi Peserta KB Aktif

Tingkat prevalensi Peserta KB Aktif atau disebut juga Persentase PUS yang ikut KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif, dibandingkan dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdapat di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode yang sama.

Dalam tahun 2018, tingkat prevalensi Peserta KB Aktif atau Persentase PUS yag ikut KB atau CPR di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 81,55%, yaitu perbandingan antara jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 335.935 akseptor dengan jumlah seluruh PUS yaitu sebanyak 404.949 pasangan. Jika dibandingkan dengan target Prevalensi Peserta KB Aktif dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu 81,55% dan tercapai 82,96% maka capaian kinerja tercapai sebesar 100,05%.

Apabila capaian Prevalensi peserta KB aktif tahun 2019 sebesar 82,96% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 81,55%, maka tingkat

prevalensi Peserta KB Aktif tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,37%.

Perkembangan Peserta KB Aktif terlihat pada grafik berikut :

Grafik IV.B.27

PERKEMBANGAN PESERTA KB AKTIF

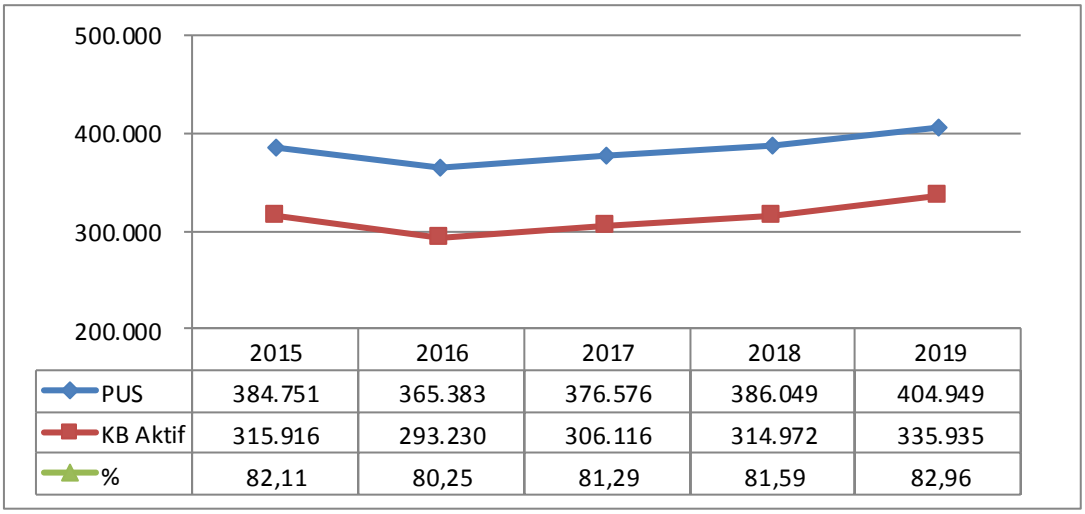

	2015	2016	2017	2018	2019
PUS	384.751	365.383	376.576	386.049	404.949
KB Aktif	315.916	293.230	306.116	314.972	335.935
%	82,11	80,25	81,29	81,59	82,96

Sumber : Dinas P3AKB

Perkembangan peserta KB Aktif ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Kampung KB. Selanjutnya perlu dilakukan pembinaan bagi peserta KB Aktif secara terus menerus agar tidak terjadi drop out dalam penggunaan alat kontrasepsi dengan harapan menjadi peserta KB lestari dengan memakai kontrasepsi jangka panjang.

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian Prevalensi Peserta KB Aktif

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian Prevalensi Peserta KB Aktif yaitu :

- Melakukan Pembinaan KB Lestari oleh Kader KB secara kontinyu
- Optimalkan Kampung KB
- Meningkatkan kesetaraan KB MKJP

b. Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Salah satu upaya penurunan angka kelahiran selain penggunaan alat kontrasepsi adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi penduduk perempuan, sedangkan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan PUP tersebut adalah persentase perkawinan dibawah umur, yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia dibawah 20 tahun (<20 tahun) dengan jumlah keseluruhan penduduk wanita yang melangsungkan perkawinan pertama dalam periode yang sama.

Dalam tahun 2018, capaian PUP di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 12.351 orang atau 99,60%, dari perkawinan pertama secara keseluruhan yaitu 12.401 orang dengan persentase perkawinan dibawah umur sebesar 0,40% atau sebanyak 50 orang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan. Jika dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu 0,50% maka Pendewasaan Usia Perkawinan tahun 2018 tercapai 80%.

Apabila realisasi capaian tahun 2018 yaitu 0,40% dibandingkan dengan capaian perkawinan dibawah umur tahun 2019 sebanyak 74 orang atau 0,59% dari jumlah keseluruhan penduduk perempuan yang melangsungkan pernikahan pertama yaitu sebanyak 12.435 orang, maka capaian di tahun 2019 ada kenaikan 0,19 % pernikahan dibawah usia 20 tahun (< 20 tahun), maka Pendewasaan Usia Perkawinan tahun 2019 tercapai 67,79 %.

Dengan pengertian peningkatan pernikahan pertama bagi perempuan dengan usia dibawah 20 tahun maka Pendewasaan Usia Perkawinan di kabupaten sidoarjo sedikit kurang berhasil. Perkawinan dibawah umur atau peningkatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) kurang berhasil disebabkan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo terjadi urbanisasi yang tinggi dan perkembangan tehnologi.

Perkembangan Persentase Wanita Menikah di Bawah Umur (<20 tahun) terlihat

Grafik IV.B.28

PERKEMBANGAN WANITA MENIKAH DI BAWAH UMUR

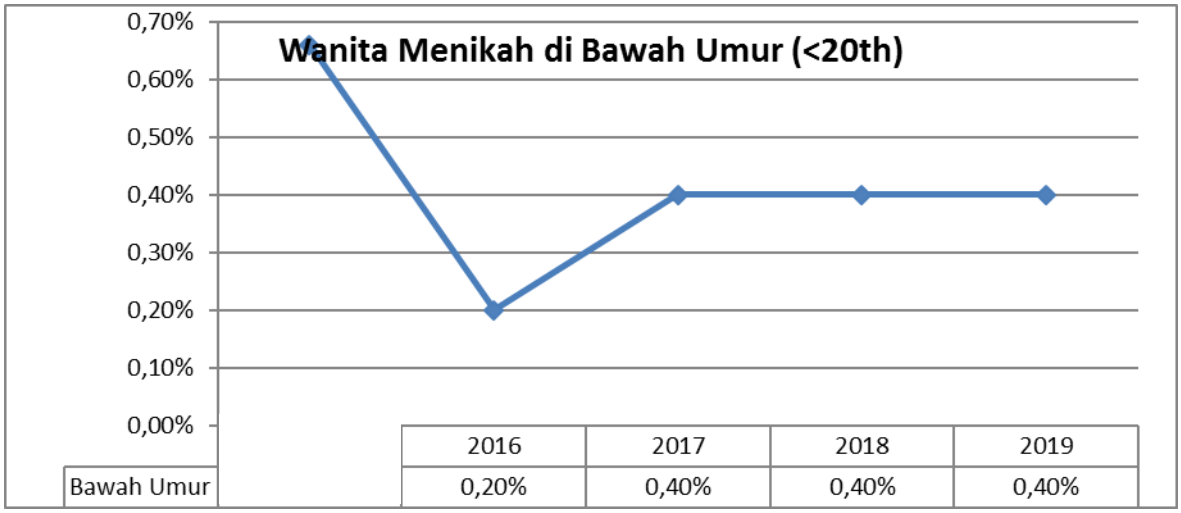

Sumber : Dinas P3AKB

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian maupun mempertahankan pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan yaitu ;

- Sosialisasi melalui kampanye Stop Nikah Dini
- Promosi melalui Media Advokasi luar ruang antara lain pemasangan baliho ditempat umum yang strategis, Media Elektronik (TV, Radio)
- Mengkampanyekan program GenRe secara terus menerus.

c. CBR (Crude Birt Rate)

Salah satu ukuran yang sering dipakai untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu adalah Angka Kelahiran Kasar atau Crude Birt Rate (CBR). Nilai CBR dapat dimanfaatkan untuk acuan mengetahui tingkat populasi penduduk di suatu wilayah.

Realisasi Crude Birt Rate (CBR) tahun 2018 sebesar 17,116 /1000 penduduk atau 101,88% dari target dalam perjanjian kinerja tahun 2018 sebesar

16,8/1000 penduduk. Angka 17,116/1000 penduduk menunjukkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo terjadi kelahiran 17 orang per 1000 penduduk.

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian Crude Birt rate

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian CBR yaitu :

- Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan
- Meningkatkan kontribusi terhadap penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur
- Meningkatkan pendewasaan usia perkawinan
- Memaksimalkan program program yang ada di Kampung KB

Atas capaian kinerja di atas didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- **Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** dengan anggaran sebesar Rp 9.372.015.549,- dan terealisasi sebesar Rp.7.402.272.705,- atau 78,98 %.

  Dengan indikator kinerja yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase pencapaian peserta KB aktif	81,43	82,97	100,00%
Persentase pencapaian peserta KB Baru	80	83,47	100,00%
Persentase kelompok bina keluarga yang mandiri	72	72	100,00%
Persentase PPKBD yang aktif	84,5	84,59	100,00%

2. Program Pengendalian Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp.563.132.000 dan terealisasi sebesar Rp. 547.929.800 atau 97,30 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	PERSENTASE
Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan	11,11%	11,11%	100%

PERMASALAHAN :

Tidak ada permasalahan berarti selama pelaksanaan kegiatan.

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. Terus melakukan sosialisasi terhadap isu isu kependudukan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam program pengendalian penduduk
2. Terus melakukan updating data kependudukan agar ketersediaan data yang akurat, valid dan sesuai dengan kondisi yang ada dapat tercukupi
3. Meningkatkan kepedulian pemangku kebijakan untuk mengkaji masalah isu isu kependudukan melalui seminar, workshop, bimbingan teknis dan sosialisasi serta pendampingan dalam program pengendalian kependudukan
4. Memperluas koordinasi dan sinkronisasi dengan steakholder terkait untuk menggalang dukungan dalam implementasi pembuatan kajian dan tindak lanjut rekomendasi kajian pengendalian kependudukan

Permasalahan dan solusi dari kegiatan pengelolaan data kependudukan dan penyusunan analisa kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Kebutuhan Data Kependudukan

- Kendala/Permasalahan yang hadapi
  1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap isu - isu kependudukan
  2. Ketersediaan data basis kependudukan yang masih belum sepenuhnya terupdate sesuai dengan kondisi yang ada
- Upaya yang telah dilakukan
  1. Terus melakukan sosialisasi terhadap isu isu kependudukan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam program pengendalian penduduk
  2. Terus melakukan updating data kependudukan agar ketersediaan data yang akurat, valid dan sesuai dengan kondisi yang ada dapat tercukupi

- Rencana tindak lanjut tahun berikutnya
  5. Melakukan inovasi dan kreasi kegiatan dalam pengelolaan pengendalian kependudukan di Kabupaten Sidoarjo
  6. Membentuk Fokus Group Discesiun (FGD) Kependudukan lintas sektor untuk secara bersama-sama membuat kebijakan pengendalian kependudukan yang berkesinambungan dan terstruktur.

Capaian kinerja tahun 2019 bila dibandingkan tahun 2018 untuk persentase data kependudukan terupdate mencapai 70% hal ini dari target 80% ada kenaikan 48,33% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 hanya sebesar 21,67% dari target 70% walaupun ada perbedaan besarnya target yang harus dilaksanakan. Sedangkan untuk jumlah peserta sosialisasi pengolahan data kependudukan mengalami peningkatan sebesar 1033 orang dari tahun 2018 sebesar 385 orang menjadi 1418 orang di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa program pengendalian kependudukan memang sangat penting untuk dapat mencegah dan mengatasi dampak dari isu isu kependudukan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Kasi Pengolahan Data Kependudukan Tahun 2018 - 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase Data kependudukan terupdate	70%	21,67%	80%	70%
2	Jumlah peserta sosialisasi pengolahan data kependudukan	385 orang	385 orang	1418 orang	1418 orang

Sasaran Kegiatan : Penyusunan Analisa Kebijakan Pengendalian Kependudukan

- Kendala/Permasalahan yang hadapi
  1. Masih minimnya kajian - kajian yang dihasilkan terkait dampak dari isu isu kependudukan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan di bidang pengendalian kependudukan
  2. Masih minimnya komitmen dari lintas sektor untuk mendukung kegiatan pengendalian kependudukan khususnya dalam

pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan, Pembuatan Profil Kependudukan dan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB.

- Upaya yang telah dilakukan
  1. Terus melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor untuk melaksanakan kajian - kajian dampak dari isu isu kependudukan
  2. Terus menjalin kerjasama dan koordinasi degan lintas sektor untuk mendukung kegiatan pengendalian kependudukan

- Rencana tindak lanjut tahun berikutnya
  1. Melakukan inovasi dan kreasi kegiatan dalam pengelolaan pengendalian kependudukan di Kabupaten Sidoarjo
  2. Membentuk Fokus Group Discesiun (FGD) Kependudukan lintas sektor untuk secara bersama-sama membuat kebijakan pengendalian kependudukan yang berkesinambungan dan terstruktur.

Capaian kinerja tahun 2019 bila dibandingkan tahun 2018 untuk persentase jumlah analisa kebijakan kependudukan yang difasilitasi tidak terdapat peningkatan baik dimana masing - masing telah tercapai 100% dari target 1 kebijakan terealisai 1. Sedangkan untuk jumlah lembaga siaga kependudukan yang difasilitasi mengalami peningkatan target 48 lembaga dibandingkan tahun 2018 yang masih belum ada target. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Siaga Kependudukan perlu diadvokasi dan melakukan pendampingan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Kasi Analisa Kebijakan dan Monev Tahun 2018 - 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Jumlah Analisa Kebijakan Kependudukan yang difasilitasi	1	1	1	1
2	Jumlah Lembaga Siaga Kependudukan yang difasilitasi	0 Lembaga	0 Lembaga	48 Lembaga	48 Lembaga

Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan secara umum sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA DISHUB	SASARAN RENSTRA DISHUB
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatkan kuantitias, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perhubungan 2. Terwujudnya keselamatan lalu lintas angkutan darat

OPD Penyelenggara urusan

Urusan perhubungan secara umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan Perhubungan pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program peningkatan pelayanan angkutan
2. Program pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
3. Program evaluasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas
4. Program penyusunan kebijakan teknis, norma standart prosedur dan sistem informasi dibidang perhubungan.

Seluruh program tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD dan mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

a. Target dan capaian Kinerja Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatkan kuantitias, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	80%	77.78%	81%	78.98%	82%	79.28%	83%	90.07%
	Tingkat pelayanan jalan	70%	90,85%	70%	94,%	70%	96%	75%	96%

Realisasai kinerja tujuan tahun 2019 melebihi dari target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya/tahun 2018

b. Atas Target dan capaian Kinerja Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan atas tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

(1) **Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan**, dengan capaian indikator kinerja sasaran yaitu Indek survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan yaitu,sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	INDEKS	TARGET	INDEKS	TARGET	INDEKS	TARGET	INDEKS
Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan	%	80	77.87	81	78.98	82	79.28	83	90.07

Untuk mendukung sasaran tersebut diatas ditetapkan sasaran urusan : "**Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Publik Bidang Perhubungan**", dengan dengan target dan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

Indek Survey Kepuasan Masyarakat:

Indek Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu sarana atau cara untuk mengetahui secara obyektif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan layanan perhubungan yaitu untuk bidang pelayanan UPT PKB, Bidang Angkutan dan Bidang Menrek:

Grafik IV.B.29

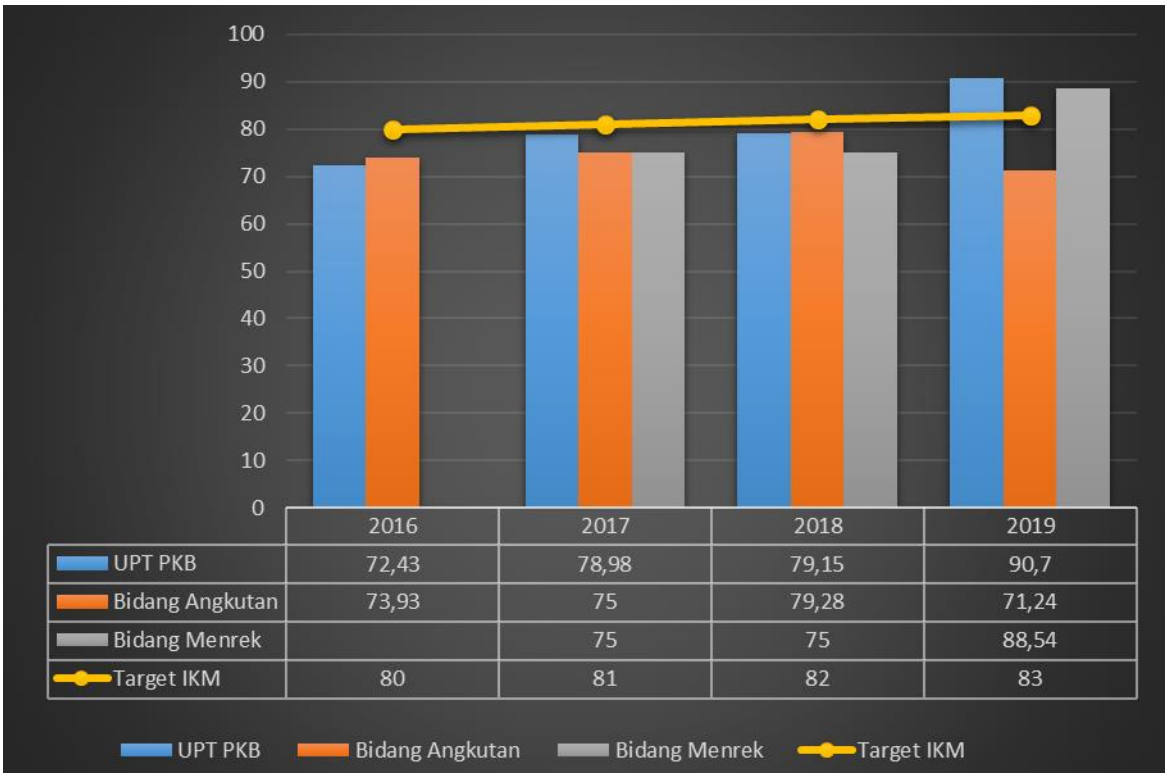

Tahun	Unit Kerja	Indeks IKM	Target IKM	Kriteria
2017	UPT. PKB	78,98	81	Baik
	Bidang. Angkutan	75	81	Baik
	Bidang. Menrek	75	81	Baik

2018	UPT. PKB	79,15	82	Baik
	Bidang. Angkutan	79,28	82	Baik
	Bidang. Menrek	75	81	Baik
2019	UPT. PKB	90,7	83	Baik
	Bidang. Angkutan	78,19	83	Baik
	Bidang. Menrek	88,54	83	Baik
	UPT Terminal	71,24	83	Baik
	Sekretariat	80,67	83	Baik

Survey Kepuasan Masyrakat (SKM) dilaksanakan oleh CV. MITRA KARSA UTAMA Jalan Medayu Pesona XII/26,RT.04 RW Kelurahan Medok Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya, bergerak di bidang jasa kunsultan Survey Kepuasan masyarakat. Berdasarkan analisa yang telah di lakukan terdapat hal penting yang dapat di simpulkan dari hasil survei kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. IKM UPT PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)

Secara umum seluruh mutu unsur pelayanan publik di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan kategori “ Baik “.

Nilai IKM dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan sebagai gambaran tahun 2017 sebesar 78,98 dengan kategori “ Baik “ tahun 2018 sebesar 79,15 dengan kategori “ Baik “ tahun 2019 sebesar 90, 70 dengan kategori memiliki kinerja yang sangat baik. Hal tersebut dikarenakan semakin baiknya prosedur pelayanan dan waktu pelayanan terutama waktu tunggu hasil pengujian kendaraan.

Grafik IV.B.30

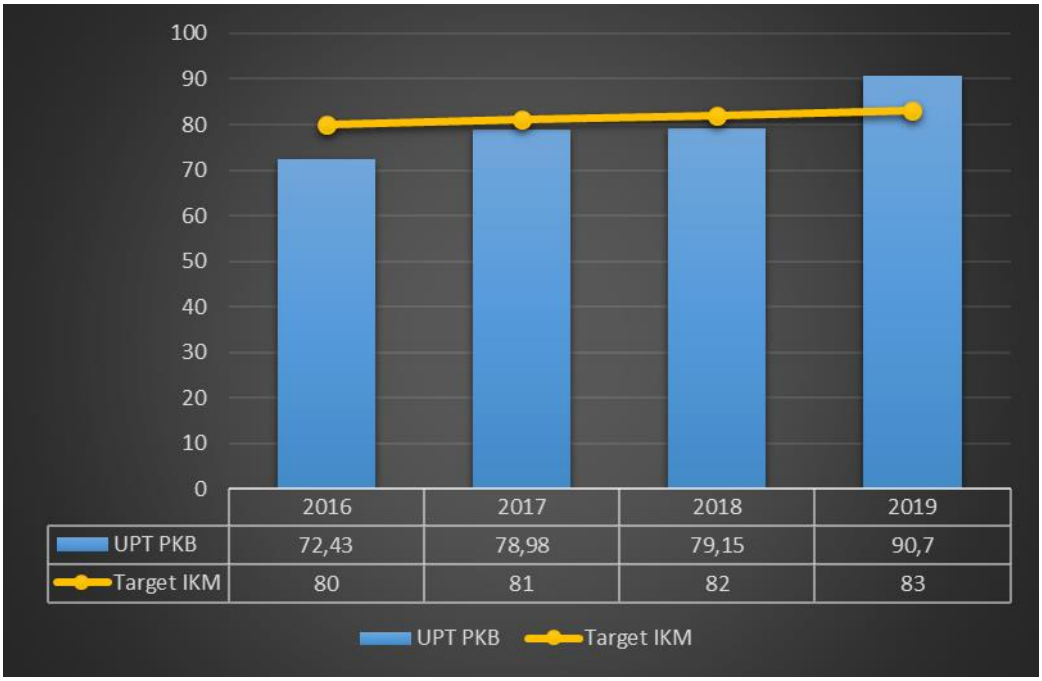

b. IKM PELAYANAN TERMINAL

Nilai IKM/SKM terminal tipe C yang terdiri dari Terminal Porong, Terminal Krian, dan Terminal Taman pada tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo sebesar 71, 24 dengan kategori " Baik' bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan lebih lanjut pelayanan masyarakat dalam sector perhubungan dengan menambah sarana dan prasarana terutama terminal tipe C sehingga palayanan akan lebih baik dan nyaman

Grafik IV.B.31

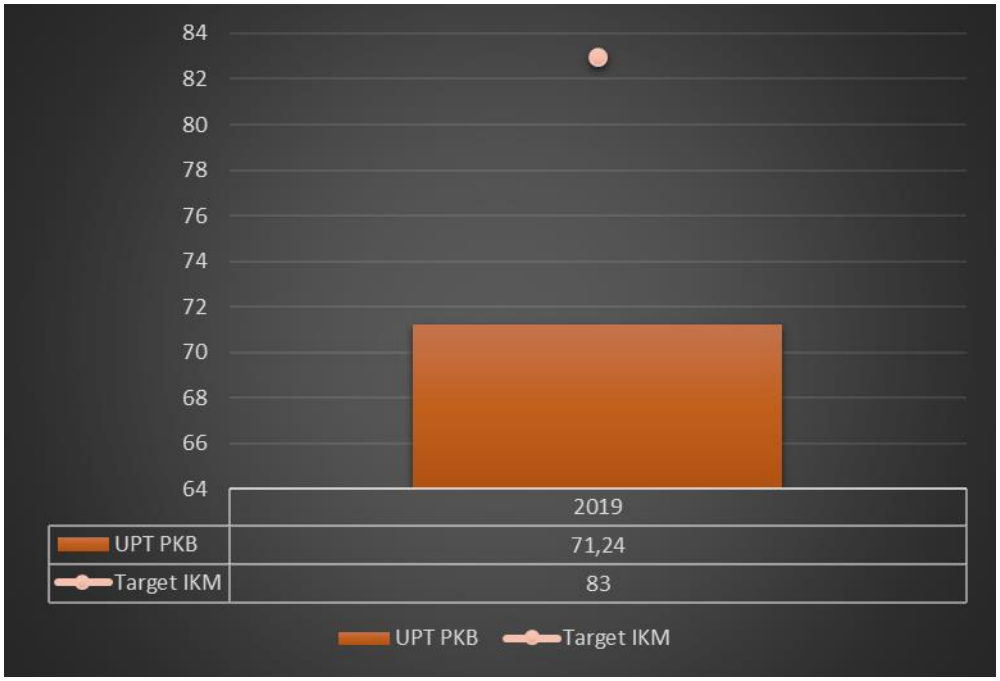

c. IKM Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Rekomendasi Andalalin)

Nilai IKM Rekomendasi Andalalin tahun 2017 sebesar 75 dengan kategori " Baik " tahun 2018 sebesar 75 dengan kategori " Baik " tahun 2019 sebesar 88,54 dengan kategori " Baik" ini menggambarkan pelayanan rekomendasi andalalin berjalan dengan baik , sesuai amanah UU No.22 Tahun 2009 Pasal 99 disebutkan "setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,permukiman,dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan,keselamatan,ketertiban,dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan sebuah Analisis Dampak Lalu Lintas" , kajian merupakan kajian teknis yang dilakukan guna mengidentifikasi dampak lalu lintas akibat sebuah pembangunan suatu kegiatan dan mengusulkan berbagai alternative penanganan yang berupa manajemen rekayasa lalu lintas.

Berikut perkembangan pelayanan pemberian rekomendasi andalalin di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2019

Grafik IV.B.32

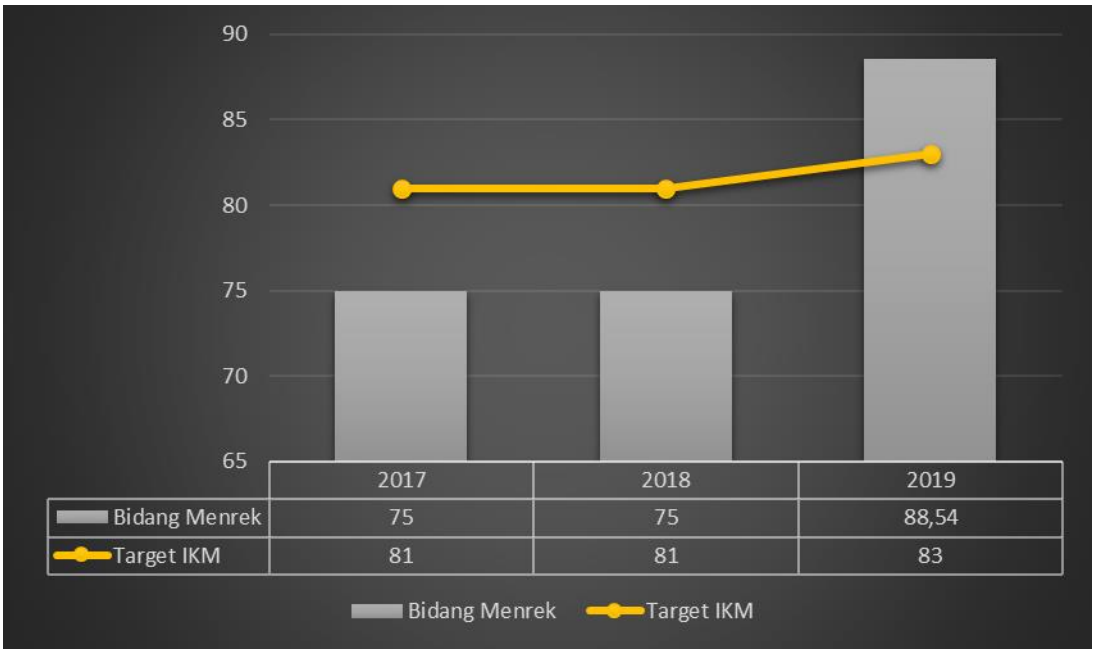

d. IKM PELAYANAN IJIN TRAYEK

Indikator dengan nilai konversi sebesar 78,67 yang memiliki kinerja baik, menggambarkan pelayanan Ijin trayek sesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo no 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum dan Retribusi Ijin Trayek dan Perbub Kabupaten Sidoarjo no 40 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan Retribsi Ijin Trayek

Berikut perkembangan pelayanan perpanjangan Kartu Pengawasan Ijin Trayek di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2019

Grafik IV.B.33

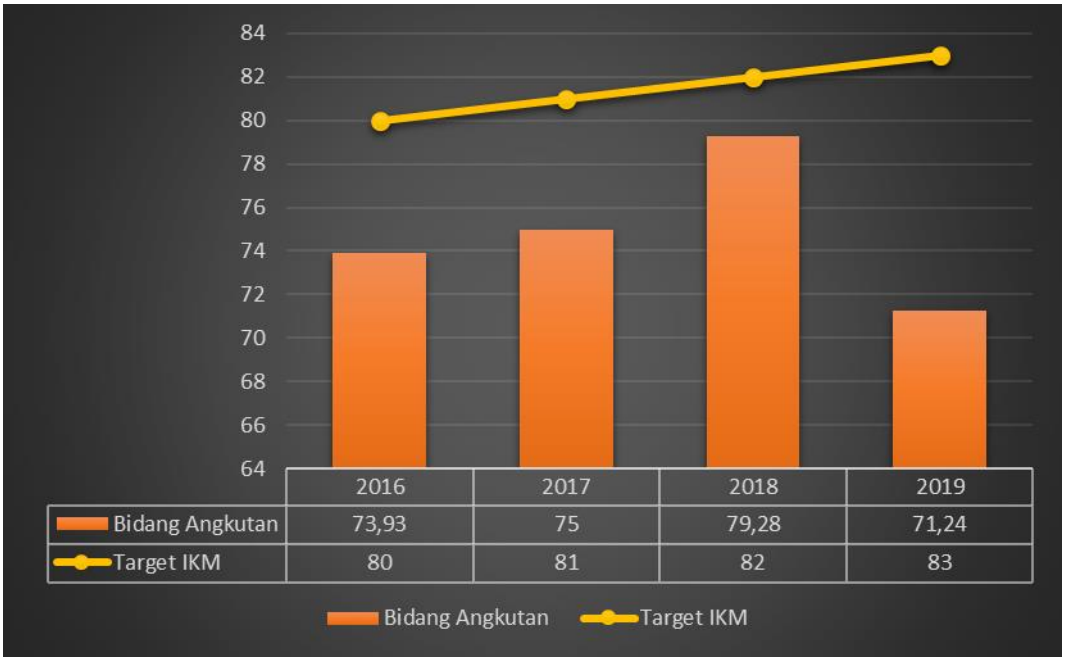

(2) **Sasaran 2: Terwujudnya keselamatan lalu lintas angkutan darat**

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Prosentase keselamatan angkutan darat di Sidoarjo	70%	90.85%	70%	94%	70%	96%	75%	96%

Yang dimaksud dengan keselamatan angkutan darat berdasarkan PP 37 TH 2017 Tentang Keselamatan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah Suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang di sebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/lingkungan. Adapun capain kinerja sasaran realisasi mengalami peningkatan hanya pada tahun 2019 sama dengan tahun lalu namun masih diatas target yang di tetapkan.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas didukung dengan indikator sebagai berikut:

1) Tingkat Pelayanan Jalan (Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)

Indikator ini merepresentasikan tingginya tingkat pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir. Berikut laporan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji sampai pada tahun 2019 :

Grafik IV.B.34

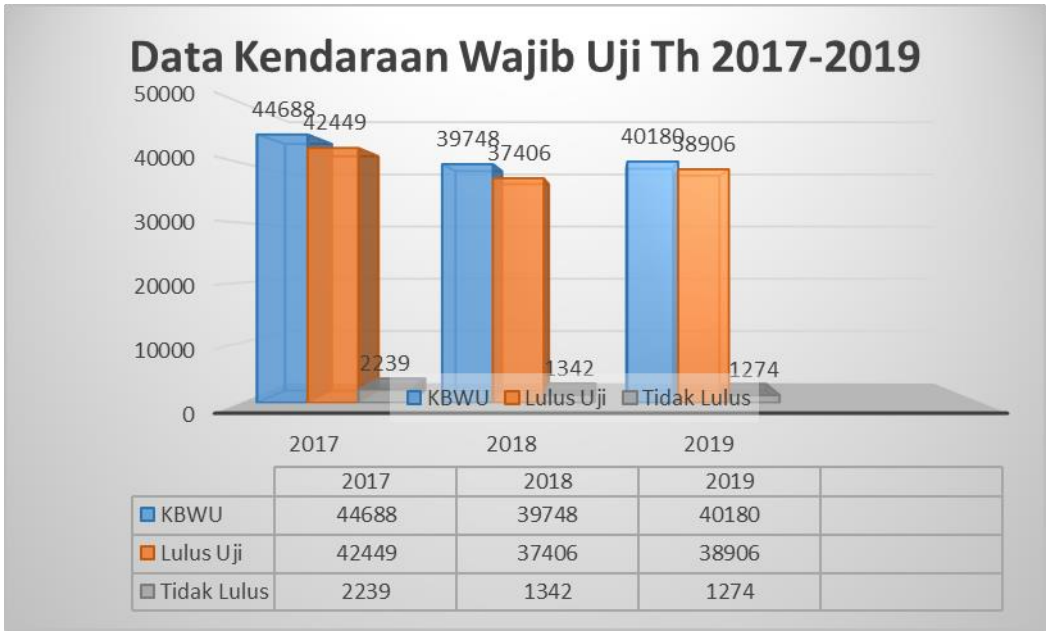

	KBWU	Lulus Uji	Tidak Lulus	Prosentase
2017	44688	42449	2239	0,94%
2018	38748	37406	1342	0,96%
2019	40180	38906	1274	0,96%

Berikut upaya dalam meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, antara lain adalah :

- Melakukan kalibrasi alat uji secara berkala, memelihara serta merevitalisasi alat untuk menjaga dan meningkatkan kapabilitas setiap komponen alat uji.
- Menambah pos *drive thru* yang diperuntukkan bagi pemohon yang datang melakukan uji atas nama pribadi yang diberikan *privilege* yaitu mendaftar dan melaksanakan pengujian di hari yang sama.
- Melakukan pemeriksaan teknis / *ramp check* bagi kendaraan yang akan melaksanakan pariwisata.

- Melaksanakan pelayanan uji keliling di wilayah tertentu dengan tujuan memberikan pelayanan prima serta dapat mengurangi beban jalan dan tingkat kemacetan khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan.

2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyediakan/mendukung Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak sebagai bentuk upaya peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelayanan jalan kepada masyarakat. Adapun definisi Sarana adalah segala sesuatu yang di pakai sebagai alat untuk mewujudkan keselamatan jalan sedangkan prasarana (infrastruktur) adalah penunjang terlaksananya keselamatan jalan.

Kecukupan Jumlah alat kelengkapan Jalan yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat Sidoarjo dalam berlalulintas dan mengurang titik - titik kemacetan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Adapun alat perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi :

1) Alat pemberi isyarat ;
2) Rambu lalu lintas;
3) Marka jalan;

4) Alat pengendali pemakai jalan,terdiri dari alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

Berikut Perkembangan Data Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi antara lain :

No	Alat Perlengkapan Jalan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Jumlah
1.	**Pengadaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas)**					
a.	Traffic Light	3 Lokasi	-	2 Lokasi		5 Lokasi
	Traffic light Over Pass	-	-	-	6 Lokasi	6 Lokasi
	Traffic light ATCS	-	-	4 lokasi	6 Lokasi	10 Lokasi
b.	Pengadaan Paku Jalan	283 Unit	-	-	-	283 Lokasi
c.	Warning Light/ Flashing Light	4 Lokasi	4 Lokasi	28 Lokasi	29 lokasi	65 Lokasi
d.	Pelican Crossing	-	2 Lokasi	3 Lokasi	3 lokasi	8 Lokasi
2.	**Pengadaan RPPJ / Rambu Jalan**		-	-	-	-
a.	Rambu Peringatan Larangan dan Perintah	102 Unit	19 Unit	-	-	121 Lokasi
b.	Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan	33 Unit	-	-	-	33 Unit
	- RPPJ elektronik	-	-	3 Unit	-	3 unit
	- Rambu lalulintas tiang F	-	-	-		-
	- Rambu Tiang biasa	-	100 Unit	150 Unit	100 Unit	350 Unit
3.	**Pengecatan marka Jalan**		-	-	-	-
a.	Dana APBD	1,175 m2	1,175 m2	12.203 m2	492,78 m2	507.333 m2
b.1	Dana DAK	260,75 m2	260,75 m2	-	-	521.5 m2
b.2	Speed Trap (pita kejut)	221,70 m2	221,70 m2	-	127,50 m	570.9 m2

4.	**Revitalisasi Guardrill**	3 titik	3 titik	-	-	6 Titik
5.	**Cermin tikung**	-	20 Unit	10 Unit	15 Unit	45 Unit
6.	**Rambu papan himbauan parker**	-	20 Unit	-	-	20 Unit
7.	**Pengadaan Mobil Sky walker**	-	-	1 Unit	-	1 Unit
8.	**Pengadaan moil derek**	-	-	1 Unit	-	
9.	**Pengadaan mobil Uji keliling**	-	-	1 Unit	-	
10.	**EWS perlintasan KA**	-	-	-	6 lokasi	

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut di atas di dukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
   a. Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan terealisasi 64,54% Karena Pelaksanaan pengurukan tanah pada bidang tanah yang direncanakan untuk Uji Kendaraan Bermotor, terkendala oleh waktu pelaksanaan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal sampai dengan akhir Desember 2019.
2. Proram Penyusunan kebijakan Teknis Norma Standart Prosedur dan Sistem informasi di bidang Perhubungan
   a. Kegiatan Penyusunan Dokumen teknis Perencanaan dan sosialisasi manajemen Lalu lintas terealisasi 58,73 % Karena : Kajian dan honor untuk pembangunan fly over gedangan dan aloha tidak di serap karena pembangunan fly over tidak laksanakan

Urusan Komunikasi dan Informatika

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatknya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smartcity	1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk **urusan Komunikasi dan Informatika** yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Peningkatan Kualitas Layanan data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2. Program Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Teknologi informatika
3. Program Pelayanan Informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : ***"Meningkatknya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smartcity"***

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatknya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smartcity	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	2,55	2,68	105,1	2,55	2,55	100	2,6	3,13	120,38

Grafik IV.B.35

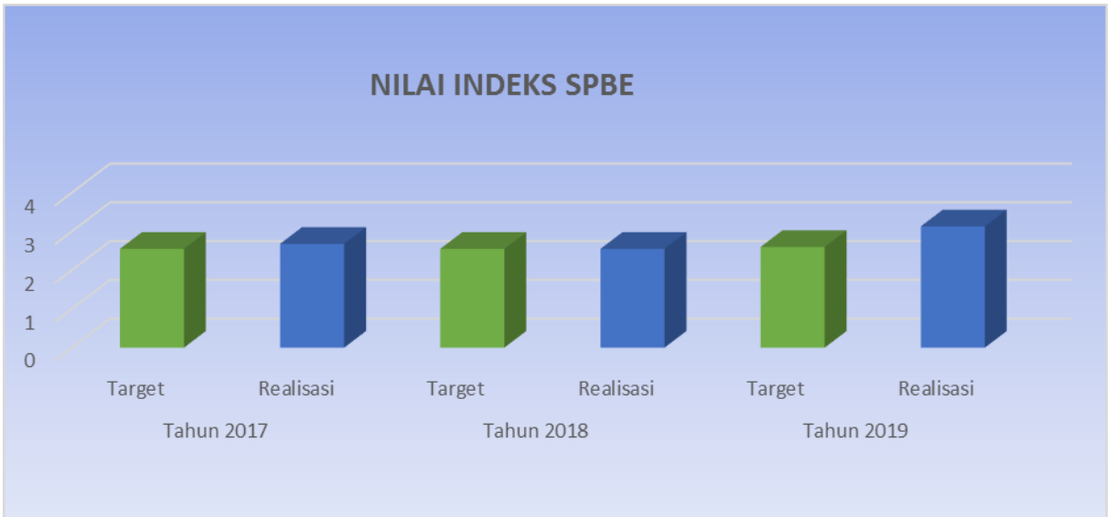

Hasil Capaian Indeks Smart City pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2018, hasil yang diraih Yaitu **3,13** dengan predikat **Baik** hasil ini dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek :

Sumber: http://spbe.go.id/moneval/

NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK

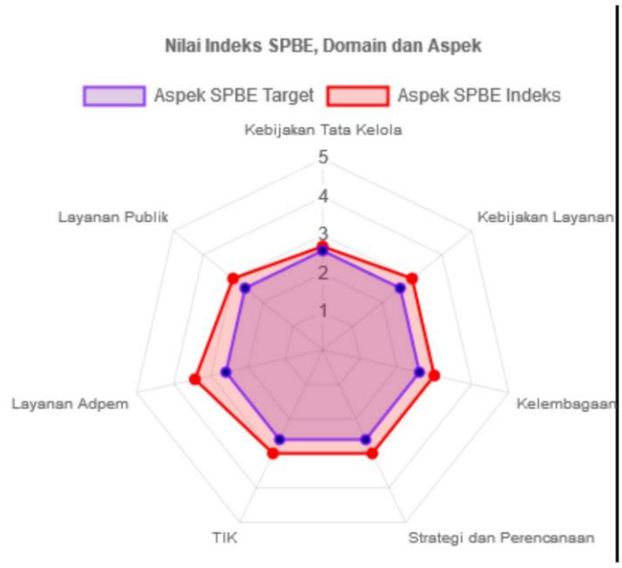

Nama Instansi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

K/L/D	:	Kabupaten
Daerah	:	Jawa Timur
Indeks SPBE	:	**3.13**
Predikat SPBE	:	Baik
Domain Kebijakan SPBE	:	**2.88**
➥ Kebijakan Tata Kelola SPBE	:	2.71
➥ Kebijakan Layanan SPBE	:	3.00
Domain Tata Kelola	:	**3.00**
➥ Kelembagaan	:	3.00
➥ Strategi dan Perencanaan	:	3.00
➥ TIK	:	3.00
Domain Layanan SPBE	:	**3.27**
➥ Administrasi Pemerintahan	:	3.43
➥ Pelayanan Publik	:	3.00

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi	47	52,08	110	58	68 ,75	118,53	70	89,6	128
Persentase Jaringan Desa/Kelurahan terintegrasi	0	0	0	24	0	0	44	0	0
Persentase lokasi RTH yang terkoneksi internet	0	0	0	20	20	100			
Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi							60	60	100

Digambarkan dalam Grafik :

Grafik IV.B.36

Sampai dengan tahun 2019 ini Target Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diraih ini dilihat dari :

Hasil sampai dengan Tahun 2019 :

2019 TERBANGUN 70 KM

FO TAHUN 2019 MENGKONEKSIKAN :

1. **MALL PELY PUBLIK KEC. SUKODONO;**
2. **9 KECAMATAN : SUKODONO, WONOAYU, KRIAN, PRAMBON, TARIK, BALONGBENDO, WARU, SEDATI & TANGGULANGIN ;**
3. **2 PUSKESMAS : KEC SIDOARJO DAN WONOAYU;**

No	OPD/Lokasi FO	04-02-2019 s.d. 01-03-2019			04-02-2019 s.d. 03-03-2019		
		Max		Aggregat	Max		Aggregat
		In	Out		In	Out	
1	Sekretariat Daerah	1206.33	1388.34	2594.67	1206.33	1388.34	2594.67
2	Sekretariat DPRD	125.61	76.3	201.91	125.61	76.3	201.91
3	Inspektorat	8.41	15.41	23.82	8.41	15.41	23.82
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2393.57	4269.28	6662.85	2393.57	4269.28	6662.85
5	Dinas Kesehatan	60.06	106.69	166.75	60.06	106.69	166.75
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pu dan PR)	1193.04	2131.45	3324.49	1193.04	2131.45	3324.49
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	50.73	60.56	111.29	50.73	60.56	111.29
8	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	97.69	182.63	280.32	131.02	232.01	363.03
9	Dinas Sosial	53.91	78.53	132.44	53.91	78.53	132.44
10	Dinas Tenaga Kerja	87.13	152.16	239.29	87.13	152.16	239.29
11	Dinas PMD, P3A, dan KB	152.05	279.74	431.79	152.05	279.74	431.79
12	Dinas Pangan dan Pertanian	38.37	92.68	131.05	38.37	92.68	131.05
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	192.32	190.32	382.64	192.32	190.32	382.64
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.46	32.68	62.14	30.23	33.45	63.68
15	Dinas Perhubungan	186.31	266.12	452.43	186.31	266.12	452.43
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	0	0
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	30.9	30.88	61.78	30.9	30.88	61.78
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.531	1.086	9.617	8.531	1.086	9.617
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORPAR)	75.17	90.98	166.15	75.17	90.98	166.15
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	238.19	311.12	549.31	238.19	311.12	549.31
21	Dinas Perikanan	51.05	62.06	113.11	51.05	62.21	113.26
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)	20.86	1.34	22.2	20.86	1.34	22.2
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	282.62	311.98	594.6	282.62	311.98	594.6
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.63	4.622	19.252	14.63	4.622	19.252
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	146.82	275.11	421.93	146.82	275.11	421.93
26	Badan Kepegawaian Daerah	425.32	729.55	1154.87	425.32	729.55	1154.87
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.205	1.181	4.386	3.205	1.181	4.386
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	242.48	156.06	398.54	282.82	228.06	510.88
29	Rumah Sakit Umum Daerah	0.271	0.226	0.497	0.271	0.226	0.497
30	Kecamatan Sidoarjo	12.16	2.825	14.985	13.66	2.825	16.485
31	Kecamatan Candi	25.34	41.82	67.16	30.89	43.13	74.02
32	Kecamatan Buduran	86.24	148.59	234.83	93.09	163.63	256.72
33	Kecamatan Gedangan	69.32	66.08	135.4	73.4	70.69	144.09
34	Mall Pelayanan Publik	273.76	470.84	744.6	273.76	470.84	744.6
35	Sidoarjo Command Center	748.36	736.66	1485.02	748.36	736.66	1485.02
36	GOR Delta	0	0	0	0	0	0
37	Wifi Alun-alun	2673.07	2640.04	5313.11	2673.77	2640.74	5314.51
	TOTAL/ BULAN	11303.3	15405.9	26709.2	11396.4	15549.9	26946.3
	TOTAL/ MINGGU	2825.82	3851.49	6677.31	2849.1	3887.48	6736.58
	RATA RATA PEMANFAATAN	63%	98%	148%	63%	98%	150%

PEMANFAATN BANDWITH

Pengembangan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, SOTK dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas pokok pada pengelolaan Sistem Elektronik mulai dari pembuatan sampai dengan pengembangannya. Pada Tahun 2019 dalam upaya penyelenggaraan Tata Kelola E-Government, Bidang Pengembangan Informatika telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Hasil dari Monitoring dan Evaluasi Aplikasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo:

No	Nama Aplikasi	Instansi	Fungsi Umum	Platform	Status				URL
					proses	pengujian	live	source code	
Triwulan I									
1	Sikada	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Informasi Kepala Daerah	Web	✓	✓	✓	✓	sikada.sidoarjokab.go.id
2	E-surat (Disposisi)	Bagian Umum	surat menyurat elektronik	Web, Android	✓	-	-	-	
3	SIBUTIK	Dinas Kesehatan	pencegahan jentik nyamuk	Web	✓	✓	✓	✓	sibutik.sidoarjokab.go.id
4	E-Arsip	BPBD	arsip & disposisi elektronik	Web, Android	✓	-	-	-	
5	Sipraja	Bagian Pemerintahan	pelayanan desa & kelurahan	Web, Android	✓	✓	✓	✓	sipraja.sidoarjokab.go.id
6	Sicantik	Dinas Kesehatan	***pengembangan***	Web	✓	-	-	-	
Triwulan II									
7	Starda	Disperindag	database industri di sidoarjo	Web	✓	✓	✓	✓	starda.sidoarjokab.go.id

8	Mapping Tanah	BPKAD	pemetaan tanah online	Web	✓	-	-	-	
9	Pelaporan Gedung	Dinas Perkim	pelaporan kerusakan gedung	Web	✓	-	-	-	
10	Sipejantan	Kecamatan Jabon	pelayanan kecamatan	Web	✓	-	-	-	
11	Tiket mudik online	Dinas Perhubungan	info bus gratis bagi pemudik	Web	✓	-	-	-	
12	BMW Taman	Kecamatan Taman	replikasi BMW	Web	✓	-	-	-	
13	E-Sakip	Dinas Kesehatan	monitoring kinerja pegawai	Web	✓	-	-	-	
14	Bursa Kerja	Dinas Tenaga Kerja	info bursa kerja online	Web	✓	✓	✓	✓	jfs.sidoarjokab.go.id
15	E-RPP / SIMPUL	Bagian PBJ	informasi pengadaan/lelang	Web	✓	-	-	-	
Triwulan III									
16	Pro U Tang	Kecamatan Tanggulangin	info produk unggulan	Web	✓	-	-	-	
17	SIM PKK	Dinas PPPA & KB	manajemen PKK multilevel	Web	✓	✓	✓	✓	pkk.sidoarjokab.go.id
18	Dapodik	Dinas pendidikan	penempatan ke server	Web	✓	-	-	-	
19	Si Abon	Puskesmas Prambon	manajemen antrian	Web	✓	-	-	-	
20	Ijin Praktek Online	Dinas Kesehatan	manajemen pegawai	Web	✓	-	-	-	
21	Tax Clearence	BPPD	konfirmasi wajib pajak	Web, Android	✓	-	-	-	
22	E-Presensi	Bagian Organisasi	manajemen kehadiran pegawai	Web	✓	✓	-	-	presensi2.sidoarjokab.go.id
Triwulan IV									
23	SIKDA Generik	Dinas Kesehatan	manajemen layanan kesehatan	Web	✓	-	-	-	
24	Dalwaskop	Dinas Koperasi dan UKM	***pengembangan***	Web	✓	-	-	-	
25	E-Dupak	Dinas Kesehatan	manajemen penyusunan dupak	Web	✓	-	-	-	
26	Ijin Penelitian Online	Dinas Kesehatan	layanan penelitian	Web	✓	-	-	-	
27	E-Arsip	Dinas Koperasi dan UKM	Manajemen kearsipan	Web, Android	✓	-	-	-	
28	Sidali	Bakesbangpol	***pengembangan***	Web	✓	-	-	-	
29	antrian MPP	DPMPTSP	manajemen antrian	Web	✓	✓	-	-	sianter2.sidoarjokab.go.id

Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik	75	0	0	77	81,23	105	79	84,17	106,54

Grafik IV.B.37

Hasil rekapitulasi pengukuran survei kepuasaan masyarakat terhadap layanan keterbukaan dan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pada tiga indikator diatas, menunjukkan bahwa pada unsur layanan komunikasi dan informasi *help desk* nilai SKM sebesar 79,48 dengan kategori B yaitu baik; unsur layanan komunikasi dan informasi public berbasis *e-government* nilai SKM sebesar 87,48 dengan kategori B yaitu baik; unsur kualitas informasi publik dengan nilai SKM sebesar 85,55 dengan kategori B yaitu baik. Sehingga, pada perhitungan rata-rata nilai SKM terhadap Keterbukaan dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 sebesar **84,17** dengan kategori **B** yaitu **Baik**. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasaan Masyarakat terhadap Keterbukaan dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

No.	UNSUR PELAYANAN	KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA
1	Layanan Komunikasi dan Informasi *Help Desk*	79,48	B	Baik
2	Layanan komunikasi dan informasi public berbasis *e-government*	87,48	B	Baik
3	Kualitas Informasi Publik	85,55	B	Baik
	Rata-Rata	**84,17**	**B**	**Baik**

Pengelolaan Komunikasi Publik

Untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat diperlukan suatu media informasi dan komunikasi, bentuk media/sarana komunikasi yang tersedia, antara lain:

1. Media komunikasi secara online melalui alamat website http://ppid.sidoarjokab.go.id .

2. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

   Media komunikasi tersebut bertujuan menunjang kelancaran komunikasi antar anggota dan pengurus kelompok informasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna informasi yang ada.

3. P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat)

   Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) berfungsi menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan. Media komunikasinya dapat diakses secara online melalui alamat website http://p3m.sidoarjokab.go.id .

4. LAPOR! SPAN

   LAPOR! diinisiasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam rangka pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik. Saat ini LAPOR! SPAN Dibawah KEMENPAN-RB, dan awal tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lewat Dinas Komunikasi dan Informatika mengimplementasikan LAPOR! kepada masyarakat.

5. Media Center

   Media Center merupakan lembaga strategis dalam mempublikasikan berbagai program kerja, kegiatan dan himbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat.

   Didalam mengelola media center saat ini banyak mengalami beberapa kendala diantaranya media center yang kurang maksimal karena

tempat/ruangan, fasilitas kurang memadai dan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat media.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi media center sebenarnya sebagai media komunikasi publik, adalah sebagai berikut :

a. Ruangan yang representatif sebagai ruangan media komunikasi publik bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat media saja namun dapat digunakan untuk masyarakat bukan media;
b. Fasilitas media center memadai ;
c. Tersedianya data-data yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Media Pers

Keberadaan Media Pers yang bermitra/bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 69, diantaranya adalah:

a. Media Cetak Harian : 13;
b. Media Cetak Mingguan/Tabloid : 22;
c. Media Online : 17;
d. Media elektronik (TV/Radio) : 17.

Disamping media tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika mengkoordinasi Radio LPPL (Suara Sidoarjo), tugas Suara Sidoarjo menyampaikan pesan kepada masyarakat atas keberhasilan pembangunan Sidoarjo.

Bentuk Kerjasama/kemitraan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan media massa sebagai berikut:

1. Pembinaan Insan Pers;
2. Jumpa Pers;
3. Advetorial;
4. Study Komparatif Insan Pers

7. Klipping dan Majalah

Dalam mendokumentasi berita harian dari berbagai media massa kami melakukan Klipping "**Sidoarjo Hari Ini**", di samping itu juga Dinas Komunikasi dan Informatika juga

menerbitkan majalah "**Gema Delta**" kedua media ini memberikan informasi mengenai hal-hal yang tejadi di Sidoarjo dan Pembangunan Sidoarjo yang lebih baik. Kedua media ini diberikan kepada Semua OPD di Sidoarjo.

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan Kualitas Layanan data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).** dengan anggaran sebesar Rp. 20.290.225.628,40 dan terealisasi sebesar Rp. 19.744.874.106,00 atau 97,31%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase jaringan FO yang dibangun	58,1%	89,6%	154,22%

2. **Program Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Teknologi informatika.** dengan anggaran sebesar Rp. 1.166.964.040,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.003.931.340,00 atau 86,03%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase aplikasi OPD berbasis e-gov yang terintegrasi dengan data center	60%	60%	100%

3. **Program Pelayanan Informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat.** dengan anggaran sebesar Rp. 2.677.987.850,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.544.251.977,00 atau 95,01%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi	82	82	100%

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mendukung misi kedua RPJMD yaitu *Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat*. Misi tersebut memiliki tujuan *Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing* dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Masyarakat
2. Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	1. Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Masyarakat 2. Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang Mandiri

OPD Penyelenggara Urusan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri No. 56 Tahun 2007, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Mulai Tahun 2017, berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengalami perubahan, yang semula merupakan satu kesatuan dalam Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral berubah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sedangkan kewenangan pengembangan usaha kecil dan menengah pengelolaan dan pengembangannya dialihkan menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur.

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Program; Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;

Pada tahun 2019 seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan : *"Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi dan Usaha Mikro"*

a. Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, memiliki tujuan yaitu : Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro. Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas	N/A	N/A	N/A	0,96%	0,96%	100%	1,14%	1,14%	100%	1,32%	1,37%	103%
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri	N/A	N/A	N/A	0,15%	0,15%	100%	0,17%	0,17%	100%	0,20%	0,23%	115%

Grafik IV.B.38

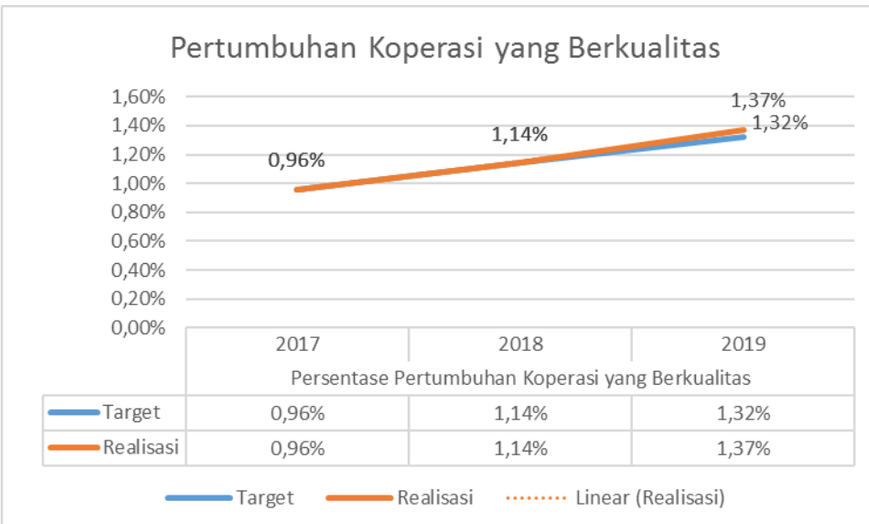

Grafik IV.B.39

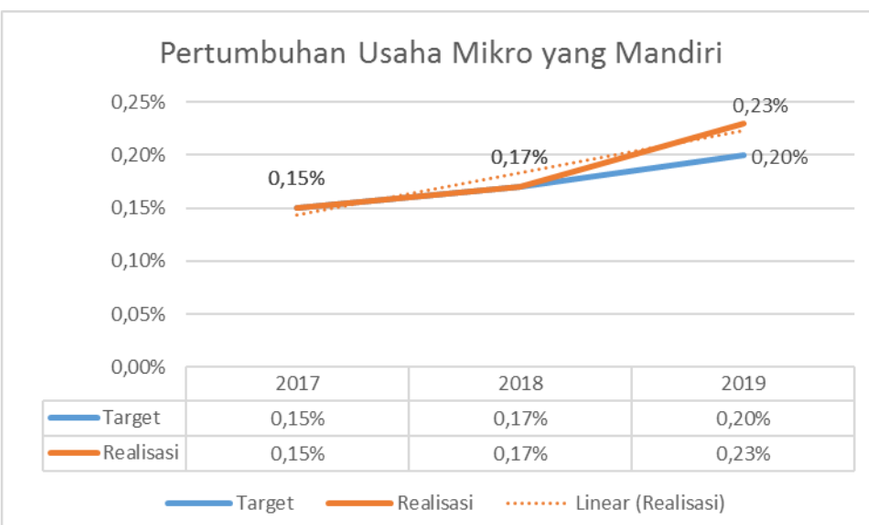

Capaian kinerja tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yaitu pertumbuhan koperasi berkualitas pada tahun 2019 realisasinya melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,37% dari target 1,32%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi berkualitas di Kabupaten Sidoarjo

tumbuh cukup baik. Sedangkan untuk usaha mikro yang mandiri, pertumbuhannya juga cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi tahun 2019 yang melampaui target yaitu sebesar 0,23% dari target sebesar 0,20%

b. Sasaran

Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka ditetapkan sasaran strategis untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut. Sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu :

1. *Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas;*
2. *Usaha Mikro Yang Mandiri;*

dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. *Persentase Koperasi yang Berkualitas*
2. *Persentase Usaha Mikro yang Mandiri*

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang Mandiri	Persentase Koperasi yang Berkualitas	N/A	N/A	N/A	16,48%	16,48%	100%	18,15%	18,15%	100%	19,83%	20,31%	102%
	Persentase Usaha Mikro yang Mandiri	N/A	N/A	N/A	0,5%	0,5%	100%	1,05%	1,05%	100%	1,50%	1,53%	102%

Grafik IV.B.40

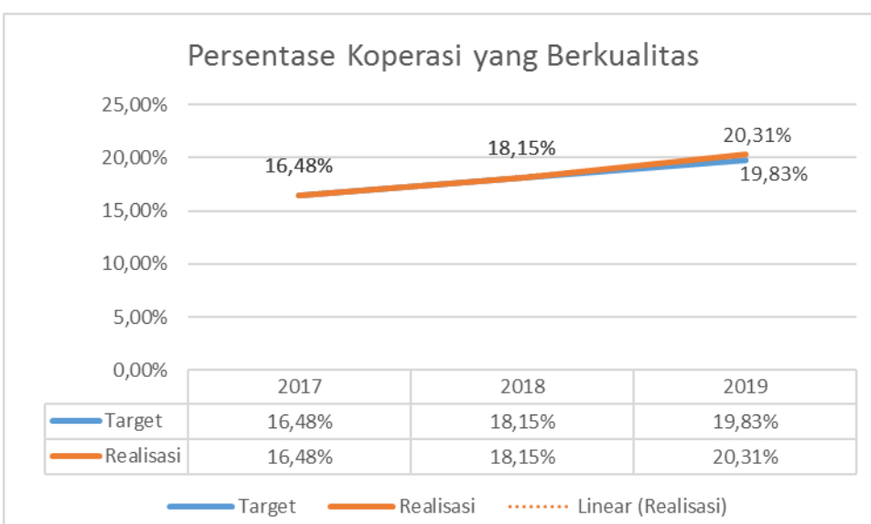

Grafik IV.B.41

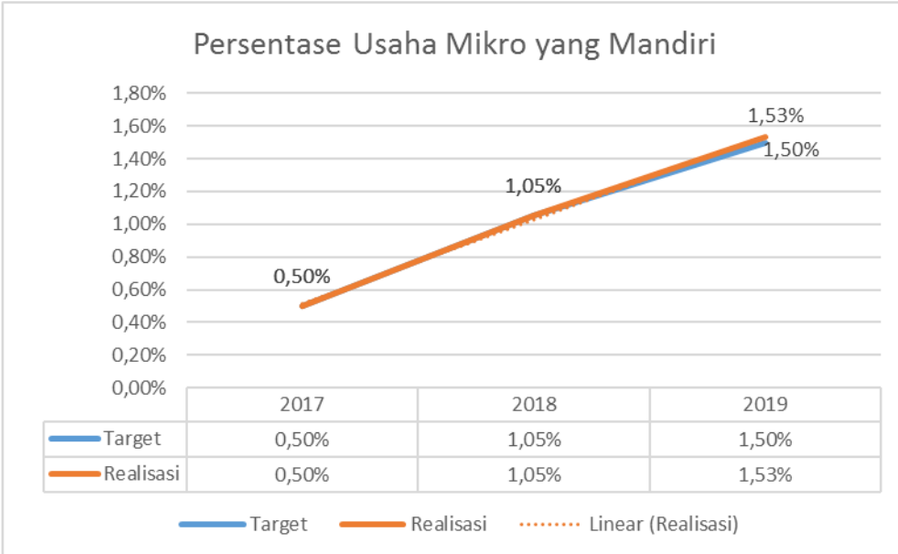

Sampai dengan Tahun 2019, kinerja tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang Mandiri	Persentase Koperasi yang Berkualitas	N/A	N/A	16,48%	16,48%	18,15%	18,15%	19,83%	20,31%

Atas target dan capaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi yang berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Parameter yang menjadi dasar koperasi berkualitas adalah apabila memenuhi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

1. Aspek Kelembagaan Koperasi, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
2. Aspek Usaha Koperasi, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam hal rasa tanggungrenteng atau kemauan untuk berbagi resiko (*risk sharing*), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan.
3. Aspek Keuangan Koperasi, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti prosentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase besaran simpanan sukarela.
4. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Anggota, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
5. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Secara garis besar Indikator Koperasi berkualitas dapat dijabarkan dalam 2 (dua) indikator yaitu :

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi yang aktif tentunya telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah seperti memiliki nomor induk koperasi (NIK), Surat Keputusan Anggaran Dasar oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Koperasi aktif mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek badan usaha aktif.

Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2019 sedikit melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 88,97% dimana sebanyak 1.307unit koperasi dinyatakan masih aktif beroperasi dari 1.469 unit koperasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 maka persentase koperasi aktif terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,80% yaitu dari 88,17% atau sejumlah 1.289 koperasi menjadi 88,97% atau sejumlah 1.307 koperasi yang artinya pada tahun 2019 ada peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 18 koperasi aktif. Target persentase koperasi aktif tahun 2019 dapat dicapai melalui kegiatan berupa Revitalisasi Koperasi. Perkembangan persentase koperasi aktif selama tiga tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

Grafik IV.B.42

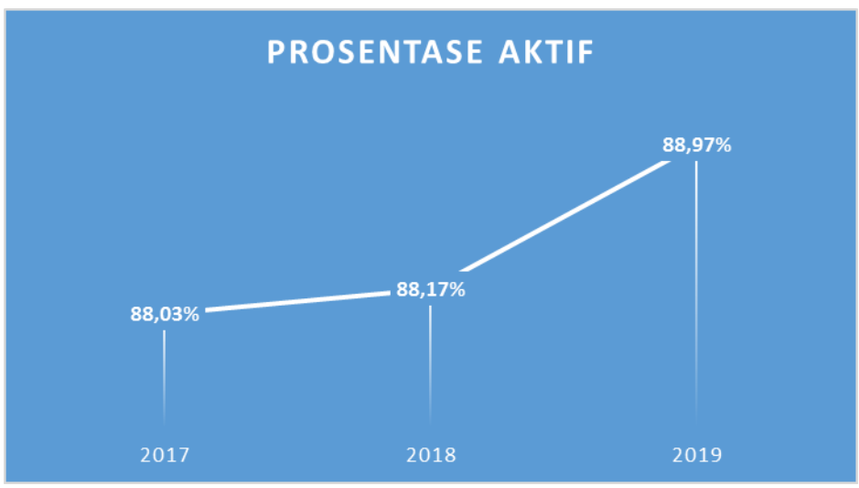

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Perkembangan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif selama tiga tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

Grafik IV.B.43

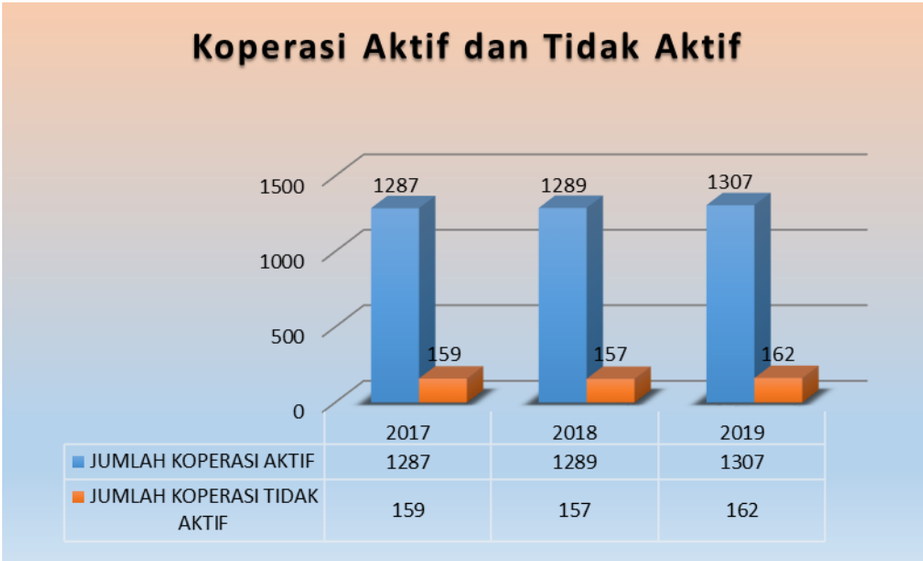

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2) Persentase Koperasi Sehat

Koperasi yang sehat dapat dilihat dari berbagai segi. Selain telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah tentunya koperasi yang sehat juga mengupayakan sehat secara organisasi, mental dan usaha. Sehat organisasi dilihat dari rapat anggota dan badan pengurus yang optimal, sehat mental dilihat dari tanggung jawab para anggota dan badan pengurus serta adanya aktivitas maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat, sedangkan sehat usaha dilihat dari pengelolaan koperasi yang berlandaskan azas serta prinsip-prinsip dasar koperasi.

Berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka koperasi wajib dinilai kesehatannya setiap tahunnya. Adapun penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

1. Permodalan
2. Kualitas Aktiva Produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi

5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Jatidiri Koperasi

Koperasi sehat mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat. Perkembangan jumlah koperasi sehat selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik IV.B.44

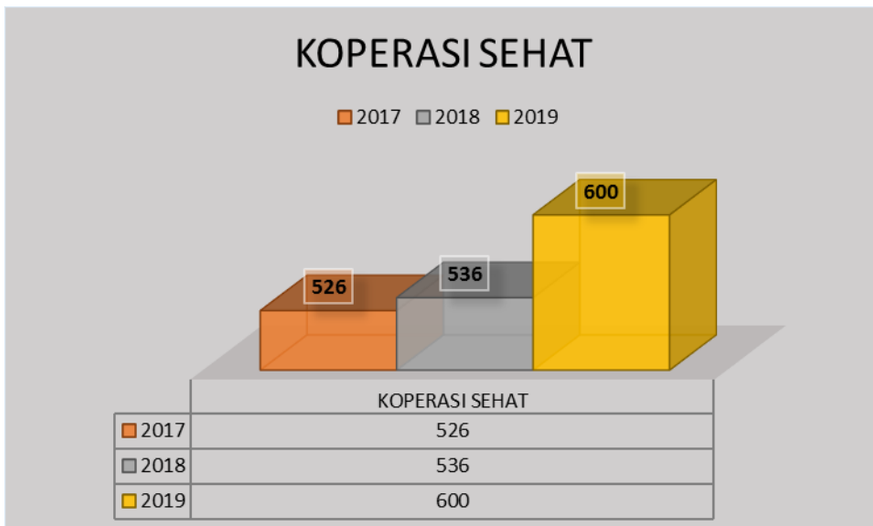

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi persentase koperasi sehat pada tahun 2018 terjadi peningkatan target yaitu dari 41,58% atau sejumlah 536 koperasi menjadi 45,56% atau sejumlah 600 koperasi. Hal ini berarti ada peningkatan jumlah koperasi sehat sebesar 100 koperasi. Target prosentase koperasi sehat tahun 2019 dapat dicapai melalui kegiatan berupa :

1. Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
2. Monitoring dan Evaluasi Koperasi

Dalam mendukung capaian Indikator Koperasi Sehat tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator dukungan yang terdiri dari :

1. **Meningkatnya Jumlah Modal Koperasi**

Permodalan merupakan salah satu input usaha koperasi. Semakin besar modal koperasi semakin tinggi kemampuan koperasi melakukan ekspansi usaha. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman.

Perkembangan jumlah modal koperasi selama tiga tahun terakhir terangkum pada grafik berikut ini :

Grafik IV.B.45

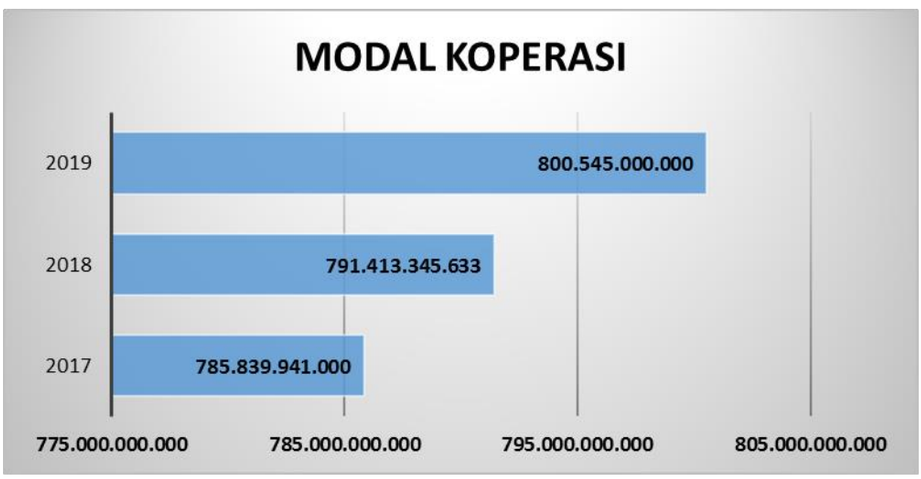

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Realisasi jumlah modal koperasi pada tahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018 dari Rp. 791.413.345.633 menjadi Rp. 800.545.000.000

Kenaikan modal sudah pasti akan lebih besar dari kenaikan SHU, karena SHU merupakan salah satu komponen dari modal sendiri selain simpanan pokok, simpanan wajib, donasi/hibah maupun cadangan resiko dan pinjaman bank serta titipan uang dari anggota pada koperasi (modal luar).

2. **Meningkatnya Jumlah Volume Usaha Koperasi**

Volume usaha koperasi merupakan total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi, semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota. Sejalan

dengan identitas koperasi yang menyatakan bahwa anggota dan pelanggan adalah orang yang sama, maka volume usaha terutama harus berasal dari jasa anggota. Loyalitas dan partisipasi aktif anggota sangat menentukan besarnya volume usaha koperasi khususnya yang berasal dari anggota. Berikut ini perkembangan jumlah volume usaha koperasi selama tiga tahun terakhir terangkum pada grafik :

Grafik IV.B.46

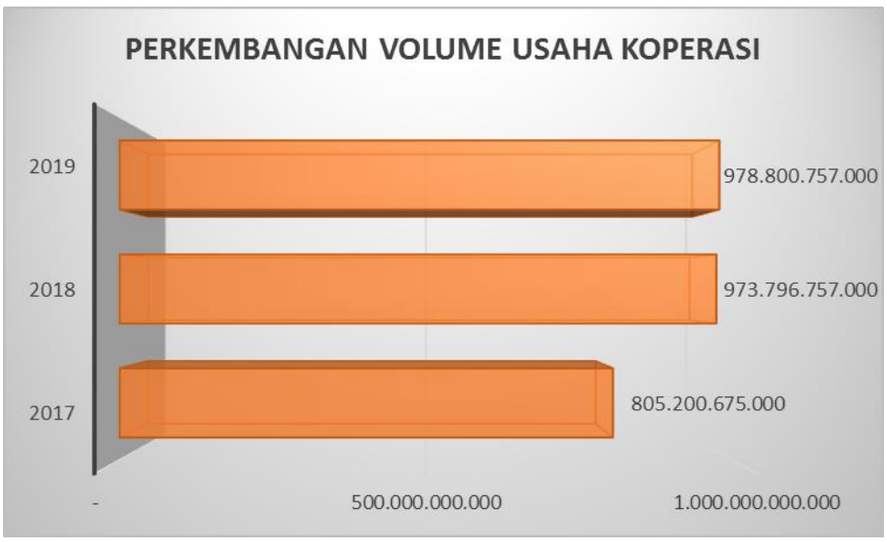

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Realisasi jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018 dari Rp. 973.796.757.000 menjadi Rp. 978.800.757.000. Kenaikan volume usaha koperasi menunjukkan bahwa usaha dan pendapatan koperasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo semakin berkembang. Hal ini juga tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui pelaksanaan bimbingan teknis antara lain bintek kelembagaan, bintek usaha, bintek keuangan koperasi.

Sasaran 2: Meningkatnya usaha mikro yang mandiri, dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Usaha Mikro yang Mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Mandiri	N/A	N/A	0,5%	0,5%	1,05%	1,05%	1,50%	1,53%

Atas target dan capaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2. Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri

Usaha Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Untuk menciptakan usaha mikro yang mandiri, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melaksanakan berbagai macam program pemberdayaan bagi usaha mikro yang sudah ada/terbentuk, yaitu berupa :

- Pembinaan
- Pendampingan Produk dan Fasilitasi Perijinan
- Pemasaran
- Pembiayaan

Selain pembinaan yang intens terhadap kualitas produk dan kemasan, pemasaran produk-produk usaha mikro juga menjadi kata kunci untuk melejitkan kompetensi dan daya saing usaha mikro. Untuk meningkatkan dan memperluas akses pasar produk usaha mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi para pelaku usaha mikro melalui program sinergi temu usaha (*bussiness matching)* yaitu sebuah pertemuan bisnis antara pelaku usaha mikro dengan partner seperti toko modern, pasar swalayan dan toko oleh-oleh. *Bussiness Matching* ini dapat membantu pelaku usaha mikro makin produktif dan memperkuat sinergi dengan jejaring pasar modern sehingga

akan meningkatkan omzet penjualan produk usaha mikro dan menjadi usaha mikro yang mandiri.

Perkembangan jumlah usaha mikro selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik IV.B.47

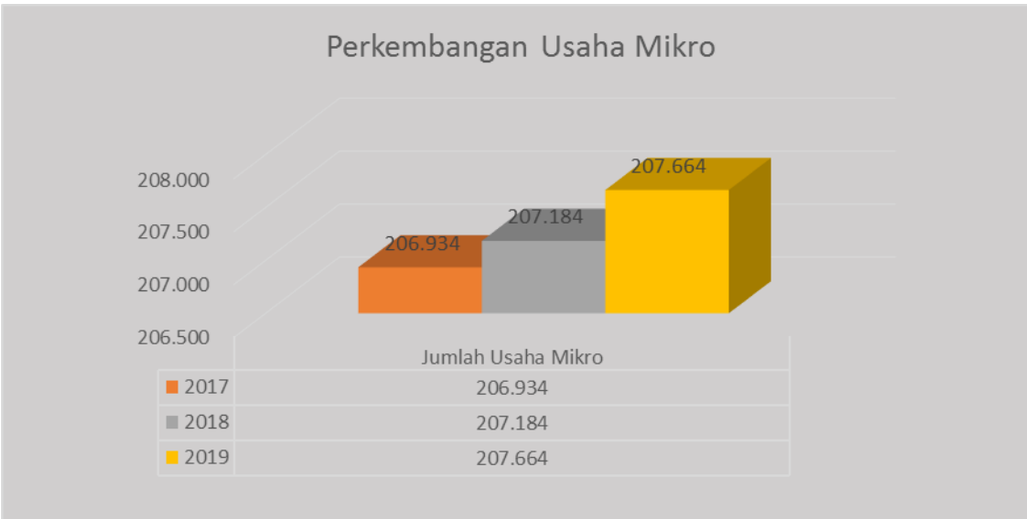

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Prosentase Jumlah Usaha Mikro pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,23 % dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 207.184 unit usaha mikro meningkat menjadi 207.664 unit usaha mikro. Adapun lima besar kelompok usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo meliputi :

1. Makanan dan Minuman
2. Fashion
3. Pengrajin Produk Kulit
4. Handicraft
5. Batik

Sedangkan untuk realisasi persentase usaha mikro yang mandiri juga sedikit melampaui target yang ditentukan yaitu dari 0,89% atau sejumlah 1.848 usaha mikro mandiri menjadi 1,53% atau sejumlah 3.180 usaha mikro mandiri, yang artinya pada tahun 2019 ada peningkatan jumlah usaha mikro yang mandiri sebesar 1.302 usaha mikro.

Pencapaian target ini diperoleh melalui kegiatan berupa :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro
2. Pelatihan Kewirausahaan
3. Pemagangan
4. Pendampingan
5. Mengikutsertakan usaha mikro dalam kegiatan pameran baik di dalam daerah maupun luar daerah

- **Sertifikasi Usaha Mikro**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa semua profesi wajib bersertifikasi termasuk usaha mikro, maka untuk meningkatkan kompetensi Usaha Mikro dalam menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi uji kompetensi bagi usaha mikro.

Sertifikasi kompetensi usaha mikro merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional yang diubah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Perkembangan jumlah usaha mikro yang bersertifikasi selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik IV.B.48

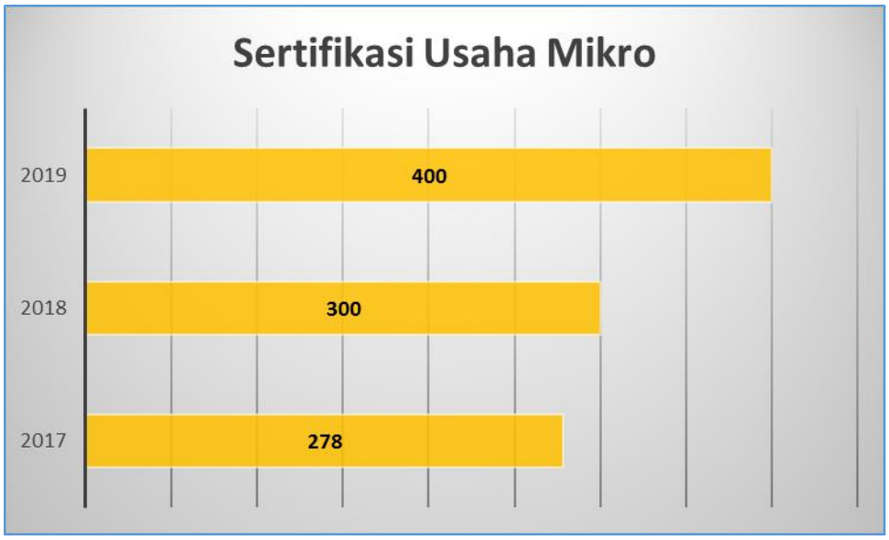

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pada tahun 2018 jumlah usaha mikro yang lulus uji sertfikasi kompetensi di bidang usaha mikro mengalami peningkatan yaitu dari 300 usaha mikro menjadi 400 usaha mikro atau pada tahun 2019 ada peningkatan 100 usaha mikro yang lulus sertifikasi.

- **Pencetakan Wirausaha Baru**

Wirausaha Baru merupakan upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menumbuhkan usaha mikro yang mandiri dan mengembangkan kewirausahaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha yang dapat membangkitkan potensi lokal dan siap menghadapi daya saing global serta untuk menjawab permasalahan yang dihadapi mulai dari tingkat pengangguran, tingkat kesejahteraan dan tingkat kemiskinan.

Pencetakan wirausaha baru mulai dilakukan pada tahun 2017 dengan target sasarannya adalah masyarakat baik mahasiswa, pelajar dan pemuda maupun masyarakat yang sudah mempunyai usaha (minimal 1 tahun).

Pencetakan wira usaha baru yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut :

Grafik IV.B.49

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat mencetak wirausaha baru sebanyak 430 wira usaha baru. Capaian tahun 2019 ini ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 300 wira usaha baru. Hal ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat sidoarjo untuk menjadi wirausaha sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan untuk pencetakan wirausaha baru, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggandeng akademisi, pelaku usaha dan komunitas. Tujuan pencetakan wirausaha baru ini antara lain :

1. Mendorong dan memacu motivasi untuk berwirausaha.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif sebagai bekal dalam berwirausaha.
3. Membangun kemandirian dan daya saing dalam berwirausaha.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
5. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Adapun proses pencetakan Wira Usaha Baru sebagai berikut :

1. Rekruitmen Calon Peserta yang dilakukan secara online/offline
2. Seleksi dan Penetapan.
3. Pelatihan Kewirausahaan
4. Pemagangan

5. Pendampingan
6. Promosi/Pameran/Pemasaran

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, pada tahun 2019 adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;

Adapun hasil dan capaian pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

1. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi** dengan anggaran sebesar Rp. 856.401.285,- dan terealisasi sebesar Rp. 832.735.535,- atau 97,24%, dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase Koperasi Aktif	91.48	91.48	100%

2. **Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro** dengan anggaran sebesar Rp. 6.345.589.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.581.150.600,- atau 87.95%, dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase Koperasi Sehat	38.83%	38.83%	100%
Persentase Pertumbuhan usaha mikro	4.48%	4.48%	100%
Prosentase SDM/Pengelola Koperasi bersertifikat SKKNI	22.21%	22.21%	100%

3. **Program Pengendalian dan Pengawasan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro** dengan anggaran sebesar Rp. 424.463.820,- dan terealisasi sebesar Rp. 379.941.940,- atau 89,51%, dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase Koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi	13,48%	13,48%	100%
Persentase Usaha Mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha mikro	36,01%	36,01%	100%
Prosentase SDM/Pengelola Koperasi bersertifikat SKKNI	22,21%	22,21%	100%

18. Urusan Penanaman Modal

Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan OPD dan Sasaran OPD

Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD
Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal
	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan penanaman modal secara umum dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan penanaman modal yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82.40	82.40	100	82.60	85.11	103	82.80	86.245	104
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah	16.799.164	17.885.626	106	16.965.413	23.832.580	140	17.131.662	23.832.676	139
	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	1	1,06	106	1	1,40	140	1	1,39	139
	Jumlah investor	3.030	7.628	251	3.060	5.741	187	3.090	6.367	206

SASARAN

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dicapai atas sasaran urusan penanaman modal adalah sebagai berikut

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82.40	82.40	100	82.60	85.11	103	82.80	86.245	104
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah	16.799.164	17.885.626	106	16.965.413	23.832.580	140	17.131.662	23.832.676	139
	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	1	1,06	106	1	1,40	140	1	1,39	139
	Jumlah investor	3.030	7.628	251	3.060	5.741	187	3.090	6.367	206

PENJELASAN PER INDIKATOR

1. **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Survey Kepuasan Masyarakat telah mencapai 104% dari target, namun demikian sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 untuk 28 jenis ijin pada Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar **86,245 *dengan kategori Baik*** (hasil survey SKM tersebut sudah sesuai dengan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey terhadap Penyelanggaraan Pelayanan Publik), sebagai pengganti ketentuan sebelumnya, **sehingga untuk tahun 2019 kategori hasil SKM meningkat. dibandingkan tahun 2018**,

2. **Nilai realisasi investasi**

Perkembangan pertumbuhan nilai investasi Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik berikut :

Grafik IV.B.50

Perkembangan Nilai Investasi Daerah

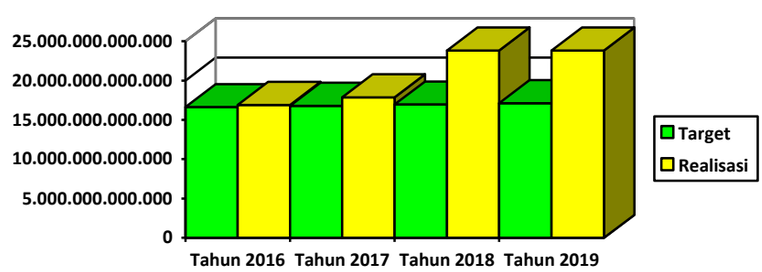

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidoarjo

Nilai investasi tersebut didalamnya termasuk investasi PMA dan investasi PMDN. Pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 23.832.676.777.188,00 atau 139,11% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar Rp.17.131.662.000.000,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun

2018 sebesar Rp. 23.832.580.166.842,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 96.610.346,00.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi daerah, yaitu :

1) Peningkatan kualitas dan penambahan jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal.
2) Optimalisasi PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya.
3) Pengembangan pelayanan perijinan berbasis system online, sehingga efisien dan akmulasi database terukur.
4) Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun OPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
5) Optimalisasi kegiatan sosialisasi, Workshop/Gathering Promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal sehingga tepat sasaran, termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan public secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo.

3. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Persentase pertumbuhan nilai investasi tahun 2019 adalah sebesar 1,39% atau sebesar 139% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 1%.

Grafik IV.B.51

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah

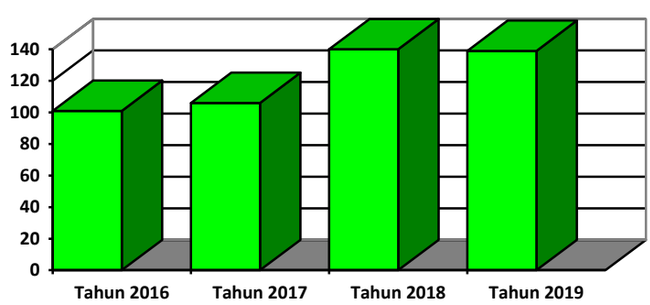

4. Jumlah investor

Jumlah investor di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 adalah 6.367 yang terbagi dalam 20 sektor, yaitu :

NO	SEKTOR USAHA	UNIT USAHA 2019	UNIT USAHA 2018
1	Sektor Ketenagalistrikan	18	0
2	Sektor Pertanian	39	0
3	Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan	11	0
4	Sektor Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	610	248
5	Sektor Kelautan & Perikanan	61	0
6	Sektor Kesehatan	91	16
7	Sektor Obat dan Makanan	746	1.870
8	Sektor Perindustrian	842	2.495
9	Sektor Perdagangan	3.216	1.112
10	Sektor Perhubungan	329	0
11	Sektor Komunikasi dan Informatika	23	0
12	Sektor Keuangan	40	0
13	Sektor Pariwisata	166	0
14	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	99	0
15	Sektor Pendidikan Tinggi	0	0
16	Sektor Agama dan Keagamaan	0	0
17	Sektor Ketenagakerjaan	68	0
18	Sektor Kepolisian	1	0
19	Sektor Perkoperasian dan UMKM	7	0
20	Sektor Ketenaganukliran	0	0
JUMLAH		6.367	5.741

Investor pada sektor perdagangan mendominasi perizinan berusaha di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan wirausaha baru baik dari usaha kecil, menengah dan besar tumbuh pesat.

Jumlah investor di tahun 2019 khususnya pada sektor perdagangan meningkat sebesar 2.104 investor sedangkan pada sektor perindustrian menurun sebesar 1.653 investor, hal ini disebabkan proses perizinan berusaha pada sektor perdaangan lebih mudah dibandingkan pada sektor perindustrian.

Grafik IV.B.52

Perkembangan Jumlah Investor di Kab. Sidoarjo

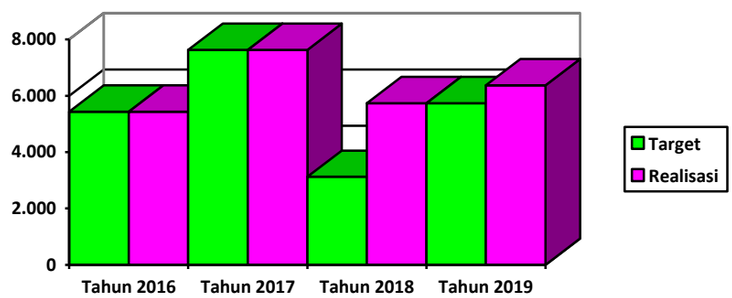

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidoarjo

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. **Program Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan** dengan anggaran sebesar Rp. 377.941.100,- dan terealisasi sebesar Rp.262.641.620,- atau 69,66 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82.80	86.245	104 %

   Realisasi capaian anggaran pada Program Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan sebesar 69,66 %, disebabkan anggaran belanja makanan dan minuman rapat yang tidak terealisasi, karena adanya regulasi baru yang mewajibkan penyederhanaan proses perizinan dan tidak memerlukan rapat koordinasi antara investor dengan instansi terkait.

Meskipun realisasi capaian anggaran hanya sebesar 69,66 % akan tetapi kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat baik dengan hasil survey SKM sebesar 86,245. Adapun solusi atas permasalahan di atas adalah dengan monitoring evaluasi atas pelaksanaan program meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Program tersebut didukung oleh Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu 1 dan Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan perijinan usaha, dengan indikator sebagai berikut:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
1. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu 1	- Jumlah Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan - Jumlah laporan Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang disusun	1.250 12	2.671 12	213 % 100 %
2. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan perijinan usaha	- Jumlah Perijinan yang diterbitkan - Jumlah laporan Perijinan yang disusun	550 12	960 12	174 % 100 %

2. **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** dengan anggaran sebesar Rp.363.584.820,- dan terealisasi sebesar Rp.304.056.860,- atau 83,63 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Nilai Realisasi Investasi Daerah	17.131.662.000.000	23.832.676.777.188	139 %

3. **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi** dengan anggaran sebesar Rp.1.886.873.210,- dan terealisasi sebesar Rp.1.836.306.350,- atau 97,32 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Nilai Realisasi Investasi Daerah	17.131.662.000.000	23.832.676.777.188	139 %

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
1	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh **Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.**

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
2. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan

TUJUAN

TUJUAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Mendorong peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan internasional.	10 orang	13 orang	130 %	10 orang	22 orang	220%	15 orang	43 orang	286,66 %
Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional	135 Prestasi	135 prestasi	100 %	140 Prestasi	250 prestasi	178,57 %	150 Prestasi	166	110,66 %

SASARAN

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan **Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata** yang telah dicapai berdasarkan sasaran urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan internasional.	10 orang	13 orang	130 %	10 orang	22 orang	220 %	15 orang	43 orang	286,66 %
Meningkatnya prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional,Nasional dan Internasional	Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional	135 Prestasi	135 prestasi	100 %	140 Prestasi	250 prestasi	178, 57 %	150 Prestasi	166	110,66 %

1. **Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh ditingkat regional, nasional, dan internasional**

   Indikator kinerja ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemuda di Kabupaten Sidoarjo dengan menghitung jumlah pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di skala Regional, Nasional atau Internasional

   Pencapaian indikator kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan, dimana untuk tahun 2017 dengan target RPJMD sebanyak 10 prestasi tercapai sebanyak 13 prestasi, untuk tahun 2018 dengan target RPJMD sebanyak 10 prestasi tercapai sebanyak 22 prestasi, sedangkan tahun 2019 dengan target 15 RPJMD tercapai sebanyak 43 prestasi dengan prestasi ditingkat Regional sebanyak 20 prestasi, tingkat Nasional sebanyak 10 prestasi dan tingkat Internasional sebanyak 13 prestasi.

   Capaian indikator kinerja ini meningkat 21 prestasi dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 22 prestasi

2. **Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional**

   Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi keolahragaan yang ada. Prestasi dibidang olahraga pada tahun 2019 sebanyak 118 prestasi di tingkat Regional,

43 prestasi ditingkat Nasional dan 5 prestasi ditingkat Nasional total sebesar **166 prestasi tercapai 110,66 % dari target 150 prestasi** .

Capaian indikator ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 84 prestasi di karenakan event yang ada disesuaikan dengan jadwal pertandingan di tingkat Propinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja selama tahun 2019, antara lain:

1. Persiapan yang lebih matang oleh pembina masing-masing cabang olahraga dalam menghadapi event yang didukung oleh peningkatan anggaran dari APBD, baik yang dilaksnakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo maupun anggaran hibah kepada KONI Kabupaten Sidoarjo
2. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang latihan tiap cabor yang ada di Kabupaten Sidoarjo
3. Adanya koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan KONI dan cabor-cabor

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran di urusan kepemudaan dan olahraga, program dan kegiatan dalam tahun 2019, sebagai berikut

a. Program Peningkatan peran serta kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp. 3.624.546.531,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.239.886.809,00, atau 89,39%, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
1. Jumlah Pemuda Yang Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	25 orang	43 orang	172 %

b. Program Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan dengan anggaran sebesar Rp.6.888.838.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.353.719.064,60, atau 92,23%, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional	150 Prestasi	166 Prestasi	110,66 %

c. Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan dengan anggaran sebesar Rp. 577.448.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 513.676.890,00, atau 88.95%, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Jumlah pengguna fasilitas keolahragaan	83.967 orang	107.866 Orang	128.46 %

Urusan Statistik

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	***Meningkatkan kualitas data statistik***	***Meningkatnya kualitas data statistik***

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk **urusan statistik** yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah Program Pengembangan data informasi statistik daerah.

Program tersebut di atas dilakasanakan dan diarahkan untuk mencapai tutjuan dan sasaran urusan statistik yaitu meningkatnya kualitas data statistik, dengan indikator dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
meningkatnya kualitas data statistik	Persentase data statistik yang diolah dan dianalisa	40	48	120,00	60	60	100,00

Dokumen Statistik Daerah yang disusun

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen statistik daerah untuk mendukung informasi pembangunan. Berikut Dokumen- dokumen yang disusun diantaranya:

1. Indikator Ekonomi;
2. Indikator Sosial;
3. Indeks Harga Konsumen;
4. Indikator Tenaga Kerja;
5. Analisa Gender;
6. ILOR;
7. Sidoarjo Dalam Angka;
8. PDRB Menurut Lapangan Usaha;
9. PDRB Menurut Pengeluaran;
10. Indeks Pembangunan Manusia;
11. Kecamatan Dalam Angka;
12. Statistik Daerah;
13. Statistik Kesejahteraan Rakyat;
14. Data Sektoral;
15. Profil Desa.

1. **Indikator Ekonomi;**

   Berbagai indikator perekonomian sangat diperlukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi dari seluruh program pembangunan yang dilaksanakan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Beberapa indikator ekonomi yang disajikan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, IPM, Indeks Gini, dll.

2. **Indikator Sosial;**

   Publikasi ini memuat analisis deskriptif dari berbagai indikator sosial yang tersedia di Kabupaten Sidoarjo. Indikator sosial yang disajikan meliputi: kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan indikator sosial lainnya.

3. **Indeks Harga Konsumen;**

   Indeks Harga Konsumen merupakan penghitungan Inflasi, dimana hasil penghitungan inflasi Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan nilai Konsumsi Dasar adalah 2012 = 100 dengan acuan Kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo mengalami inflasi 'Y-O-Y' 2,12 persen persen lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 sebesar 2,70 persen.

4. **Indikator Tenaga Kerja;**

   Informasi mengenai ketenagakerjaan merupakan hal penting yang dapat digunakan sebagai perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun bidang sosial, misalnya dapat memberikan gambaran tentang daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja.

5. **Analisa Gender**

Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sudah berperspektif gender. Analisa Gender ini berisikan tentang informasi mengenai kondisi sosial demografi perempuan dan laki-laki serta penghitungan IPG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.

6. **ILOR (*Incremental Labour Output Ratio)***

ILOR merupakan sebuah rasio yang menginformasikan kepada kita seberapa banyak tambahan tenaga kerja yang diperlukan untuk memberikan tambahan satu unit output perekonomian.

7. **Sidoarjo Dalam Angka**

Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2019 merupakan publikasi tahunan yang berupa kumpulan data dan secara komprehensif dari berbagai bidang/ sektor. Tujuan utama publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara global keadaan Kabupaten Sidoarjo setiap tahun.

8. **PDRB Menurut Lapangan Usaha**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menyajikan angka-angka periodik, yang masing-masing disusun menurut lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku (*Curent Prices*) maupun atas dasar harga konstan (*Constant Prices*).

Penghitungan PDRB yang dilakukan melalui pendekatan lapangan usaha terdiri dari 17 sektor, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan pengolahan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan

perawatan obil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estate; jasa perusahaan; administasi pemerintahan, pertanahan, dam jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kesiatan sosial; dan jasa lainnya.

9. PDRB Menurut Pengeluaran

Penghitungan PDRB yang dilakukan melalui pendekatan pengeluaran dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumahtangga (PK-LNPRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, dan ekspor dan impor serta jasa.

10. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

11. Kecamatan Dalam Angka

Kecamatan Dalam Angka 2018 merupakan publikasi tahunan yang berupa kumpulan data dan secara komprehensif dari berbagai bidang/ sektor. Tujuan utama publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara global keadaan masing-masing kecamatan (18 Kecamatan) di Kabupaten Sidoarjo setiap tahun.

12. Statistik Daerah

Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo 2018 berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar kondisi sosial-ekonomi di Sidoarjo yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Sidoarjo. **Berbeda dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih menekankan pada analisis**.

Masing-masing tema tersebut dibahas terperinci disertai analisisnya, tidak hanya sekedar data.

13. Statistik Kesejahteraan Rakyat

Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 merupakan publikasi yang memuat berbagai indikator kesejahteraan seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana,perumahan dan konsumsi rumah tangga.

Publikasi ini disajikan dalam bentuk angka persentase dari suatu populasi, berupa infografis dan tabel yang bersumber dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

14. Data Sektoral

Buku Data Statistik Sektoral ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo hasil Survey Data Statistik Sektoral Tahun 2019.

Dengan penyusunan data statistik sektoral Kabupaten Sidoarjo maka diharapkan dapat diketahui potensi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dilihat dari berbagai sektor yang nantinya bisa digunakan sebagai data dalam menyusun kebijakan-kebijakan di Kabupaten Sidoarjo.

15. Profil Desa

Buku profil desa merupakan suatu gambaran menyeluruh tentang karakter Desa dari 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang bertujuan agar data-data yang ada di wilayah Desa di Kabupaten Sidoarjo dapat tersusun lebih baik, valid dan mudah dimengerti serta agar dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak dalam upaya mendapatkan informasi mengenai data Desa di setiap wilayah Kecamatan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Buku Profil Desa ini mencakup data-data dari 322 Desa dan 31 Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Untuk pelaksanaan pembuatan dokumen Indikator Ekonomi, Indikator Sosial, Indeks Harga Konsumen, Indikator Tenaga Kerja, ILOR dan Analisa gender pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan BPS Kabupaten Sidoarjo, Sedangkan untuk Dokumen Sidoarjo Dalam Angka, PDRB menurut pengeluaran, PDRB menurut Lapangan Usaha, Indeks Pembangunan Manusia, Statistik Daerah, Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Kecamatan Dalam Angka merupakan produk BPS yang dipublikasikan dan digandakan oleh Bidang Statistik untuk kepentingan umum. Kegiatan Pengumpulan Data Sektoral dan Buku Profil Desa merupakan produk Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika.

Diharapkan informasi-informasi yang dihimpun tersebut dapat memberikan manfaat untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran di urusan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program **Program Pengembangan data informasi statistik daerah.** dengan anggaran sebesar Rp 606.020.658,00 dan terealisasi sebesar Rp. 568.251.158,00 atau 93,77%, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase data statistik yang diolah dan di analisa	60%	60%	100%

Urusan Persandian

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	***Meningkatknya ketersediaan teknologi informasi publik menuju Sidoarjo Smartcity***	***1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi*** ***2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik***

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk **Persandian** yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah

Program Peningkatan Kualitas Layanan data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Program tersebut di atas dilakasanakan dan diarahkan untuk mencapai tutjuan dan sasaran urusan persandian yaitu Meningkatnya pengembangan implementasi teknologi informatika, dengan indikator dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Jaringan OPD dan Kecamatan yang terintegrasi	58	68,75	188,53	70	88,89	127,00

Pada tahun 2019, sebanyak 27 OPD (Dinas dan Badan), Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan 13 Kecamatan sudah terintegrasi dengan data center.

5 kecamatan yang belum terkoneksi dengan data center adalah Kecamatan Taman, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong dan Kecamatan Jabon.

Sesuai dengan fungsi seksi keamanan informasi dan telekomunikasi terkait layanan keamanan informasi e-government, diperlukan kebijakan keamanan informasi yang mengatur norma, standard, prosedur dan kriteria pelaksanaan/inplementasi keamanan e-government di pemerintah kabupaten Sidoarjo agar implementasi keamanan informasi e-government dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran di urusan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 melaksanakan program **Program Peningkatan Kualitas Layanan data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).** dengan anggaran sebesar Rp. 20.290.225.628,40 dan terealisasi sebesar Rp. 19.744.874.106,00 atau 97,31%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase jaringan FO yang dibangun	58,1%	89,6%	154,22%

Urusan Kebudayaan

Sasaran 2: Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2017	TAHUN 2018			TARGET TAHUN 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE			
Jumlah seni dan budaya daerah yang dilestarikan	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100.00%	3 kelompok	3 kelompok	100.00%

Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah maka harus dijaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Pada Tahun 2019, adat budaya yang dilestarikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, antara lain sebagai berikut :

a. Lelang Bandeng adalah salah satu budaya kearifan lokal masyarakat Sidoarjo, yaitu melelang bandeng kawakan yang berusia 5-10 tahun dengan berat 7-10 kg dan diadakan di alun-alun, kegiatan ini diadakan setiap tahun sekali untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW dan menjunjung tinggi nilai-nilai Maulud Nabi Muhammad SAW.

b. Perayaan/Ruwatan cara mengambil kupang di laut yang disebut juga dengan Nyadran adalah salah satu budaya kearifan lokal yang ada di Kecamatan Candi, Sidoarjo dan Buduran. Tradisi tersebut dinamakan pesta nyadran. Nyadran merupakan upacara adat bagi para nelayan kupang desa Balongdowo Candi, desa Bluru Kidul Sidoarjo dan Kepetingan Buduran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk kegiatan nyadran berupa pesta peragaan cara mengambil kupang di tengah laut selat Madura.
c. Reog Cemandi adalah Kesenian khas yang ada di Desa Cemandi Kecamatan Sedati. Reog Cemandi tidak sama dengan reog Ponorogo, reog cemandi tidak ada waroknya dan topengnya tidak ada bulu meraknya. Topeng terbuat dari kayu randu dan dicat.
d. Gagrak wayang kulit porongan adalah hasil pengembangan wayang kulit di Jawa, khususnya Jawa Timuran. Di Jawa Timur sendiri wayang kulit Jawa Timuran juga disebut wayang kulit jeg dong. Ada 4 versi di Jawa Timur yaitu Lamongan, Mojokerto, Malang dan Sidoarjo.

Untuk melestarikan seni budaya, peran kelompok seni budaya yang ada di masyarakat sangat besar. Kelompok seni budaya yang terbentuk terbagi dalam beberapa bidang seni yaitu : Ludruk, Wayang Kulit, Reog Ponorogo, Patrol, Jaranan/Bantengan, Musik (Orkes Melayu, Hadrah, Samroh, Gambus, Al Banjari dan Keroncong), Kentrung,Tari,Teater, Karawitan, Campursari dan Mocopat.

Di Kabupaten Sidoarjo juga terdapat daerah pesisir yang melestarikan budaya nelayan pesisir. Sampai saat ini budaya nelayan pesisir dilestarikan oleh enam desa, yaitu :

1) Desa Balong Dowo Kecamatan Candi
2) Desa Balong Gabus Kecamatan Candi
3) Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
4) Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo

5) Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati
6) Desa Kepetingan Kecamatan Sidoarjo

Tradisi ini sampai beberapa tahun terakhir masih terpelihara dan terjaga kelestariannya. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan tradisi tersebut antara lain :

1. Menyelenggarakan pentas seni budaya
2. Menyelenggarakan festival seni budaya
3. Mengadakan seminar, workshop, diskusi dan lain-lain tentang seni budaya
4. Memberikan penghargaan kepada seniman berprestasi

a. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah alat atau sarana untuk mencapai Sasaran kedua yaitu sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.768.080.175,- dan terealisasi sebesar Rp.1.702.438.830,- atau 96,29%, Dengan indikator kinerja yaitu :

INIDKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019
Jumlah kelompok seni yang melestarikan seni dan budaya daerah	2 kelompok	2 kelompok	100.00%	3 kelompok	3 kelompok	100.00%
Jumlah seni dan budaya daerah yang dibina menjadi destinasi wisata	2 Jenis	2 Jenis	100.00%	2 Jenis	2 Jenis	100.00%

Urusan Perpustakaan

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

NO.	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat	1. Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat 2. Meningkatnya Layanan Perpustakaan

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan Perpustakaan yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
2. Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan

Pada capaian kinerja seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : **"**Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat**"**

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat	Indeks Minat Baca Masyarakat	42	42	100%	60	69	115%	69	71,42	103%

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Indeks Minat Baca Masyarakat	42	42	100%	60	69	115%	69	71,42	103%

Kajian Minat Baca Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 dengan Metode penentuan sampel.

Indeks Minat Baca merupakan indeks komposit yang disusun dari 4 dimensi yaitu:

1. Dimensi Kecakapan
2. Dimensi Akses
3. Dimensi Alternatif
4. Dimensi Budaya

Dalam pengembangan Indeks Minat Baca ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten yakni PT. ICONESIA SOLUSI PRIORITAS

- Indeks minat baca masyarakat di Kabupaten Sidoarjo sebesar 71,42, masuk dalam kategori tinggi.
- Dimensi pendukung tertinggi adalah dimensi kecakapan sebesar 96,91 (angka termasuk dalam kategori sangat tinggi). Dimana dimensi pendukung lainnya mendapatkan nilai masing – masing yaitu dimensi akses sebesar 64,71, dimensi alternatif sebesar 66,53, dimensi budaya sebesar 62,36 (angka termasuk dalam kategori tinggi).

Perkembangan Indeks Minat Baca Masyarakat dari tahun 2016 s/d tahun 2019

Grafik IV.B.53

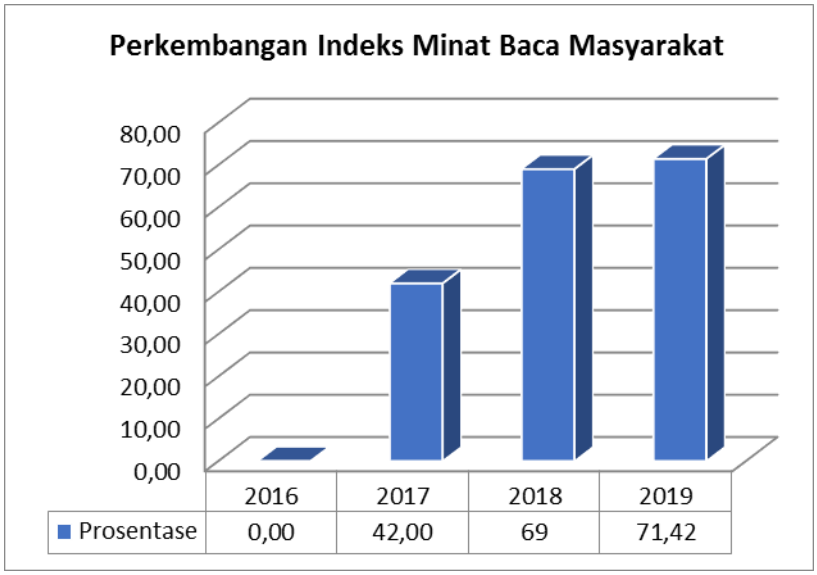

Sumber : Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD untuk indeks minat baca adalah 69. Realisasi Indeks Minat Baca Masyarakat tahun 2019 tercapai sebesar 71,42 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 69, maka realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,42 atau 3,50%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 69, maka capaian Indeks Minat Baca Masyarakat telah tercapai sebesar 103,50%.

Berdasarkan tabel/grafik, pencapaian kinerja di Tahun 2019 mengalami peningkatan dan melampaui dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan :

- Dilaksanakannya promosi/ sosialisasi melalui gerakan gemar membaca dengan mengadakan lomba mendongeng, lomba perpustakaan sekolah/desa/kelurahan
- membentuk perpustakaan percontohan di Desa/ Kelurahan
- sosialisasi pengelolaan perpustakaan di Desa/ Kelurahan maupun di masyarakat
- peningkatan kualitas SDM perpustakaan baik melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Minat Baca Masyarakat, antara lain :

(1) Mensosialisikan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang pemanfaatan dana desa untuk perpustakaan.

(2) Mensosialisikan UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan utamanya untuk pembudayaan literasi di sekolah

(3) Pembinaan dan memotivasi Kades/Kakel dan Kepala Sekolah untuk mengembangkan perpustakaan

(4) Mengadakan Bimtek/pelatihan untuk petugas pengelola perpustakaan desa dan sekolah

(5) Disahkannya Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang dapat mendorong semua stakeholder dalam pengembangan perpustakaan

(6) Mengadakan kegiatan - kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mitra perpustakaan seperti :

- Lomba mendongeng
- Lomba perpustakaan sekolah/desa

Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan Perpustakaan melalui peningkatan layanan perpustakaan kepada masyarakat yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perpustakaan**

   Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat/ pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kabupaten Sidoarjo, Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang dimiliki Pemkab. Sidoarjo. Penilaian SKM Layanan Perpustakaan yang dilakukan oleh lembaga independent dalam hal ini PT. KOKEK dengan melakukan pembagian kuisioner kepada pengunjung mengenai layanan perpustakaan.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Nilai SKM Layanan Perpustakaan	81,47	81,54	100,09	81,47	80,94	99,35	81,53	87,383	107,17%

Grafik IV.B.54

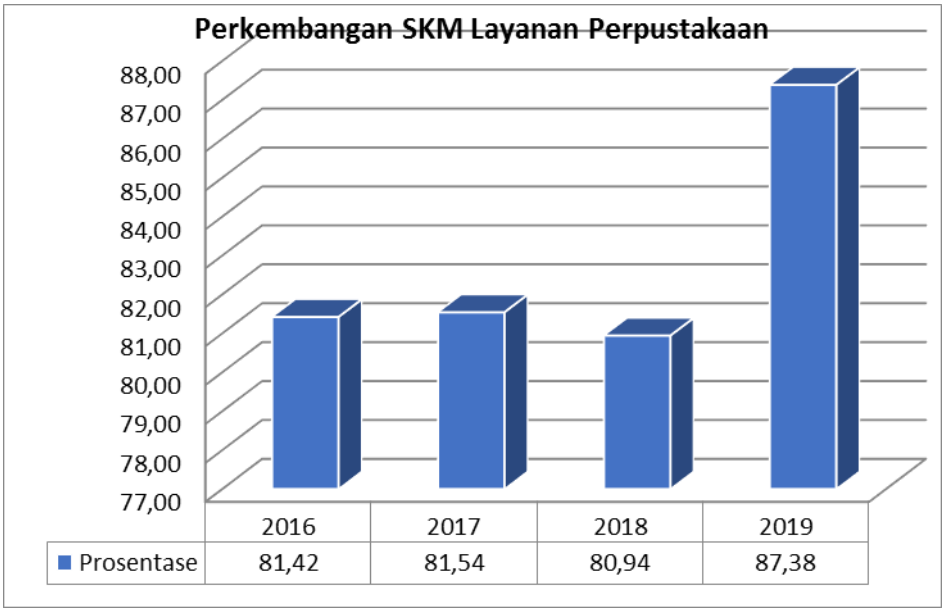

Sumber : Bidang Pengolahan, Layanan

Realisasi SKM Layanan perpustakaan tahun 2019 tercapai sebesar 87,38 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 80,94 maka realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,44 atau 7,95%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 81,53, maka capaian SKM Layanan perpustakaan telah tercapai sebesar 107,17%.

INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 : NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) LAYANAN PERPUSTAKAAN

Berdasarkan tabel/ grafik, pencapaian kinerja di Tahun 2019 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan :

- Peningkatan fasilitas perpustakaan berupa BOLAM (Bioskop Literasi Anak dan Masyarakat
- Peningkatan sarana prasarana yang mendukung layanan sirkulasi yang sudah terkomputerisasi
- Peningkatan sarana prasarana perpustakaan yang representatif berupa dekorasi interior Ruang Baca Anak yang lebih menarik
- Penambahan koleksi Buku yang berkualitas
- Adanya armada perpustakaan keliling (Mobil Perpustakaan Keliling) sebanyak 5 (lima) unit dan 18 Torpin (motor pintar)
- Perpustakaan Online/ dibukanya media jejaring sosial (internet) pada Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yakni dengan adanya SIDIRA (Sidoarjo Information Digital Library)

Upaya yang telah dilakukan :

1. Melaksanakan promosi/ sosialisasi kegiatan layanan perpustakaan lebih gencar melalui sosial media dan media cetak.
2. Meningkatkan inovasi layanan perpustakaan
3. Memaksimalkan dan menambah kebutuhan bahan pustaka bagi masyarakat

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca** dengan anggaran sebesar Rp. 993.008.542,- dan terealisasi sebesar Rp. 935.095.627,- atau 94,17 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sidoarjo	897	927	103%

   Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca dapat disimpulkan ***telah berhasil*** karena dilihat dari realisasi dan capaian kegiatan maka kegiatan ini telah melebihi target, kalau dilihat dari sisi realisasi anggaran terdapat sisa anggaran yang merupakan efisiensi dari penyerapan anggaran.

   Upaya yang telah dilakukan :

   1. Memberikan sosialisasi kepada para Kades/ Kakel dan Kasek tentang arti pentingnya keberadaan dan pengembangan perpustakaan dengan cara mengintensifkan pembinaan dan mensosialisasikan Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
   2. Mengintensifkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan
   3. Memasyarakatkan minat dan budaya baca melalui lomba mendongeng dan Lomba perpustakaan sekolah/ Desa/ Kelurahan

2. **Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan** dengan anggaran sebesar Rp. 4.212.415.254,50 dan terealisasi sebesar Rp. 3.940.822.945,50 atau 93,55 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
a. Jumlah koleksi perpustakaan	97.000 Eks.	114.919 Eks	111.47 %
b. Jumlah pengunjung perpustakaan	155.000 Orang	208.955 orang	134.80 %

Upaya yang telah dilakukan :

1. Memberdayakan tenaga Non ASN untuk membantu pengolahan bahan Pustaka
2. Menambah Kapasitas internet
3. Mempromosikan layanan perpustakaan baik melalui media cetak maupun media social
4. Meningkatkan inovasi layanan perpustakaan
5. Memaksimalkan dan menambah kebutuhan bahan pustaka bagi masyarakat dengan melakukan survey kebutuhan bahan pustaka

Berdasarkan hasil capaian tersebut, maka Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan dapat disimpulkan ***telah berhasil*** karena dilihat dari realisasi dan capaian kegiatan maka kegiatan ini telah melebihi target, kalau dilihat dari sisi realisasi anggaran terdapat sisa anggaran yang merupakan efisiensi dari penyerapan anggaran.

Urusan Kearsipan

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

NO.	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
1.	Meningkatnya sistem akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan sistem tertib administrasi kearsipan	3. Prosentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan Kearsipan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan Perpustakaan yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Pengelolaan, Pelayanan Dan Dokumen Kearsipan

Pada capaian kinerja seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : **"**Meningkatkan sistem tertib administrasi kearsipan**"**

Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan sistem tertib administrasi kearsipan	Prosentase arsip aktif yang terkelola dengan baik	10%	10%	100%	12%	12%	100%

Sumber : Bidang Kearsipan

Catatan : Pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 masih dalam bentuk Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

d. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya tertib kearsipan dan layanan arsip.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	17,63	17,87	101,36	20,04%	20,04%	100%	22,46%	22,46%	100%

Untuk mengetahui Prosentase Lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku yaitu dengan mengetahui jumlah Lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku dibanding dengan jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang dimaksud lembaga antara lain Lembaga terdiri dari SKPD, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, BUMD, KPU Sidoarjo, Sekretariat KORPRI adalah dengan melihat kualitas tata kelola kearsipan di SKPD :

- Tata naskah
- Klasifikasi arsip
- Sarana prasarana
- SDM

Grafik IV.B.55

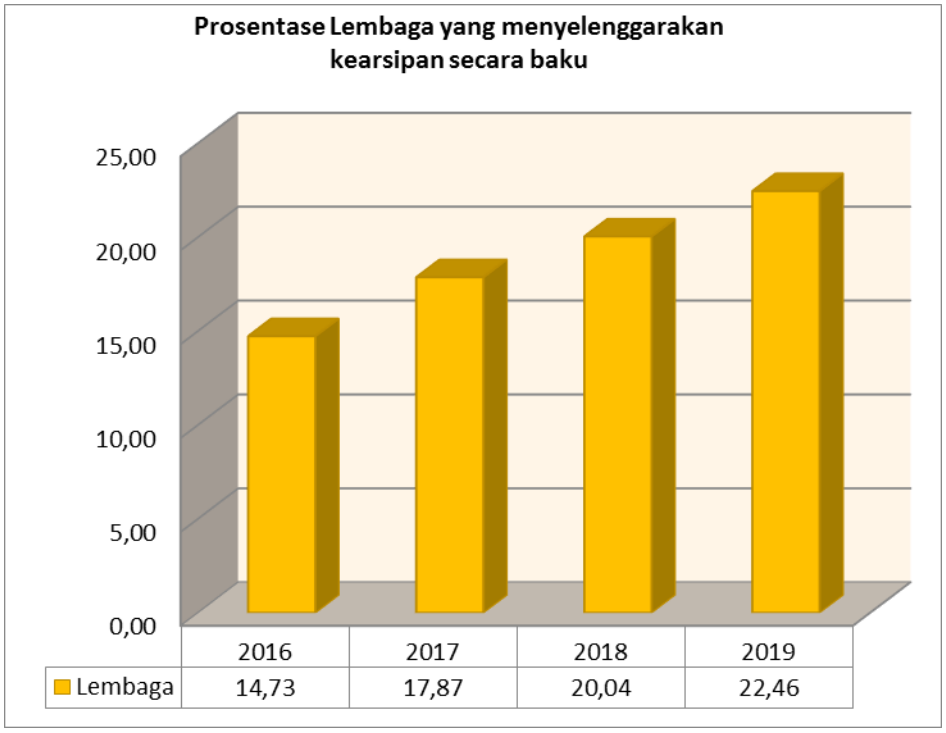

Sumber : Bidang Kearsipan

Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku tahun 2019 sebanyak 93 Lembaga, total jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 414 Lembaga sehingga Prosentase Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku tahun 2019 sebesar 22,46%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 83 lembaga, maka realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 10 lembaga atau 12,05%. Sedang target tahun 2019 Prosentase Lembaga yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku sebesar 22,46%, maka capaian target tahun 2019 sebesar 100%

INDIKATOR KINERJA SASARAN 3 : PROSENTASE LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN KEARSIPAN SECARA BAKU

Berdasarkan tabel/ grafik, pencapaian kinerja di Tahun 2019 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan :

- meningkatnya pembinaan pengelolaan arsip
- pendampingan dan monitoring secara berkala mengenai arsip di Lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo
- Mengadakan bintek kearsipan secara terus-menerus
- Mengadakan sosialisasi/ penyuluhan kearsipan

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Pengelolaan, Pelayanan Dan Dokumen Kearsipan** dengan anggaran sebesar Rp. 719.694.502,- dan terealisasi sebesar Rp.651.834.645,- atau 90,57 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Jumlah lembaga yang telah menyelengarakan sistem kearsipan dengan standart yang di tentukan	93 Lembaga	93 Lembaga	100%
Presentase pelayanan kearsipan yang terpenuhi	20%	20%	100%

Sumber : Bidang Kearsipan

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka Program Pengelolaan, Pelayanan Dan Dokumen Kearsipan dapat disimpulkan *telah berhasil* karena dilihat dari realisasi dan capaian kegiatan maka kegiatan ini telah mecapai target yang

telah ditentukan, kalau dilihat dari sisi realisasi anggaran terdapat sisa anggaran yang merupakan efisiensi dari penyerapan anggaran.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
2. Mengadakan monev arsip secara berkesinambungan agar tertib arsip bisa dijalankan
3. Selalu berupaya melakukan koordinasi dengan pengelolaan arsip di semua OPD dan Desa/Kelurahan
4. Menggali atau mencari sumber bersejarah

Kegiatan : **Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Daerah**

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Belum sempurnanya aplikasi kearsipan (masih adanya penyempurnaan aplikasi dari ANRI), sehingga belum terlaksana pembinaan di Lembaga
2) Tidak adanya SDM khusus yang mengelola aplikasi kearsipan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga saat ini dikelola oleh Kasi
3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja di tahun mendatang, yaitu:

Dilakukan *hosting* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dan koordinasi dengan ANRI

3) Simpulan capaian (berhasil / tidak) :

Berdasarkan hasil analisa tersebut Kegiatan alihmedia telah berhasil, namun dalam segi pembinaan kelembagaan belum terlaksana karena terkendala belum sempurnanya aplikasi SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) dari ANRI

Dari hasil pencapaian realisasi anggaran tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

1. Kegiatan : **Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan**
   a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:
      - belum selesainya pembuatan Raperda tentang Kearsipan karena masih dalam proses pembahasan di DPRD sehingga cetak perda kearsipan tidak bisa diserap
   b. Upaya yang telah dilakukan yaitu:
      - Pada pelaksanaan monitoring ke Lembaga pengelola arsip dengan menggunakan pedoman dari ANRI dan Perda Propinsi tentang pengelolaan arsip
2. Kegiatan : **Penyelenggaraan Tata Kearsipan**
   a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:
      - belum selesainya pembuatan Raperda tentang Kearsipan karena masih dalam proses pembahasan di DPRD sehingga cetak perda kearsipan tidak bisa diserap
   b. Upaya yang telah dilakukan yaitu:
      - Pada pelaksanaan Pembinaan pengelolaan arsip dengan menggunakan pedoman dari ANRI dan Perda Propinsi tentang pengelolaan arsip

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk unsur penunjang sekretariat daera pada tahun 2019 adalah :

1. Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum
3. Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
4. Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama
6. Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD
7. Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
8. Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah
9. Program Pelayanan Kesekretariatan

b. Realisasi Pelaksanaan ProgramSerta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian beberapa sasaran, diantaranya :

Nilai SAKIP Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 memperoleh kategori **BB** (**Sangat Baik**), hasil tersebut meskipun telah memenuhi target yang ditetapkan pada RPJMD yakni kategori **BB (Sangat Baik)**, namun mengalami penurunan level dari tahun sebelumnya, dimana di tahun 2018 Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo kategori **A (Memuaskan)**.

Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2012, sebagaimana pada grafik berikut :

Grafik IV.D.1

Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo

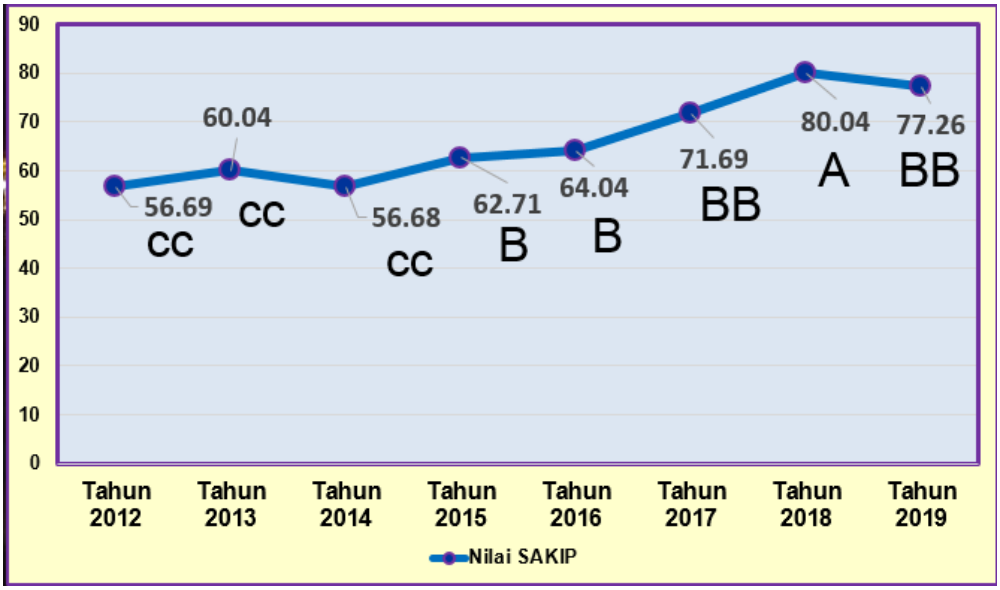

Sumber Data : LHE SAKIP Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam penerapan SAKIP ini sehingga mampu mendorong penerapan budaya kinerja sejak proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Hasil evaluasi SAKIP diberikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tanggal 27 Januari 2020 di Inaya Putri Hotel, Badung, Provinsi Bali.

Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan karena terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti, oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di tahun 2020, maka dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- Dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD mempertimbangkan fungsi – fungsi yang terkait, bukan OPD yang terkait, sehingga dapat dianalisa fungsi – fungsi yang kurang efektif.
- Mereviu kembali penyusunan peta proses bisnis dengan mempertimbangkan langkah strategis pencapaian kinerja mulai level Kabupaten, OPD, hingga level individu dengan mengadakan asistensi yang didampingi evaluator nasional
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja, serta mereviu kembali aspek – aspek yang mempengaruhi tunjangan kinerja dengan mengacu pada kualitas manajemen kinerja OPD
- Menyusun Analisa Resiko seluruh Kegiatan OPD bersamaan dengan penyusunan KAK pada saat penyusunan Renja OPD

- Setiap Laporan Kinerja OPD, sebelum diupload pada aplikasi milik Kementerian PAN dan RB, terlebih dahulu direview oleh Tim APIP
- Pengembangan aplikasi e-monev yang tidak hanya mengevaluasi kinerja output, tetapi juga kinerja outcome
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja
- Pelaksanaan Evaluasi SAKIP ke seluruh OPD dengan menghadirkan Tim evaluator Nasional sebagai pengarah
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja

Status Kinerja LPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 memperoleh nilai (score) 3,4108 dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) dan bertahan mendapat peringat ke-**1 (pertama)** tingkat Nasional dan berhasil meraih predikat bintang 4 (empat) kinerja terbaik. Kabupaten Sidoarjo sudah pernah mendapatkan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI tahun 2017 yang diselenggarakan di Alun – Alun Kabupaten Sidoarjo, serta Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tahun 2015. Sehubungan dengan telah berhasilnya Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan tersebut, maka Kabupaten Sidoarjo harus tetap dapat mempertahankan prestasi kebanggannya.

Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :

Grafik IV.D.2

Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo

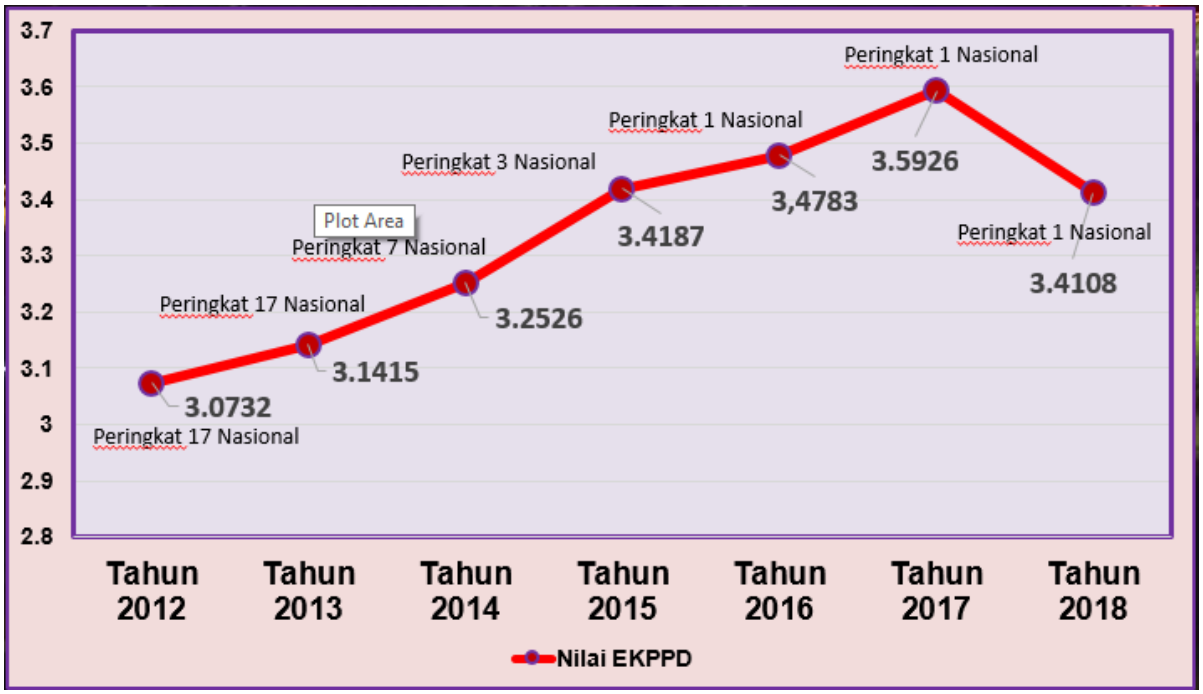

Sumber Data : Hasil EKPPD Kementerian Dalam Negeri

Upaya yang dilakukan adalah membuat kebijakan satu OPD satu Inovasi, sehingga kinerja OPD menjadi sangat tinggi dan memiliki nilai lebih. Selain juga menjaga tren Pencapaian Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Kabupaten Sidoarjo.

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Tujuan dari dilaksanakannya Evaluasi Pelayanan Publik, adalah :

- Sebagai percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat

Metodologi evaluasi dan penilaian adalah sebagai berikut :

Indikator dan Range Nilai Evaluasi Pelayanan Publik dengan menggunakan Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	B-	Baik (DC)
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (DC)
1,51 – 2,00	D	Buruk
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
0 – 1,00	F	Gagal

Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu OPD satu Inovasi yang ditetapkan oleh Bapak Bupati Sidoarjo. Selain itu banyak pula inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang pernah mendapatkan penghargaan SINOVIK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu SIPPADU Aplikasi Perijinan Terpadu, SIMANIES Aplikasi untuk mencegah kematian ibu melahirkan, SIPEKAT Aplikasi kenaikan pangkat paperless, dan SIPANDU sistem untuk mendeteksi dini gangguan autis pada anak usia dini.

Melalui inovasi – inovasi yang berkembang, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2019 mendapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Unit Pelayanan Yang di Sampling	Nilai (Indeks)	Konversi
1.	***Rumah Sakit Umum Daerah***	***4,51***	***Pelayanan Prima***
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,21	Sangat Baik (A-)
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,76	Baik (B)
		4,16	**Sangat Baik (A-)**

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo

Pembangunan Mal Pelayanan Publik, Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan Kelompok Budaya Kerja (KBK) mendorong tercapainya kualitas pelayanan publik yang Sangat Baik. Diharapkan di tahun 2020 akan semakin banyak unit pelayanan yang mendapatkan sampling dan memiliki inovasi yang efektif, sehingga nilai Indeks Pelayanan Publik juga semakin meningkat.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitas baku yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, bagaimana dan kapan melakukannnya, dimana dan oleh siapa aktivitas dilakukan.

Diperlukan adanya SOP oleh setiap unit pelayanan sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan. Tersusunnya SOP pada setiap unit pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

Data Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Tahun 2019, sebagai berikut :

NO	OPD PELAKSANA	JUMLAH SOP
1	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	18
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	5
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	8
4	Bagian Perekonomian Dan SDA Sekretariat Daerah	4
5	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	10
6	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	32
7	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	17
8	Bagian Umum Sekretrariat Daerah	15
9	Bagian Protokol Dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3
11	Inspektorat	3
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11
14	Badan Pelayanan Pajak Daerah	20
15	Badan Kepegawaian Daerah	52
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5
18	Satuan Polisi Pamong Praja	14
19	Rumah Sakit Umum Daerah	22
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
21	Dinas Kesehatan	14
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26
23	Dinas Perhubungan	11
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20
25	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	53

NO	OPD PELAKSANA	JUMLAH SOP
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57
27	Dinas Perikanan	14
28	Dinas Pangan dan Pertanian	17
29	Dinas Pemuda Olah Raga, dan Pariwisata	14
30	Dinas Perkim, Cipta Karya dan Tata Ruang	32
31	Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air	53
32	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	37
33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3
36	Dinas Tenaga Kerja	7
37	Dinas Sosial	15
38	Kecamatan Sidoarjo	74
39	Kecamatan Candi	8
40	Kecamatan Buduran	10
41	Kecamatan Gedangan	9
42	Kecamatan Sedati	7
43	Kecamatan Waru	10
44	Kecamatan Taman	10
45	Kecamatan Krian	10
46	Kecamatan Wonoayu	10
47	Kecamatan Sukodono	9
48	Kecamatan Balongbendo	20
49	Kecamatan Tarik	14
50	Kecamatan Tulangan	27
51	Kecamatan Prambon	10
52	Kecamatan Krembung	21
53	Kecamatan Tanggulangin	10
54	Kecamatan Jabon	9
55	Kecamatan Porong	8
56	Kelurahan Magersari	9
57	Kelurahan Pucang	9
58	Kelurahan Sidoklumpuk	8
59	Kelurahan Sidokumpul	9
60	Kelurahan Pucanganom	9
61	Kelurahan Bulusidokare	9
62	Kelurahan Sekardangan	9
63	Kelurahan Celep	9
64	Kelurahan Sidokare	9
65	Kelurahan Pekauman	9

NO	OPD PELAKSANA	JUMLAH SOP
66	Kelurahan Lemahputro	9
67	Kelurahan Gebang	9
68	Kelurahan Urangagung	9
69	Kelurahan Cemengkalang	9
70	Kelurahan Taman	9
71	Kelurahan Ketegan	9
72	Kelurahan Sepanjang	9
73	Kelurahan Wonocolo	20
74	Kelurahan Bebekan	9
75	Kelurahan Ngelom	9
76	Kelurahan Kalijaten	9
77	Kelurahan Geluran	9
78	Kelurahan Krian	12
79	Kelurahan Tambakkemerakan	12
80	Kelurahan Kemasan	12
81	Kelurahan Porong	12
82	Kelurahan Mindi	12
83	Kelurahan Juwetkenongo	12
84	Kelurahan Gedang	3
85	Kelurahan Siring	12
86	Kelurahan Jatirejo	12
87	Puskesmas Sidoarjo	74
88	Puskesmas Sukodono	9
89	Puskesmas Porong	63
90	Puskesmas Tulangan	58
91	Puskesmas Gedangan	92
92	Puskesmas Krian	92
93	Puskesmas Taman	92
94	Puskesmas Tarik	84
95	Puskesmas Sekardangan	135
96	Puskesmas Kepadangan	98
97	Puskesmas Waru	92
98	Puskesmas Buduran	138
99	Puskesmas Prambon	92
100	Puskesmas Balongbendo	92
101	Puskesmas Sedati	82
102	Puskesmas Medaeng	107
103	Puskesmas Barengkrajan	92
104	Puskesmas Candi	92
105	Puskesmas Jabon	92
106	Puskesmas Kedungsolo	81

NO	OPD PELAKSANA	JUMLAH SOP
107	Puskesmas Trosobo	74
108	Puskesmas Tanggulangin	52
109	Puskesmas Krembung	92
110	Puskesmas Urang Agung	87
111	Puskesmas Wonoayu	148
112	Puskesmas Ganting	92
113	UPTD Gudang Farmasi	8

Sumber data : Bagian Organisasi Setda

Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo sejumlah 48 OPD telah menyusun dan menerapkan SOP. Jumlah SOP di Kabupaten Sidoarjo adalah 3.613 SOP.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2019, dilakukan pengukuran pelayanan bidang pemerintahan, kesehatan, perijinan, pelayanan publik dengan nilai rata-rata 86,612 atau kategori B (baik).

Rincian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	
1	2	3	4	
1	Sekretariat Daerah	86,283	B	Baik
2	Sekretariat DPRD	82,481	B	Baik
3	Inspektorat	88,772	A	Sangat Baik
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	84,954	B	Baik
5	Dinas Kesehatan	85,466	B	Baik
6	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga Dan Sumber Daya Air	83,898	B	Baik
7	Dinas Perumaha, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	86,138	B	Baik
8	Satuan Polisi Pamong Praja	86,204	B	Baik
9	Dinas Sosial	88,164	B	Baik
10	Dinas Tenaga Kerja	87,860	B	Baik

11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	86,621	B	Baik
12	Dinas P3A KB	87,740	B	Baik
13	Dinas Pangan Dan Pertanian	85,490	B	Baik
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	87,465	B	Baik
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	84,998	B	Baik
16	Dinas Perhubungan	90,655	A	Sangat Baik
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	86,164	B	Baik
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	86,595	B	Baik
19	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	86,245	B	Baik
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	85,657	B	Baik
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	87,383	B	Baik
22	Dinas Perikanan	90,447	A	Sangat Baik
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	87,707	B	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	82,419	B	Baik
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	86,896	B	Baik
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	87,932	B	Baik
27	Badan Kepegawaian Daerah	89,186	A	Sangat Baik
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	87,564	B	Baik
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87,875	B	Baik
30	Rumah Sakit Umum Daerah	90,303	A	Sangat Baik
31	Mal Pelayanan Publik	85,010	B	Baik
32	Kecamatan Sidoarjo	88,799	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Candi	86,240	B	Baik
34	Kecamatan Buduran	85,958	B	Baik
35	Kecamatan Gedangan	85,096	B	Baik
36	Kecamatan Sedati	85,468	B	Baik
37	Kecamatan Waru	85,506	B	Baik
38	Kecamatan Taman	86,894	B	Baik
39	Kecamatan Krian	85,265	B	Baik
40	Kecamatan Wonoayu	85,085	B	Baik
41	Kecamatan Sukodono	86,223	B	Baik

42	Kecamatan Balongbendo	85,109	B	Baik
43	Kecamatan Tarik	86,445	B	Baik
44	Kecamatan Tulangan	86,503	B	Baik
45	Kecamatan Prambon	87,360	B	Baik
46	Kecamatan Krembung	86,954	B	Baik
47	Kecamatan Tanggulangin	86,520	B	Baik
48	Kecamatan Jabon	87,455	B	Baik
49	Kecamatan Porong	86,516	B	Baik
50	Puskesmas Jabon	84,23	B	Baik
	Rata-Rata Konversi	**86,612**	**(B)**	Baik

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

Manajemen Mutu Pelayanan

Suatu Sistem Manajemen Mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan Praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi"

Sistem Manajemen Mutu mendefenisikan bagaimana organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Sidoarjo secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerpan sistem manajemen mutu ISO. Berikut data OPD yang telah ber-sertifikat ISO sebagai berikut :

Unit Pelayanan/ Unit Kerja Yang Disertifikasi	Jenis ISO	Ruang Lingkup Sertifikasi	Tahun Perolehan & Nama Lembaga Sertifikasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9001:2015	The Provision of Public Administration Service of Population and civil Regristrations	2016, PT. British Standart Institution (bsi) Group Indonasia
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9001:2015	26 Layanan Perizinan	2018, Sucofindo

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	9001: 2015	Provision of affair regional transportation, including provision of service and the feasibility	2012, worlwide Quality Assurance Indonesia
Kecamatan Taman	9001:2015	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Umum, Fungsi Pendukung terkait	2018, Garuda Sertfikasi
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9001:2015	Provision of Library Services	2017, Europead Quality Assurance Group Indonesia
Badan Kepegawaian Daerah	9001:2015	The provision service of public administration for ASN development and welfare division and ASN re-assisment divison	2018, PT TAFA Sertifikasi Indonesia
Kecamatan Wonoayu	9001:2015	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Umum, Fungsi Pendukung terkait	2018, Garuda Sertfikasi
Kecamatan Krian	9001:2015	Provision Of Public Services For Resident Regristation, General Public Service Activities And Related Support Function	2016, Worlwide Quality Assurance Indonesia
Badan Lingkungan Hidup	9001:2015		2016, Worlwide Quality Assurance Indonesia
Kecamatan Waru	9001:2015	Provision of public services for resident regristation, general public service activities and related support function	2016, Worlwide Quality Assurance Indonesia

Kecamatan Taman	9001:2015	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Umum, Fungsi Pendukung terkait	2018, Garuda Sertfikasi
Kecamatan Wonoayu	9001:2015	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Umum, Fungsi Pendukung terkait	2018, Garuda Sertfikasi
Kecamatan Krian	9001:2015	Provision Of Public Services For Resident Regristation, General Public Service Activities And Related Support Function	2016, Worlwide Quality Assurance Indonesia
Kecamatan Tulangan	9001:2015	Provision Of Public Services For Resident Regristation, General Public Service Activities And Related Support Function	2016, Worlwide Quality Assurance Indonesia
Kecamatan Tarik	9001:2015	Provision of Sub-Distric Administration and Permit Recommendation	2017, Sucofindo
SMP NEGERI 1 SIDOARJO	9001:2015	Provision of Junior High School Services	2016, European Quality Assurance Group Indonesia
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	27001:2013	Provision of Electronic Procurement Services Running on SPSE Aplication for Sidoarjo Regency Area	2016, Transpacific Certifications Limited

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Sedangkan inovasi tata kelola pemerintah merupakan jenis inovasi yang mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkup internal yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah. Berikut daftar inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintah pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo :

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	Sipandu: Skrining Pendengaran Balita di Posyandu (UPT ABK)
			SIKeB (Sistem Informasi Kerusakan Bangunan)
			Calisline (Baca Tulis Online) SMPN 4 Sidoarjo
2	Dinas Kesehatan	6	Posbindu Penyakit Tidak Menular
			Desa Bebas Rokok
			Si Jari Emas
			Remiks (Rekam Medik)
			Pelayanan Konseling Orang Dengan HIV/Aids
			Si CANTIK (Sistem Informasi Cegah Kematian Ibu dan Anak)
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Aplikasi SEMAR (Sistem Manajemen Arsip)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	M-BONK : Cara Cepat dan Akurat Penanganan Jalan Rusak
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3	SIKOLING (Sistem Informasi Dokumen Lingkungan)

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
			Pengelolaan Sampah Terpadu di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kawasan (TPST)
			Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
			E-NYANK Pasar (aplikasi retribusi pasar)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Sistem Paket Pelayanan
			Salam 30 Menit
			One Day Service Jemput Bola
8	Dinas Perhubungan	2	Uji KIR Drive Thru
			Uji KIR Jemput Bola
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5	Pelayanan Paket Perijinan Online
			SIPPADU berbasis Elektronik
			Smart Card Dan Tanda Tangan/Stempel Elektronik (SITTEK)
10	Sekretariat DPRD	1	Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (e-Parlemen)
11	Dinas PMDP3AKB	1	Pelayanan Tuntas Korban Mentas dari UPT P2TP2A
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Sistem Informasi Bantuan Desa (SiBD)
			Musrenbang Online
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo (SIKSDA)
14	Badan Pelayanan Pajak Daerah	1	Pelayanan Pajak secara Online (eSPTPD)
15	Badan Kepegawaian Daerah	5	SIPEKAT : Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat paperless
			Sistem Penilaian Prestasi Kerja PNS (eSKP)
			Unit Training Of Competence (UTC)
			Kenaikan Gaji Berkala Online
			Daftar Hadir Pegawai Online

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	Rama Damkar : Rangkul Masyarakat Dalam Pemadaman Kebakaran
			Sidoarjo Tanggap (SIGAP)
17	Rumah Sakit Umum Daerah	6	SiMaNEis (Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency SMS GATEWAY)
			Sistem Informasi Kamar Rawat Inap (InKam)
			e-Tamat (Elektronik Akta Kematian)
			SAntri (SMS ANTRIAN)
			Anak Lahir Membawa Akta dan KK (Alamak)
			Remic (Rekam Medis Elektronik)
18	Kecamatan Sukodono	1	BMW (Berkas Mlaku Dewe)
19	Kecamatan Buduran	1	SIPETEK
20	Kecamatan Krian	1	SICANTIK (Sistem Inovasi Cepat, Amanah, Nyaman, Tegas, Interaktif Dan Kerumah)
21	Kecamatan Tulangan	1	Cepet Mari (sistem pengelolaan keuangan desa yang cepat, tepat, mudah, akuntabel, relevan dan inovatif)
22	Puskesmas Kedungsolo	1	SMS Informasi Tubercolose Paru
23	Puskesmas Medaeng	1	Kegiatan Pos Gizi
24	Puskesmas Jabon	1	Selamatkan Jiwa Wanita dan Anak (SEJIWA)
25	Puskesmas Krembung	2	JUMantik kecil berAksi Nyamuk Jadi larI (JUMANJI)
			Krembung pEduli Catin, Usia suBur,ibU daN keluarGa (KECUBUNG)
26	Puskesmas Porong	1	Bersama Ingin Cuci Tangan Bersama Peduli Kesehatan (BINTANG BERLIAN)
27	Puskesmas Urangagung	1	Pos Pembinaan Kesehatan Haji Terpadu
28	Puskesmas Candi	1	Perangi Kanker Mulut Rahim (PeKan MuRah)
29	Puskesmas Tulangan	1	ASI Eksklusif
30	Puskesmas Tarik	9	KEMILAU CINTA (Kelas Ibu Hamil Andalan Utama Cegah Kematian Ibu Dan Neonatal di Tarik)

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
			SMART IS BEAUTY (Sistem Rekam Medis Puskesmas)
			SIAP Tarik (Sistem Informasi Antrian Puskesmas)
			JEDA LAYAR (Jemput Dampingi Antar Ibu Bersalin)
			SWEGER (Swadaya Air Bersih Layak Konsumsi Bagi Rakyat)
			WARNA CINTA (Wahana Bermain Anak Cerdas di Tarik)
			CINTA HATI (Dacin Balita Sehat di Tarik)
			RUMAH CINTA (Ruang Menyusui Ramah Anak Cerminan Kasih Ibu di Tarik)
			HAI CINTA (Hallo Imunisasi Cerminan Peduli Balita di Tarik)
31	Puskesmas Waru	1	Gebyar geMpita MEngekspos Sisi Hati (GEMMESH)
32	Puskesmas Barengkrajan	1	Lentera Cinta Untuk Tunas Generasiku Melalui Paguyuban Penyelamatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (P2SPK)
33	Puskesmas Krian	4	Sehat Selamat
			Penanganan Penderita HIV AIDS
			Klinik Inisiasi ARV
			Komunitas Peduli Kesehatan Mental (KOPISEMEL)
34	Puskesmas Prambon	1	Kampung UBM (Upaya Berhenti Merokok)
35	Puskesmas Sedati	1	Gerakan Semanggi (Selamatkan Yang Anda Sayangi)
36	Puskesmas Taman	6	Senyum Balitaku
			ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Tuntas
			Posyandu Bina Warung Makan (POSNAWAR)
			Gerakan Masyarakat Kader Risti dan MKIA (GEMA KARISMA)
			Menabung dan Menyumbang di Bank Sampah
			Chat Box Keluhan Pelanggan
37	Puskesmas Buduran	1	Kelas Ibu Hamil Plus
38	Puskesmas Balongbendo	1	Gerakan Masyarakat Menyusui Sejak Dini (GEMA SUSI)
39	Puskesmas Sukodono	1	DELIA CERIA

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
40	Puskesmas Gedangan	1	Sabar Antri Kita dengarkan Tentang Informasi (SAKTI)
41	Puskesmas Wonoayu	1	DASI
42	Puskesmas Sidoarjo	1	Gerakan Jajan Enak Lan Sehat (GAK JELAS)
43	Puskesmas Ganting	1	Gerakan Polisi Sungai (GPS of STBM)
44	Puskesmas Sekardangan	1	Klas Ibu Menyusui Mom Loves Me (MLM)
45	Puskesmas Trosobo	1	PERMATA CINTA (PERiksa MATa Anda dan Cek Kondisi Kesehatan Anda)
	Jumlah Inovasi	89	

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentag Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019 serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Kabupaten Sidoarjo mulai Tahun 2016 - 2018 telah dievaluasi oleh kementerian PAN dan RB atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit** (Enablers) dan **Hasil** (Results). *Pengungkit* adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan *Hasil* adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi

pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Tujuan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 adalah 48,82 atau kategori "C", Tahun 2017 adalah 62,93 dengan kategori "B", Tahun 2018 adalah 72,08 dengan kategori "B", sedangkan Tahun 2019 adalah dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai			
			2015	2016	2017	2018
I	**Komponen Pengungkit**					
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,77	3,69	3,64	4.38
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,09	3,13	4.31
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,32	2,66	5,33	5.76
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,35	4,01	4,71	3.87
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,57	12,30	13,69	14.83
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,85	2,33	6	5.83
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,92	2,24	9,13	9.31
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,81	3,58	5,46	5.92
Total Komponen Pengungkit (A)		**60,00**	**29,29**	**32,90**	**51,08**	**54.2**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai			
			2015	2016	2017	2018
II	**Komponen Hasil**					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	-	8,78	10,04	11.21
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	-	5,10	-	4.26
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	-	5,57	3	6.14

4	Opini BPK	3,00	-	3,00	-	3
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	-	7,58	7,96	8.49
Total Komponen Hasil (B)		**40,00**	-	**30,03**	**21**	**33.1**
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		**100,00**	-	**62,93**	**72,08**	**87.3**

Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan

Untuk mengukur efektivitas jalannya pemerintahan salah satunya diukur dengan sampai sejauh mana kelengkapan peraturan perundangan sebagai kelengkapan hukum setiap aktivitas yang dilaksanakan. Kelengkapan hukum tersebut adalah keberadaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah produk Hukum yang dihasilkan selama tahun 2014 s.d 2019 adalah sebagai berikut :

Produk Hukum Yang Dihasilkan

No	ProdukHukum		Tahun				
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	2019
1	Peraturan Daerah	10	11	17	10	9	18
2	Peraturan Bupati	62	64	102	104	116	95
3	Keputusan Bupati	1.545	1.268	1.443	721	855	929

Sumber Data : Bagian Hukum Setda

Jumlah Permasalahan Hukum yang Diselesaikan

Untuk mengukur kepastian hukum dalam menjalankan Pemerintahan maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus tetap berusaha agar setiap permasalahan hukum/sengketa hukum yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat melalui jalur *Litigasi* (persidangan) maupun jalur *Non Litigasi* (di luar persidangan/ mediasi).

Jumlah sengketa hukum yang ditangani sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 25 sengketa hukum

Urusan Penunjang Sekretariat DPRD

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	Pemerintah yang bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.	Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan DPRD yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan.	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan penunjang Sekretariat DPRD secara umum dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Faslitasi Penganggaran dan Pengawasan
3. Program Persidangan dan Perundang-Undangan
4. Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada **Sekretariat DPRD** seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : ***"Meningkatnya Sinergritas Legislatif"***

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,inovatif dan transparan dan penyelesaian Produk Hukum yang Masuk Dalam Prolegda	Survey Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	72	70.05	97.29%	73	75,26	103.09%	74	82,481	111,46%
	dan Prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda	66,05	43,48	65,83%	68,02	43,56	64,04%	70	39,28	56,11%

Grafik IV.D.3

INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD

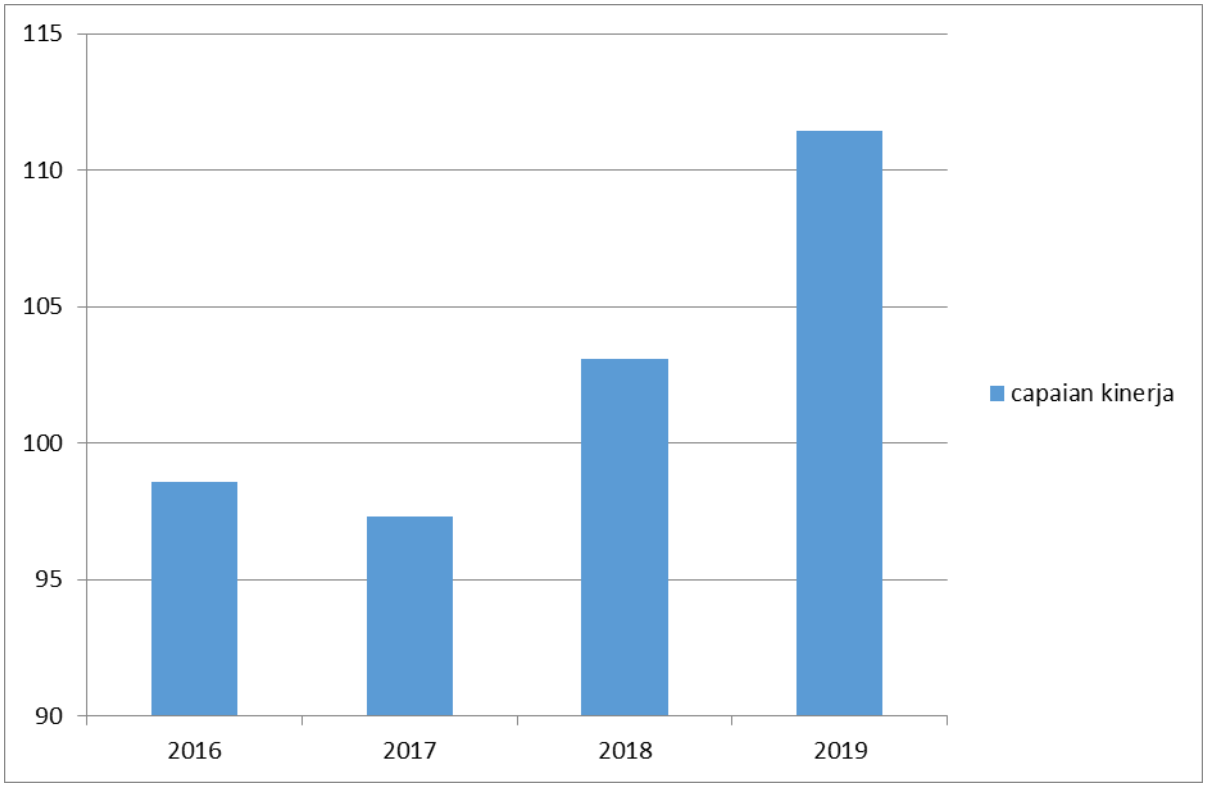

Grafik IV.D.4

PROSENTASE PENYELESAIAN PRODUK HUKUM YANG MASUK DALAM PROLEGDA

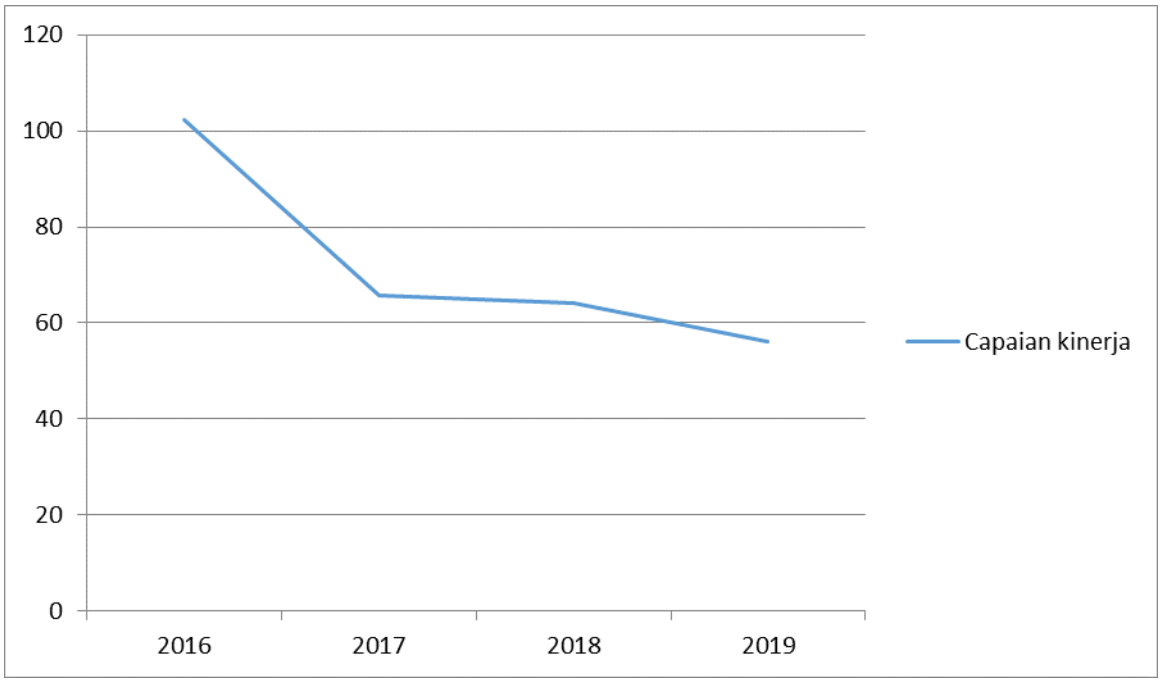

Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD untuk Indeks Nilai IKAD (Indikator Kepuasan Anggota DPRD) adalah 74. Realisasi Indeks nilai IKAD (Indeks Kepuasan Anggota DPRD) tahun 2019 tercapai sebesar 82,481, maka capaian Indeks nilai IKAD (Indikator Kepuasan Anggota DPRD) telah tercapai sebesar 111,46%.

Sedangkan untuk Target Prosentase Penyelesaian Produk Hukum Yang Masuk Dalam Prolegda Tahun 2019 adalah 70 dan terealisasi sebesar 39,28, maka capaian Prosentase Penyelesaian Produk Hukum Yang Masuk Dalam Prolegda tercapai sebesar 56,11%. Hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk penyelesaian produk hukum dan telah melaksanakan fungsi fasilitator dengan maksimal sedangkan kewenangan eksekutor tetap dipegang oleh Anggota DPRD.

b. Sasaran

Untuk mendukung target tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran dengan target kinerja sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Survey Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	72	70.05	73	75.26	74	82.481
	Prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam Prolegda	66.05	43.48	68.02	43.56	70	39.28

Grafik IV.D.5

INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD

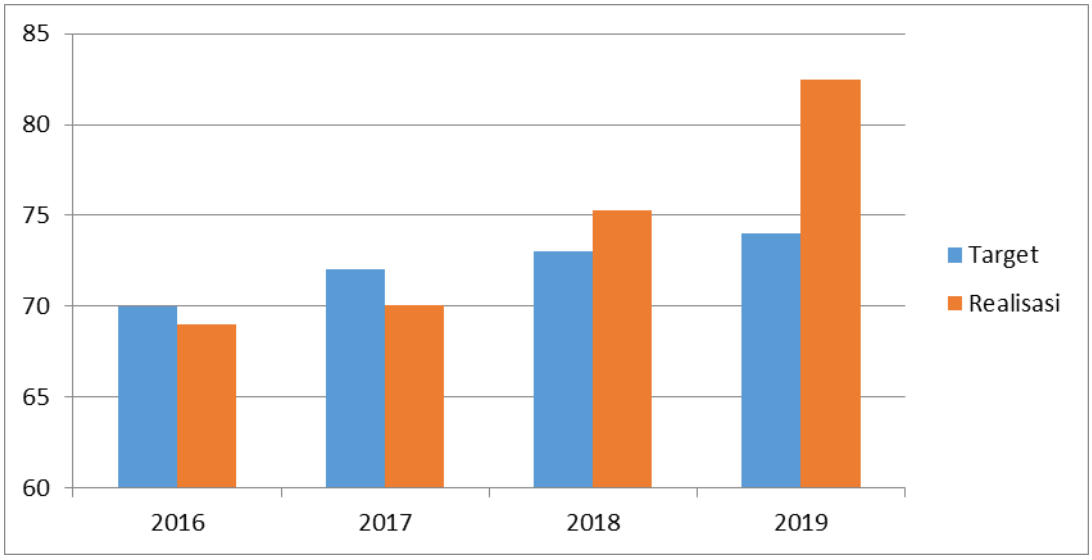

Grafik IV.D.6

PROSENTASE PENYELESAIAN PRODUK HUKUM YANG MASUK DALAM PROLEGDA

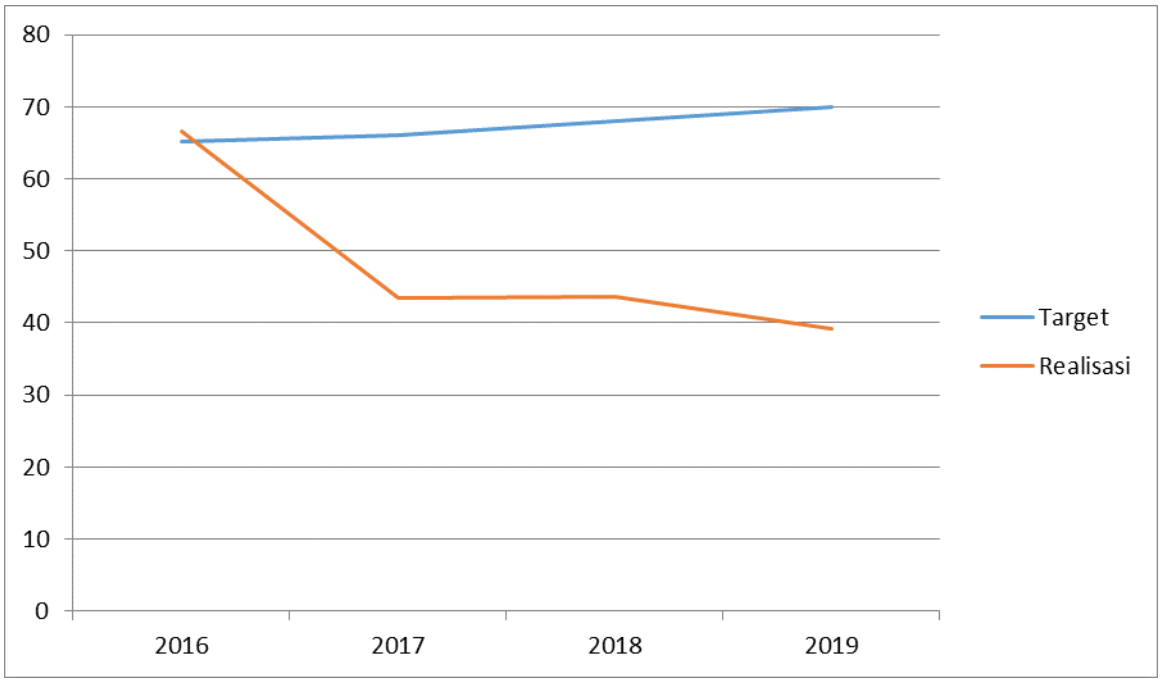

1) Nilai IKAD (Indeks Kepuasan Anggota DPRD)

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya. Permasalahan yang muncul dari Indeks Nilai IKAD (Indikator Kepuasan Anggota DPRD), yaitu:

1. Kurang luas dan kurang memadai ruang rapat/ruang komisi untuk Anggota DPRD.
2. Kurang nyaman karena ada beberapa ruang rapat yang kurang memadai baik sarana ataupun prasarana.
3. Kurang adanya tindak lanjut dalam penanganan kritik dan saran.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan Indeks Nilai IKAD (Indikator Kepuasan Anggota DPRD), antara lain:

1. Melakukan penataan ruang rapat secara maksimal guna menunjang kelancaran pelayanan.
2. Menambah sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
3. Melakukan pengecekan data sehingga dapat mempercepat penyelesaian masalah.

2) Penyelesaian Produk Hukum Yang Masuk Dalam Prolegda

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat prosentase penyelesaian produk hukum yang masuk dalam prolegda. Dalam Tahun 2019

Produk Hukum Yang Masuk Dalam Prolegda adalah 28 buah, dan sudah terselesaikan sebanyak 11 buah. Sedangkan target penyelesaian produk hukum yang masuk dalam prolegda yaitu 70% dan terealisasi sebesar 39.28%, sehingga capaian kinerja yang didapat sebesar 56.11%.

Sekretariat DPRD perlu terus berkomitmen dan memberikan pelayanan terbaik, sesuai dengan prosedur pelayanan serta dijalankan tepat waktu kepada para Anggota DPRD.

Untuk mencapai target indikator diatas, perlu dilakukan pencapaian juga terhadap indikator program, antara lain :

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Pelayanan Kesekretariatan** dengan anggaran sebesar Rp.10.822.995.463,52 dan terealisasi sebesar Rp. 8.810.027.849,40 atau 81.40 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	87 %	87 %	100 %

Permasalahan:

- Untuk Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa harus menyesuaikan kebutuhan dan keinginan para Pimpinan DPRD.

Solusi:

- Penyerapan anggaran dimaksimalkan sesuai alokasi anggaran per tribulan.

2. **Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan** dengan anggaran sebesar Rp.35.886.928.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.822.331.785,- atau 60,81 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
a. Prosentase penyelenggaraan kegiatan dialog dan jaring aspirasi masyarakat	a. 85 %	a. 90,83 %	a. 106,85 %
b. Prosentase penyelenggaraan kegiatan Banggar, KUA, KUPA, APBD dan PAPBD	b. 85 %	b. 100 %	b. 117,64 %
	c. 85 %	c. 100 %	c. 117,64 %

c. Prosentase penyelenggaraan kegiatan BK, Komisi, dan Monev			

Permasalahan:

- Belum ada jadwal kegiatan dialog antara DPRD dengan masyarakat di media (menyesuaikan permintaan Pimpinan DPRD).
- Jadwal kegiatan DPRD tiap bulannya berdasarkan hasil rapat Banmus di setiap awal bulan.

Solusi:

- Melaksanakan kegiatan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan Pimpinan DPRD.
- Kegiatan akan dilaksanakan dengan maksimal dan berpedoman pada hasil rapat Banmus DPRD.

3. **Fasilitasi Persidangan dan Perundang-Undangan** dengan anggaran sebesar Rp.19.159.647.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.200.031.457 atau 84, 55 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
a. Prosentase Perda dan produk hukum lainnya yang dibahas, disusun dan ditetapkan oleh DPRD	a. 85 %	a. 100 %	a. 117,64 %
b. Prosentase persidangan dan rapat-rapat DPRD yang difasilitasi	b. 85 %	b. 100 %	b. 117,64 %

Permasalahan:

- Pelaksanaan terkadang waktunya mendesak dan untuk mencapai kuorum cukup sulit.

Solusi:

- Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan rapat dan hasil rapat Banmus.

4. **Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 7.742.439.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.138.759.500 atau 27.62 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
a. Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti Peningkatan Kapasitas DPRD b. Meningkatnya kesehatan Anggota DPRD	a. 85 % b. 50 orang	a. 85 % b. 46 orang	a. 100 % b. 92 %

Permasalahan:

- Tidak semua Anggota DPRD mau mengikuti kegiatan general check up kesehatan (sesuai dengan kebutuhan).
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD diserap sesuai dengan undangan yang masuk (menyesuaikan kebutuhan).
-

Solusi:

- Kegiatan dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan alokasi anggaran per tribulannya.
- Meningkatkan koordinasi dengan para pendamping fraksi untuk kebutuhan/kegiatan/undangan bimtek Anggota DPRD.

Urusan Penunjang Inspektorat

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

OPD Penyelenggara Urusan

Urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program kesekretariatan
2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pada tahun 2019 seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : ***"Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal"***

d. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal	Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	n/a	n/a	n/a	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
	Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	B	B	B	BB	BB	A	A	BB
	Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian maturitas SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari level berkembang menjadi terdefinisi

e. Sasaran

Untuk mendukung target tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran dengan target kinerja sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	44,68%	43,75% (21/48*100)	55.31%	91,48% (43/47*100)	63,82%	100% (47/47)	100%	100% (48/48)
	2.Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	0 %	21,26% (37/174)	2,12%	8,51%	2,12%	0%	2,04%	2,04% (1 OPD)
	3. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	n/a	n/a	n/a	n/a	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinis (Skor 3,09)
	4.Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	0,31%	4,96% (16/322)	0,31%	3,76%	0,62%	1,24% (4/322)	0%	0%

	5.Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan ekternal yang ditindaklanjuti	98,20%	99,21% (527/531)	98,50%	98,66%	99,00%	94,24% (589/625)	94,24%	99,88% (844/845)
	6.Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	99,42%	98,20% (1810/1843)	99,50%	71,09%	99,65%	72,18% (558/773)	72,18%	89,82% (600/668)
	7.Persentase pengaduan/kasus yang diselesaikan	100%	100% (33/33)	100%	100%	100%	100% (45 kasus)	100%	91,18% (31/34)

a. Jumlah temuan/nilai pemeriksaan BPK dan tindak lanjutnya.

Perkembangan rekomendasi BPK pada angka baseline tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2016		
Rekomendasi BPK s/d Thn 2016	693	99,85%
Rekomendasi BPK s/d Thn 2016 yang telah ditindak lanjuti	689	
Yang belum ditindak lanjuti	4	
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2017		
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2017	746	99,86%
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2017 yang telah ditindak lanjuti	744	
Yang belum ditindak lanjuti	2	
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2018		
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2018	625	94,24%
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2018 yang telah ditindak lanjuti	589	
Yang belum ditindak lanjuti	36	
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2019		
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2019	845	99,88%
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2019 yang telah ditindak lanjuti	844	
Yang belum ditindak lanjuti	1	

Sumber : laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren tindak lanjut atas rekomendasi BPK dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,62% dibanding tahun 2017, hal ini disebabkan 36 rekomendasi masih dalam proses verifikasi oleh BPK dan sudah terselesaikan pada tahun 2019.

b). Jumlah rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan tindak lanjutnya.

Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melakukan tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan. Berikut ini kami sajikan data perkembangan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dari angka baseline tahun 2016, sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH 2016			
1	Rekomendasi Inspektorat Tahun 2016	860	100%
2	Rekomendasi Inspektorat Tahun 2016 yang telah ditindak lanjuti	860	
3	Yang belum ditindak lanjuti	0	
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH 2017			
1	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2017	1796	79,84%
2	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2017 yang telah ditindak lanjuti	1434	
3	Yang belum ditindak lanjuti	362	
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH 2018			
1	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2018	773	72,18%
2	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2018 yang telah ditindak lanjuti	558	
3	Yang belum ditindak lanjuti	215	
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH 2019			
1	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2019	668	89,82%
2	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2019 yang telah ditindak lanjuti	600	
3	Yang belum ditindak lanjuti	68	

Sumber : Ikhtisar laporan hasil pengawasan Inspektorat daerah kabupaten Sidoarjo semester 2 tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 menunjukan tren positif terhadap tindak lanjut temuan inspektorat daerah yaitu mengalami kenaikan sebesar 17,64% dibanding tahun 2018. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 20,16% dan pada tahun 2018 sebesar 7,66% hal ini disebabkan obyek pemeriksaan (terutama desa) kurang respon atas tindak lanjut yang menjadi kewajibannya meskipun sudah diberikan peringatan dan pendekatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja kepengawasan terutama dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah masih perlu meningkatkan koordinasi dengan BPK dan obyek pemeriksaan.

c). Maturitas SPIP

Tingkat Kematangan (maturity level) SPIP menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagaimana dalam target RPJMN bahwa di tahun 2019 tingkat kematangan harus sudah menunjukkan level 3 (terdefinisi), berdasarkan laporan quality assurance (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPKP bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,09. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan dan sudah memenuhi target sebagaimana diamanatkan pada RPJMN.

d). Kapabilitas APIP

Berdasarkan laporan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPKP provinsi Jawa Tumur bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo berada pada "*level 2 plus*" (menunggu penetapan dari BPK Pusat), ini menunjukan ada peningkatan nilai hasil penjaminan yang sebelumnya berada pada posisi level 2.

Upaya untuk meningkatkan kematangan dalam pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menuju level 3 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan PKPT berbasis risiko
2. Peningkatan kapasitas APIP melalui bimtek, sosialisasi, Diklat, dll
3. Penguatan kerja sama dengan APH
4. Optimalisasi Larwasda dan rakorwas

Capaian kinerja ini didukung program dan kegiatan sebagai berikut :

c. Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Pada tahun 2019 anggaran biaya program ini sebesar Rp. 1.505.991.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.089.571.420,- dengan persentase serapan sebesar 72,35%.

Adapun indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	100% (48/48)	100%
Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	2,04%	2,04% (1 OPD)	100%

Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi (Skor 3,09)	100%
Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	0,62%	0%	0%
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan ekternal yang ditindaklanjuti	94,24%	99,88% (844/845)	105,98%
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	72,18%	89,82% (600/668)	124,44%
Persentase pengaduan/kasus yang diselesaikan	100%	91,89% (34/37)	91,89%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 7 indikator program terdapat 6 indikator program rata-rata capaian kinerja 103% dan dapat dikatakan berhasil, namun ada 1 indikator (Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara) yang tingkat capaian kinerja 0%, hal ini disebabkan tingkat pemahaman dan konsisten kepala desa dan perangkatnya dalam penatausahaan keuangan desa masih kurang. Adapun usaha perbaikan yang akan kami lakukan pada tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan intensitas monitoring dan pengawasan terhadap penatausahaan laporan keuangan pemerintah desa
2. Melakukan reviu indikator kinerja utama (IKU) terutama pada indikator *"Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara"* dan indikator *"Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara"* dengan pertimbangan menimbulkan benturan kepentingan

Unsur Penunjang Perencanaan

a. Tujuan

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Bappeda Kab. Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALSASI	%
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	3,89	3,89	100	5,34	5,34	100

Keterangan :

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021, maka diperlukan pula peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan capaian Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Maka pada Tahun 2018 Bappeda Kabupaten Sidoarjo mengikuti kompetisi dalam rangka Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), yaitu kompetisi yang diadakan oleh BAPPENAS dalam rangka mengukur tingkat konsistensi dokumen perencanaan, inovasi dan capaian pembangunan daerah. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang sudah berhasil menyusun perencanaan dan berbagai inovasi serta terobosan dalam perencanaan pembangunan.

Tahapan penilaian dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ini terdiri dari Penilaian dokumen perencanaan; Verifikasi lapangan dan wawancara serta Presentasi.

Sesuai Pedoman Umum Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dari Bappeprov Jatim tahun 2019 bahwa nilai PPD dihitung melalui berbagai tahap yaitu sebagai berikut :

1. Penilaian tahap I adalah Penilaian Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD Kabupaten dan Kota oleh Tim Provinsi (Bobot 40%) dengan rincian :
   a. Pencapaian (30%)
   b. Keterkaitan (15%)
   c. Konsistensi (15%)
   d. Kelengkapan dan kedalaman (20%)
   e. Keterukuran (5%)
   f. Inovasi Perencanaan (15%)
2. Penilaian Tahap II adalah tahap Presentasi dan Wawancara oleh Tim Provinsi
   (Bobot 60%) dengan rincian :
   a. Pencapaian (35%)
   b. Penilaian terhadap dokumen RKPD (Bobot 15%)
   c. Proses Penyusunan (Bobot 15%)
   d. Penilaian Presentasi (Bobot 35%)

**) Penetapan dan Nominasi Kabupaten & Kota Terbaik Mewakili Provinsi*

3. Penilaian Tahap III adalah tahap Penilaian Dokumen dan Pencapaian RKPD Kabupaten dan Kota oleh Tim Pusat (Bobot 40%)
4. Penilaian Tahap IV adalah tahap Presentasi dan Wawancara oleh Tim Pusat (Bobot 60%)

**) Penetapan Kabupaten dan Kota Terbaik se-Nasional*

Sesuai surat Jawaban dari Bappeda Provinsi No. 050/658/201.5/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Penyampaian Nilai PPD 2019 Kabupaten Sidoarjo bahwa nilai PPD untuk Kabupaten Sidoarjo pada tahap I adalah 5,34 (lima koma tiga puluh empat).

Untuk mendukung tujuan prioritas RPJMD maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

b. Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	92	92,08	100.09	95	96,4	101.47	97	100	103.09
Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	55	64,07	116.49	60	60,87	101.45	65	61	93.85
Persentase Program Pembangunan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian hasil (*outcame*) > 76 %	82	95,83	116.87	85	93,72	110.26	87	97.92	112.55
Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	40	59,51	148.77	45	64,45	143.22	50	72.54	145.08

*) Terdapat Perubahan Indikator Kinerja pada tahun 2017 dikarenakan adanya perubahan Renstra. Hal ini menyebabkan Indikator Kinerja pada tahun 2016 berbeda dengan Indikator Kinerja tahun 2017 s/d tahun 2019.

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak dijumpai permasalahan yang signifikan yang menghambat/menjadi kendala capaian sasaran, namun demikian terdapat hal yang kami ungkapkan

1. Definisi Operasional dokumen Perencanaan PD yang berkualitas baik sesuai Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :
   a. Dokumen Renja disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu
   b. Berisikan Program dan Kegiatan yang memuat Tupoksi SKPD
   c. Memuat indikator kinerja yang terukur, lokasi program, tahun pelaksanaan dan sumber dana yang diperlukan
   d. Terdapat keselarasan antara Renstra dan RPJMD
   e. Terdapat keselarasan antara Renja, RKPD dan KUA-PPAS serta RAPBDs

   Saat ini seluruh dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 telah menunjukkan keselarasan 100%. Keselaran dokumen Perencanaan dan Penganggaran ini dikarenakan

telah terintegrasinya aplikasi e-*Planning* dan e-*Budgeting* dalam satu sistem aplikasi RDS.

2. Usulan Musrenbang 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun Anggaran 2019 berjumlah 1.858 usulan sedangkan yang dapat diakomordir dalam RKPD adalah sebanyak 1.131 usulan atau sebesar 93.85% dari total usulan yang ada sesuai rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Usulan Kegiatan		
		Diusulkan	Diterima	Ditolak
1	KECAMATAN BALONGBENDO	100	63	37
2	KECAMATAN BUDURAN	31	23	8
3	KECAMATAN CANDI	100	60	40
4	KECAMATAN GEDANGAN	7	6	1
5	KECAMATAN JABON	189	121	68
6	KECAMATAN KREMBUNG	87	59	28
7	KECAMATAN KRIAN	193	109	84
8	KECAMATAN PORONG	66	42	24
9	KECAMATAN PRAMBON	93	57	36
10	KECAMATAN SEDATI	78	44	34
11	KECAMATAN SIDOARJO	173	84	89
12	KECAMATAN SUKODONO	67	50	17
13	KECAMATAN TAMAN	131	89	42
14	KECAMATAN TANGGULANGIN	114	73	41
15	KECAMATAN TARIK	99	67	32
16	KECAMATAN TULANGAN	109	57	52
17	KECAMATAN WARU	138	75	63
18	KECAMATAN WONOAYU	83	52	31
TOTAL		**1.858**	**1.131**	**727**

Belum dapat diakomordirnya seluruh usulan dari 18 kecamatan dikarenakan masih terdapatnya usulan Musrenbang RKPD yang diusulkan bukan merupakan kewenangan Kabupaten, tetapi kewenangan desa, provinsi maupun pusat serta masih terdapatnya usulan yang tidak berbasis kebutuhan isu-isu starategis wilayah setempat.

3. Aplikasi e-Monev dalam sistem RDS masih baru dibangun oleh Tim pada akhir Tahun 2019, sehingga data sementara yang tersedia saat ini adalah Capaian realisasi sampai dengan TW 3 tahun 2019 yang telah disampaikan oleh Perangkat Daerah dan telah dilakukan evaluasi secara manual oleh Bappeda.

4. Dokumen RTRW untuk Pola dan Struktur ruang sudah menitikberatkan Kabupaten Sidoarjo pada pengembangan Perdagangan dan Jasa pelayanan Pemerintahan dan swasta, tetapi setalah dilihat kembali pada implementasi dalam dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, belum terdapat program yang mendukung implementasi pengembangan Jasa secara langsung.

Solusi :

1. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada Kecamatan dan Desa pada saat Musrenbang Kecamatan tentang batasan usulan hasil Musrenbang Desa/kelurahan dan Kecamatan yang bisa diusulkan dalam Musrenbang untuk di akomodir dalam RKPD Kabupaten.

2. Optimalisasi aplikasi e-Monev sedang dilakukan dan diharapkan dapat selesai pada akhir bulan Februari 2020 untuk dapat digunakan pada acara Expose Monev 2019 yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada awal Maret 2020.

3. Melakukan sinkronisasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan daerah (RKPD Kabupaten Sidoarjo) dengan dokumen penataan ruang (RTRW dan RDTRK) pada saat pelaksanaan Verifikasi Renja Perangkat Daerah.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dokumen penelitian/kajian dan data

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Persentase dokumen Penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	60	70	116.67	65	73	112.31	70	-	-

Keterangan :

Untuk data Realisasi Penelitian/Kajian yang telah ditindaklanjuti menjadi kebijakan Pembangunan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Penelitian/Kajian	Jumlah Penelitian/Kajian yang ditindaklanjuti		% Penelitian/Kajian yang ditindaklanjuti sebagai Kebijakan
			Non Kebijakan	Kebijakan	
1	2017	37	9	26	70.27%
2	2018	37	8	27	72.97%
3	2019	44	11	33	75.00%

Permasalahan :

1. Data terkait Penelitian/kajian di Tahun 2017 yang menjadi kebijakan pembangunan daerah di Tahun 2019 belum tersedia karena Perangkat Daerah yang memiliki Judul Kajian belum mengajukan dokumen KAK kajian, untuk dibahas oleh Tim Rekomendasi yang akan dibandingkan dengan Kebijakan Pembangunan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Solusi :

1. Meminta Perangkat Daerah yang memiliki kajian yang belum ditindaklanjuti untuk segera mengajukan dokumen KAK kajiannya untuk dibahas oleh Tim Rekomendasi sesegera mungkin sesuai Surat dari Bappeda No. 050/176/438.6.1/2020 tanggal 07 Februari 2020 perihal Pengisian Form Monev Kajian Tahun 2017.

   Dalam surat tersebut, terlampir rekap 20 (dua puluh) Judul Kajian dari 5 (lima) Perangkat Daerah yang belum mengajukan KAK kajiannya di Tahun 2017 sehingga tim rekomendasi belum dapat menindaklanjuti untuk dibandingkan lebih lanjut dengan Kebijakan Pembangunan Daerah yang telah disusun.

   Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

c. Program dan Kegiatan

1. **Program perencanaan pembangunan daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 3.324.850.080,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.074.512.650,- atau 62.39%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	PERSENTASE (%)
Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD	70%	61%	87.14%
Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	90%	100%	111.11%
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	85%	100%	117.65%

Permasalahan :

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang menghambat proses capaian kinerja namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk kelancaran program kegiatan mendatang, diantaranya :

a. Masih terdapatnya usulan Musrenbang RKPD yang diusulkan bukan merupakan kewenangan Kabupaten, tetapi kewenangan desa / provinsi / pusat serta masih terdapatnya usulan yang tidak berbasis kebutuhan isu-isu starategis wilayah setempat, sehingga pembiayaannya tidak bisa diusulkan melalui APBD Kabupaten.
b. Dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi kegiatan telah tercapai melebihi target yang ditetapkan namun realisasi penyerapan anggaran hanya sebesar 62,39%, karena telah terintegrasinya aplikasi e-*Planning* dan e-*Budgeting* dalam satu sistem RDS (*Regional Development System*) sehingga terdapat efisiensi anggaran dan efisiensi waktu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang konsisten.

Solusi :

a. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada Kecamatan dan Desa pada saat Musrenbang Kecamatan tentang batasan usulan hasil Musrenbang Desa/kelurahan dan Kecamatan yang bisa diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten untuk di akomodir dalam RKPD.

b. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (PD dan Kecamatan) sehingga tercipta keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD dan Renja) dan penganggaran (RKA/DPA PD) dengan realisasinya.

Keterangan :

a. Realisasi kinerja seluruh kegiatan telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, masih terdapat satu kegiatan yang belum dapat terealisasi yaitu kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

   Hal ini disebabkan karena Aplikasi e-Monev dalam sistem RDS masih baru dibangun oleh Tim pada akhir Tahun 2019, sehingga data sementara yang tersedia saat ini adalah Capaian realisasi sampai dengan TW 3 tahun 2019 yang telah disampaikan oleh Perangkat Daerah dan telah dilakukan evaluasi secara manual oleh Bappeda.

b. Upaya yang dilakukan untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan adalah dengan Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (PD dan Kecamatan) sehingga tercipta keselarasan dan konsistensi antara seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran.

Realisasi anggaran untuk kegiatan penyusunan dokumen Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah masih dalam kategori rendah dengan capaian dibawah 70%.

Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran disebabkan adanya digitalisasi dokumen melalui penggunaan system RDS. Sejak terbentuknya sistem RDS yang mengintegrasikan aplikasi e-*Planning* dan e-*Budgeting* serta e-*Monev* maka anggaran serta waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen monev dapat efisien dan efektif.

2. **Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.585.713.060,- dan terealisasi sebesar Rp.1.544.596.010,- atau 97.40%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	PERSENTASE (%)
Prosentase capaian kinerja program PD bidang Penmas thd perencanaan dengan capaian ≥ 76 %	85%	85%	100%
Prosentase dokumen perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang berkualitas baik	85%	85%	100%
Prosentase Hasil Rapat Koordinasi bidang Penmas yang ditindaklanjuti	85%	85%	100%

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang menghambat proses capaian kinerja namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk kelancaran program kegiatan mendatang, yaitu banyaknya Jumlah Perangkat Daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan masyarakat sehingga dibutuhkan adanya komunikasi yang intensif.

Solusi:

a. Menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya.
b. Mengadakan rapat koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.

Keterangan :

Seluruh kegiatan dalam program perencanaan bidang Pemerintahan dan Masyarakat telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk dapat merealisasikan target kinerja yang ada yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.

Selain itu, dengan selalu menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga

seluruh kegiatan bidang menjadi lebih terarah dan efektif sesuai capaian yang ingin direalisasikan.

a. Realisasi anggaran dalam program Perencanaan bidang Pemerintah dan Masyarakat telah mencapai lebih dari 90%. Penyerapan anggaran kegiatan termasuk tinggi, hal ini karena adanya koordinasi yang baik sehingga seluruh anggaran kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun dapat direalisasikan menjadi keluaran sesuai target prioritas bidang.
b. Upaya yang dilakukan untuk dapat menyerap anggaran kegiatan secara maksimal dan efektif adalah dengan terlebih dahulu menyusun kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh masing-masing sub bidang sehingga nantinya anggaran yang tersedia dapat dikelola sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3. **Program Perencanaan Bidang Ekonomi** dengan anggaran sebesar Rp. 1.238.337.730,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.194.695.825,- atau 96.48%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	PERSENTASE (%)
Persentase Capaian Kinerja Program PD bidang Ekonomi terhadap perencanaan dengan capaian ≥ 76%	90%	96.15%	106.8%
Persentase Dokumen Perencanaan PD dibawah bidang ekonomi berkualitas baik	97%	100%	103.1%
Persentase Hasil Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti sebagai bahan Kebijakan	85%	100%	117.6%

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang menghambat proses capaian kinerja namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk kelancaran program kegiatan mendatang, yaitu padatnya Kegiatan di Bidang Ekonomi sehingga beberapa sub kegiatan berjalan tidak sesuai waktu yang ditetapkan.

Solusi:

Menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga seluruh kegiatan bidang menjadi lebih terarah dan efektif sesuai capaian yang ingin direalisasikan.

Keterangan :

Seluruh kegiatan dalam program perencanaan bidang Ekonomi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk dapat merealisasikan target kinerja yang ada yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Bidang Ekonomi. Selain itu, dengan selalu menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga seluruh kegiatan bidang menjadi lebih terarah dan efektif sesuai capaian yang ingin direalisasikan.

a. Realisasi anggaran dalam program Perencanaan bidang Ekonomi telah mencapai lebih dari 90%. Penyerapan anggaran kegiatan termasuk tinggi, hal ini karena adanya koordinasi yang baik sehingga seluruh anggaran kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun dapat direalisasikan menjadi keluaran sesuai target prioritas bidang.
b. Upaya yang dilakukan untuk dapat menyerap anggaran kegiatan secara maksimal dan efektif adalah dengan terlebih dahulu menyusun kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh masing-masing sub bidang sehingga nantinya anggaran yang tersedia dapat dikelola sesuai jadwal yang telah ditentukan.

4. **Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah** dengan anggaran sebesar Rp. 3.480.416.880,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.373.971.540,- atau 96,94%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	PERSENTASE (%)
Prosentase Hasil Rapat Koordinasi bidang PD Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah yang ditindak lanjuti	80%	80%	100%
Prosentase dokumen perencanaan RKPD yang sesuai dengan arahan dalam dokumen tata ruang	65%	65%	100%

Prosentase dokumen perencanaan Renja PD Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah berkualitas baik	85%	85%	100%
Prosentase capaian kinerja program PD Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah terhadap perencanaan dengan capaian ≥ 76 %	90%	90%	100%

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang menghambat proses capaian kinerja namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk kelancaran program kegiatan mendatang, yaitu terlaksananya proses untuk pengadaan langsung dimulai lebih lambat dari target sehingga waktu yang diperlukan untuk pekerjaan lebih pendek.

Solusi:

a. Mengoptimalkan SDM dan tenaga ahli sesuai waktu yang tersedia.
b. Mempersiapkan sedini mungkin penyusunan rencana kerja dan anggaran secara komprehensif sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Keterangan :

a. Seluruh kegiatan dalam program perencanaan bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
b. Upaya yang dilakukan untuk dapat merealisasikan target kinerja yang ada yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi sub bidang yang mengampu masing-masing Perangkat Daerah di Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah.
   Selain itu, dengan selalu menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga seluruh kegiatan bidang menjadi lebih terarah dan efektif sesuai capaian yang ingin direalisasikan.

a. Realisasi anggaran dalam program Perencanaan bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagian besar telah mencapai lebih dari 90%. Penyerapan anggaran kegiatan termasuk tinggi, hal ini karena adanya koordinasi yang baik sehingga seluruh anggaran

kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun dapat direalisasikan menjadi keluaran sesuai target prioritas bidang.

b. Upaya yang dilakukan untuk dapat menyerap anggaran kegiatan secara maksimal dan efektif adalah dengan terlebih dahulu menyusun kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh masing-masing sub bidang sehingga nantinya anggaran yang tersedia dapat dikelola sesuai jadwal yang telah ditentukan.

5. **Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.425.384.625,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.328.803.700,- atau 93,22%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	PERSENTASE (%)
Persentase Rekomendasi hasil penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti	100%	94.80%	94.80%
Persentase Ketersediaan elemen data yang actual dan valid sebagai masukan perencanaan pembangunan daerah	88%	87.83%	99.81%

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan yang menghambat proses capaian kinerja namun demikian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk kelancaran berjalannya program kegiatan mendatang, yaitu sering terjadinya keterlambatan data KAK yang diajukan oleh PD yang mempunyai kajian untuk dibahas oleh Tim Rekomendasi

Solusi:

Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan PD terkait yang memiliki kajian yang dapat menjadi untuk dapat segera dibahas oleh tim Rekomendasi.

Keterangan :

a. Seluruh kegiatan dalam program perencanaan bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
b. Upaya yang dilakukan untuk dapat merealisasikan target kinerja yang ada yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah.
   Selain itu, dengan selalu menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga seluruh kegiatan bidang menjadi lebih terarah dan efektif sesuai capaian yang ingin direalisasikan.

a. Realisasi anggaran dalam program Perencanaan bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah sebagian besar telah mencapai lebih dari 90%. Penyerapan anggaran kegiatan termasuk tinggi, hal ini karena adanya koordinasi yang baik sehingga seluruh anggaran kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun dapat direalisasikan menjadi keluaran sesuai target prioritas bidang.
b. Upaya yang dilakukan untuk dapat menyerap anggaran kegiatan secara maksimal dan efektif adalah dengan terlebih dahulu menyusun kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh masing-masing sub bidang sehingga nantinya anggaran yang tersedia dapat dikelola sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Unsur Penunjang Keuangan

Urusan Keuangan secara umum sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

OPD Penyelenggara Urusan

Unsur penunjang keuangan secara umum dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pelayanan Pajak Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran BPKAD

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra BPKAD	Sasaran Renstra BPKAD
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Keuangan yang berkualitas	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk unsur penunjang keuangan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 meliputi :

1. Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Program Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran unsur penunjang, yaitu Sasaran RPJMD, Tujuan Renstra dan Sasaran Renstra SKPD salah satunya “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Sesuai Ketentuan, transparan dan akuntabel”, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Atas Target dan Realisasi Tujuan Renstra SKPD

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Keuangan yang berkualitas	Opini atas Audit BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	Dalam Proses Penilaian

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph penjelasan. Sedangkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 opini BPK atas pemeriksaan LKPD naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni tanpa paragraph penjelasan, dan untuk Tahun 2019 masih dalam proses penilaian.

b) Atas Target dan Capaian Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	93,75%	84,9%	84,9%	93,75%	85,11%	91%	100%	85,42%	85,42%
3. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	99,72%	99,805%	100%	99,73%	99,812%	100%	99,74%	99,46%	99,72%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Indikator Kinerja 1**: **Kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD**, dimaksudkan RKA yang penyusunannya sudah sesuai dengan pedoman penyusunan APBD, RKBU, SSH, dan kode rekening. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator tersebut mulai dari awal penyusunan Renstra di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 adalah 100% dan terealisasi 100%.

2) **Indikator Kinerja 2 : Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran** berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, dimaksudkan bahwa OPD yang melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan pagu dan waktu yang telah ditetapkan (penyerapan ≥80%).

   Pada Tahun 2018 untuk indikator tersebut ditargetkan 93.75% dan terealisasi 85.11% dengan capaian sebesar 91%, sedangkan pada Tahun 2019 dengan target 100% dan terealisasi 85.42% atau tercapai sebesar 85.42%. Adapun capaian Tahun 2019 lebih rendah 5.58% hal ini dikarenakan terdapat kendala/permasalahan antara lain :

Permasalahan:

1) Kurangnya pemahaman OPD terkait tujuan alokasi/pembagian anggaran kas tiap triwulan, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan tidak selaras dengan alokasi anggaran yang direncanakan;
2) Proses pengadaan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; yang mengalami gagal lelang sehingga tertunda penyerapannya;
3) Pembangunan frontage road yang masih terkendala pembebasan lahan.

Solusi:

1) Rekonsiliasi dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran yang dilaksanakan tiap triwulan;
2) Penerbitan surat edaran nomor 900/8627/438.6.2/2019 tanggal 10 September 2019 perihal percepatan penyerapan anggaran dan langkah – langkah penyerapan pada akhir tahun.

Indikator Kinerja 3 : Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal, dimaksudkan adalah aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum.

Pada Tahun 2018 indikator tersebut ditargetkan 99.73% dan terealisasi 99.81% dengan capaian 100%, sedangkan pada Tahun 2019 ditargetkan 99.74% dan terealisasi 99.46% atau tercapai 99,72%. Realisasi dan capaian Tahun 2019 lebih rendah dibandingkan Tahun 2018, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan/kendala antara lain:

Permasalahan:

Pada dasarnya tidak dijumpai permasalahan yang signifikan, hal yang belum optimal dan sudah ditindak lanjuti pada tahun berjalan adalah sbb:

1) Pengguna barang kurang memahami kewajiban dalam pengamanan hukum dan administrasi aset yang berada dalam penguasaannya;
2) Kurang lengkapnya dokumen persyaratan dari OPD untuk pengurusan sertifikat.

Solusi:

1) Sosialisasi dan atau Bimbingan Teknis kepada pengguna barang terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pengamanan aset (BMD);
2) Rekonsiliasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
3) Koordinasi dengan OPD terkait kelengkapan persyaratan untuk pengurusan sertifikat.

Secara umum seluruh OPD pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan tata kelola BMD secara tertib melalui aplikasi yang telah dibangun dan secara bertahap dikembangkan supaya dapat terintegrasi dengan sistem akuntansinya.

c. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung atas target kinerja tujuan dan sasaran tersebut diatas dilakukan melalui Program/Kegiatan sebagai berikut:

1) **Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 3.916.682.748,- dan terealisasi sebesar Rp.3.224.951.931,- atau 82,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
a. Persentase OPD yg tepat dalam menentukan kode rekening pada RKA OPD	100%	100%	100%

b. Persentase dokumen pengganggaran yang telah dipublikasikan melalui media publik	100%	100%	100%
c. Ketepatan waktu dalam penyusunan anggaran (APBD & PAPBD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%

Permasalahan dan Solusi:

Tidak dijumpai permasalahan yang signifikan, kesalahan penetapan atau pemilihan kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan telah dilakukan koreksi oleh BPKAD pada saat verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD atau pada saat penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

2) **Program Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.691.775.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.546.555.283,- atau 91,42 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
a. Persentase OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan berbasis SAP (Akrual)	100%	100%	100%
b. Persentase OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan	100%	85,42%	85,42%
c. Ketepatan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%

Permasalahan:

1) Kurangnya pemahaman OPD terkait tujuan alokasi/pembagian anggaran kas tiap triwulan, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan tidak selaras dengan alokasi anggaran yang direncanakan;
2) Proses pengadaan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; serta Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan; yang mengalami gagal lelang sehingga tertunda penyerapannya;

3) Pembangunan frontage road yang masih terkendala pembebasan lahan.

Solusi:

1) Rekonsiliasi dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran yang dilaksanakan tiap triwulan;
2) Penerbitan surat edaran nomor 900/8627/438.6.2/2019 tanggal 10 September 2019 perihal percepatan penyerapan anggaran dan langkah – langkah penyerapan pada akhir tahun.

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.691.709.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.601.293.970,- atau 59,49 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
a. Persentase aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam Laporan BMD (aset tetap tanah yang sudah bersertifikat)	29,06%	17,22%	59,25%
b. Persentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	100%	100%	100%
c. Persentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian Laporan BMD	100%	100%	100%

Realisasi penyerapan anggaran tersebut diatas berdampak pada tidak tercapainya indikator kinerja. Adapun yang dimaksud dengan aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam Laporan BMD adalah jumlah aset tetap berupa tanah yang telah bersertifikat.

Permasalahan Dan Solusi:

1. Kurang komitmen OPD dalam pengamanan aset;
2. Kurang lengkapnya dokumen pendukung pengurusan sertifikat yang disampaikan OPD.

Solusi:

1. Membentuk Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Aset;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Penelusuran dokumen guna tertib administrasi.

B. Badan Pelayanan Pajak Daerah

Urusan Keuangan secara umum sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kabupaten Sidoarjo, urusan penunjang Keuangan selain dilaksanakan oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) juga dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran BPPD

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra BPPD	Sasaran Renstra BPPD
Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Terwujudnya peningkatan PAD.	Meningkatkanya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk unsur penunjang keuangan pada Badan Pelayanan pajak Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1) Program Pelayanan Kesekretariatan
2) Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah
3) Program Penetapan Pajak Daerah
4) Program Pengendalian Pajak Daerah

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran unsur penunjang, yaitu Sasaran RPJMD, Tujuan Renstra dan Sasaran Renstra SKPD.

b. Atas Target dan Realisasi Tujuan Renstra SKPD

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Badan Pelayanan Pajak Daerah Pengelola yang telah dicapai berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya Peningkatan PAD	Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah	56 : 100	55,37 :100	98,88 %	57 : 100	56,56 : 100	99,23 %	58 : 100	60,78 : 100	104,79 %

Data target dan realisasi Pajak Daerah dan PAD sebagai berikut:

TAHUN	Pendapatan Asli Daerah		Hasil Pajak Daerah	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2016	1,203,799,439,005.00	1,335,283,958,792.70	686,820,000,000.00	735,767,679,182.50
2017	1,557,772,194,420.59	1,671,485,430,546.00	831,150,000,000.00	925,569,237,852.49
2018	1,493,647,141,178.83	1,700,642,002,415.34	904,540,000,000.00	961,840,717,556.86
2019	1,708,311,077,856.00	1,698,258,028,058.89	1,009,946,880,000.00	1,032,160,117,012.09

c. Atas Target dan Capaian Sasaran

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja tahunan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatkanya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima.

Dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	BASE LINE (TAHUN 2016)	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1) Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah	68	75	76,94	102.59%	76	88,21	116.07%	77	87,93	114.19%
2) Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3) Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah	6,3	7,01%	21,01%	299.71%	7,01%	8,83 %	125.96%	7,05%	11,65 %	165.25%
5) Prosentase Realisasi Piutang	73,3	74,1	89,69%	121.04%	74,9	92,44%	123.42%	75,8	92,94 %	122.61%

Masing – masing Indikator daapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diperoleh melalui proses Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan pajak mancapai angka **87,93** dengan kategori mutu **BAIK.** Hal ini dikarenakan setiap tahun BPPD melakukan inovasi inovasi baru yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengajuan layanan pajak daerah;
2) Pada Tahun 2019 terdapat 71 aduan/keluhan wajib pajak yang diterima oleh Badan Pelayanan Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi lapor.go.id, website dan email resmi BPPD, serta kotak saran. seluruh Pengaduan tersebut telah ditanggapi sesuai dengan waktu tanggap yang telah ditentukan dalam standar pelayanan publik, dan sampai dengan akhir Tahun 2019 seluruh keluhan aduan telah diselesaikan
3) **Penerimaan pajak daerah** selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data penerimaan pajak daerah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH	686,820,000,000.00	831,150,000,000.00	904,540,000,000.00	1,009,946,880,000.00
Peningkatan Target Pajak Daerah per Tahun (Rp)	7,166,001,140.00	144,330,000,000.00	73,390,000,000.00	105,406,880,000.00
Peningkatan Target Pajak Daerah per Tahun (%)	1.05%	21.01%	8.83%	11.65%
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	735,767,535,183.50	925,569,237,852.49	961,840,717,556.86	1,032,160,117,012.09
Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak per Tahun (Rp)	35,269,238,505.31	189,801,702,668.99	36,271,479,704.37	70,319,399,455.23
Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak per Tahun (%)	5.03%	25.80%	3.92%	7.31%

Peningkatan Penerimaaan Pajak Daerah

Berikut grafik perkembangan penerimaan pajak daerah :

Grafik IV.D.7

Dari grafik tersebut disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak daerah selalu meningkat. Hal ini diupayakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, yaitu :

A. Intensifikasi pada tahun 2019
   1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak (hotel, hiburan, parkir, restoran) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melaporkan pajak sesuai dengan omset yang sebenarnya
   2. Pemutakhiran Pajak Bumi dan Bangunan secara massal dan bertahap, hal ini diharapkan pada akhir masa RPJMD/Renstra sekurang kurangnya sebanyak 7 kecamatan Taman, Waru, Gedangan, Tarik, Sedati dan Balongbendo dari jumlah kecamatan seluruhnya sebanyak 18 kecamatan.

3. Pemasangan alat perekam transaksi (E-Tax) kepada wajib pajak bekerjasama dengan Bank Jatim, sampai dengan tahun 2019 sebanyak 44 obyek pajak sudah terpasang alat perekam
4. Pemeriksaan Wajib Pajak dengan kerjasama dengan pihak/Instansi terkait;
5. Pemutakhiran data (survey harga pasar properti baru) dan melaksanakan Penilaian Individu atas Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan

B. Ekstensifikasi pada tahun 2019
1. Melaksanakan Pendataan Objek Pajak Baru bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam perijinan
2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada calon wajib pajak

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2019, 3 (tiga) terbesar terdiri atas sektor :

1) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar Rp. 334.002.890.576,00
2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 305.381.298.528.68
3) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 237.461.681.071

1) REALISASI BPHTB TAHUN 2016 S/D 2019

Grafik IV.D.7

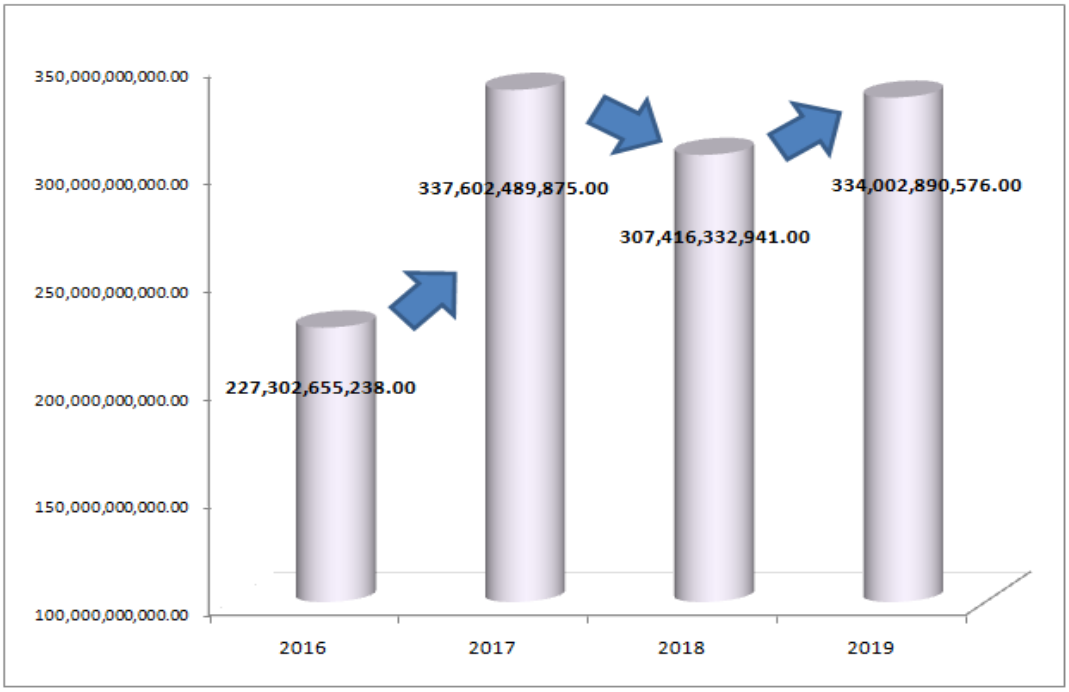

Pertumbuhan ekonomi dan properti di Kabupaten Sidoarjo serta optimalisasi penerapan aplikasi e- BPHTB memberikan peningkatan penerimaan BPHTB pada Tahun 2019 :

- Kegiatan Ekstensifikasi
  - Sosialisasi kepada PPAT / Notaris untuk memberikan informasi kepada wajib pajak dalam melaporkan transaksi peralihan hak secara wajar
  - Survey lapang untuk mengidentifikasi objek pajak yang sudah beralih kepemilikan dan peruntukannya tetap belum melakukan balik nama BPHTB.
- Kegiatan Intensifikasi
  - Pelaksanaan Pemungutan BPHTB dilaksanakan dengan cara pemeriksaan NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) di awal sebelum dilaksanakan

pembayaran BPHTB, hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB

- Pemutakhiran informasi perumahan properti setiap tahun yang digunakan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pemeriksaan BPHTB.
- Optimalisasi penerapan aplikasi e-BPHTB dengan pendekatan penerapan nilai transaksi wajar pada setiap transaksi / peralihan hak atas BPHTB

2) REALISASI PPJ TAHUN 2016 S/D 2019

Grafik IV.D.8

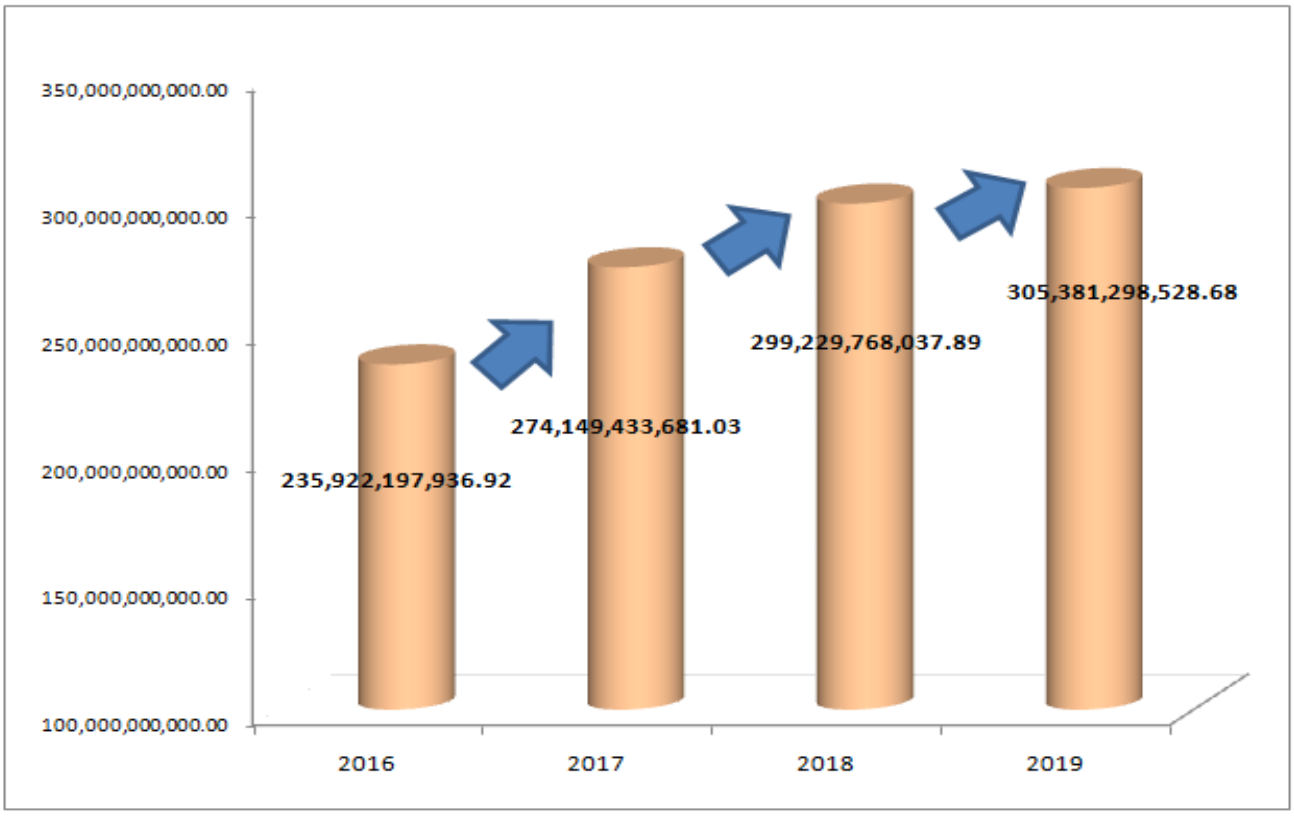

Peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 di pengaruhi oleh :

- Kegiatan Ekstensifikasi
  - Melaksanakan Pendataan Objek Pajak Baru PPJ bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perijinan ESDM Propinsi
  - Melaksanakan sosialisasi kepada Calon Wajib Pajak tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan

- Kegiatan Intensifikasi
  - Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak non PLN tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.
  - Melaksanakan rekonsiliasi dengan wajib pajak PLN dengan melakukan kegiatan
    (i) Koordinasi proses penagihan pajak kepada PLN
    (ii) Melaksanakan rekonsiliasi berkala atas data jumlah tagihan listrik dan besarnya PPJ dengan meminta laporan pembayaran listrik oleh pelanggan kepada PLN (sampling beberapa pelanggan)
    (iii) Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PPJ (Melakukan evaluasi besarnya penerimaan pajak penerangan jalan setiap bulan, menghimpun data besarnya tarif dasar listrik (TDL) setiap bulan dan melaporkan realisasi penerimaan PPJ setiap bulan – Rekonsiliasi bulanan
  - Melaksanakan pemeriksaan (pengecekan) wajib pajak non PLN

3) REALISASI PBB TAHUN 2016 S/D 2019

Grafik IV.D.9

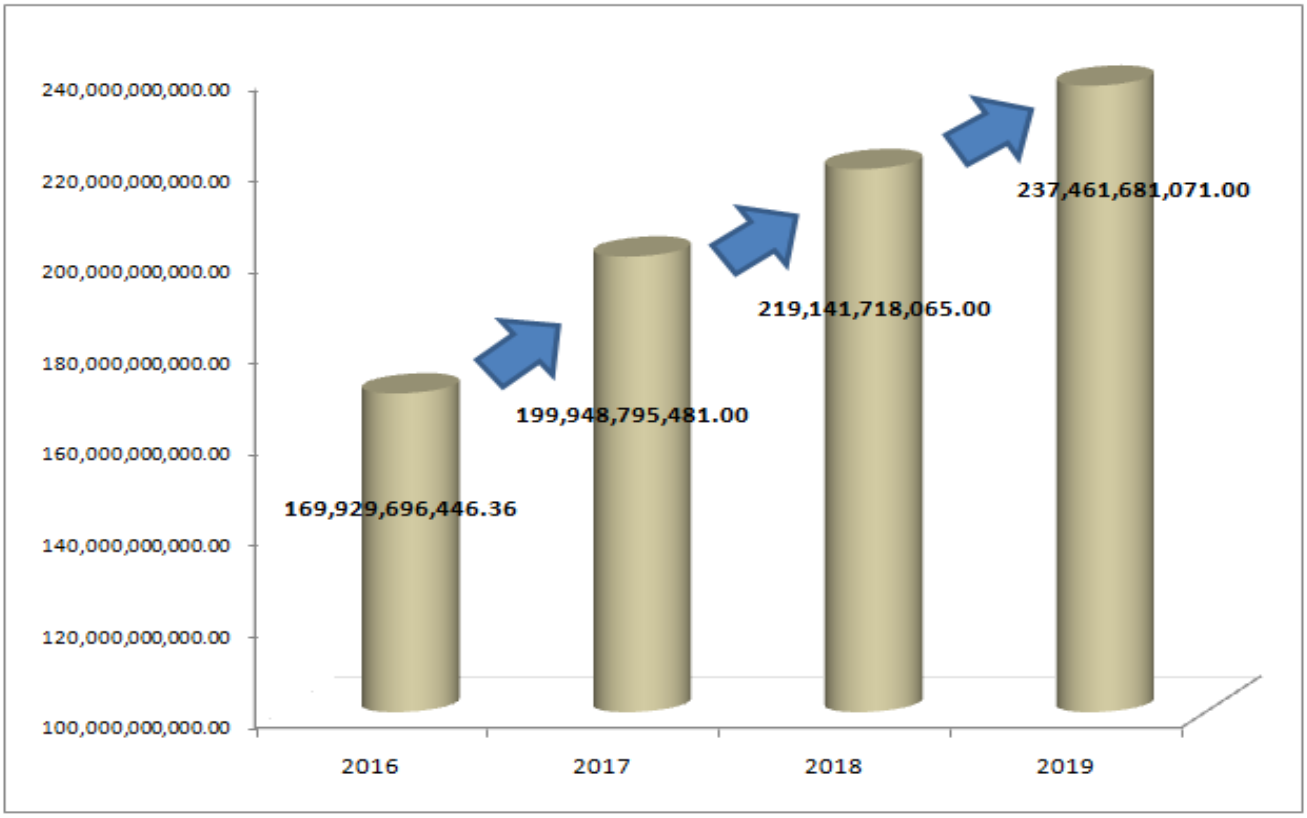

Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 di pengaruhi oleh :

- Kegiatan Ekstensifikasi
  - Melaksanakan Pendataan Objek Pajak Baru bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mengeluarkan perijinan (DPMPTSP)
  - Melaksanakan sosialisasi kepada Calon Wajib Pajak tentang Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  - Melakukan penelitian berkas pelayanan PBB dengan menambahkan persyaratan foto bangunan untuk kelengkapan berkas guna mengupdate luas bangunan dan NJOP bangunan

➢ Kegiatan Intensifikasi

- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran massal pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tarik, Buduran, Gedangan dan Sedati sejumlah 155.582 objek pajak
- Pelaksanaan kegiatan penilaian individu pajak bumi dan bangunan
- Melaksanakan kegiatan penyesuaian Zona Nilai Tanah (Pemutakhiran ZNT) dan DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan)

4) Realisasi piutang setiap tahun selalu mengalami kenaikan, hal ini telah didukung kegiatan pemutakhiran dan evaluasi data obyek PBB secara berkesinambungan. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang pasti untuk menghapus piutang, khususnya terhadap data yang tidak valid dan perlu dilakukan penghapusan

Data realisasi piutang kami sajikan sebagai berikut

KETERANGAN	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
PIUTANG TOTAL	827,688,596,920.68	948,352,588,758.70	1,354,451,068,683.61	1,452,549,756,157.43
REALISASI	509,473,964,223.14	607,361,020,819.70	973,472,215,540.36	1,039,376,058,330.09
% REALISASI PIUTANG	61.55%	64.04%	71.87%	71.56%

Pencapaian indikator kinerja dimaksud yaitu Peningkatan Pajak Daerah dapat dicapai dengan dukungan kegiatan sebagai berikut;

1. Dukungan program kegiatan telah mensupport untuk peningkatan PAD dari sektor Pajak Daerah

2. Optimalisasi kinerja SDM selalu ditingkatkan, masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kediklatan/bimtek fungsional, misalnya PPNS, Juru Sita Pajak, Pemeriksa Pajak dan sejenisnya
3. Optimalisasi sarpras pelayanan yang tersedia, masih diperlukan kendaraan yang berfungsi sebagai stan yang bisa dimobilisasi ke desa-desa dan masih diperlukan anggaran untuk sosialisasi yang lebih intensif.
4. Sosialisasi kepada WP sudah dilaksanakan secara langsung dan melalui media cetak/elektronik, kesadaran WP masih belum maksimal dalam membayar pajak.
5. Perhitungan persentase realisasi piutang dihitung tahun berjalan berdasarkan panambahan ketetapan piutang tahun berjalan, namun demikian Peningkatan secara proporsional tehadap penagihannya tetap berdampak pada peningkatan piutang, yang akan kami lakukan.

d. Program dan Kegiatan

1. **Program Pendataan**, **Peningkatan Dan Pengembangan Pajak Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 6.134.743.820,- dan terealisasi sebesar Rp.4.617.164.219,- atau 75,26 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
Pesrentase Pertumbuhan Obyek Pajak Daerah	4 %	6,67 %	166,7 %

Pencapaian indikator kinerja dapat tercapai 100%, walaupun realisasi anggaran tidak tercapai secara keseluruhan dan hal ini dikarenakan ada efisiensi anggaran pada proses pengadaan.

2. **Program Penetapan Pajak Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.2.854.443.120,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.781.782.520,40 atau 97,45%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
Persentase jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sesuai ketentuan	82 %	109,6 %	133,66 %

Pencapaian indikator kinerja dapat tercapai 100%, walaupun realisasi anggaran tidak tercapai secara keseluruhan dan hal ini dikarenakan ada efisiensi anggaran pada proses pengadaan.

3. **Program Pengendalian Pajak Daerah** dengan anggaran sebesar Rp.1.443.244.630,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.265.861.035,04atau 87,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
Persentase Realisasi pembayaran tagihan Pajak Daerah	22 %	24,02 %	109,18 %

Pencapaian indikator kinerja dapat tercapai 100%, walaupun realisasi anggaran tidak tercapai secara keseluruhan dan hal ini dikarenakan ada efisiensi anggaran pada proses pengadaan.

Urusan Penunjang Kepegawaian

Keterkaitan dengan Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD

	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD
	Misi 1 "Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan" Tujuan 1 "Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan " Sasaran 1 "Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan"	Membangun SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional	Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang didukung kualitas layanan administrasi kepegawaian yang prima

OPD Penyelenggara Urusan Penunjang Kepegawaian

Urusan Penunjang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Program Pembangunan yang dilaksanakan

Program pembangunan untuk urusan penunjang kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
3. Program Pengembangan ASN

4. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Tujuan : **"** Membangun SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional **"**

Indeks Profesionalitas ASN

Dalam RPJMN 2020-2024 peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu dari tujuh agenda pembangunan. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Ruang lingkup lebih kecil lagi adalah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang merupakan abdi negara yang menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan mandat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik, pelayanan pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga sejalan dengan tujuan agar tercipta ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sampai dengan Tahun 2019 kinerja jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Membangun SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang profesional	Indeks Profesionalisme ASN	N/A	84,90	76	86,57	78	86,57	78	71,53

Grafik IV.D.10

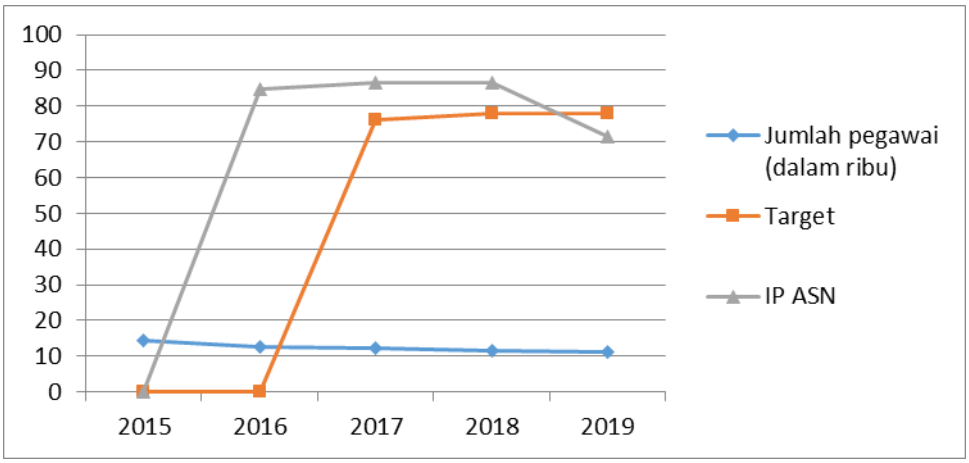

Indeks Profesionalisme ASN

NILAI RATA -RATA DARI INDEKS VARIABEL KOEFISIENNYA				INDEKS PROFESIONALITAS PEGAWAI
KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	INDISIPLINER	
13.05	**31.52**	**25.23**	**5**	**71,53**

Sumber : Laporan IP ASN Badan Kepegawaian Daerah, 2019

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

1. 91-100 (Sangat Tinggi)
2. 81-90 (Tinggi)
3. 71-80 (Sedang)
4. 61-70 (Rendah)
5. 60 ke bawah (Sangat Rendah)

Capaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada kategori sedang dan masih dibawah target nasional (sebesar 76) maupun target RPJMD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 yaitu sebesar 78 (capaian sebesar 89% atas target). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan capaian dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut :

a. Terdapat perbedaan kebijakan mendasar dalam perhitungan Indek Profesionalitas ASN, yaitu :

	2018	2019
Dasar hukum perhitungan	Instruksi Badan Kepegawaian Negara 2017	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 **dan** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
Unsur Penilaian	a. kompetensi b. kompensasi, c. kinerja, d. disiplin	a. kualifikasi b. kompetensi c. kinerja, d. disiplin
Segmen perhitungan	Pejabat struktural (670 orang)	Seluruh PNS (11.294 orang)
Rumus perhitungan	*IP=(Koef(1-gaps))+ ((koef x KJ)/100) + (koef(1-Si))+ (koef(1-Indisp))*	*IP=(Koef Kualifikasi)25%+ (koef Kompetensi)40 %+ (koef Kinerja) 30%+ (koef Disiplin)5%*
Sumber data	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pemkab Sidoarjo	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara
Metode perhitungan	Manual	Aplikasi online

b. Kurang validnya data kompetensi pada SAPK, karena update data dilakukan pada SIMPEG

c. Tidak terkoneksinya SIMPEG Pemkab Sidoarjo dengan SAPK BKN

Langkah-langkah yang diambil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk solusi permasalahan di atas adalah mulai tahun 2020 membentuk tim yang bertanggungjawab sesuai unsur-unsur penilaian yang ada untuk membangun data yang valid pada SAPK BKN dengan cara langsung melakukan update pada aplikasi SAPK BKN

Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya

INDIKATOR KINERJA DAERAH	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	55%	63,80%	67%	69,40%	67%	70,29%	70%	73,85%

Grafik IV.D.11

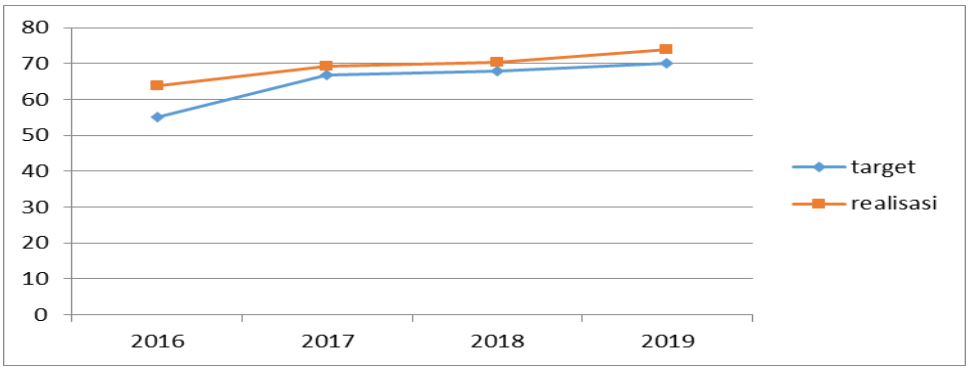

Pada tahun 2019 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan target sasaran penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya sebesar 70%. Berdasarkan penempatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diperoleh data pengukuran kompetensi ASN, sebagai berikut :

Uraian	Jumlah ASN (31 Des 2019)	Terpetakan	ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya			
			2019	**2018**	**2017**	**2016**
Jumlah ASN JFT	7.510	7.510	7409	7.507		
Jumlah ASN JFU	3.040	1251	589	322		
Jumlah ASN J. Struktural	744	723	343	267		
Jumlah ASN Kab. Sidoarjo	11.294	9.484	8.341	8.096		
			73,85 %	70,29%	69,4%	63,8%

Sehingga capaian Badan Kepegawaian Daerah sebesar 105,5% atas target di tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 70%.

Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya

INDIKATOR KINERJA DAERAH	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	N/A	N/A	10%	10%	12%	25,48%	18%	12%

Grafik IV.D.12

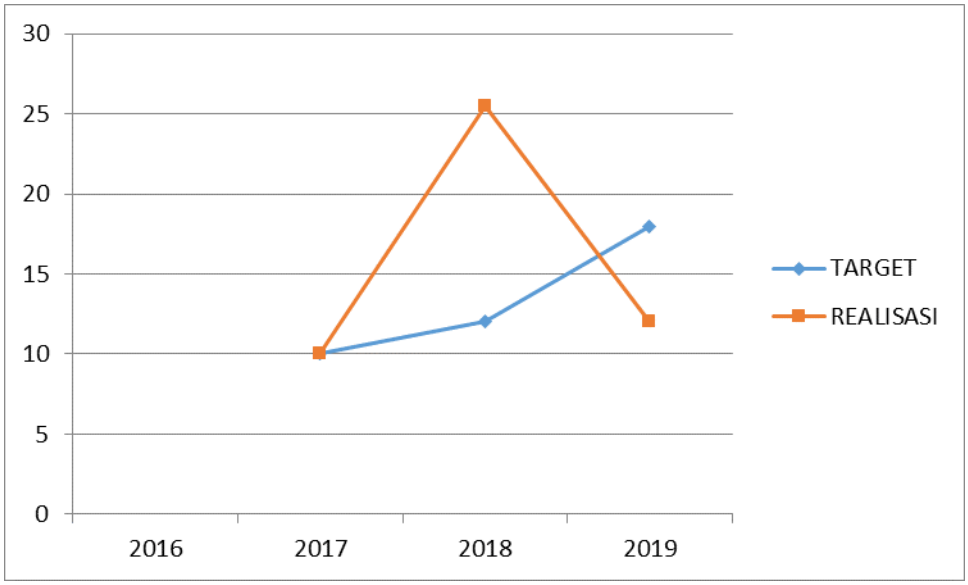

Selama tahun 2019 diselenggarakan upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN sebagai berikut :

JENIS KEGIATAN BIDANG DIKLAT TAHUN 2019

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	SCCD Komputer	50
2	SCCD Kepribadian bagi Kepala Sekolah	100
3	SCCD PBJ	30

4	SCCD (Fasilitasi dan Non fasilitasi)	64
5	Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II	2
6	E-Learning	80
7	SCCD Master of Ceremony	20
8	SCCD Presentasi	30
9	Latihan Dasar CPNS	438
10	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	30
11	Pembekalan dan ujian Sertifikasi PBJ	79
12	Peningkatan kapasitas kepala OPD	136
13	Pengiriman kediklatan	262
14	Tindak lanjut Permohonan Ijin Belajar dan Tugas Belajar	90
	Total	1.411

Sumber data : Bidang Diklat BKD Kab.Sidoarjo, 2019

Dengan total anggaran tahun 2019 pada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebesar Rp. 7.818.097.047 (**0,3209% dari Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**) namun harus menjawab amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 21 huruf e bahwa "pengembangan kompetensi adalah hak setiap PNS" dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat (4) bahwa "pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun", maka sejak tahun 2018 selain menyelenggarakan sendiri pendidikan dan pelatihan, juga melakukan pengiriman diklat fungsional ke instansi pembina masing-masing jabatan fungsional.

Selain pengembangan kompetensi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah juga memfasilitasi pengembangan kompetensi yang dilakukan mandiri melalui penerbitan rekomendasi Ijin Belajar, Pencatuman gelar, Keterangan Pendidikan serta mulai mengembangkan metode peningkatan kompetensi berbasis " **Smart Community for Competency Development"** – **SCCD** yang secara legal dan terintegrasi dalam satu sistem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara efektif dan efisien sejak 2014. Dimana SCCD ini memberi kesempatan setiap PNS dalam rumpun jabatan fungsional / rumpun jabatan fungsional umum / ketrampilan teknis lainnya ataupun ketrampilan yang menunjang kinerja organisasi bisa memperoleh peningkatan kompetensi

secara legal (mendapatkan sertifikat yang teregister) melalui kegiatan pengembangan kompetensi berkelompok dengan pola pembiayaan :

- **APBD** (pembiayaan honor pengajar, konsumsi dan sertifikat dari APBD)
- **Cost Sharing** (pembiayaan konsumsi dari peserta, honor pengajar dan sertifikat dari APBD)
- **Mandiri** (pembiayaan honor pengajar dan konsumsi dari peserta, sertifikat dari APBD), dan beberapa kegiatan lain :

1	Fasilitasi magang / penelitian	48
2	Tindak lanjut permohonan pencatuman gelar	93
3	Registrasi sertifikat	3653
4	Fasilitasi benchmarking	3

Dari seluruh peserta pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dilakukan monitoring dan evaluasi setelah kembali ke instansi melalui atasan langsungnya.

Perkembangan peningkatan kompetensi yang dilakukan setiap tahun

No	Tahun	Jumlah pengembangan kompetensi yang dilakukan
1	2019	1411
2	2018	1704
3	2017	1230
4	2016	1349
5	2015	1351
6	2014	1230
7	2013	394
8	2012	515

Capaian kinerja di atas di dukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian** dengan anggaran sebesar Rp. 1.565.533.305,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.393.733.049,- atau 89,03%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase ASN yang Telah Ditempatkan Sesuai Dengan Formasi Jabatan	100%	100%	100%

2. **Program Pengembangan ASN** dengan anggaran sebesar Rp.2.937.458.735,- dan terealisasi sebesar Rp. 882.417.765,- atau 30,04 %.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase PNS Dalam Talent Pool	88%	88%	100%

Permasalahan:

1. Untuk kegiatan Pengembangan karir dan kinerja ASN penyerapan anggaran yang kecil disebabkan karena :
   - Sub Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Penilaian Kinerja dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Karir, tidak dapat dilaksanakan karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 sehingga muncul kebijakan penyederhanaan birokrasi dari pemerintah pusat, yang menyebabkan tidak diperlukan lagi pengaturan Perbup yang dimaksud.

2. Untuk kegiatan Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan informasi ASN penyerapan anggaran yang kecil disebabkan karena :
   - Sub Kegiatan tes seleksi kemampuan dasar dan bidang untuk pengadaan formasi CPNS tahun 2019 dilaksanakan di tahun 2020 karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat.

Solusi:

1. Dilaksanakan sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat.

3. **Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN** dengan anggaran sebesar Rp. 1.446.474.087,50 dan terealisasi sebesar Rp. 1.268.439.952,- atau 87,69%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Persentase perangkat daerah yang telah tertib administrasi kepegawaian	70%	70%	100%

4. **Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 7.818.097.047,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.893.655.850,- atau 75,38%.

   Dengan indikator kinerja yaitu :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2019	REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
Prosentase jumlah ASN yang meningkatkan kompetensinya	18%	12%	69,40%

Permasalahan:

Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur realisasi yang lebih kecil dari target disebabkan karena :

Dengan total anggaran tahun 2019 pada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebesar Rp. 7.818.097.047 (**0,3209% dari Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**) namun harus menjawab amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 21 huruf e bahwa "pengembangan kompetensi adalah hak setiap PNS" dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat (4) bahwa "pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun".

Solusi:

Memperketat kebijakan kegiatan registrasi sertifikat untuk mendapatkan data yang benar-benar valid sehingga memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai peningkatan kompetensi ASN.

B. KINERJA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH

MISI 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan

1. Indeks Good Governance

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Good Governance	*)	63,35	65,35	66,31	63,96	67,33	69,19	**69,32**	**74,24**	69,55	70,76

Untuk memastikan berjalannya pemerintahan yang baik dan transparan sebagai prinsip pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menerapkan penilaian kinerja pemerintahan dengan mengukur indeks good governance. Tujuan menghitung indeks good governance adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang lebih akurat tentang kapasitas Pemda
2. Menjadi informasi bagi Pemda dalam mengukur daya saing dan keunggulan daerah
3. Menjadi salah satu bentuk dari pertanggung jawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah terhadap stakeholders di daerah
4. Menjadi informasi bagi pihak swasta dalam membangun kerjasama dan atau kerjasama di daerah
5. Menjadi salah satu indikasi makro keberhasilan pembangunan yang dapat dikomparasi dengan daerah lainya

Pengukuran indikator indeks good governance yang diterapkan menggunakan indikator dari delapan prinsip good governance yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara, diantaranya :

1. Taat Hukum;
2. Partisipasi
3. Daya Tanggap
4. Transparansi
5. Akuntabilitas
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan Efisiensi
8. Visi Strategis

Berikut perkembangan Indeks Good Governance di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik IV.E.1

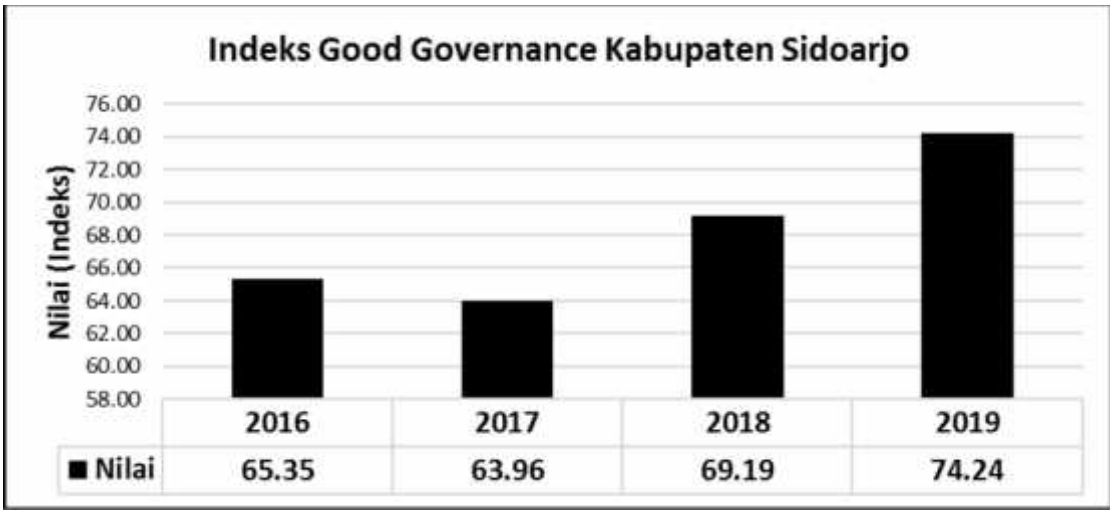

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo sudah lebih akuntabel. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 69.32 maka tercapai hingga 107.10%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang senilai 69.19, maka kenaikan sebesar 7.30%.

Nilai Indeks Good Governance 74.24 menggambarkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Baik. Berikut range / skala kategori dari Indeks Good Governance:

Nilai	Kategori
40.00 – 59.99	Buruk
60.00 – 79.99	Baik
80.00 – 100.00	Sangat Baik

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Reformasi Birokrasi	*)	C	C	B	B	B	B	**B**	**B**	B	B

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Terdapat delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi, yaitu :

1. Organisasi
2. Tata Laksana
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
4. Peraturan Perundang – Undangan
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Budaya Kerja Aparatur

Berikut perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik IV.E.2

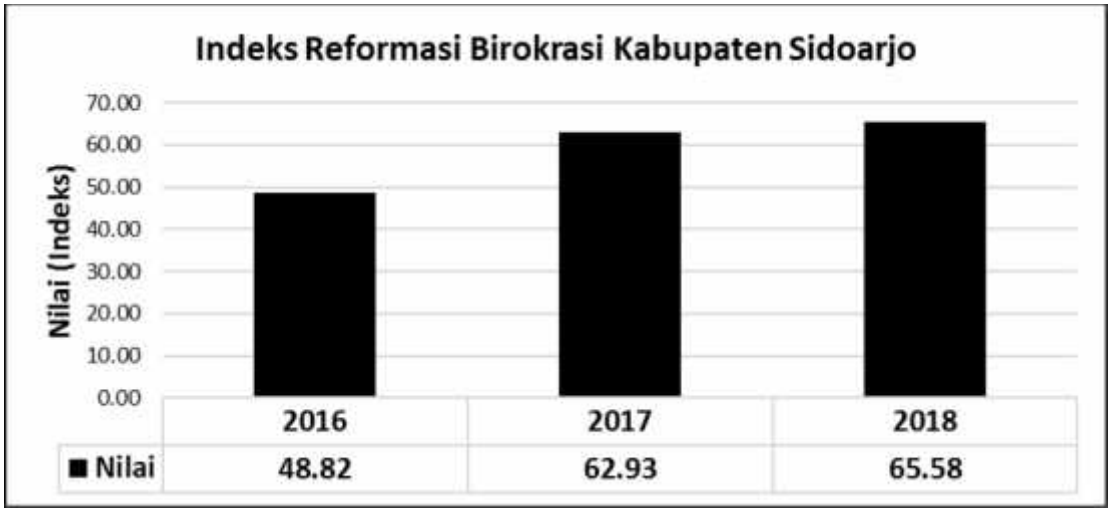

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo

Untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2019 masih dalam tahap evaluasi, sehingga belum didapatkan hasilnya, namun seiring dengan meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas, pelayanan publik, integritas dan indeks profesionalitas, diharapkan mampu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 dengan kategori B (Baik), maka capaian tahun 2018 dengan nilai indeks 65,58 sudah masuk pada kategori B (Baik). Kategori Reformasi Birokrasi tahun 2018 masih sama dengan tahun 2017, meskipun nilai indeks sudah meningkat dari 62.93 menjadi 65.58 atau naik 4,21%.

Adapun yang menjadi rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB untuk peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

1. Menyusun peta proses bisnis yang mengacu sepenuhnya pada kinerja yang akan diwujudkan
2. Menerapkan *performance based organization* atau organisasi berbasis kinerja
3. Pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan.
4. Peraturan perundang – undangan belum dilakukan evaluasi atas efektivitas keberhasilan pelaksanaannya
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar mampu memenuhi harapan masyarakat
6. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengawasan sebagai upaya peningkatan integritas pegawai dan upaya pencegahan korupsi

Berdasarkan hasil suvey persepsi pelayanan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan indeks 3.31 dalam skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan belum cukup dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hasil survey persepsi anti korupsi menunjukkan indeks 3.60 dalam skala 4 yang merupakan gambaran atas integritas dalam memberikan laanan masih perlu ditingkatkan, terutama pengelolaan gratifikasi, *whistle blowing system*, penanganan pengaduan dan kebijakan benturan kepentingan.

Sedangkan untu hasil survei internal terhadap 99 orang responden ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas integritas jabatan menunjukkan terdapat 24 orang pegawai atau 24.24% yang tida memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan kinerjanya. Sebanyak 48 pegawai atau 48.48% telah memahami tugas fungsi namun tidak tahu ukuran keberhasilan kinerjanya, serta 27 orang pegawai atau 27.27% yang telah memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

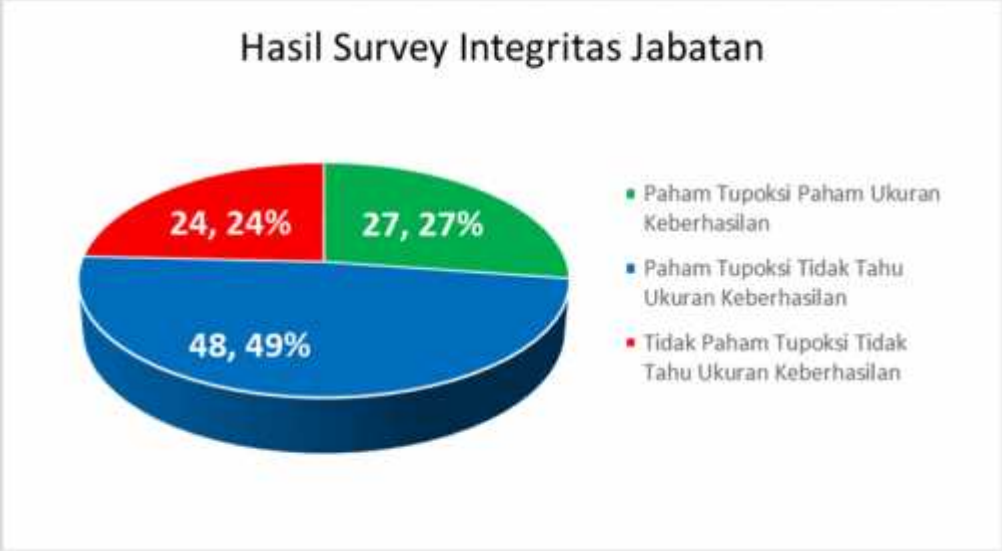

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi KEMENPAN & RB

Sedangkan untuk survei integritas organisasi menunjukkan indeks 3.37 dalam skala 0 – 4 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Indeks
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3.22
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3.46
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3.40
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3.38
Indeks Integritas Organisasi		3.37

MISI 2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat

3. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Pertumbuhan Ekonomi	5,24	5,51	5,51	5,63	5,80	5,65	6,05	**5,67**	**5,99**	5,75	5,85

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK 2010 mengalami fase peningkatan, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik IV.E.3

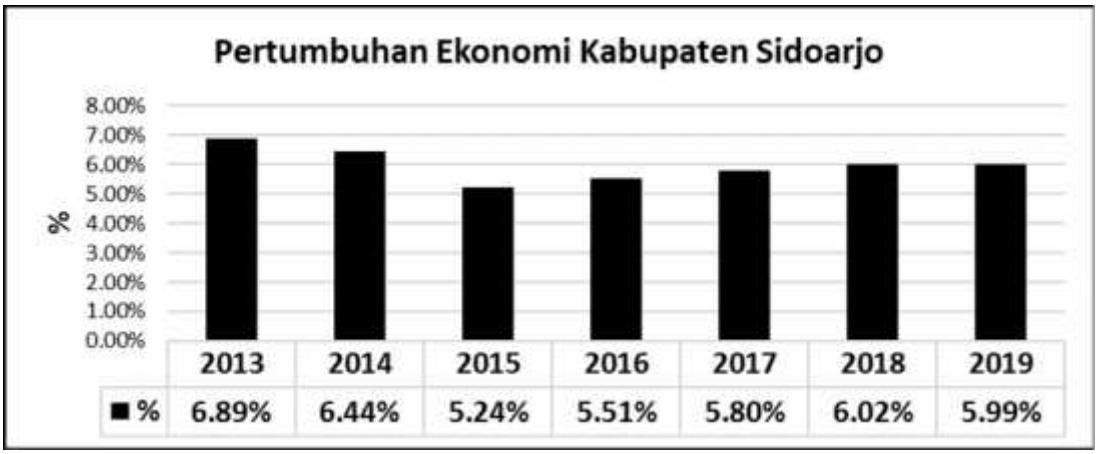

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Sidoarjo cenderung stabil, dan diharapkan dapat bertahan sampai dengan akhir masa jabatan tahun 2021, dengan akselerasi sektor potensial daerah, terutama pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan peningkatan usaha mikro melalui Program 1.000 WUB (Wira Usaha Baru). Untuk persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sampai dengan perhitungan sementara berada pada kisaran 5,99%, sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 5,67% maka capaian sementara di tahun 2019 sudah memenuhi target hingga 105,64%. walaupun terdapat penurunan dari tahun 2018 sebesar 0,5%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,45% dan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,07%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo masih berada diatas rata – rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

4. Indeks GINI

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks GINI	0.35	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.34	**0.37**	**0.34**	0.37	0.37

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik IV.E.4

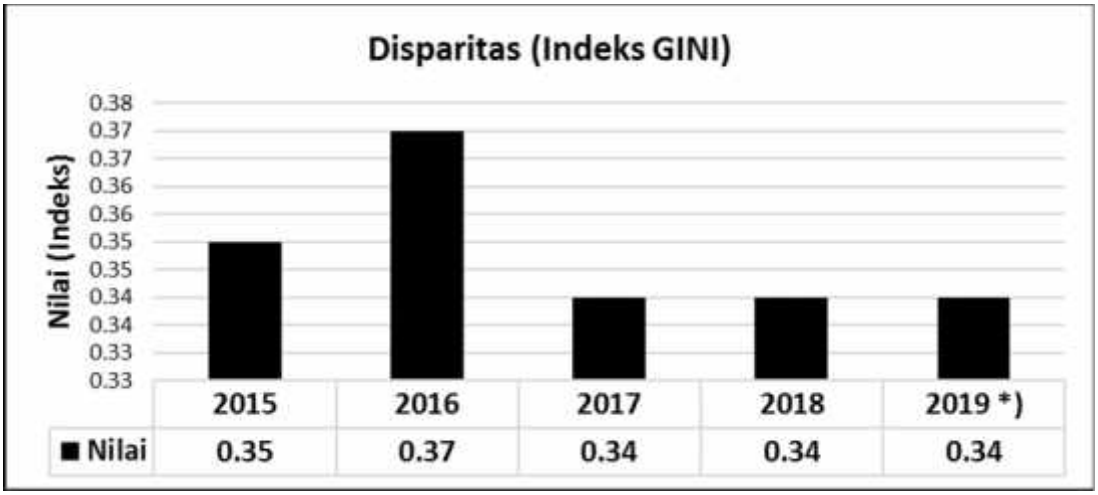

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai

0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kisaran rendah, dimana telah dilakukan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk Sidoarjo wilayah barat dan wilayah timur, salah satunya adalah infrastruktur kesehatan yaitu Rumah Sakit di wilayah barat. Selain itu juga pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan penghubung, sehingga usaha ekonomi masyarakat di semua wilayah di Kabupaten Sidoarjo dapat terhubung dengan baik, untuk mengurangi angka kesenjangan.

Untuk capaian tahun 2019 berdasarkan angka sementara mencapai kisaran 0,34 sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0.37 maka capaian di tahun 2019 sudah memenuhi target. Upaya peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal dan terluar sudah diupayakan untuk pemerataan pendapatan.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Indeks GINI Provinsi Jawa Timur yang bernilai 0.39, maka capaian Indeks GINI Kabupaten Sidoarjo terbilang masih dalam proporsi yang lebih baik.

MISI 3. Meningkatkan Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Pembangunan Manusia	77,43	78,17	78,17	78,61	78,80	78,84	79,50	**79,51**	**80,05**	79,96	80,57

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana

penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

UNDP menggunakan IPM ini sejak tahun 1990. Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kualitas hidup dan kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)
2. Pengetahun (*knowledge*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :
   a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
   b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
3. Standar Hidup Layak (*decent dtandard of living*)
   Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik IV.E.5

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Angka IPM di kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dari 76.39 tahun 2013 menjadi 80,05 tahun 2109. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 79.51, maka capaian tahun 2019 mencapai 100,68% dari target, serta meningkat 0,69% dari capaian tahun 2018 yang mencapai angka 79,50%.

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Angka Harapan Hidup (tahun)	73,98
- Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,91
- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,25
- Pengeluaran perkapita riiel disesuaikan (Rp.000)	14.609

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo menempati ranking 4 skor IPM se-Jawa Timur sekaligus mengungguli capaian IPM Provinsi Jawa Timur yang memiliki skor 71.50.

MISI 4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

6. Indeks Kebahagiaan

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Kebahagiaan	*)	77,11	77,11	77,65	78,58	78,23	79,37	**79,83**	**80,28**	80,47	81,14

Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial.

Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap :

1) kesehatan,
2) pendidikan,
3) pekerjaan,
4) pendapatan rumah tangga,
5) keharmonisan keluarga,
6) ketersediaan waktu luang,
7) hubungan sosial,
8) kondisi rumah dan aset,
9) keadaan lingkungan, dan
10) kondisi keamanan.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo dituangkan program untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan mengukur kebahagiaan dengan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kebahagian (IKH). Pengukuran indeks kebahagiaan (IKH) ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo baik secara umum maupun indeks kebahagiaan menurut kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan keharmonisan keluarga.
2. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut variabel hubungan sosial, lingkungan, ketersediaan waktu luang, kondisi rumah dan aset, serta kondisi keamanan.
3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan indeks kebahagiaan penduduk Kabupaten Sidoarjo

Berikut perkembangan Indeks Kebahagiaan di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik IV.E.6

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Indeks kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 adalah 80.28, indeks tersebut naik setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan peningkatan pada aspek keamanan, ketertiban, dan jaminan keadilan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga penduduk merasa nyaman berada di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 79,83 maka telah tercapai sebesar 100,56%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya maka Indeks Kebahagiaa selalu meningkat, untuk tahun 2019 meningkat hingga 1,15% dari capaian tahun 2018.

MISI 5. Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

7. Indeks Infrastruktur

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Infrastruktur	1,402	1,406	1,406	1,41	1,41	1,414	1,419	**1,418**	**1,417**	1,422	1,426

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api.

Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik IV.E.7

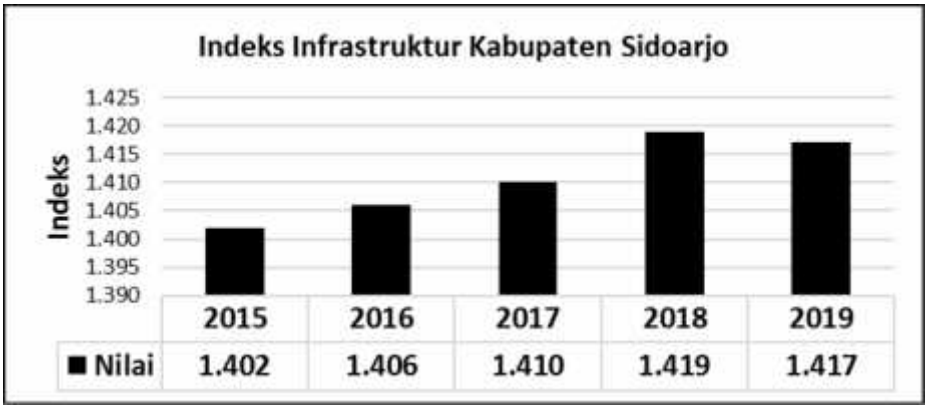

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Peningkatan indeks infrastruktur dikarenakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, yang meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengelolaan sampah, transportasi, perhubungan, telekomunikasi dan informatika, jalan, jembatan, pengendalian banjir, rusunawa, dan gedung terpadu pemerintahan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 1.418, maka telah tercapai 99,93%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun tahun 2018 maka mengalami penurunan sebesar 0,14%.

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	49,47	49,26	49,26	50,01	48,79	51,01	55,10	**52,01**	**61,03**	53,01	54,26

Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 52,01 sedangkan realisasi Tahun 2019 sebesar 61,03 dimana nilai tersebut termasuk dalam rentang **kategori IKLH Kurang** walaupun capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 117 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 55,10 maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan salah satu komponen Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan/ Vegetasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018. Hasil Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung melalui metode analisis citra satelit dengan skala yang lebih tinggi dibanding tahun 2018 sehingga luas tutupan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat terinventarisasi dengan baik dan menyeluruh. Terhadap Nilai / Skor IKLH dalam kategori Kurang seyogyanya masih dalam posisi yang cukup aman karena

Target IKLH Nasional Tahun 2019 pun hanya sebesar 66,5 - 68,5 (kategori cukup) berada pada 1 (satu) tingkat kategori di atas Kabupaten Sidoarjo. Nilai / Skor IKLH dalam kategori Kurang disebabkan:

1) Baseline IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 dengan nilai/skor 49,26 (kategori waspada) sehingga sulit untuk meningkatkan nilai/skor IKLH ke kategori baik;
2) Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas menyebabkan tingkat pencemaran air sungai di Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi sehingga sulit untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) secara signifikan;

Adapun perkembangan nilai/skor IKLH tiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik IV.E.8

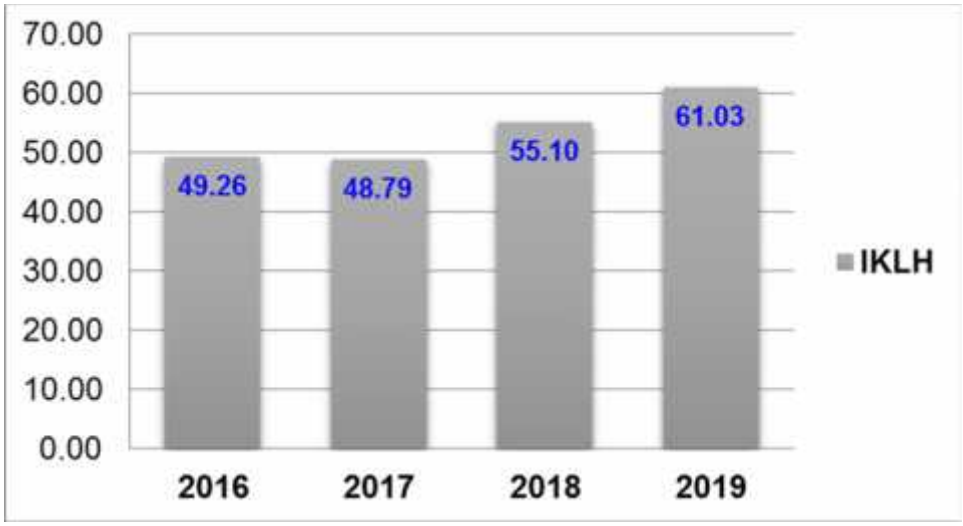

Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan Program yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk tugas pembantuan, baik yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), maupun Dana Cukai DBHCHT. Program / Kegiatan, jumlah anggaran serta realisasinya, Perangkat Daerah yang melaksanakan, serta asal dana diperoleh diuraikan sebagai berikut :

Program	:	**Program Pendidikan Sekolah Dasar**
Kegiatan	:	Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan
Anggaran	:	Rp. 2.705.878.000,00
Realisasi	:	Rp. 2.705.875.900,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus

Program	:	**Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**
Kegiatan	:	Pembinaan Penyelenggaraan TK
Anggaran	:	Rp. 178.200.000,00
Realisasi	:	Rp. 178.164.408,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik, BOP PAUD

Program	:	**Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**
Kegiatan	:	Penyelenggaraan dan Operasional UPT SKB
Anggaran	:	Rp. 15.600.000,00
Realisasi	:	Rp. 14.700.000,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik, BOP PAUD

Program	:	**Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**
Kegiatan	:	Penyelenggaraan dan Operasional UPT SKB
Anggaran	:	Rp. 112.200.000,00
Realisasi	:	Rp. 110.210.200,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik, BOP Kesetaraan

Program	:	**Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**
Kegiatan	:	Kegiatan penyediaan obat dan BMHP
Anggaran	:	Rp. 6.288.564.000,00
Realisasi	:	Rp. 6.106.472.985,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Kesehatan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus

Program	:	**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**
Kegiatan	:	Pembinaan dan pelayanan pencegahan, pengendalian penyakit menular
Anggaran	:	Rp. 446.366.000,00
Realisasi	:	Rp. 176.475.500,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Kesehatan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus

Program	:	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**
Kegiatan	:	Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas (26 PKM)
Anggaran	:	Rp. 20.220.655.000,00
Realisasi	:	Rp. 8.169.933.761,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Kesehatan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Program	:	**Program peningkatan pelayanan pada BLUD**
Kegiatan	:	Pelayanan didukung pemenuhan sarana prasarana SDM SIM dan tata kelola
Anggaran	:	Rp. 3.463.450.000,00
Realisasi	:	Rp. 3.405.629.176,00
OPD yang melaksanakan	:	Rumah Sakit Umum Daerah
Dana	:	Dana Alokasi Khusus

Program	:	**Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan**
Kegiatan	:	Peningkatan jalan
Anggaran	:	Rp. 9.043.590.000,00

Realisasi	:	Rp. 821.308.000,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Dana	:	Dana Alokasi Khusus

Program	:	**Program pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman**
Kegiatan	:	Pembangunan sarana dan prasarana Pemukiman (termasuk DAK, RSH, Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh dan Pemukiman Nelayan)
Anggaran	:	Rp. 3.332.829.000,00
Realisasi	:	Rp. 2.766.674.670,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta karya dan Tata Ruang
Dana	:	Dana Alokasi Khusus

Program	:	**Program Pelayanan Kesekretariatan**
Kegiatan	:	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Anggaran	:	Rp. 31.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 7.250.000,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pangan dan Pertanian
Dana	:	Dana Alokasi Khusus

Program	:	**Program Pelayanan Kesekretariatan**
Kegiatan	:	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Anggaran	:	Rp. 994.664.000,00
Realisasi	:	Rp. 974.750.000,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pangan dan Pertanian

Dana	:	Dana Alokasi Khusus
Program	:	**Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian / Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan**
Kegiatan	:	Peningkatan kapasitas penyuluh dan petani
Anggaran	:	Rp. 463.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 416.422.500,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pangan dan Pertanian
Dana	:	Dana Alokasi Khusus
Program	:	**Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**
Kegiatan	:	Peningkatan pelayanan laboratorium dan uji lab
Anggaran	:	Rp. 753.310.000,00
Realisasi	:	Rp. 574.825.000,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus
Program	:	**1. Program Pelayanan Kesekretariatan** **2. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** **3. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk** **4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** **5. Program pelayanan pencatatan sipil**

Kegiatan	:	1. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri 2. Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Pelayanan Identitas Penduduk 4. Pelayanan Administrasi Pindah Datang dan Pindah Keluar Penduduk 5. Pengembangan sistem administrasi kependudukan 6. Pelayanan administrasi akte kelahiran
Anggaran	:	Rp. 2.644.058.200,00
Realisasi	:	Rp. 1.809.320.342,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dana	:	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
Program	:	**Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**
Kegiatan	:	Pembinaan dan pelayanan KB
Anggaran	:	Rp. 175.308.000,00
Realisasi	:	Rp. 173.500.000,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Dana	:	Dana Alokasi Khusus
Program	:	**Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**
Kegiatan	:	Pengadaan sarana dan prasarana budidaya dan pemasaran perikanan
Anggaran	:	Rp. 892.232.000,00
Realisasi	:	Rp. 892.232.000,00

OPD yang melaksanakan	:	Dinas Perikanan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus
Program	:	**Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat**
Kegiatan	:	Pembangunan / Pemeliharaan Konstruksi bangunan pasar
Anggaran	:	Rp. 1.754.161.000,00
Realisasi	:	Rp. 1.557.012.912,77
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus
Program	:	**Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM**
Kegiatan	:	Pembinaan dan Pelatihan Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika
Anggaran	:	Rp. 9.549.145.000,00
Realisasi	:	Rp. 8.349.834.500,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dana	:	Dana Alokasi Khusus
Kegiatan	**:**	**Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga dan masyarakat melalui pelatihan tenaga kerja siap pakai**
Anggaran	:	Rp. 1.150.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 1.090.540.335,00

OPD yang melaksanakan	:	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan	**:**	**Pengembangan IHT dengan kadar TAR dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian TAR dan nikotion bagi IKM serta pelatihan good manufacturing, practices bagi industri hasil tembakau**
Anggaran	:	Rp. 537.500.000,00
Realisasi	:	Rp. 467.771.458,15
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan	**:**	**1. Bantuan sarana produksi, bibit/benih ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat** **2. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat**
Anggaran	:	Rp. 1.333.014.765,00
Realisasi	:	Rp. 1.159.444.901,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pangan dan Pertanian
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan	**:**	**Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu/tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran**
Anggaran	:	Rp. 615.101.500,00
Realisasi	:	Rp. 502.668.270,00
OPD yang melaksanakan	:	Bagian Perekonomian dan SDA
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan	**:**	**Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri**
Anggaran	:	Rp. 2.426.985.236,00
Realisasi	:	Rp.613.820.570,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan	**:**	**Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat**
Anggaran	:	Rp. 725.650.400,00
Realisasi	:	Rp. 680.729.900,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan	**:**	**Penyediaan/pemeliharaan saluran air, sanitasi dan air bersih**
Anggaran	:	Rp. 200.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 195.100.000,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan	**:**	**Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dan atau pembayran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja**
Anggaran	:	Rp. 10.545.133.480,00

Realisasi	:	Rp. 10.408.905.640,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Kesehatan
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan	**:**	**Pembangunan dan pemeliharaan irigasi**
Anggaran	:	Rp. 2.349.595.100,00
Realisasi	:	Rp. 1.605.407.964,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan	**:**	**Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat**
Anggaran	:	Rp. 200.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 197.334.100,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan	**:**	**Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata**
Anggaran	:	Rp. 400.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 0,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dana	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah otonom selain menyelenggarakan fungsi desentralisasi dan tugas pembantuan, juga harus menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas ini bersifat koordinatif antar daerah otonom maupun instansi pemerintahan secara vertikal serta pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selama tahun 2019, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah.

Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Kerjasama Antar Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Peningkatan Program PUSKESMAS Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 120.23/45/PKS/033.4/2019 dan Nomor : 188/1/438.1.1.1/2019 tanggal 2 Januari 2019;

2. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Kerjasama pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 120.23/15/KSB/033.4/2019 dan Nomor : 188/2/438.1.1.1/2019 tanggal 2 Januari 2019;

B. Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang pada hakekatnya mendorong untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah

a. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertanian tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluhan Pertanian Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepatan Bersama Nomor : 188/4/438.1.1.1/2019 dan Nomor : 14.24/NK/I/02/2019 tanggal 13 Februari 2019;

b. Kesepakatan Bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, sebagaimana tertuang dalam Kesepatan Bersama Nomor : 188/8/438.1.1.1/2019 dan Nomor : KEP-228/WPJ.24/2019 tanggal 23 April 2019;

c. Kesepakatan Bersama dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Metode Computer Assisted Test, sebagaimana tertuang

dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/5/438.1.1.1/2019 dan Nomor : 11/KS/IV/2019 tanggal 11 April 2019;

d. Nota Kesepahaman dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tentang Kerjasama Bidang Pertanahan, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/6/438.1.1.1/2019 dan Nomor : 07/SKB-35.15/IV/2019 tanggal 23 April 2019;

e. Nota Kesepahaman dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Penerimaan Daerah di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/7/438.1.1.1/2019 dan Nomor : 058/090/DIR/HBK/MON tanggal 23 April 2019;

f. Nota Kesepahaman dengan Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/9/438.1.1.1/2019 dan Nomor : 83/NK/BEKREF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019;

g. Kesepakatan Bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Cakupan Kesehatan Smesta di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/10/438.1.1.1/2019 dan Nomor : 73/KTR/VII-12/0519 tanggal 31 Mei 2019;

h. Kesepakatan Bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pengkajian Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/12/438.1.1.1/2019 tanggal 11 Juli 2019;

i. Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Penyediaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Krian melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/13/438.1.1.1/2019 dan Nomor : DK-4/PR/2019 tanggal 16 Agustus 2019;

2. Kerjasama dengan Universitas

a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas STIESIA Surabaya tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/16/438.1.1.1/2019 pada tanggal 12 September 2019;
b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/18/438.1.1.1/2019 dan Nomor : 093/II.3.AU/02.00/P/KEP/X/2019pada tanggal 10 Oktober 2019;

3. Kerjasama dengan Lembaga Non-Pemerintah / Swasta

a. Nota Kesepakatan dengan PT. INDOSAT Tbk. tentang Kerjasama peningkatan pelayanan publik melalui Smart City di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan bersama Nomor : 188/3/438.1.1.1/2019 dan Nomor : 461/JODC/LGL/19 tanggal 16 Januari 2019;
b. Nota Kesepahaman dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tentang Pengembangan sistem transportasi berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan bersama Nomor : 180/11/438.1.1.1/2019 dan Nomor : Mou/MTI-BPT.SIDOARJO/KU- tanggal 29 Mei 2019;

C. Pembinaan Batas Wilayah

Batas daerah merupakan salah satu unsur dasar eksistensi suatu daerah. Batas daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan maupun desa pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari luas wilayah daerah di mana di dalamnya mengandung makna keberadaan teritorial daerah. Batas daerah selain sebagai penentu wilayah kerja administratif juga dapat berfungsi untuk mengetahui batas-batas pengelolaan kegiatan usaha suatu daerah. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah. Hal ini menunjukan bahwa batas daerah itu penting dan strategis namun pelaksanaannya memerlukan adanya pedoman pelaksanaan sebagai dasar pemahaman yuridis, teknis survei dan pemetaan, sehingga untuk melaksanakan penegasan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Batas daerah yang akan diwujudkan adalah batas daerah yang jelas dan pasti di lapangan memenuhi aspek yuridis dan fisik. Dengan terbitnya Permendagri ini bukan berarti mengkotakkan wilayah, tetapi lebih pada penataan batas wilayah kerja Administrasi Pemerintahan, untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya.

Batas Wilayah menjadi penting bagi Daerah, termasuk bagi Kabupaten Sidoarjo, karena merupakan batas penyelenggaraan otonomi daerah. Wilayah Kabupaten Sidoarjo berbatasan langsung dengan empat daerah lainnya, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Begitu pula dengan wilayah Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, pembinaan batas wilayah menjadi batasan dalam menyelenggarakan tugas kewenangan antar wilayah.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan penetapan, penegasan, dan evaluasi batas daerah (kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan) dengan realisasi pelaksanaan kegiatan berupa Evaluasi Pilar di Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei s.d 21 Juni 2019 dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Sidaorjo.

Selain Pembinaan batas wilayah, Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan Rupabumi di tahun 2019, dengan realisasi kegiatan Inventarisasi data Gasetir Rupabumi unsur buatan di Kecamatan Sidoarjo yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli s.d 7 September 2019 dengan Sumber pendanaan APBD Kabupaten Sidoarjo.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Jumlah pilar batas wilayah yang dilakukan pengecekan sebanyak 300 pilar. Pilar batas wilayah dengan kondisi baik sebanyak 15 pilar, kondisi rusak ringan 220 pilar, kondisi rusak berat 20, kondisi hilang 45 pilar
- Jumlah Obyek Rupabumi yang banyak
- Keterbatasan Kemampuan Teknis dan fisik Staf

Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

- Diadakan perbaikan / Pemeliharaan
- Menggunakan Jasa Tenaga Ahli
- Pelaksanaan Inventarisasi Gasetir Rupabumi Unsur Buatan secara bertahap (Sekali Pendataan 2 Kecamatan)

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan selain melakukan kerjasama dengan daerah dan dengan pihak ketiga, dilakukan pula koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yakni dengan Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) sebagaimana diamanatkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 dengan melakukan koordinasi yang melibatkan unsur TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri Sidoarjo,

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diarahkan untuk meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun antargolongan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan perdesaan, serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan serta penyelundupan lintas batas.

a. Forum Koordinasi

Forum koordinasi dibentuk dalam rangka meningkatkan dan memperlancar sistem manajerial dan operasional pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan kesepahaman.

2. Materi Koordinasi

1) Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;
2) Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur;
3) Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.

3. Instansi Vertikal yang Terlibat

Instansi vertikal yang terlibat yakni Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kepolisian Resort Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo.

4. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan manfaat dari koordinasi ini adalah menggugah kembali kesadaran masyarakat akan keamanan lingkungan melalui penggiatan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) sehingga dapat menjaga lingkungan dari tindakan-tindakan kriminalitas dan terorisme serta tercipta koordinasi yang baik antar Forum Pimpinan Daerah.

5. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Tindak lanjut hasil koordinasi dilaksanakan melalui kebijakan untuk memantapkan keamanan lingkungan masing-masing yang diinstruksikan melalui para camat dan kepala desa/lurah melalui rapat koordinasi sinergitas Pemerintah, Kepolisian, TNI-AD, TNI-AL, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, DPRD bersama stake holder.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2019, di Kabupaten Sidoarjo terjadi bencana alam yang memerlukan penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penanggulangan bencana yang terjadi telah diupayakan sebagai berikut :

1. Upaya / Penanggulangan yang telah dilakukan antara lain :

- Koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan tata Ruang; Dinas Kesehatan; dan lain-lain);
- Melakukan kesiapsiagaan Pemadam kebakaran;
- Pengembangan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) atau menambah pos Pemadam kebakaran;
- Inventarisasi Data kasus kebakaran;
- Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana melalui pembentukan kelompok / komunitas kebencanaan;
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur.

2. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

- Mendirikan posko kesiapsiagaan bencana;
- Pengadaan sarana prasarana kebencanaan;
- Pengadaan bahan bangunan untuk kebutuhan darurat pasca bencana;
- Penguatan kapasitas SDM aparatur;
- Pemanfaatan teknologi dalam Sistem Peringatan Dini melalui prakiraan cuaca dari BMKG Juanda
- Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran dengan melakukan kajian resiko kebakaran
- Melakukan sosialisasi / pelatihan / pemberdayaan masyarakat (Sekolah aman bencana , Desa Tangguh Bencana, Sekolah Sungai)
- Mengadakan sarana prasarana penanganan kebakaran (Mobil Damkar, Pompa air dll)

- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIGAP (Sidoarjo Tanggap – Adalah Aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dalam melaporkan kejadian bencana secara real time di Kabupaten Sidoarjo)

3. Permasalahan dan solusi

Permasalahan secara umum terhadap penanggulangan bencana antara lain :

- Belum masuknya urusan kebencanaan ke dalam urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga belum masuk ke dalam prioritas penganggaran daerah. Hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran tidak bisa efektif;
- Benturan aturan pendukung yang bersifat teknis mengakibatkan tema penanggulangan bencana belum menjadi “mandat pokok” pendanaan, sehingga pendanaan Penanggulangan Bencana di daerah tidak masuk dalam prioritas utama;
- Kuantitas dan kualitas sumber-daya manusia terbatas ;
- Fasilitas / sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang terbatas;
- Logistik dan peralatan yang masih terbatas dan belum dapat hadir pada waktu dan tempat dibutuhkan;
- Politik lokal dukungan legislatif sangat minim;
- Luasnya cakupan wilayah yang rawan bencana dan kebakaran yang harus dilayani dengan akses terbatas;

Solusi yang telah dilakukan untuk menanggulangi bencana antara lain :

- Dukungan anggaran / pendanaan untuk efektifitas penyelenggaran Penanggulangan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana dan Kebakaran;

- Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo;
- Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
- Pembentukan dan atau Penguatan Forum PRB;
- Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah;
- Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
- Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah;
- Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana dan kebakaran lintas lembaga;
- Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Di Kabupaten Sidoarjo tidak terdapat daerah kawasan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada penjelasan umum tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selama tahun 2019, di Kabupaten Sidoarjo tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada konflik yang berbasis SARA, separatisme dan anarkisme. Gangguan yang terjadi sangat bersifat lokal dan individual yang secara keseluruhannya masih mampu diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah mulai tingkat desa / kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

BAB VII
PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1) Tanggal 1 Februari 2019: Penghargaan Pembina Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Sidoarjo atas Zero Acident (nihil Kecelakaan), Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan Program Pencegahan dan penanggulangan HIV – AIDS (P2 HIV – AIDS) di tempat kerja kepada perusahaan periode Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM di Gedung Negara Grahadi – Surabaya
2) Tanggal 6 Februari 2019: Predikat nilai A hasil Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP pada RPJMD tahun 2018. Laporan SAKIP diserahkan langsung oleh Menpan RB, Syafruddin, kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II di Banjarmasin - Kalimantan Selatan
3) Tanggal 28 Maret 2019: Juara ke 2 Lomba Kerapihan dan Ketertiban Pasukan Satpol PP pada peringatan HUT Damkar ke 100, HUT Satpol PP ke 69 serta HUT Satlinmas ke 57 tahun 2019 se Jawa Timur yang digelar di Madiun. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifa Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin
4) Tanggal 25 April 2019: Penghargaan “Satya Lencana Karyabhakti Praja Nugraha” penghargaan daerah terbaik Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tertinggi nomor 1 nasional dengan predikat

(Sangat Tinggi). Penghargaan diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam acara peringatan Hari Otoda ke-23 di Banyuwangi

5) Tanggal 29 April 2019: Top Pembina BUMD 2019 dianugerahkan kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Top BUMD 2019 diberikan kepada BPR Delta Artha dan PDAM Delta Tirta dan Top CEO BUMD 2019 diberikan kepada Dirut BPR Delta Artha, Sofia Nurkrisnajati Atmaja. Penyelenggara Majalah Top Business di Jakarta
6) Tanggal 23 Mei 2019: Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemkab Sidoarjo. Opini WTP yang keenam kalinya ini diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018
7) Tanggal 23 Juli 2019: Kota Layak Anak (KLA) 2019 dengan peningkatan predikat dari kategori Madya ke kategori Nindya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam acara Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak di Hotel Four Points Makasar, Sulawesi Selatan bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2019 di Makassar
8) Tanggal 8 Agustus 2019: Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo raih penghargaan Public Services of The Year Jawa Timur 2019, pada acara Indonesia Marketeers Festival 2019, di Ballroom Shangri-la Hotel Surabaya, Kamis, (8/8). Tiga OPD tersebut antara lain RSUD Sidoarjo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidoarjo dan BPR Delta Artha Sidoarjo. Penghargaan tahunan yang diselenggarakan MarkPlus Inc tersebut diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak
9) Tanggal 17 Agustus 2019: Medali 9 Windu Kejuangan Kemerdekaan R.I ke 74 dari Dewan Harian Nasional 45 kepada Bupati Sidoarjo. Piagam dan medali ini diberikan sebagai wujud komitmen Bupati dalam melestarikan nilai kejuangan bangsa
10) Tanggal 2 Oktober 2019: Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI. Predikat WTP ini adalah ke-6 kali untuk Kab Sidoarjo sejak tahun 2013.

11) Tanggal 12 Oktober 2019: Pemkab Sidoarjo diwakili Kelompok Asuhan Mandiri Desa Jemundo mendapatkan Penghargaan Desa Pengembangan Tanaman TOGA terbaik se-Jawa Timur. Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Sidoarjo saat Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di Grahadi
12) Tanggal 28 Oktober 2019: Penghargaan Kota Layak Pemuda Kategori Utama Tahun 2019 dari Kemenpora R.I. Penghargaan diserahkan Menpora Zainudin Amali kepada Bupati Sidoarjo saat puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 di Jakarta.
13) Tanggal 19 November 2019: Meraih Penghargaan Katagori Kepala Daerah Komitmen Tinggi Peduli Ketahanan Pangan dari Gubernur Jawa Timur, di Surabaya
14) Tanggal 22 November 2019 : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali memberikan penghargaan kepada dua instansi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dua instansi tersebut yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan RSUD Sidoarjo menjadi role model pelayanan public nasional. DPMPTSP masuk dalam kategori pelayanan publik Sangat Baik (A-), sedangkan RSUD Sidoarjo masuk dalam kategori Pelayanan Prima (A).
15) Tanggal 10 Desember 2019 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sidoarjo, mendapatkan penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB RI, Tjahjo Kumolo
16) Tanggal 17 Desember 2019 : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, BPR Delta Artha kembali meraih penghargaan kategori BPR BUMD Kabupaten/Kota Terbaik Pertama Se-Jawa Timur. Penghargaan

BAB VIII
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun anggaran 2019 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain LKPJ ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2019.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang mendukung situasi dan kondisi tetap

terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka selebar - lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Buati Sidoarjo Akhir Tahun Anggaran 2019 ini, diiringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.